

Volume 21, No.2 (Desember 2019): 132-261

ISSN 1410-8356
E-ISSN 2355-5963

JURNAL ANTROPOLOGI

Isu-isu Sosial dan Budaya

**Budaya, Agama, dan Makna Volunterisme Bagi Kader Warga Peduli AIDS
di Kota Bandung**
ERNA HERAWATI

**Faktor-faktor Budaya Penghambat Penderita Kanker Berobat
ke Fasilitas Pengobatan Modern**
SRI MEIYENTI, MAIHASNI, AZIWARTI

**NGEMPON: The Role-Sharing Strategy of Hindus and
Muslims in Bhur Bwah Swah Temple, Karangasem, Bali**
I NYOMAN YOGA SEGARA

Strategi Bertahan Hidup Perajin Gerabah Tradisional
JOAN HESTI GITA PURWASIH, MAHENDRA WIJAYA, DRAJAT TRI KARTONO

Budaya Rimpu Sebagai Eksistensi Perempuan Islam di Tanah Bima
AYU FITRIANA, SUHARNO



LABORATORIUM ANTROPOLOGI
JURUSAN ANTROPOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya

P-ISSN 1410-8356

E-ISSN 2355-5963

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) telah terdaftar dengan nomor ISSN 1410-8356 (cetak), ISSN 2355-5963 (online). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) adalah jurnal peer review yang diterbitkan oleh Laboratorium Antropologi, Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) diterbitkan dengan tujuan ikut mengembangkan kajian Ilmu Antropologi Sosial dan Budaya di Indonesia, dengan terbuka dan menerima kontribusi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang bertemu di persimpangan hasil penelitian dan analisis-kritis mengenai isu pembangunan kontemporer. Jurnal ini dikelola dan di bawah naungan Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas. Sumbangan artikel meliputi artikel hasil penelitian, kajian kepustakaan dan ulasan ilmiah lainnya.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JANTRO) terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam rentang waktu bulan Juni hingga bulan Desember. Artikel Jurnal ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel yang diterbitkan telah melalui proses seleksi oleh dewan redaksi dan mitra bestari. Artikel yang lolos seleksi akan dipungut biaya guna keberlanjutan jurnal, sedangkan pengiriman naskah tidak dipungut biaya. Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan

DEWAN EDITORIAL

Pemimpin Redaksi : Lucky Zamzami

Dewan Editor : Takamasa Osawa (Kyoto University, Jepang)
Johan Weintre (Flinders University, Australia)
Maskota Delfi (Universitas Andalas)
Yevita Nurti (Universitas Andalas)
Eka Vidya Putra (Universitas Negeri Padang)
Asrinaldi (Universitas Andalas)
Zainal Arifin (Universitas Andalas)

Mitra Bestari : Nursyirwan Effendi (Universitas Andalas)
Juniator Tulus (Nanyang Technological University)
Najah Nadiyah Amran (National Univ. of Malaysia)
Akifumi Iwabuchi (TUMSAT, Jepang)
Semiarto Aji Purwanto (Universitas Indonesia)
Adi Prasetyo (Universitas Diponegoro)
Silfia Hanani (IAIN Bukittinggi)
Alfan Miko (Universitas Andalas)
Syahrizal (Universitas Andalas)
Asliah Zainal (IAIN Kendari)
Jendrius (Universitas Andalas)
Bambang Rudito (ITB Bandung)
Dedi Adhuri Supriadi (LIPI, Jakarta)

ALAMAT REDAKSI

JURNAL ANTROPOLOGI
Isu-isu Sosial dan Budaya
Gedung Jurusan Lantai II FISIP
Universitas Andalas Padang
Kampus Limau Manis 25162

Online at <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro>

PENERBIT

LABORATORIUM ANTROPOLOGI
JURUSAN ANTROPOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

Telp. 0751-71266/081374535378

Email: editor_jantro@soc.unand.ac.id

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya telah mendapatkan akreditasi nasional peringkat 2 Ristek Dikti, dengan nomor SK: 34/E/KPT/2018 Tanggal 10 Desember 2018



Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



DAFTAR ISI

	Halaman
Budaya, Agama, dan Makna Volunterisme bagi Kader Warga Peduli AIDS di Kota Bandung ERNA HERAWATI	132
Faktor-faktor Budaya Penghambat Penderita Kanker Berobat ke Fasilitas Pengobatan Modern SRI MEIYENTI, MAIHASNI, AZIWARTI	142
<i>Ngempon</i> : The Role-Sharing Strategy of Hindus and Muslims in Bhur Bwah Swah Temple, Karangasem, Bali I NYOMAN YOGA SEGARA	150
Strategi Bertahan Hidup Perajin Gerabah Tradisional JOAN HESTI GITA PURWASIH, MAHENDRA WIJAYA, DRAJAT TRI KARTONO	159
Penanaman Nilai-Nilai Multikultural yang Dipengaruhi oleh Kompetensi Komunikasi Guru di Sekolah Dasar Inklusi Tlirenggo, Yogyakarta DWI KARTIKAWATI, DJUDJUR LUCIANA RAJAGUKGUK, YAYU SRIWARTINI	168
Regulasi Konflik Pemilu (Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung) SRI ANGGRAINI, AFRIZAL, INDRADIN	177
Strategi Visual Punden Berundak Situs Gunung Padang dalam Genre Fotografi Landscape sebagai Pesan Budaya WINNY GUNARTI WIDYA WARDANI, WULANDARI, SYAHID	185
Solusi Konflik Peran Perempuan Minangkabau (Kasus Perawat yang Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi) NOLA MUTIARA ASRIL, MAIHASNI, ALFITRI	194
Perubahan Sosial Budaya Akibat Media Instagram bagi Kalangan Mahasiswi di Kota Padang ELVA RONANING ROEM, SARMIATI	202
Budaya <i>Rimpu</i> sebagai Eksistensi Perempuan Islam di Tanah Bima AYU FITRIANA, SUHARNO	211

Budaya Literasi Media Digital Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga DEWI NOVIANTI, SITI FATONAH	218
Welfare State Policy Model as A Poverty Reduction Strategy in The West Sumatra Districts and Cities AZWAR, EMERALDY CHATRA, ZULDESNI	227
Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018 DHARMA KELANA PUTRA	236
Social Network Analysis in the Coastal Area improvement Initiation Program AYU NOVELISA	245
Fenomena Gegar Budaya pada Warga Negara Perancis yang Bekerja di Jakarta YUSNIA KHOIRUNNISA, NATHALIA PERDHANI SOEMANTRI	253



BUDAYA, AGAMA, DAN MAKNA VOLUNTERISME BAGI KADER WARGA PEDULI AIDS DI KOTA BANDUNG

Erna Herawati ^{1*}

¹ Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 28 April 2019
Review : 19 August 2019
Accepted : 21 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Budaya; Agama; Volunterisme; Warga Peduli AIDS

CORRESPONDENCE

*E-mail: e.herawati@unpad.ac.id

ABSTRACT

HIV epidemic in Indonesia has been last for three decades and the members of the community have participated in the prevention and intervention. Warga Peduli AIDS (WPA) is an action by a group of local residents in Bandung City who concerned about HIV and AIDS. This action has been one of examples of community participation in responding to the epidemic. The action includes participation in meetings held by NGOs and city government to discuss prevention at the community level, dissemination of information about epidemic preventions; and providing social support for people living with HIV and AIDS. This study aims at describing motives that drive the WPA activist (better known as WPA Kader) to carry out an action, and how they view the meaning of their action. This study was conducted in a qualitative approach using an ethnographic model. This study finds that WPA Kader derived their motive of action from religious and cultural values, and their action is a combination of altruism and self-interest to pursue their personal spiritual satisfaction. In line with this motive, they view their action as part of their religious and cultural expression; instead of merely a community-based action to respond to a timely health issue.

A. PENDAHULUAN

Istilah Warga Peduli AIDS (selanjutnya disingkat WPA) merujuk pada gerakan atau aksi oleh warga masyarakat sebagai wujud kepedulian dan partisipasi mereka dalam upaya mengatasi masalah HIV dan AIDS di wilayah tempat tinggal masing-masing (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2010). Pembentukan WPA diatur dalam PERMENKES RI No. 21 tahun 2013 bab XI pasal 51 ayat 1 (d) yang berbunyi: "Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV/AIDS dengan acara membentuk dan mengembangkan WPA". WPA terdiri dari berbagai komponen di lingkungan masyarakat baik di tingkat Desa, Kelurahan, Rukun Warga (RW), Dusun, Blok dan tingkat sejenisnya. Bentuk gerakan WPA di dalam pelaksanaannya cukup beragam di setiap wilayah, tergantung dari situasi dan kondisi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Tugas utama para warga yang tergabung dalam gerakan WPA (selanjutnya disebut kader

WPA) adalah menggerakkan anggota masyarakat lain untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Bentuk gerakan WPA ada yang formal; memiliki struktur organisasi yang baku dan rencana kegiatan yang tersusun rapi; dan ada pula yang informal; berupa aksi sukarela oleh warga dan tidak berupa organisasi.

Di Kota Bandung, gerakan WPA berbentuk gerakan informal dan aksi sukarela. Gerakan ini telah muncul sejak 2006, jauh sebelum konsep Warga Peduli AIDS digagas secara resmi oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Sejumlah warga memulai aksi yang meliputi 1) partisipasi dalam kegiatan pencegahan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan LSM HIV; 2) penyebaran informasi mengenai HIV dan AIDS dan pencegahannya; serta mempromosikan anti stigma dan anti diskriminasi pada ODHA ke masyarakat luas; 3) membantu Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mengakses pengobatan gratis di rumah sakit pemerintah. Para warga ini

menamai aksi mereka 'Warga Peduli AIDS' dan mereka pun menyebut diri mereka kader WPA. Para kader ini adalah para ibu rumah tangga yang telah lama aktif sebagai kader kesehatan di wilayah tempat tinggal mereka. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS. Namun, mereka tetap memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada masalah HIV dan AIDS (Herawati, 2017).

Aksi yang dilakukan para kader WPA di Kota Bandung sangat menarik untuk diteliti. Sebab, di saat sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pandangan negatif dan stigma pada HIV, AIDS, dan ODHA, para kader ini justru sangat peduli dan tergerak untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Selain itu, sebagian besar kader WPA adalah warga menengah ke bawah dengan kondisi keuangan rumah tangga yang sangat terbatas. Namun, keterbatasan itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan aksi sukarela.

Volunterisme atau kesukarelawanan merujuk pada pekerjaan, aktivitas atau aksi yang dilakukan individu atau kelompok secara sukarela, tidak berbayar, dengan tujuan mewujudkan kondisi yang lebih baik dan bermanfaat di masyarakat (Ibrahim, 2017). Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kesukarelawanan (volunterisme) menemukan beragam faktor yang memotivasi individu atau kelompok melakukan aksi tersebut. Aksi sukarela tidak selalu murni didasari oleh altruisme tetapi juga oleh kepentingan pribadi (Omoto dan Snyder, 2002; Grönlund, 2013). Faktor sosial, budaya, dan psikologis adalah faktor yang umum memotivasi aksi sukarela (Clary, Snyder, dan Ridge, 1992; Clary et al., 1998; Esmond dan Dunlop, 2004; Akintola, 2011; Grönlund, 2013; Novoa dan Johnson, 2013).

Clary dan Snyder (1999) menjelaskan enam faktor yang secara umum memotivasi individu atau kelompok melakukan aksi sukarela. *Pertama*, faktor sosial-budaya. Individu atau kelompok melakukan aksi sukarela karena ingin menerapkan nilai dan norma sosial-budaya-agama mereka. *Kedua*, faktor karir. Individu atau kelompok melakukan aksi sukarela dengan tujuan membangun jejaring sosial dengan sesama volunteer dan jejaring itu dimanfaatkan untuk meningkatkan karir mereka. *Ketiga*, faktor personal. Individu melakukan aksi sukarela karena memiliki masalah pribadi dan ingin rehat sejenak dari persoalan pribadi mereka. *Keempat*, faktor permasalahan sosial. Individu melakukan aksi sukarela karena ingin memahami permasalahan sosial di masyarakat. *Kelima*, faktor kepercayaan diri. Individu melakukan aksi sukarela dengan tujuan membangun kepercayaan diri karena merasa dibutuhkan oleh orang lain. *Keenam*, faktor pengakuan. Individu melakukan aksi sukarela karena ingin memperoleh pengakuan atas ketrampilan yang ia miliki.

Senada dengan temuan Clary dan Snyder

(1999), penelitian Grönlund dkk (2013); Parboteeah, Cullen, dan Lim, (2004) juga menemukan bahwa faktor budaya menjadi faktor yang mendorong individu melakukan aksi sukarela. Masyarakat di dunia sebagian besar adalah masyarakat komunal dan kolektif. Jiwa altruisme di masyarakat komunal sangat dianjurkan. Oleh karena itu banyak warga masyarakat komunal yang terdorong melakukan aksi sukarela karena hal itu merupakan bagian dari ekspresi budaya mereka (Hofstede, 2001; Novoa dan Johnson, 2013).

Penelitian Essen, Hustinx, Haers, dan Mels, (2015) dan penelitian Okun, O'Rourke, Keller, Johnson, dan Enders (2015) pada motivasi aksi sukarela, menemukan faktor lain yang memotivasi individu melakukan aksi sukarela, yaitu faktor agama. Di setiap agama, terdapat anjuran mengembangkan sifat altruisme dan kepedulian pada orang lain. Menolong orang lain adalah cerminan ketaatan umat pada ajaran agama.

Di dalam konteks epidemi HIV dan AIDS, penelitian Akintola (2011) di Afrika, menemukan bahwa aksi sukarela lebih banyak dimotivasi oleh faktor agama. Kegiatan sukarela di bidang HIV dan AIDS di Afrika umumnya dilakukan oleh orang-orang Kristen yang taat dan dilakukan dalam payung gereja. Para sukarelawan meyakini bahwa aksi kepedulian mereka pada Orang dengan HIV/AIDS adalah salah satu upaya mereka mewujudkan cinta kasih dan ketaatan pada Tuhan.

Penelitian ini bertujuan: 1) menelusuri dan menggambarkan motivasi para kader WPA di Kota Bandung melakukan aksi kesukarelawanan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; 2) menelusuri dan menggambarkan makna aksi tersebut bagi kader; dan 3) menggambarkan manfaat dari aksi volunterisme tersebut bagi orang dengan HIV dan AIDS serta masyarakat umum yang menjadi sasaran aksi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif model etnografi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Wawancara dilakukan pada para kader WPA di lima kecamatan di Kota Bandung yaitu Rancasari, Sumur Bandung; Kebon Gedang, Kebon Pisang, dan Bojongloa Kidul. Pengamatan terlibat dilakukan pada seluruh aksi yang dilakukan oleh kader WPA. Data sekunder dikumpulkan dari studi-studi arsip. Analisis data dilakukan mengikuti prinsip analisis data kualitatif, yaitu analisis tematik. Hasil penelitian disajikan dengan model deskriptif eksplanatoris (Syahrizal, 2016) dengan menonjolkan aspek emik (Miles dan Huberman, 2014; Amady, 2015). Penelitian ini

dilakukan pada kurun waktu Juni-Desember 2015 dan Februari-Juni 2016; dan telah dinyatakan lolos uji etik oleh komite etik Australian National University. Identitas para kader ditampilkan dengan nama asli sesuai permintaan mereka dan nama para ODHA menggunakan nama samaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Epidemi HIV di Kota Bandung dan Aksi Sukarela Warga

Tingginya prevalensi infeksi HIV dan AIDS Kota Bandung saat ini, terkait erat dengan tren penggunaan narkoba suntik berbahan *putaw* (heroin berkualitas rendah) pada awal tahun 2000. *Putaw* digunakan dengan cara disuntik melalui pembuluh darah balik. Harga jarum suntik yang mahal dan rumitnya ijin untuk membeli jarum suntik di apotik memunculkan perilaku bergantian menggunakan jarum suntik diantara para pengguna narkoba suntik (penasun). Perilaku ini mendorong tersebarnya virus HIV secara cepat di kalangan penasun. Beberapa tahun kemudian, ledakan infeksi HIV melanda Indonesia termasuk Kota Bandung. Pasangan seksual para penasun pun mulai terjangkit HIV; begitupun bayi-bayi yang terlahir dari mereka.

Pada awal 2006, program penanggulangan HIV yang didanai oleh lembaga kesehatan internasional mulai masuk ke Kota Bandung. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) cabang Jawa Barat adalah salah satu lembaga yang pertama melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS di Bandung. Program itu bernama Harm Reduction (HR)-PKBI; didanai oleh Australian Aid (Ausaid). Tujuan program itu adalah menjangkau dan memberi edukasi mengenai pengurangan dampak buruk narkoba dan HIV pada penasun. Program ini juga menggandeng para kader kesehatan di Kota Bandung untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Saat diajak oleh tim HR-PKBI itulah pertama kali para kader kesehatan di Kota Bandung mengenal isu HIV dan AIDS. Mereka pun tersadar akan pentingnya situasi epidemi HIV di Bandung dan tergerak berpartisipasi dalam aksi pencegahan yang dilakukan oleh LSM HIV dan juga Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.

Beberapa kader kesehatan di Kota Bandung yang peduli pada isu HIV dan AIDS dan aktif dalam aksi pencegahan, bertemu di dalam sebuah acara peringatan hari AIDS sedunia di akhir 2006. Di acara itu, mereka mendeklarasikan aksi mereka sebagai aksi Warga Peduli AIDS dan menyebut diri mereka kader Warga Peduli AIDS. Mereka mengajak warga masyarakat lain untuk turut serta dalam aksi

mereka. Tahun demi tahun, makin banyak warga yang mulai peduli pada masalah HIV dan tergerak melakukan aksi sebagai warga peduli AIDS.

Kemunculan aksi WPA di setiap wilayah dilatarbelakangi peristiwa yang berbeda-beda. Secara umum aksi dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan para kader kesehatan pada isu HIV dan AIDS setelah mengetahui beberapa tetangga mereka terinfeksi HIV. Misal, di Kecamatan Sumur Bandung, munculnya aksi Warga Peduli AIDS dilatarbelakangi oleh insiden meninggalnya tiga warga secara berturut-turut pada pertengahan 2010 akibat AIDS. Insiden itu mendorong kader kesehatan setempat untuk mencari info lebih lanjut mengenai AIDS dan mulai melakukan aksi pencegahan. Mereka mendekati warga yang mereka ketahui sebagai penasun dan membujuknya mengikuti konseling dan tes HIV di Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang menyediakan layanan konseling dan tes HIV gratis. Penasun yang telah terinfeksi HIV didampingi untuk mengakses layanan pengobatan gratis di rumah sakit. Selain itu, kader WPA juga mendekati dan memberikan pengertian pada keluarga ODHA agar tidak mengucilkan dan tetap memberikan dukungan dan perawatan pada anggota keluarganya tersebut.

Fenomena kemunculan aksi WPA di Bandung berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa faktor pengetahuan yang cukup mengenai epidemi HIV menjadi faktor pendorong warga melakukan aksi pencegahan melalui WPA beraksi (Fernandez, Manurung, Toy, dan Ndoen, 2019; Wati, Cahyo, dan Indraswari, 2017). Sementara di Kota Bandung, peristiwa terkait HIV dan AIDS di wilayah tempat tinggal menjadi motivasi warga untuk beraksi.

2. Budaya Sunda, Agama, dan Volunterisme

'Sunda' adalah istilah yang merujuk pada etnis, budaya, dan bahasa suku asli di Jawa Barat. Suku Sunda adalah suku terbesar nomor dua di Indonesia setelah suku Jawa. Di Kota Bandung, 93% populasi penduduk adalah orang Sunda. Secara historis, orang Sunda bermata pencaharian sebagai petani peladang berpindah dan hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Kebiasaan hidup secara berkelompok membuat orang Sunda mengembangkan tradisi komunalisme dan sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan; kerukunan, dan sifat saling menolong (Harsojo, 1979).

Orang Sunda sangat religius dan memiliki jiwa spiritualisme tinggi. Status sosial individu tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan saja, tetapi juga dari kemampuannya menerapkan nilai-nilai dan norma-norma kesundaan, diantaranya

religius dan berperilaku halus (Sudaryat, 2014; Danasasmita, 1987; Warnaen, 1987). Budaya demikian masih dijunjung tinggi dan dipelihara oleh masyarakat Sunda (Rosidi, 2010).

Agama asli orang Sunda adalah Sunda wiwitan; yaitu agama penghormatan pada leluhur dan kekuatan alam. Agama ini mendapat pengaruh dari Hindu dan Budha pada abad ke-4; dan pengaruh Islam pada abad ke-17. Islam memiliki pengaruh yang paling kuat pada religi asli orang Sunda. Ritual-ritual religi masa pra-Islam kini telah banyak ditinggalkan dan digantikan oleh ritual Islam (Ricklefs, 2012). Konon, kemiripan ajaran Islam dan agama asli Sunda yang mengedepankan pentingnya komunalisme (berjamaah) membuat orang Sunda sangat mudah menerima ajaran Islam (Ekadjati, 2005). Kini, Islam adalah agama mayoritas orang Sunda. Di Kota Bandung, 87% populasinya beragama Islam (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2017).

Perpaduan kuat antara Islam dan Sunda terlihat dari ungkapan 'Islam *teh* Sunda, Sunda *teh* Islam' atau 'Islam adalah Sunda dan Sunda adalah Islam' (Newland, 2000; Jakob, 2010; Wibisana, 2010; Wildan, 2010). Menjadi Islam dan menjadi Sunda adalah dua identitas penting orang Sunda (Newland, 2000). Konsekuensinya, orang Sunda berupaya menerapkan nilai dan norma Sunda dan Islam secara bersamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap perilaku individu Sunda selalu dianjurkan untuk mengakar pada agama dan budaya (Rusyana, 1989; Ekadjati, 2005; Kahmad, 2009).

Kolektivisme dan komunalisme adalah elemen penting dalam organisasi sosial masyarakat Sunda; sedangkan individualisme sangat tidak dianjurkan. Nilai-nilai dan moralitas kesundaan tertulis di kitab Sanghyang Siksakandang Karesian, sebuah kitab pedoman sikap dan prinsip hidup bagi para pandita (resi) yang ditulis pada abad 15. Orang Sunda secara umum juga sangat dianjurkan untuk mempelajari dan menjalankan prinsip-prinsip yang tertulis di kitab tersebut agar bijaksana (Noorduyn dan Teeuw, 2006).

Nilai dan moralitas kesundaan dilestarikan turun temurun di masyarakat Sunda melalui nyanyian rakyat, perumpamaan, kiasan, dan kata pepatah dalam Bahasa Sunda yang menegaskan pentingnya menjaga kerukunan, menjaga perilaku, dan solidaritas pada sesama. Hal ini tampak dalam ungkapan *silih asah, silih asih*, dan *silih asuh* yang bermakna saling belajar, saling mengasahi, dan saling mengasuh yang merupakan konsep dasar dalam interaksi sosial orang Sunda (Sumamiharja, 2005).

Sikap suka menolong orang lain sangat disarankan dalam budaya Sunda. Hal ini tampak dalam ungkapan: '*kedah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngobor kanu poeken, mere kanu weleh, nganterkeun kanu sieun*' yang artinya 'mesti menolong orang yang membutuhkan,

menolong orang yang kesusahan, memberikan penerangan pada orang mengalami kegelapan, dan menemani orang yang memerlukan kawan atau dukungan (Indrawardana, 2014; Lisdiati, Hum Syarif Hidayat, Abdulhak, dan Muchsin, 2014; Pasaribu, 2015).

Di dalam budaya Sunda, sikap sukarela dan suka menolong adalah cerminan tingkat spiritualisme, kebijakan, intelektualitas, kematangan emosi, dan ketrampilan hidup individu yang sangat tinggi. Individu dengan karakteristik demikian dianggap sebagai sosok manusia Sunda seutuhnya, yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain (Sudaryat, 2014).

3. Motivasi dan Makna Volunterisme

Berdasarkan hasil wawancara dengan para kader Warga Peduli AIDS, mereka memaknai aksi mereka sebagai 1) ibadah, 2) sedekah ilmu, 3) wujud tanggungjawab sosial pada masyarakat; dan 4) upaya menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat.

1) Aksi sebagai Ibadah

Aksi Warga Peduli AIDS tidak menghasilkan keuntungan finansial maupun material bagi para kader. Mereka justru harus mengorbankan uang pribadi, waktu, dan energi mereka untuk menjalankan aksi sukarela itu. Mereka seringkali menggunakan uang yang seharusnya untuk keperluan dapur mereka sebagai ongkos transport menghadiri pelatihan pencegahan HIV atau mengantar tetangga yang ODHA untuk mengambil obat di rumah sakit. Hal ini dialami oleh Ratna, salah seorang kader kesehatan di Kecamatan Sumur Bandung yang memulai aksi sebagai kader WPA sejak 2010. Ratna kini menjadi pendamping pengobatan bagi tiga tetangganya yang ODHA. Setiap bulan ia menemani ketiganya mengambil obat ke rumah sakit, dan mendampingi mereka jika harus dirawat inap.

Ratna adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Satu-satunya pendapatan keluarganya berasal dari gaji suaminya yang bekerja sebagai pegawai sablon. Gaji itu hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sekolah dua anaknya yang duduk di bangku SD dan SMP. Terkadang, Ratna pun harus berhutang pada tetangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, kondisi keuangan rumah tangganya tidak menghalanginya untuk melakukan aksi sukarela sebagai WPA.

Ratna menyebutkan bahwa ia tergerak menolong tetangga yang ODHA tidak semata karena kewajibannya sebagai kader kesehatan, tetapi karena rasa kemanusiaan dan kewajiban sebagai seorang Muslim. Baginya, menolong orang lain adalah bagian dari ibadah dan ia tidak merasa terbebani dengan kewajiban itu:

"Hidup di dunia *kan* cuma sebentar saja. Kita

mesti perbanyak ibadah, agar dapat pahala untuk di akhirat nanti. Ibadah *kan gak* hanya sholat. Berbuat baik juga ibadah. Di WPA ini saya juga ibadah. Saya jalankan dengan ikhlas. Ibadah saya di WPA ini hanya mengharap PGA (*Pahala Gusti Allah*; (Ratna; kader WPA di Kecamatan Sumur Bandung).

Di dalam aksinya, Ratna tidak mepedulikan latar belakang sosial orang yang ditolongnya. Ia mengakui bahwa pada dasarnya ia tidak suka dengan perilaku tetangganya yang ODHA saat mereka masih jadi penasun. Sebab, para penasun di wilayah tempat tinggalnya, kerap mencuri untuk mendapatkan uang guna membeli *putaw*. Ia pun kerap kali menjadi korban aksi pencurian itu. Namun, saat para mantan penasun itu telah menjadi ODHA, Ratna tetap bersedia membantu mereka. Baginya, semua orang yang layak ditolong harus ditolong, terlepas dari latar belakang sosialnya atau masa lalunya. Ia menyebut bahwa aksinya sejalan dengan konsep *silih asih* dalam budaya Sunda, yang artinya saling mengasihi.

Penuturan Ratna menggambarkan bahwa ia membangun makna bagi aksinya dengan cara mengkaitkannya dengan konsep ibadah. Baginya, konsep ibadah tidak hanya merujuk pada ritual berdoa semata, yaitu sholat, tetapi juga merujuk pada semua bentuk tindakan yang bertujuan baik dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, termasuk menolong ODHA.

2) Aksi sebagai 'sedekah ilmu'

Kegiatan yang dilakukan para kader WPA, selain menjadi pendamping ODHA, adalah menyampaikan informasi mengenai HIV dan AIDS pada para tetangga mereka; serta mengajak masyarakat luas untuk tidak mengucilkan ODHA. Para kader memanfaatkan pertemuan rutin di masyarakat, sebagai arena menyampaikan informasi. Hal ini dilakukan oleh Euis Farida, adalah salah satu kader WPA di Kecamatan Kebon Gedang.

Serupa dengan Ratnawati, kondisi keuangan rumah tangga Euis sangat terbatas. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Euis berjualan gorengan untuk mendapatkan tambahan pendapatan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Euis memulai aksinya sejak akhir 2012. Bersama kader lain, ia secara berkala menghadiri acara majelis taklim, PKK, Posyandu, dan karang taruna di wilayah tempat tinggalnya. Di setiap acara itu, Euis dan kader WPA lain meminta waktu pada penyelenggara acara agar diijinkan menyampaikan informasi mengenai HIV dan AIDS selama 15 menit di akhir acara.

Euis menyatakan bahwa aksinya tidak hanya dilandasi oleh kepeduliannya pada masalah HIV tetapi juga oleh keyakinannya bahwa aksinya sesuai dengan anjuran dalam agamanya untuk berbagi ilmu. Ia menyebut aksinya sebagai

sedekah ilmu:

"Sedekah *kan* gak hanya dengan uang dan harta. Pengetahuan dan ilmu itu *kan* juga harta. Jadi bisa disedekahkan juga. Kalau ilmu yang kita sedekahkan itu bermanfaat buat orang lain, kita dapat pahala. Saya uang *gak* punya, saya hanya punya sedikit info tentang HIV, ya sudah, saya sebarin aja. Saya anggap ini sedekah saya. Lagipula sedekah ilmu itu *kan* jadi amal jariyah, *nggak* akan terputus pahalanya sampai kita mati nanti (Euis Farida; kader WPA di Kecamatan Kebon Gedang).

Selain menganggap penyebarluasan informasi sebagai sedekah ilmu. Euis juga menganggap aksinya sebagai perwujudan nilai-nilai *silih asih* dalam budaya Sunda. Melalui diskusi saat menyampaikan informasi, ia mengaku mendapatkan pengetahuan tambahan saat para tetangga juga memiliki informasi yang ia belum mengetahuinya. Pada tahap itulah saling asah terjadi. Dengan demikian, selain mengakarkan aksinya pada nilai agama; Euis juga mengakarkan aksinya pada nilai budaya Sunda.

3) Aksi sebagai wujud tanggungjawab sosial

Para kader menyebut bahwa aksi mereka merupakan perwujudan rasa tanggungjawab sosial. Mereka melihat masalah HIV dan AIDS sebagai masalah bersama dan sebagai warga mereka terpanggil untuk turut menyelesaikan masalah itu. Hal ini diyakini oleh Ira Canra, kader WPA di Kecamatan Rancasari.

Ira adalah satu dari kader WPA yang berasal dari kelompok sosial menengah. Suami Ira adalah salah satu staf di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat. Ira menjabat sebagai sekretaris PKK dan Ketua RW Siaga di Kecamatan Rancasari. Meski suaminya telah berkecimpung di dunia HIV dan AIDS sejak lama, Ira tidak serta merta tergerak untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal itu apalagi beraksi. Ia baru tergerak beraksi pada akhir 2012 setelah menyaksikan testimoni salah seorang tetangganya yang ternyata seorang ODHA dan mantan penasun. Testimoni itu dilakukan pada sebuah acara sosialisasi HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS di kantor Kecamatan Rancasari. Testimoni itu membuat Ira menyadari dekatnya masalah epidemi itu dengan kesehariannya. Lambat laun, Ira pun makin mengetahui bahwa tak sedikit warga muda di wilayah tempat tinggalnya adalah mantan penasun dan ODHA. Selaku aktivis kesehatan, rasa tanggungjawab sosialnya pun tergerak. Ia pun memasukkan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS di dalam agenda kegiatan PKK dan RW Siaga yang dipimpinnya.

Target penerima informasi Ira awalnya adalah para tetangga satu wilayah RT-nya. Lambat laun, Ira melebarkan target pada tetangga di wilayah RT dan RW lain. Di dalam aksinya, ia menemukan bahwa banyak anak muda di wilayahnya yang mantan penasun dan telah HIV positif telah lama mengalami pengucilan; dan mereka ingin kembali diterima oleh masyarakat. Ira tanpa ragu merangkul mereka dan mengajak mereka bersamanya mempromosikan anti stigma pada ODHA. Ira menyatakan:

“Saya merasa bertanggungjawab membantu mereka yang ingin kembali menjadi warga yang baik. Ya...meski mereka dulu penasun, tapi sekarang *kan* sudah *enggak*. Bagaimana pun mereka *kan* tetangga kita, anak-anak kita juga. Mereka bahkan bisa membantu kita dalam aksi pencegahan”(Ira Canra, kader WPA di Kecamatan Rancasari).

Ira mengkaitkan aksinya dengan nilai-nilai dalam Islam. Ia tidak secara tegas menyebutkan ingin mendapatkan pahala dari aksinya, tetapi ia menyatakan bahwa aksinya di WPA telah membuatnya melatih diri menjadi orang ikhlas. Ia ikhlas memberikan waktu, tenaga, dan keuangan bagi aksinya. Ia menyatakan cukup bahagia dengan gaji SAJUTA yang ia peroleh. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa SAJUTA adalah singkatan dari sabar, jujur, dan tawakkal.

Di Kecamatan Sumur Bandung, Yulia dan Wawang adalah dua kader yang memiliki kerabat ODHA. Mereka menyatakan bahwa pengalaman memiliki kerabat ODHA membuat mereka tergerak untuk mencegah keluarga lain memiliki pengalaman yang sama dengan mereka. Mereka menyatakan bahwa aksi mereka adalah perwujudan tanggungjawab sosial mereka.

Wawang, memiliki adik kandung yang mantan penasun dan kini menjadi ODHA. Ia dan keluarganya tidak mengusir adiknya, meski mereka kecewa adiknya menjadi penasun. Saat Wawang mengetahui adiknya terinfeksi HIV, ia mencari semua teman-teman adiknya yang ia ketahui pernah menyuntik narkoba bersama dengan adiknya. Wawang mendekati mereka satu demi satu dan memberi mereka penjelasan mengenai HIV dan AIDS. Wawang juga membujuk dan mendampingi mereka untuk mengikuti konseling dan tes HIV di PKBI. Wawang menyatakan bahwa tindakan itu ia lakukan karena ia merasa bertanggungjawab pada kesehatan teman-teman adiknya:

“Saya merasakan betul tidak tahu apa-apa tentang HIV waktu pertama adik saya kena AIDS. Bingung harus bagaimana; dan takut juga. Pengalaman itu bikin saya merasa bersalah kalau teman-teman adik saya sampai tidak tahu bahaya yang mengancam diri mereka. Mereka juga *kan* para tetangga saya. Saya merasa

bertanggungjawab untuk memberitahu mereka mengenai HIV (Wawang, kader WPA Kecamatan Sumur Bandung).

Yulia, kader WPA di Kecamatan Sumur Bandung memiliki dua keponakan yang mantan penasun dan kini menjadi ODHA. Serupa dengan Wawang, pengalaman merawat kerabat ODHA membuat mereka merasa memiliki tanggungjawab sosial untuk mencegah keluarga lain di wilayahnya mengalami hal yang sama dengan keluarga mereka. Yulia dan Wawang secara intensif mendekati para tetangga yang mereka ketahui pernah menggunakan narkoba bersama kerabatnya. Mereka secara perlahan memberikan informasi mengenai HIV dan AIDS dan juga dengan sabar membujuk dan mendampingi mereka untuk konseling dan tes HIV. Mereka juga mendampingi para tetangga yang hasil tes HIV-nya positif, untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit.

4) Aksi sebagai upaya menjadi manusia bermanfaat

Para kader WPA seringkali menyatakan bahwa mereka melakukan aksi dengan tujuan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara itu, mereka pun menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini diakui oleh Iwa Lesmana, kader WPA di Kecamatan Bojongloa Kidul.

Iwa adalah satu-satunya kader WPA laki-laki di Kota Bandung. Sehari-hari ia adalah staf bagian keagamaan di kecamatan. Ia juga berprofesi sebagai ustadz yang membina majelis taklim di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul. Oleh karena ia sering menyelipkan informasi mengenai pencegahan HIV dan AIDS di sela-sela acara majelis taklim serta aktif dalam acara *talkshow* HIV di radio. Iwa dikenal dengan sebutan ‘ustadz HIV’ karena aksinya itu.

Iwa memulai aksi sebagai kader warga peduli AIDS pada tahun 2011. Sebelum tahun itu, Iwa sama sekali tidak pernah peduli dengan isu HIV dan AIDS. Bahkan ia memiliki stigma tinggi pada para ODHA. Menurutnya, orang dengan perilaku melanggar aturan agama layak diberi teguran berupa penyakit. Ia selalu menganggap bahwa ODHA layak mendapatkan hukuman berupa penyakit akibat perbuatan mereka yang menyimpang dari norma sosial dan agama.

Pandangan Iwa pada isu HIV dan ODHA berubah drastis saat ia menyaksikan testimoni dari seorang perempuan ODHA di sebuah acara sosialisasi mengenai HIV di kantor Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Ia hadir di acara itu mewakili atasannya yang berhalangan hadir.

Perempuan yang melakukan testimoni di acara itu adalah seorang ibu rumah tangga muda dengan seorang anak balita. Suaminya baru saja

meninggal akibat AIDS. Saat suaminya didiagnosa AIDS, dokter yang merawat suaminya menganjurkan ia dan anaknya yang masih balita untuk di tes HIV. Hasilnya, ia dan anaknya positif terinfeksi HIV.

Testimoni itu mengubah pandangan Iwa pada ODHA dan isu HIV dan AIDS secara umum. Awalnya, ia menganggap bahwa semua ODHA layak mendapat penyakit karena perbuatan mereka yang melanggar norma agama, seperti homoseksualitas, menggunakan narkoba suntik atau menjadi pekerja seks. Namun, ketika ia mengetahui bahwa penyakit itu dapat menyerang siapa saja, ia menyadari bahwa anggapannya itu keliru. Iwa juga merasa bersalah telah abai pada isu HIV dan AIDS tanpa pernah melakukan *tabayun* (mencari kebenaran sebuah informasi); dan berprasangka buruk pada ODHA. Ia pun tersadar bahwa seharusnya sebagai pemuka agama, ia turut berkontribusi pada upaya menyelesaikan masalah itu.

Sejak menyadari peran yang seharusnya ia lakukan, Iwa aktif dalam setiap kegiatan pelatihan pencegahan HIV dan AIDS. Ia membaca semua buku panduan dan brosur mengenai HIV dan AIDS. Tak jarang ia juga berdiskusi para aktivis di LSM HIV maupun para staf Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bandung untuk memperdalam pengetahuannya. Ia mengakui bahwa hal itu dilakukannya dalam rangka *tabayun*.

Iwa kini aktif sebagai kader Warga Peduli AIDS. Ia memaknai aksinya sebagai sebuah upaya mengajak masyarakat berbuat kebaikan:

“Di dalam Islam kan kita dianjurkan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Itu ditulis jelas di Al Qur'an surat Lukman 17. Menurut saya apa yang saya lakukan ini adalah bukti bahwa saya ingin melakukan hal-hal baik; dan saya juga mengajak orang-orang untuk bersama saya melakukan hal-hal baik.” (Iwa Lesmana, kader WPA di Kecamatan Bojongloa Kidul).

Aksi sebagai kader WPA membuat Iwa berinteraksi secara intensif dengan ODHA. Banyak dari ODHA yang ia temui memiliki masa lalu sebagai penasun, pekerja seks, dan penyuka sesama jenis. Saat menjadi ODHA, orang-orang itu meminta Iwa membantu mereka belajar agama di sisa hidup mereka. Iwa pun membantu mereka belajar sholat dan membaca Al-Quran. Lambat laun, Iwa menjadi sangat dekat dengan mereka dan ia secara sukarela menjadi pendamping mereka dalam memepelajari agama. Iwa menyadari bahwa aksi sukarejanya sungguh bermanfaat bagi orang lain.

Iwa mengakui bahwa aksinya sebagai kader WPA mendampingi ODHA memberikan kepuasan tersendiri baginya. Menurutnya, aksi yang ia lakukan lebih memuaskan hatinya daripada berceramah di depan umum. Saat ceramah, ia

mengajak masyarakat berbuat hal baik tetapi ia tidak dapat melihat langsung efek dari ceramahnya; apakah betul orang yang ia ceramahi menjalankan anjurannya atau tidak. Sementara di aksi WPA, ia dapat melihat langsung hasil dari aksinya itu. Ia sering menyaksikan orang-orang yang bertobat dan kembali pada ajaran agama secara sukarela; yaitu saat ia mendampingi para mantan pecandu menjalani proses pertobatan dan secara bertahap belajar sholat dan membaca Al-qur'an. Ia merasa puas saat orang-orang yang ia dampingi menemukan kembali semangat hidup.

Selain memaknai aksinya sebagai upaya mengajak orang lain berbuat baik, Iwa juga menganggap aksinya sebagai upayanya menjadi manusia yang bermanfaat:

“Ya, saya ingin-*lah* menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah bersabda: *khairunnasi anfa'uhum lilnas*, sebaik-baiknya orang adalah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, yaitu masyarakatnya. Semoga saya apa yang saya lakukan ini selalu bermanfaat buat orang lain (Iwa Lesmana, kader WPA di Kecamatan Bojongloa Kidul).

Iwa menyadari bahwa aksi sukarela yang ia lakukan, tidak mendatangkan keuntungan keuangan dan materi. Bahkan ia seringkali harus mendonasikan uang pribadi dan waktu untuk melakukan aksi itu. Namun, ia ikhlas karena ia merasa dengan cara itu ia dapat menjadi manusia bermanfaat.

Diantara beragam faktor yang mendorong individu melakukan aksi kesukarelawan di penelitian sebelumnya, pada kasus warga peduli AIDS di Kota Bandung, faktor keinginan menerapkan nilai agama dan budaya adalah faktor yang paling kuat. Hal ini berbeda dengan di tempat lain di Indonesia, di mana faktor pengetahuanlah yang menjadi faktor terkuat yang mendorong warga untuk memulai gerakan WPA.

Makna aksi sukarela yang dilakukan warga di bangun dengan cara menghubungkan aksi mereka dengan nilai-nilai budaya dan agama. Aksi sukarela bagi para kader adalah ekspresi religiusitas dan budaya mereka.

4. Aksi Volunterisme WPA dalam pandangan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan masyarakat umum

Makna volunterisme bagi kader makin menguat ketika mereka mendapati bahwa aksi yang mereka lakukan memberikan manfaat bagi orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mereka dampingi. Para ODHA menyatakan bahwa aksi para kader WPA sangat berarti bagi mereka terutama dalam hal pengurangan stigma, dan rekonstruksi identitas sosial. Bayu, salah seorang mantan penasun dan ODHA menyatakan:

"Gimana ya rasanya *tuh* saya sebagai orang *kayak* gini. Ya istilahnya mungkin orang lihat saya *tuh kayak* sampah kali ya. Ga ada guna, harus dibuang. Tapi pas saya diajak ibu-ibu kader WPA itu, saya ada rasa haru. Saya merasa *kayak* sampah, tapi yang didaur ulang gitu. Ada guna lagi" (Bayu, mantan penasun dan ODHA di Kecamatan Rancasari).

Selain merasakan manfaat dari aksi WPA, para ODHA juga memberikan apresiasi pada aksi tersebut. Serupa dengan para kader, para ODHA juga mengkaitkan aksi para WPA dengan nilai-nilai dalam budaya Sunda dan agama. Hal ini tampak dalam pernyataan Ela, perempuan yang tertular HIV dari suaminya:

"Saya gak bisa *bales* kebaikan mereka (kader WPA). Semoga Allah yang membalas kebaikan mereka. Saya dibolehin tinggal di rumah kader waktu diusir mertua gara-gara ketahuan saya HIV; didampingi waktu terpuruk. Jadi kalo dibidang WPA itu nerapin *silih asih* ya bener *pisan*. Asli itu *mah* (Ela; ODHA di Kecamatan Sumur Bandung).

Pernyataan Bayu dan Ela, menegaskan bahwa nilai-nilai agama dan budaya Sunda menjadi rujukan bagi kader dan juga ODHA yang didampingi oleh kader untuk membangun makna atas aksi WPA. Aksi tersebut tidak hanya bermakna bagi kader semata tetapi juga bermakna bagi para ODHA yang menerima manfaat dari aksi.

Bagi masyarakat umum non-ODHA, aksi para kader dalam menyebarluaskan informasi mengenai HIV dianggap sangat bermanfaat dan juga memiliki makna penting, seperti penuturan Usep, salah seorang warga:

"Pas saya *denger* penjelasan tentang HIV itu, *wah* kaget saya. takut. Tapi lalu saya bersyukur saya jadi tahu. Coba kalau saya *nggak* tahu, bisa-bisa saya berisiko kena. Makasih-*lah* sama mereka (kader) dah kasih info'. Mudah-mudahan *sing kagantian lah* (terganti) kebaikan mereka (kader)." (Usep, warga di Kecamatan Kebon Gedang)

Serupa dengan para ODHA, Usep juga memberikan apresiasi pada aksi para kader WPA. Ia juga menganggap bahwa aksi tersebut layak untuk mendapatkan balasan baik dari Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Akintola, O. (2011). What motivates people to volunteer? The case of volunteer AIDS caregivers in faith-based organizations in KwaZulu-Natal, South Africa. *Health Policy and Planning*. <https://doi.org/10.1093/heapol/czq019>

D. KESIMPULAN

Aksi WPA Kota Bandung memberikan gambaran bahwa aksi sukarela dalam pencegahan HIV dan AIDS tidak selalu didorong oleh kecukupan tingkat pengetahuan warga mengenai isu HIV dan AIDS semata tetapi justru didorong oleh rasa kepedulian dan rasa tanggungjawab sosial pada masalah HIV dan AIDS. Aksi yang dilakukan oleh kelompok Warga Peduli AIDS di Kota Bandung menggambarkan sebuah bentuk volunterisme dalam konteks epidemi HIV yang dimotivasi oleh nilai-nilai agama dan budaya. Makna aksi ini pun dibangun tidak hanya oleh kader, tetapi oleh ODHA dan masyarakat umum selaku penerima manfaat aksi.

Aksi WPA di Kota Bandung dapat menjadi masukan bagi para pengampu kepentingan untuk merancang sebuah program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang berbasis masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya dan agama yang merupakan elemen nilai penting di dalam masyarakat. Disain program sebaiknya tidak hanya mengedepankan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai epidemi sebagai faktor pendorong mereka untuk beraksi dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan; tetapi sebaiknya mengedepankan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai sosial budaya dan agama.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada para kader Warga Peduli AIDS, ODHA, dan warga di Kota Bandung yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih pada Prof. Kathryn M. Robinson (College of Asia and The Pacific, Australian National University (ANU)) atas komentar dan sarannya pada seluruh proses penulisan artikel ini, yang merupakan cuplikan dari disertasi saya. Terima kasih pada Kemristekdikti dan Australian National University yang telah menyediakan dukungan dana bagi terlaksanannya penelitian ini.

- Amady, M. R. El. (2015). Etik dan Emik pada Karya Etnografi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2017). *Kota Bandung Dalam Angka 2017*. Retrieved from <https://bandungkota.bps.go.id/publication/2017/08/11/7cf46753e6cb9992a7e401b6/kota-bandung-dalam-angka-2017.html>
- Clary, E. G., Ridge, R. D., Stukas, A. A., Snyder, M., Copeland, J., Haugen, J., Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1516>
- Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. (1992). Volunteers' motivations: A functional strategy for the recruitment, placement, and retention of volunteers. *Nonprofit Management and Leadership*. <https://doi.org/10.1002/nml.4130020403>
- Danasasmita. (1987). *Sewaka Darma (koropak 408), Sanghyang Siksakandang Karesian (koropak 630), Amanat Galunggung (koropak 632: Transkripsi Terjemahan*. Bandung: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ekadjati. (2005). *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Esmond, J., Dunlop, P. (2004). Developing the Volunteer Motivation Inventory to assess the underlying motivational drives of volunteers in western Australia. *Research Project Funded by Lotterywest Social Research Grant*.
- Essen, D. J. von, Hustinx, A. P. L., Haers, J., Mels, S. (2015). *Religion and Volunteering: Complex, Contested and Ambiguous Relationships*. *Religion and Volunteering*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04585-6>
- Fernandez, W., Manurung, I. F. E., Toy, S. M., Ndoen, H. I. (2019). Perilaku Warga Peduli AIDS terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Kupang. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*. <https://doi.org/10.35963/hmj.k.v4i8.157>
- Grönlund, H. (2013). Cultural Values and Volunteering: A Cross-Cultural Perspective, 71–84. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6952-0_6
- Harsojo. (1979). *Kebudayaan Sunda*. In *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*.
- Herawati, E. (2017). Warga Peduli AIDS': Community Participation in the HIV and AIDS Response in Bandung. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2439>
- Hofstede, G. H. (2001). Culture's Consequences, Second Edition: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. In *Edn, Sage Publications, Inc, Thousand Oaks*. <https://doi.org/10.1177/0022022110388567>
- Ibrahim, M. Y. (2017). Pengaruh amalan komunikasi terhadap penglibatan belia dalam kesukarelawanan. *Malaysian Journal of Society and Space*. <https://doi.org/10.17576/geo-2017-1304-08>
- Indrawardana, I. (2014). Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan. *MELINTAS*. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1284.105-118>
- Jakob, S. (2010). Islam dan Sunda dalam Mitos: Pandangan Manusia Sunda Masa Kini dan Hubungannya dengan Islam. In M. Hasbullah (Ed.), *Studi Sejarah Islam Sunda*. Bandung: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sundan Gunung Djati.
- Kahmad, S. (2009). Agama Islam dan Budaya Sunda. In *International Roundtable Discussion on Islamic Thought and Sundanese Values*. Bandung.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Permenkes No 21 Tahun 2013*.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (2010). *Warga Peduli AIDS Perwujudan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan HIV -AIDS*. Jakarta.
- Lisdiati, L., Hum Syarif Hidayat, M., Abdulhak, I., dan Muchsin, M. (2014). The Tradition of Consecrating Rice in Pangandaran Sub-District. *Asian Culture and History*. <https://doi.org/10.5539/ach.v7n1p156>
- Miles, M.B. Huberman, M. a. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.)*. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. London: Sage Publication.
- Newland, L. (2000). Under the Banner of Islam: Mobilising Religious Identities in West Java. *Australian Journal of Anthropology*. <https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.2000.tb00056.x>
- Noorduyn, J; Teeuw, A. (2006). *Three Old Sundanese Poems*. Leiden: KITLV.
- Novoa, A.D; Johnson, V.(2013). *Volunteer Experience: Understanding and Fostering Global Citizenship*. New York. Retrieved from https://wp.nyu.edu/steinhardt-appsych_opus/the-volunteer-experience-understanding-and-fostering-global-citizenship/
- Okun, M. A., O'Rourke, H. P., Keller, B., Johnson, K. A., Enders, C. (2015). Value-Expressive Volunteer Motivation and Volunteering by Older Adults: Relationships With Religiosity and Spirituality. *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbu029>
- Omoto, A. M., Snyder, M. (2002). Considerations of community: The context and process of volunteerism. *American Behavioral Scientist*. <https://doi.org/10.1177/0002764202045005007>

- Parboteeah, K. P., Cullen, J. B., Lim, L. (2004). Formal volunteering: A cross-national test. *Journal of World Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2004.08.007>
- Pasaribu, Y. (2015). Modernization of Transportation Means and its Shift in Worldview of Traditional Community: Case Study of Sundanese Culture in Bandung. *Tawarikh International Journal of Historical Study*, 6(2), 237–257.
- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present*. University of Hawaii Press.
- Rosidi. (2010). *Mencari Sosok Manusia Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Rusyana, Y. (1989). *Pandangan Hidup Orang Sunda: seperti Tercermin dalam Kehidupan Masyarakat Dewasa ini (Tahap II)*.
- Sudaryat, Y. (2014). The Interpretation of Sundanese Educational Philosophy in Traditional Idiomatic Expressions. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*.
- Sumamiharja, S. (2005). Organisasi dan Struktur sosial Masyarakat Sunda. In *Masyarakat Sunda dan kebudayaannya*. Jakarta: Girimuksi Pasaka.
- Syahrizal, S. (2016). Deskripsi dan Eksplanasi dalam etnografi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n2.p161-174.2015>
- Warnaen, S. (1987). *Pandangan Hidup Orang Sunda Seperti Tercermin dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda: Penelitian Tahap II (Konsistensi dan Dinamika)*. Bandung.
- Wati, N., Cahyo, K., Indraswari, R. (2017). Pengaruh Peran Warga Peduli AIDS terhadap Perilaku Diskriminatif pada ODHA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*.
- Wibisana, W. (2010). Pengaruh Islam terhadap Budaya Sunda. In M. Hasbullah (Ed.), *Studi Sejarah Islam Sunda*. Bandung: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati.
- Wildan. (2010). Perjumpaan Islam dengan Tradisi Sunda. In *Studi Sejarah Islam Sunda*. Bandung: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati.



FAKTOR-FAKTOR BUDAYA PENGHAMBAT PENDERITA KANKER BEROBAT KE FASILITAS PENGOBATAN MODERN

Sri Meiyenti^{1*}, Maihasni², Aziwarti³

¹ Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

^{2,3} Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 07 April 2019
Review : 21 August 2019
Accepted : 17 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Healthy; Sick; Illness; Health care; Social-culture

CORRESPONDENCE

*E-mail: smeiyenti@yahoo.com

A B S T R A C T

This article based on research that tries to trace cancer patients who do not want to go to the hospital. Often we hear cancer patients come to the hospital when the condition of the disease is already at an advanced stage. So it's too late to handle. According to data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, if cancer is treated early it can prevent more than 30 percent death. This study aims to determine the problem of cancer patients' reluctance to go to the hospital in terms of socio-cultural aspects. The method used in this research is a qualitative method. Data collected by observation and in-depth interview techniques. The results showed that the reluctance of cancer patients to go to the hospital was influenced by socio-cultural aspects so it was crucial to determine the choice of treatment for cancer patients. The socio-cultural aspects are cultural knowledge about cancer, belief in traditional medicine, and the influence of relatives and other social environments such as friends and neighbors in health care choices. Relatives, neighbors, and friends recommend traditional treatment. However, with traditional medicine, there are no informants who have recovered from their illnesses. There is actually a disease that is getting worse

A. PENDAHULUAN

Hampir semua manusia pernah mengalami sakit. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan manusia sakit. Penyebab sakit berbeda-beda menurut pengetahuan dan budaya masyarakat. Pengetahuan modern berbeda dengan pengetahuan tradisional dalam melihat penyebab penyakit. Pengetahuan modern melihat penyebab penyakit seperti karena infeksi bakteri, virus, kuman, dan lain sebagainya. Sementara, pengetahuan tradisional mengaitkan penyebab penyakit dengan hal-hal yang bersifat supranatural, seperti gangguan dari makhluk halus, seperti dewa, roh nenek moyang, hantu, dan lain sebagainya.

Apabila manusia sakit dan sakitnya telah mengganggu aktivitas atau penampilan fisiknya, maka mereka akan mencari pengobatan sesuai dengan pengetahuan dan budaya masyarakat tersebut. Pada umumnya masyarakat akan melakukan beberapa tahap pengobatan. Pada tahap awal biasanya berupa usaha sendiri dengan mencari ramuan-ramuan yang ada di

sekitar lingkungan tempat tinggal atau mencari obat yang dijual bebas di warung-warung atau rumah obat. Supardi dan Nurhadiyanto mengatakan dari semua orang yang mengeluh sakit, persentasenya lebih besar memilih pengobatan sendiri (54,4%) untuk menanggulangi keluhan tersebut. Pengobatan sendiri adalah upaya pengobatan keluhan sakit menggunakan obat yang dijual bebas, obat tradisional atau cara tradisional tanpa petunjuk dari ahlinya (Supardi & Nurhadiyanto, 2003). Biasanya, apabila tidak ada perubahan, maka si penderita akan mencari pertolongan pada tingkat yang lebih tinggi, yakni pada ahlinya (pengobatan tradisional atau modern).

Pilihan-pilihan berobat manusia tergantung pada pengetahuan dan kepercayaannya (etiologi penyakit). Banyak di antara kita beranggapan bahwa masyarakat desa, miskin, dan berpendidikan rendah akan cenderung memilih pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan modern. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak juga orang berpendidikan tinggi dan tinggal di kota tetap memilih pengobatan tradisional ketimbang pengobatan modern.

Pengobatan tradisional diminati karena sesuai dengan pengetahuan budaya mereka. Seperti hasil penelitian (Desni, Wibowo, & Rosyidah, 2011) bahwa masyarakat lebih percaya pada pengobatan tradisional karena lebih murah, praktis, mudah dijangkau dan sementara akses terhadap pelayanan kesehatan modern kurang terjangkau. Padahal pengobatan tradisional kadang-kadang tidak memberikan hasil yang memuaskan, terutama untuk penyakit fisik yang berat seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Foster dan Anderson mengatakan “para ahli antropologi dan psikiater merasakan bahwa pengobatan non-Barat (tradisional) lebih efektif pada pengobatan psikososial dibandingkan dengan pengobatan klinis. Mereka menyimpulkan bahwa pengobatan non-Barat kurang memberikan kepuasan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pada masa sekarang”(Foster & Anderson, 1986).

Apa yang dikatakan oleh antropolog dan ahli kesehatan di atas ada benarnya. Ada beberapa kasus yang diketahui yakni penderita penyakit yang dikategorikan berat yakni kanker, tetapi mereka tidak memanfaatkan pengobatan modern, mereka justru lebih memilih pengobatan tradisional sehingga berakibat fatal. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut dan Mulyono menemukan bahwa penderita kanker payudara yang berobat ke pengobatan tradisional cukup besar jumlahnya yakni 44,6% pada terapi kombinasi dan 43,1% untuk terapi operasi. Penelitian mereka ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan tidak punya pengaruh dalam pilihan berobat (Ketut & Mulyono, 2004). Fenomena yang sama juga ditemukan di Kota Padang bahwa penderita kanker diketahui ada yang berpendidikan tinggi sampai ke jenjang S3 dan pekerjaan mereka adalah perawat, guru, dan PNS. Suatu hal yang sulit dipahami pada saat sekarang sarana kesehatan sudah sangat memadai mengapa mereka tidak memilih pengobatan modern? Padahal sudah lama persoalan ini diperbincangkan, sebagaimana dalam tulisan Sciortino, hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga pada tahun 1980 memperlihatkan bahwa hanya 44 persen penduduk Indonesia berobat secara medik, 26 persen mengobati diri sendiri, dan 26 persen lainnya tidak mencari pengobatan (Sciortino, 1999). Ternyata apa yang dikemukakan oleh Sciortino sejak puluhan tahun yang lalu belum berubah hingga sekarang. Menurut Sembiring dan Sismudjito 49,5% (hampir setengah penduduk Indonesia) masih menggunakan pengobatan tradisional berupa jamu-jamuan, 4,5% di antaranya mengkonsumsi obat tradisional setiap hari dan sisanya mengkonsumsi sekali-sekali (Sembiring & Sismudjito, 2015).

Penyakit kanker merupakan penyakit yang tidak menular tetapi mematikan. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI, 2015) “kanker

merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012 di dunia terdapat 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Kanker paru, hati, perut, kolorektal dan kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya.”

Mengubah pola makan dan perilaku yang dapat memicu kanker bisa mencegah timbulnya penyakit kanker hingga lebih 30 persen. Kemudian, penyakit kanker bisa ditangani dengan lebih baik apabila penyakit tersebut ditemukan lebih awal (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Kusuma dan Susilawati mengatakan “pada kanker payudara metode pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) bisa mendeteksi secara dini kanker payudara. Hanya saja karena berbagai faktor menyebabkan banyak penyakit kanker ditemui sudah dalam kondisi stadium lanjut. Salah satu faktornya adalah keengganan penderita memilih pengobatan ke pelayanan pengobatan modern atau ilmiah (Kusuma & Susilawati, 2014).”

Foster dan Anderson mengatakan apabila pengobatan ilmiah yang baik tersedia bagi penduduk tradisional, diberikan oleh petugas kesehatan yang ramah dan simpatik, dengan harga yang terjangkau dan pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang tepat, maka pengobatan ilmiah menjadi pilihan utama bagi penduduk tradisional (Foster & Anderson, 1986). Apa yang dikatakan oleh Foster dan Anderson ternyata bertolak belakang dengan fenomena yang ditemui. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa ada penderita penyakit kanker yang berpendidikan tinggi, tinggal di Kota Padang yang sarana pengobatannya banyak dan representatif, serta penderita relatif mampu secara ekonomi, tetapi menolak pengobatan modern. Diasumsikan di sini ada hambatan-hambatan budaya di samping hambatan psikologis yang menyebabkan penderita tidak memilih pengobatan modern. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang sosial budaya penderita kanker, mengetahui tindakan dan penanganan awal ketika penderita mengetahui mereka kena kanker, dan mengetahui pengobatan-pengobatan tradisional dan modern yang dilakukan pasien dalam usaha mendapatkan kesembuhan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebudayaan atau disebut juga sebagai pendekatan etnografi. Pendekatan ini mempertimbangkan perilaku manusia dalam menguraikan pengetahuan mereka. Pendekatan etnografi menggunakan metode kualitatif. Pendekatan etnografi ini bersifat holistik, yaitu memperhatikan aspek yang menyeluruh dari fenomena yang terjadi.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah keengganan penderita kanker berobat ke fasilitas pengobatan medis modern. Hal yang diperhatikan adalah apa saja dari lingkungan sosialnya yang mempengaruhi penderita untuk melakukan pengobatan dan perawatan penyakitnya. Misalnya pengetahuan budaya tentang penyakit yang diderita, pengetahuan budaya tentang pengobatannya, pengaruh lingkungan sosial dalam pilihan berobat dan perawatan penyakit. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, penelitian ini juga menggunakan pandangan ilmu kedokteran dan kesehatan untuk menganalisis variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek klinis penyakit kanker.

Penelitian ini dilakukan di kota Padang. Penderita kanker tinggal tersebar di berbagai wilayah. Untuk memudahkan mendapatkan informan, maka digunakan metode survey terlebih dulu dengan cara penyebaran kuesioner di Poli Penderita Penyakit Tumor dan Kanker Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Kuesioner disebar sebanyak 26 eksemplar ke 26 responden. Ternyata responden berdomisili tersebar di berbagai Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, yakni di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Agam, dan Darmasraya. Karena keterbatasan waktu dan dana responden yang dipilih untuk dijadikan informan adalah yang berdomisili di Padang. Mereka juga tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Koto Tengah, Nanggalo, dan Padang Utara. Semuanya berjumlah 13 orang, namun yang berhasil dihubungi kembali untuk diwawancara hanya 10 orang. Tiga orang lagi tidak bisa dilacak karena nomor kontak yang diberikan tidak bisa dihubungi dan ada juga alamat yang diberikan tidak benar. Keengganan mereka untuk diwawancara kembali sebenarnya sudah terlihat pada waktu penyebaran kuesioner sebelumnya. Sepertinya mereka enggan orang lain mengetahui tentang penyakit yang dideritanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesehatan, Penyakit, dan Perawatan Kesehatan

Kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan adalah kenyataan-kenyataan pada umat manusia. Setiap masyarakat memiliki persepsi dan perawatan penyakit yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perawatan kesehatan tergantung dari etiologi dan jenis penyakitnya. Berdasarkan survey terhadap kepustakaan etnomedisin, Foster dan Anderson hanya menemukan dua kategori besar etiologi penyakit pada masyarakat tradisional. Etiologi tersebut adalah "sistem personalistik dan sistem naturalistik" (Foster & Anderson, 1986).

Sistem personalistik adalah suatu sistem di mana penyakit (*illness*) disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif berupa makhluk supranatural. Pada sistem penyakit naturalistik, penyakit (*illness*) dijelaskan dengan istilah sistemik, mengakui adanya suatu model keseimbangan. Sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas dan dingin berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan sosialnya. Apabila keseimbangan terganggu hasilnya adalah timbulnya penyakit " (Foster & Anderson, 1986).

Berbagai jenis penyakit seperti "*disease*, *illness*, dan *sickness* dianggap sinonim dalam bahasa Inggris, namun ada perbedaan penting di antara mereka dalam antropologi medis. Biomedik memandang *disease* sebagai masalah biologis yang melibatkan kelainan pada struktur tubuh. *Illness* mengacu pada pengalaman pasien tentang sesuatu yang salah, rasa terganggu pada kesehatan yang mungkin akibat penyakit atau disebabkan oleh kepercayaan budaya (seperti merasa bahwa Anda terlalu gemuk atau dianiaya oleh penyihir, UFO, atau CIA, pada masyarakat Minangkabau ada istilah *tasapo* (pen). Perbedaan *sickness* berfokus pada konsekuensi tanggapan sosial terhadap seseorang, misalnya, pengalaman pribadinya saat diasingkan karena mengalami AIDS atau obesitas (Winkelman, 2009).

Konsep *disease*, *illness*, dan *sickness* mencerminkan perbedaan antara realitas medis, pribadi, dan sosial. Perbedaan ini menggambarkan pentingnya perspektif lintas budaya dalam memahami masalah kesehatan. Antropologi medis menekankan pendekatan konstruktivis sosial untuk memahami masalah kesehatan, yang menggambarkan peran proses sosial dan budaya dalam mendefinisikan, menafsirkan, dan merespons penyakit. Pengalaman penyakit diwujudkan melalui konsep berbasis budaya karena mereka membentuk persepsi tentang pentingnya kondisi yang mempengaruhi pencarian dan respons terhadap perawatan dan diagnosis individu terhadap pengobatan (Winkelman, 2009). Bagi masyarakat penyakit itu bisa terjadi karena perilaku yang salah terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini konsep penyakit yang menjadi perhatian adalah konsep *illness* dan *sickness*, yakni bagaimana penderita menanggapi dan mendefinisikan penyakitnya serta pengalamannya tentang tanggapan sosial terhadap penyakitnya. Berdasarkan pemahaman ini penderita akan menentukan pilihan perawatan kesehatannya. Apakah ke perawatan medis modern atau tradisional? Kleinman mengemukakan tiga model perawatan kesehatan yaitu perawatan kesehatan "umum, kedukunan, dan profesional" (lihat Winkelman, 2009). Berbeda dengan Kleinman, Kalangie menganggap sektor-sektor perawatan tersebut

merupakan suatu sistem tersendiri. Sistem perawatan umum merupakan sistem perawatan yang paling banyak dipilih masyarakat. Sistem perawatan ini disebut sebagai *selftreatment*. Biasanya dipilih untuk mengatasi penyakit yang tidak berat atau penyakit biasa (Winkelman, 2009). Senada dengan Kalangie, Dunnell dan Cartwright menemukan dalam hasil penelitiannya di London bahwa pengobatan sendiri (*selftreatment*) dengan obat bebas lebih sering dilakukan dibandingkan dengan obat resep (dalam Tuckett, 1995).

Untuk menentukan suatu penyakit ringan atau berat sangat tergantung pada budaya kesehatan masyarakat. Penyakit yang dipersepsikan ringan oleh masyarakat, tetapi secara klinis mungkin sudah parah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dyanti dan Suariyani menemukan "penderita kanker payudara terlambat memeriksakan penyakitnya sehingga sudah sampai ke stadium lanjut disebabkan oleh gejala benjol yang telah dirasakan, tetapi diabaikan karena tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari oleh karena itu dianggap tidak membahayakan" (Dyanti & Suariyani, 2016). Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Pelly bahwa di kalangan suku Mano Liberia, penyakit malaria dianggap tidak sakit karena semua orang Mano mengidap penyakit malaria, sehingga mereka tidak lagi menganggap orang yang menderita malaria adalah orang yang sedang sakit (Pelly, dalam (Sanipar, T & Yusuf, 1992).

Gambaran yang dijelaskan di atas bisa juga terjadi karena terkait dengan konsep sehat dan sakit pada masyarakat. Bagi masyarakat pengertian sehat apabila tidak ada perasaan yang tidak enak, seperti rasa sakit, pusing, atau yang lainnya yang mengganggu aktivitas keseharian mereka. Sementara, sakit apabila sudah ada rasa yang mengganggu sehingga menghalangi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Tugas-tugas mereka sehari-hari sudah diambil alih oleh kerabatnya yang lain. Berdasarkan dari pengertian ini maka sering kita menemukan masyarakat mengabaikan penyakit yang dideritanya karena tidak/atau belum mengganggu akativitasnya dalam kehidupan. Ini lah yang sering menjadi faktor keterlambatan dalam penanganan penyakit, seperti penyakit pada penderita kanker. Seringkali kanker yang berada pada stadium awal belum menimbulkan gejala seperti rasa sakit atau rasa yang mengganggu sehingga sering kali terabaikan.

2. Gambaran Responden dan Informan

Responden dan informan sama-sama merupakan sumber data primer dalam suatu penelitian. Di sini keduanya digunakan untuk memperoleh data primer. Responden berbeda dengan informan. Responden adalah yang

memberikan informasi tentang dirinya sendiri, sedangkan informan selain memberikan informasi tentang dirinya, ia dapat juga memberikan informasi tentang orang lain yang ia ketahui. Dalam penelelitian ini sumber data diperoleh dari responden dan juga informan. Data dari responden dijarah menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan dilakukan wawancara yang bersifat terstruktur. Tujuan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden adalah untuk memudahkan memperoleh informan dalam penelitian ini. Karena sulit untuk mengetahui di mana dan siapa penderita kanker. Para penderita kanker jelas tidak berdomisili di wilayah yang terkonsentrasi. Kuesioner disebarkan ke sejumlah 26 responden yang dijarah melalui teknik eksidental di Poli Kanker dan Tumor Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Rentang umur responden adalah antara 22 tahun hingga 64 tahun. Rata-rata usia mereka adalah di atas 40 tahun yakni sebanyak 20 orang. Semua responden berjenis kelamin perempuan.

Pendidikan responden yang terbanyak adalah tingkat SLTA yaitu sebanyak 12 orang, kemudian diikuti Perguruan Tinggi sebanyak 7 orang, SD sebanyak 4 orang, dan SLTP sebanyak 3 orang. Sedangkan pekerjaannya lebih banyak ibu rumah tangga yaitu berjumlah 13 orang, yang lain adalah guru, bidan, pedagang, dan wiraswasta. Status perkawinan responden yang terbanyak adalah menikah yakni 23 dari dan 3 orang belum menikah.

Penyakit yang diderita responden juga beragam yaitu kanker getah bening, kanker tiroid, kanker payudara, tumor di kepala, dan FAM. Stadiumnya juga beragam ada yang stadium awal, 1, 2, 2A, dan 3B. Dari berbagai jenis penyakit kanker tersebut yang terbanyak adalah kanker payudara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada penderita kanker payudara, yakni sebanyak 10 orang.

3. Latar Belakang Budaya Penderita Kanker

Informan dalam penelitian ini adalah etnis Minangkabau. Secara administratif pemukiman informan tersebar di berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kota Padang. Pola pemukiman informan terbagi menjadi dua yaitu tinggal menetap bersama keluarga inti dan menetap bersama keluarga luas. Keputusan dalam pemilihan pola tempat tinggal dipengaruhi oleh budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga pola menetap setelah menikah cenderung di sekitar tempat tinggal keluarga perempuan atau istri meskipun tidak tinggal di rumah orang tua perempuan istri. Informan yang tinggal dengan keluarga inti biasanya hidup terpisah dengan keluarga luasnya atau di rumah warisan keluarganya, mereka tinggal di lingkungan yang baru. Kebanyakan mereka tinggal di pemukiman perumahan yang dibangun

oleh pengembang, tetapi ada juga rumah yang dibangun sendiri dengan membeli tanah yang jauh dari kerabatnya matrilinealnya.

Pola pemilihan tempat tinggal matrilineal juga memberi pengaruh ke berbagai sisi kehidupan informan. Salah satu pengaruh tersebut adalah pada aspek kesehatan. Dalam penelitian ini ditemui bahwa bagi informan pengaruh keluarga inti maupun keluarga luas sangat besar terutama untuk memutuskan pengobatan dan perawatan yang akan dijalani oleh informan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap informan penderita kanker di Kota Padang dapat diketahui bahwa keputusan dalam menjalani pengobatan dan perawatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial penderita yaitu: keluarga, kerabat, tetangga, dan teman. Dari pihak keluarga yang mempengaruhi adalah suami, ibu, dan anak. Sementara pengaruh kerabat diperoleh dari mamak. Tetapi, tidak ditemui adanya pengaruh keluarga suami dalam memilih pengobatan.

Keluarga merupakan faktor yang memberikan pengaruh paling besar dalam pengambilan keputusan bagi informan. Ditemukan enam (6) orang informan yang dipengaruhi oleh keluarga dalam memutuskan pengobatan. Satu (1) orang dipengaruhi oleh kerabat atau keluarga luas. Kemudian ada lima (5) informan yang dipengaruhi oleh tetangga dan temannya dalam memutuskan pengobatan kanker yang dideritanya. Pengaruh keluarga, kerabat, tetangga, dan teman dalam pengobatan ini lebih banyak menyebabkan informan memutuskan berobat secara tradisional, yakni sebanyak delapan (8) informan dari sepuluh (10) informan. Pengobatan tradisional yang mereka pilih ada yang mengobati sendiri dengan membuat ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang diberitahu oleh keluarga, kerabat, dan teman. Ada juga yang memilih berobat ke dukun atau pengobatan alternatif. Pengobatan tradisional menurut mereka lebih aman dan obatnya tidak memiliki efek samping karena berbahan dasar tumbuh-tumbuhan. Mereka berfikir obat dari rumah sakit itu mengandung bahan kimia sehingga memiliki efek samping yang berbahaya.

Sementara, dari literatur yang dibaca diketahui bahwa tidak semua obat tradisional itu yang tidak memiliki efek samping. Misalnya merkuri dan berbagai metal berat lainnya yang digunakan secara ekstensif dalam pengobatan Ayurveda dan pengobatan Islam adalah sangat berbahaya. Dalam artikel yang sama Leslie memberikan contoh tentang "galukoma yang disebabkan oleh sejenis candu (poppy) yang dimasukkan ke dalam obat tradisional di India dan Pakistan (dalam, Foster & Anderson, 1986).

4. Riwayat Penanganan Penyakit

Hampir semua informan dalam penelitian ini pertama kali menyadari penyakitnya secara tidak sengaja. Hanya satu orang yang mengetahui ada sesuatu yang tidak biasa di payudaranya melalui metode SADARI (Pemeriksaan Diri Sendiri). Setelah mereka mengetahui ada sesuatu di payudaranya respon mereka umumnya adalah memunculkan rasa cemas, panik, dan takut. Tindakan mereka setelah itu beragam yaitu: ada yang menyembunyikan kondisinya, ada yang menceritakan kepada keluarga seperti kepada anak, suami, dan ibu, dan ada juga yang menceritakan kepada teman dan tetangga. Respon dari keluarga, teman, dan tetangga juga beragam yaitu: ada yang menyarankan mengkonsumsi ramuan-ramuan tertentu, ada yang menyarankan melakukan pemeriksaan ke Puskesmas, dan ada juga yang menyarankan berobat ke dukun atau alternatif.

Beberapa informan yang memeriksakan diri ke Puskesmas, oleh dokter Puskesmas diberikan rujukan ke rumah sakit untuk memastikan penyakit yang diderita. Setelah hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan mereka mengidap kanker dan direkomendasikan untuk operasi, banyak dari mereka menarik diri dari pengobatan rumah sakit. Ada di antara mereka yang menyembunyikan penyakitnya dari lingkungan keluarga, kerabat, teman, dan tetangga. Mereka merasa malu bila ada orang lain yang mengetahui penyakitnya. Mereka takut orang akan memandang dengan rasa kasihan. Hal itu membuat perasaan mereka menjadi tidak enak dan menambah cemas.

Mereka yang menarik diri dari pengobatan rumah sakit, mencoba beralih berobat ke alternatif atau pengobatan tradisional, serta ada pula yang mengobati sendiri dengan mengkonsumsi ramuan dari tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya seperti sarang serangga. Ramuan dari tumbuh-tumbuhan umumnya dikonsumsi dengan cara direbus dan diminum airnya. Ramuan dari benda-benda dipakai sebagai obat luar dengan cara mengoles pada area yang sakit.

Dalam pengobatan tradisional ini, ada di antara mereka yang berpindah-pindah dari satu dukun ke dukun lainnya dan dari satu ramuan ke ramuan lainnya. Hal ini mereka lakukan karena pengobatan tradisional yang mereka pilih tidak memberikan hasil yang memuaskan. Artinya tidak menyembuhkan atau tidak mengurangi keluhan dan gejala penyakit mereka.

Mereka memilih pengobatan tradisional karena ada yang atas kehendak mereka sendiri dan ada juga atas saran dan suruhan suami, ibu, anak, keluarga luas, teman, dan tetangga. Mereka yang menyarankan berobat ke alternatif atau tradisional karena beranggapan berobat ke rumah sakit sudah dipastikan akan disuruh operasi. Menurut mereka operasi itu membuat penyakit itu akan kambuh lagi dan bahkan

menjadi bertambah ganas. Pemahaman ini mereka peroleh dari mulut ke mulut di lingkungan sosialnya. Di samping itu, ada juga yang enggan berobat ke rumah sakit karena rasa malu dan tidak diizinkan oleh suaminya.

Pemahaman informan tentang etiologi (penyebab) penyakit kanker ini umumnya berdasarkan etiologi naturalistik yaitu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat alami. Tidak ada informan yang mengatakan penyebab kanker yang mereka derita karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat personalistik atau supranatural. Mereka mengatakan penyebabnya kanker itu karena mereka sering mengkonsumsi makanan yang menggunakan bahan penyedap rasa, keturunan, dan mengkonsumsi ayam potong yang mengandung hormon penyubur. Oleh karena itu, pengobatan tradisional yang mereka lakukan tidak ada yang dilakukan dengan teknik pengobatan supranatural.

Akan tetapi, pengobatan tradisional dalam pengobatan kanker pada penelitian tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada informan yang sembuh atau penyakitnya berkurang dengan pengobatan itu. Ada satu orang informan yang meyakini pengobatan tradisional ini bisa menyembuhkan kanker, jika pengobatan dilakukan dengan disiplin. Menurut dia kenapa tidak berhasil sembuh menggunakan obat tradisional tersebut? Hal itu karena dia tidak melakukan dengan disiplin.

Oleh karena, tidak ada yang berhasil sembuh dengan pengobatan tradisional ini, yang ada justru penyakitnya semakin berkembang, akhirnya semua informan kembali ke rumah sakit dan melakukan tindakan operasi dan kemoterapi. Melalui pengobatan rumah sakit ini ada informan yang mengatakan penyakitnya sudah sembuh. Tetapi ada di antara informan yang dapat dikatakan sudah agak terlambat karena penyakitnya sudah naik stadiumnya dibandingkan dengan pemeriksaan awal.

Selain itu, dengan pengobatan rumah sakit ada beberapa informan yang mengalami efek sosial yaitu: ada yang mengalami rasa minder dan ada juga yang mengalami penolakan dari suami. Rasa *minder* dan penolakan suami itu setelah ia menjalani operasi pengangkatan payudaranya.

Informan yang mengalami rasa *minder* ini membatasi diri untuk melakukan kontak dengan lingkungan sosialnya. Ia merasa tidak enak jika ada yang bertanya tentang penyakit dan operasi yang ia jalani. Sementara, yang mendapat penolakan dari suaminya itu akhirnya bercerai dengan suaminya. Informan yang diceritakan suaminya ini dapat menerima kondisi itu karena baginya kesehatan dirinya merupakan hal yang nomor satu dalam hidupnya saat ini. Jadi, efek sosial dari pengobatan rumah sakit ini yang ditemukan menjadi alasan keengganan dari informan untuk berobat ke rumah sakit. Mereka

merasa menjadi tidak sempurna lagi sebagai perempuan.

5. Perawatan dan Pengobatan Penyakit

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, secara antropologi perawatan kesehatan terbagi ke dalam tiga bentuk yakni perawatan kesehatan umum (*selftreatment*), kedukunan (*folk*) dan profesional (Kalangie, 1994). Sistem perawatan umum adalah suatu sumber perawatan yang lebih cenderung dilakukan dalam pengobatan penyakit yang dianggap ringan oleh penderita atau keluarganya. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan masyarakat lokal mengenai pengobatan utama yang harus dilakukan sebagai alternatif utama dan pembantu dalam perawatan kesehatan. Kemudian sistem perawatan kedukunan (sering dikenal dengan sistem perawatan tradisional) melibatkan peran serta dukun dalam pengobatan penyakit dengan memperhatikan etiologi penyakitnya, prevalensinya, dan jenis-jenis penyakitnya. Sedangkan sistem perawatan profesional adalah pengobatan yang melibatkan tenaga profesional atau lebih dikenal dengan kedokteran moderen.

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap informan penderita kanker payudara, ditemukan beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan oleh mereka. Pengobatan-pengobatan tersebut seperti kategori yang telah dijelaskan oleh Kalangie, pengobatan umum, kedukunan, dan profesional.

Pada penelitian ini informan memilih pengobatan umum berbeda dari yang dikatakan Kalangie. Mereka memilih pengobatan umum bukan karena penyakitnya dianggap masih ringan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada informan pada awal mengetahui mereka menderita penyakit kanker, mereka langsung memilih pengobatan sendiri dengan cara membuat ramuan. Hal ini dilakukan karena jika berobat ke rumah sakit mereka akan disuruh operasi. Sementara menurut informasi yang mereka terima dari keluarga, kerabat, tetangga, dan teman, apabila kanker itu dioperasi suatu saat akan kambuh lagi dan bahkan akan menjadi lebih ganas.

Ada sebanyak tujuh orang informan yang mengobati sendiri penyakit kanker yang dideritanya. Ramuan yang mereka buat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan air putih. Jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membuat ramuan terdiri dari kunyit putih, daun ekor naga, daun sirsak, dan benalu kopi. Jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan membuat ramuan ini tidak sama pada semua informan. Ada yang membuat ramuan dari daun sirsak saja (2 orang), ada yang menggabungkan daun ekor naga dan kunyit putih (2 orang), ada yang menggabungkan benalu kopi dan ekor naga (2 orang), ada yang menggabungkan kunyit putih, daun ekor naga, dan daun sirsak (2 orang), dan

yang menggabungkan semua jenis tumbuhan (1 orang). Semua ramuan itu diolah dengan cara direbus. Air rebusan itu yang mereka minum.

Selain mengobati dengan ramuan yang dibuat sendiri, ada juga informan yang berobat ke dukun yakni sebanyak empat orang. Keempat orang informan yang berobat ke dukun ini sebelumnya juga mengobati sendiri penyakitnya. Obat yang diberikan dukun adalah air putih yang dimantrai terlebih dulu dan ada juga yang berupa buah-buahan yang manis seperti salak dan apel.

Namun, semua informan yang melakukan pengobatan dengan menggunakan perawatan kesehatan umum dengan mencari ramuan sendiri dan perawatan kedukunan semuanya berakhir pada perawatan rumah sakit. Semua informan akhirnya melakukan operasi dan kemoterapi. Pengalaman informan yang melakukan perawatan sendiri dan kedukunan tidak ada yang berhasil sembuh. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni penyakit mereka semakin parah, yakni stadium penyakit mereka telah meningkat dibandingkan ketika awal mereka memeriksakan diri ke rumah sakit.

D. KESIMPULAN

Pengetahuan budaya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pengetahuan budaya menjadi pedoman hidup yang menuntun segala aktivitas manusia. Namun pengetahuan budaya manusia belum tentu dapat memenuhi semua aspek kehidupannya. Karena belum semua pengetahuan budaya manusia itu dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Masih ada keterbatasan pengetahuan tradisional dalam menghadapi semua masalah kehidupan manusia. Seperti pada penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan budaya penderita kanker belum memadai dalam merespon dan mengobati penyakit tersebut. Hampir semua informan yang pernah menangani penyakitnya melalui pengobatan tradisional yang berbasis budaya, akhirnya menyerah dan pindah ke pengobatan modern. Ternyata pengobatan tradisional yang mereka

jalani tidak benar-benar dapat menyembuhkan penyakit yang mereka derita.

Pilihan mereka dalam menanganai penyakit atau mengobati penyakitnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya informan. Di sini yang mempengaruhi adalah keluarga inti, keluarga luas, tetangga, dan teman. Umumnya mereka ini menyarankan untuk memilih pengobatan tradisional. Akan tetapi, dengan pengobatan tradisional itu tidak ada informan yang berhasil sembuh dari penyakitnya. Malah ada yang merasakan justru penyakitnya menjadi bertambah parah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penderita kanker yang berobat secara tradisional justru menghalangi dan memperlambat mereka untuk mendapatkan penanganan penyakit dengan baik.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPM Universitas Andalas yang telah bersedia mendanai penelitian ini melalui Dana BOPTN tahun 2017. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan FISIP Universitas Andalas yang telah memberikan rekomendasi agar penelitian ini bisa dilakukan. Selanjutnya terima kasih juga ditujukan kepada Pimpinan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Poli Penyakit Tumor dan Kanker. Kemudian, kepada semua informan yang telah bersedia dan memberikan waktunya untuk diwawancarai dalam penelitian ini. Tidak lupa juga terima kasih ditujukan kepada berbagai pihak lain yang telah berkontribusi dalam penelitian ini seperti mahasiswa sebagai enumerator dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Desni, F., Wibowo, T. A., & Rosyidah. (2011). Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku Kepala Keluarga Dengan Pengambilan Keputusan Pengobatan Tradisional Di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Riau. *Kesehatan Masyarakat*, 5(3), 162–232.
- Dyanti, G. A. R., & Suariyani, N. L. P. (2016). Jurnal Kesehatan Masyarakat DELAYING FACTORS IN BREAST CANCER PATIENTS TAKING EARLY, 11(2).
- Foster, G., & Anderson, B. G. (1986). *Antropologi Kesehatan* (1st ed.). Jakarta: UI-Press.
- Kalngie, N. S. (1994). *Kebudayaan dan Kesehatan: Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Pendekatan Sosiobudaya*. Jakarta: KBI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Stop Kanker*. Jakarta.
- Ketut, R. I., & Mulyono, N. (2004). Keterikatan antara karakteristik penderita kanker payudara dengan upaya pengobatan tradisional. *Meditek*.

- Kusuma, P. D., & Susilawati, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006 Jalur Reguler Yang Berisiko Terkena Kanker Payudara Terhadap Perilaku Sadari. *Keperawatan Maternitas*, 2(1), 12–19.
- Sanipar, T. A., & Yusuf, M. (1992). *Dukun, Mantra, dan Kepercayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Karya Grafika.
- Sciortino, R. (1999). *Menuju Kesehatan Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sembiring, S., & Sismudjito. (2015). Pengetahuan dan Pemanfaatan Metode Pengobatan pada Masyarakat Desa Suka Nalu Kecamatan Barus Jahe. *Perspektif Sosiologi*, 3(1), 104–117.
- Supardi, S., & Nurhadiyanto, F. (2003). Penggunaan Obat Tradisional Buatan Pabrik, 2(4), 135–140.
- Tuckett, D. (1995). Menjadi Seorang Pasien. In Fauzi Muzaham (Ed.), *Memperkenalkan Sosiologi kesehatan* (1, p. 113). Jakarta.
- Winkelman, M. (2009). *Culture and Health: Applying Medical Anthropology*. San Fransisco: Jossey – Bass A Wiley Print.



NGEMPON: THE ROLE-SHARING STRATEGY OF HINDUS AND MUSLIMS IN BHUR BWAH SWAH TEMPLE, KARANGASEM, BALI

I Nyoman Yoga Segara^{1*}

¹ Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Bali, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 28 April 2019
Review : 19 August 2019
Accepted : 19 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Ngempon; Culture Strategy; Role-Sharing; Bhur Bwah Swah temple

CORRESPONDENCE

*E-mail: yogasegara@ihdn.ac.id

A B S T R A C T

This article is the result of research on how Hindus and Muslims in Tabuan hill, Karangasem could live side by side in harmony. They showed it by becoming pengempon at Bhur Bwah Swah temple. Unlike in general, Muslims also take part in concurrently as pengempon. They actively maintain and carry out the ceremony every six months. The strong will of Muslims to be involved cannot be separated from their historical awareness of the past when they were welcomed and placed in Islamic villages by the king of Karangasem Kingdom. Furthermore, rites are a tool for them to re-dialogue past history to fulfill their needs. It is further used as guides of both religious people to maintain social solidarity. Symbolically, Muslims feel to be an inseparable part of the lives of Hindus since there is a santren in Bhur Bwah Swah temple. It is a sort of place where they perform prayers and celebrate saparan day every year. This research was conducted with a qualitative approach through an interview, observation, and document study techniques and utilize practice theory, precisely concerning the habitus developed by Pierre Bourdieu.

A. INTRODUCTION

Pura (temple) is the name of a holy place for Hindus in Indonesia, although there are additionally other names, such as Kuil for Hindus from India ethnic, Balai Basarah (Dayak Kaharingan in Central Kalimantan), or Candi (Java). Etymologically, *pura* is originated from Sanskrit, *pur*, to the locality of the ethnic area it dawns from. Sanjaya (2008) and Subagiasta (2008) distinguished temples based on four sorts of characters, first, family temple. This kind of temple is worshiped by families bound by blood and descendants based on *purusha* lines (Ind: male). There are quite numerous names of family temples, including *Pura kawitan*, *Pura dadia*, *Pura panti*, and *Pura paibon*. Second, territorial temple. They are based upon the boundaries of the area where people live. In Bali, each traditional village has some temples that are shared by the community based on the area of residence which consists of *Pura desa*, *Pura puseh*, and *Pura dalem* or known as *Pura kayangan tiga*. Third, functional temple, namely a temple that is functioned by Hindus who have similar professions or jobs, such as fishermen, traders, or farmers. Fourth, public temples.

Hindus can visit without distinguishing the origin of the family, traditional village, work, as well as area of origin. Further, each type of *Pura* above has *piodalan* or *pujawali* (Ind: temple festival) which is held every 210 days or every six months.

Functionally, Sanjaya (2008) and Subagiasta (2008) classify temples into two, *Pura kahyangan tiga* which is built in a village as a holy place to worship God and His manifestations, particularly Sanghyang Tri Wisesa or Tri Murti and *Pura Kahyangan Jagat* located throughout Bali. This temple is functioned to worship God and His manifestations as the eight guardians of directions. Stuart-Fox (2010: 65) asserts that temples in Bali hold a structure in reliance on three organizational forms, namely locality, ancestry, and irrigation. Though, it seems that Stuart-Fox's opinion has been accommodated into the characteristic of the temple as specified formerly.

Nevertheless, from the characteristic and function of the temple as mentioned above, it eternally has *pengempon*, a community group or Hindus who have right and obligation to take care and hold sacred ceremonies (Stuart-Fox, 2010). *Pengempon* is also called *penyung-sung* or

pengamong. For instance, *pengempon* of the family temple is a large family of the temple. *Pura kayangan tiga* (community in the customary village concerned), *Pura swagina* (community group based on profession) and public temple (community in province and general Hindus). To be able to take care of temples and hold sacred ceremonies, *pengempon* needs a large amount of money so they will habitually maintain the *pelaba* land (Ind: land owned by the temple) to make it productive. In addition to the costs obtained from managing the *pelaba* land, they are further taken from individual contributions and *punia* funds (Ind: non-binding voluntary donations) as well as a donation from *penyungsong*.

Pengempon of a temple generally comes from community groups that possess similar identities and notably Hinduism. Though, in Bhur Bwah Swah temple located on Bibis hill, further called Tabuan Hill, Banjar Peninggaran, Seraya Village, Karangasem District, Karangasem Regency, there are unique and compelling facts regarding *pengempon* since they dissent from prevailing principles. First, as a public temple, Bhur Bwah Swah should only own sacred buildings for Hindus, yet, here, there is a place of worship for Muslims, specifically a small mosque. Muslims in Tabuan hill named it *santren*. Second, *pengempon* of Pura Bhur Bwah Swah is reckoned to be a Hindu community group in Karangasem. However, this temple is molded by Muslims. Third, *pidalan* or *pujawali* which commemorates on the full moon of *Karo* (July), Muslims celebrate *saparan* on Wednesday which is adjacent to the dark moon (a month after full moon). Even every three years, the *pidalan* and *saparan* will come together. 2018's festivity was a big celebration, both were held simultaneously. This three uniqueness is appealing to study by exploring the meaning and strategy of *ngempon* for Hindus and Muslims at Pura Bhur Bwah Swah.

The theoretical perspective encouraged to investigate this problem was a theory of practice, one of them was habitus as proposed by Bourdieu (in Siregar, 2016) for which he referred to as a form of historical epistemology in the framework of revealing the practical relevance of a discourse. As an outcome of history, habitus will design practice, both for individuals and groups, in line with the scheme contained by history. Habitus is present to provide guarantees for past experiences stored in each organism in the form of schemes of perception, thought and action, primarily all formal rules and express norms to ensure the suitability of practices over time (see also Bourdieu, 1977, 1984).

Habitus is used by Bourdieu to ensure that there is a coherence of relations between the concept of society and actors, a connection between individuals and collectivities that allows the development of actors' social production

theory and logic of action. Furthermore, Bourdieu said that socialization enhanced a form of integrating class habitus that resulted in individual ownership of the class by reproducing the class as a group that had similar habitus. What is happening at Tabuan hill must also be recognized as the work of Bourdieu's concept of habitus. Within hundreds of years, how they collaborated with Hindus in Tabuan hill was conducted through habituation and continuous socialization thereby social reflexes to maintain harmony could occur unnoticed. This is one of the most important research focuses to be revealed. Thus, habitus can be stated as cultural unconscious which is a historical product since humans were born and interact in social reality. That is, habitus is not nature not merely inherited from biological and psychological science but is the result of learning through experience, perform activities, and community education in the broadest sense.

B. METHOD

To reveal primary and secondary data, this research applied a qualitative approach through an interview, observation, and document study techniques. Considering that Pura Bhur Bwah Swah has a wide area and effortless access to be observed. This research was greatly helped by the informants. As for the key informants (Mr. Mangku Kembar and Mr. Sahrudin) were selected purposively and interviewed since they did not only understand but also undergo the life process in the field. This research was supported by additional informants from the members of the Karangasem royal family as the history of the existence of Muslims living in Tabuan hill and being *pengempon* of the temple, hence, they cannot be secluded from the role of the kingdom in the past.

This research is expected to be able to attain unique occurrences and render them into narratives that depart from various events and activities, including how the subject's position in social, economic, political, and cultural frames, as with ethnographic-based anthropological research that aims to enrich the sensitivity of researchers, including their experience and awareness (see Spradley, 1979). The source data of the subject explored through interviews and observations was an analytical tool with the intention of capturing the perspective of the subject, and its association with life. Nonetheless, subjects are those who are aware of their own vision and world, as similarly stated by Bruner (1986) who declared that the anthropological approach more focuses on how subjects view their own experiences, including how they seek to understand the world as a subject who experiences and sees it with their own perspective. Research under the theme of tolerance is not something that is obvious to

describe as what often appears on the surface is distinctive from the hidden. It then became prominent since the researcher had the opportunity to see how the expressions of people encountered so that their social experiences (Hindus and Muslims) in their social connections has a meaningful focus to explore.

Methodologically, this research was inspired by the triad dialectics concept of Berger and Luckman (1966) which states that there are three processes in studying the identity construction in a group and society, namely respecting externalization, objectivation, and internalization which shows that the meaningful and objectivated structure of knowledge (nomos) in reality is to explain individual actions. Another concept that is methodologically valuable to use is symbolic interaction from Blumer (1969) which emphasizes that human social actions generate concepts concerning thoughts, interpretations, actions, role-taking, communication, and action mapping so that they act through words and signals as the manifestations of action of intergroup social.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Muslims in Tabuan Hill: from the Wetu Telu Community to the Five Times of Islam

Karangasem is one of the eight major kingdoms in Bali. The entry of Islam to Karangasem could not be sequestered from the entry of Islam into Bali, notably when the Kingdom of Gelgel came to power. Even in this kingdom, for the first time there was the Gelgel village which had a population of Muslims (Parimartha, et al., 2012: 35; see also Fadillah, 1986, 1999; *Jelajah Magazine*. Issue 08/Yr. 1/March 2010; 12th Edition /Yr. 1/July 2010; Issue 18th/Year 2/January 2011). In his paper, Agung (1979: 2, 3) tried to discuss the re-entry of Islam into Karangasem from various regions, including the motives behind it. This interest in rereading history had been done by various experts (see Tim, 1997/1998: 7-13; Mashad, 2014: 170-178; Kartini [in Basyar, 2016: 101-131]). According to Agung (1979: 3) who is the royal *pinisepuh* of Karangasem, the history of writing concerning the entry and development of Islam in Karangasem is still inadequate, yet the weakness is reinforced by highly valuable historical relics such as old tombs, ancient inscriptions, and mosques. There are at least four sacred tombs that were believed to be the case for the arrival of Islam, namely the tomb of Sayid Abdurachman in Buitan Manggis, the tomb of Raden Kyai Jalil in Saren Jawa Budakeling, the tomb of Datu Mas Pakel in Ujung, and the tomb of Datu Seleparang in Tanculung Kecincang.

Agung (1979: 3) states that the written source which has been used presently as a

reference is an inscription containing "word" and "*piteket*" (Ind: advice) which provides information on the placement of Sasak people in Karangasem. The ancient mosque is considered as a guide to the history of the existence of Sasak people in Karangasem in Wijaya's research (1986: 55-56) includes Baiturrahman Mosque in Kecincang, and other ancient mosques located in Ujung, Karang Langko, Nyuling, Subagan Dangin, and other Islamic villages. Some of the ancient mosques even hold *bale kulkul* (Ind: a pavilium drum, the *kentongan* will ring out for festival) and *bale banjar* (Ind: a traditional social function hall, it usually does for meeting), and a pulpit in a full mosque completed with Balinese carvings. Even the Mosques have two or three *meru* (Ind: a multiple tiered roofs temple architecture). According to Wijaya (1986), this fact shows that the link between Hinduism and Islam has been established for a quite long time. The Karangasem Kingdom is estimated to have a very large influence in building peaceful relations between Hindus and Muslims and paying close attention to Muslims at that time. Kartini (in Basyar, 2016: 105) mentions that the kingdom once helped found the Ampel Mosque which is located 500 meters from the Puri of Karangasem Kingdom.

The kingdom does provide a place to live for Muslims. Mashad (2014: 170) stated that there were around 26 Muslim villages spread out in Karangasem regency. Only one Muslim village that is deemed to be the Javanese origin promptly occupies the Saren Java Village in Budakeling, the rest are Sasak tribal Muslims, Lombok. In the historical record, the Sasak people were brought to Karangasem when the Karangasem Kingdom succeeded in conquering the Kingdom of Pejanggik which at that time controlled the Central Lombok, although this conquest according to Mashad (2014: 170), had taken place long before, namely when Dalem Watuenggong ruled the Gelgel kingdom in Klungkung.

Sasaks who were brought to Karangasem at first were the followers of *Wetu Telu*. Aziz (2009: 243) affirms that there are two styles of Islam emerged in the Sasak community in Lombok, namely *Wetu Telu* Islam and Five Times Islam, although this division is not fully accepted. *Wetu Telu* is a tradition and is not a religion, mainly as a local religion declared by Jahroni and Darmadi (2014). So that the term *Wetu Telu* Islam is regarded as inappropriate. Aziz and Zuhdi (2006) named it a community which in the study of Rasmianto (2009: 138) is mostly isolated and backward rural communities in life. They generally live in the northern and southern parts of the island of Lombok, and still survive in the village of Bayan, West Lombok Regency and are considered the center of the *Wetu Telu* civilization. Besides, Zuhdi (2006: 72) who is specialized in researching this community in

Bayan Village tries to simplify these two variants as a plurality of diversity expressions by categorizing *Wetu Telu* Islam as traditional religion and Five Times Islam as a divine religion. Though, according to him, this category is not a separate one from each other.

Aziz (2009: 243-244) tells the term *Wetu Telu* is oftentimes confused with matching it as "time" even though according to this community, the word "*wetu*" originates from the word "*metu*" which means "appears" or "comes from". The meaning of the word *wetu* reveals a belief that all living things appeared (*metu*) through three kinds of reproduction created by God, namely *menganak* (giving birth) like humans, *menteluk* (laying eggs) like birds, and *mentiuik* (breeding from seeds) like fruits. The *Wetu Telu* community believes in God who created Adam and Eve as the first humans. Rasmianto (2009: 142, 146) asserts that this community has a *telu* (three) view of life as if the number is a sacred number. The term "three" in *Wetu Telu* has nothing to do with religious rituals but an understanding of the origin of human stories.

The existence of *Wetu Telu* Islam was deemed to have characterized the components of Sasak Islam in Lombok which is unprecedented, even today. Jamaluddin (2011: 64) illustrates the face of Sasak Islam that is peaceful, friendly, and tolerant. This character has become the spirit of Islamization of Lombok. The spread of tolerant even surprisingly accommodating Islam, the belief of *vis a vis*, practices of religion and local traditions frequently make Islam in Lombok viewed as syncretic Islam. This aspect is influenced by the history of the entry of Hinduism and Buddhism, long before Islam developed in Lombok. Jamaluddin (see also Rasmianto, 2009: 139-141) even suspected that a lot of speculation had grown that stated that *Wetu Telu* Islam was a Majapahit religion (Hindu-Buddha) that had been colored by Islamic teachings since the Javanese who brought Islam to Lombok still carried Javanese Hindu elements.

This view is further confirmed by the writings of Bartholomew (2001: 96) which states that *Wetu Telu* beliefs originated from numerous sources, namely Hindu-Majapahit, local traditions, and the influence of Balinese people who ruled Lombok from 1740-1894. As a result of the Hindu-Buddhist influence, Zuhdi (2006: 82) remarked that perhaps the native religion of Lombok people is *Sasak Boda*, referring to the word Buddha. However, the Islamization of Lombok blown up by the defeat of Majapahit and brought Islamic traders to Eastern Indonesia including Lombok, in the end, was slowly but surely made the *Wetu Telu* Islam undergo changes. Aziz (2009: 245-246) assumed that as the development of Islam as the majority religion made this community prefer Islam as its religious identity. Various coaching and contributions of *tuan guru* and scholars, the *Wetu Telu* com-

munity began to implement Islamic teachings perfectly, notably the Five Pillars of Islam.

The Sasak people who adhered to *Wetu Telu* and lived in Islamic villages since the 16th century in Karangasem were very close to nature and made local wisdom and custom as a way of life. According to the informant Mr. Sahrudin, a takmir mosque or marbot, if there are religious or customary activities in the Puri Kingdom, Sasak Muslims will regularly *ngaturang ayah* and share their garden produce. Vice versa, if Muslims celebrate a big day, one of them is Eid al-Adha, the kingdom also often donates sacrificial animals.

Despite since independence, chiefly due to the formation of religious leaders, religious assemblies, religious organizations, and the role of the Ministry of Religion of Karangasem Regency, they are now formally no longer adhering to *Wetu Telu*, Muslims in Tabuan hill remain to carry out the essence of *Wetu Telu* without banging it against Islam they are currently in. According to informant Mr. Sahrudin, all Muslims in Tabuan hill since the 1980s have adopted Islam Five Times and are practicing obediently the Five Pillars of Islam. However, they continue to carry out some of the customs and cultures adopted in Lombok, such as *maulidan* and large meals together, which are continued in Tabuan hill through the *saparan* and *megibung* ceremonies. The establishment of Masjid Al-Ikhlâs and the great contribution of H. Nurudin, a donor as well as a figure of Arab descent who migrated from Lombok and were well received by the kingdom has brought the progress of Muslims in Tabuan Hill and its surroundings. Further appreciation went to the role of H. Nurudin, this mosque was visited by many Islamic congregations from abroad, but at the same time they did not refuse to establish kinship with Hindus even becoming the temple *pengempon*, willing to worship using Balinese traditional clothes, or at least using *udeng* or *destar* (Ind: Balinese headgear) and cloth with *saput* (Ind: cloth tied to the waist).

Now, according to the informant, Sahrudin, followers of Islam in almost all Karangasem, especially in Bukit Tabuan, have embraced Islam by praying five times a day and carrying out the pillars of Islam well. This change is inseparable from their existence outside Lombok and intensive coaching is also carried out by scholars, Muslim leaders and the role of the Ministry of Religion, particularly the Office of the Ministry of Religion in Karangasem Regency. Over time, there are no more *Wetu Telu* Muslims around Pura Bhur.

2. Santren and Bhur Temple: "One Bond, Two Beliefs"

Bhur Bwah Swah temple occupies three locations in Bisbis hill, Seraya, Karangasem. Each temple was then established, namely Bhur

temple at the bottom, Bwah temple (center) and Swah temple (top). All of these three temple areas are called Bhur Bwah Swah temple and become a unit that cannot be separated. To reach one temple to the next temple, it takes a trip to climb the terrain which is considered difficult because it is still a dirt road and there is no steps access. Climbing becomes even more severe if the rainy season hits. By the local community, Bisbis hill is a twin of Lempuyang hill which also has a temple with the identical structure, specifically the Kahyangan Jagat Lempuyang Temple. Both of these temples are believed to be the two major pillars that guard Karangasem and Bali in general.

As the name implies, this temple is a symbol of the *triloka* (Ind: three realms), namely the under-world (*bhur loka*), middle-world (*bwah loka*), and upper-world (*swah loka*). Three realms are a holistic concept and represent an unbroken cycle. To mark the strength of each spot, a temple is built, namely in the lower or hillside with Bhur temple, middle (Bwah temple) and upper (Swah temple). Considering that the three temples are a symbol of the three realms concept, all three are united under the name Bhur Bwah Swah temple. Hindu worshipers will worship in stages starting from Bhur temple, then Bwah temple, and finally Swah temple. If they cannot afford to travel with such a heavy field, Hindus will usually pray only in Bhur temple.

Bhur Bwah Swah temple is associated as Puncak Sari Gunung Manik Kembar. Furthermore, this is further termed Bisbis temple since it is at the top of Bisbis Hill, while Bhur temple is named Bhuar Bhuaran temple, Bwah temple as Pasar Agung temple and Swah temple as Puncak Sari Temple Gunung Manik Kembar. However, other names are modified because first, the location or place of each temple has rendered the concept of the Three Realms. Second, the name symbolizes the sacred concept subsists in Hinduism, namely the Three Realms with sections.

There is a small *langgar* behind the Hindu holy building in Bhur temple. It was the topic and discussion in this research. Muslims who inhabit in the village of Tabuan hill and around Bhur temple refer to the *langgar* as *santren*. According to the informant Mr. Sahrudin, said *santren* had nothing to do with the term *pesantren*, but the name was proffered by the Sasak Muslims. *Santren* is only formed *bebaturan* (Ind: a pile of stones) which is placed at the same area with Bhur temple, not outside the *penyengker* (Ind: a parapet) that departs the temple from the surrounding environment. Initially, Muslims required to make the *santren* a separate building and erected outside the *penyengker* so that it would not be confused with temples. Though, based on mutual agreement between figures from Hindus and Muslims, the *santren* were left alone in one *penyengker*.

The agreement was taken then, thus Hindus and Muslims could continue to be united because if it was built outside Bhur temple it would suggest a separation between the two religions even though they had been united both physically and non-physically. The physical structure of the *santren* or *langgar* is evident and heretofore it has been maintained despite it is only in the form of *bebaturan*, but this evidence is symbolic to designate that there has been a very strong touch of Islam. The identical fact was found by Yusuf (2014) and Segara (2018) in Penataran Agung Dalem Jawa Temple, Bunutin, Bangli or better known as Langgar temple. Physically, there is no *langgar* found in the true meaning of Langgar temple, but the main *palinggih* building resembles a *langgar* with nuances of Islamic architecture in Java. The similar form can additionally be read in Djuana's research (2018) roughly the Mecca Temple in Banjar Anyar, Poh Gading Village, Ubung Kaja, Denpasar, where only the touch of Islam is represented in certain parts of the temple building.

There are particular reasons why *santren* in the temple *penyengker* are not created magnificently. According to the informant Mr. Sahrudin, they exist because first, the *santren* were bodily present still and this was enough to be a figure that there is *langgar* in the *penyengker*. Secondly, the construction of *santren* has not become comprehensive *langgar* to avoid contradictory assumptions. Actually, it is not possible to have two buildings at the same size in one *langgar*. According to the informant, this agreement was necessitated so as not to become a delicate issue. Third, as a minority, they grant awards to Hindus who are the "owner" of the Bhur Bwah Swah temple. Fourth, even if it was not built, Muslims can still offer prayers at Bhur temple which are conducted outside the *penyengker*. Fifth, the *santren* does not require to be developed anymore for Muslims based on permission and agreement with Hindus for they have established a large mosque called Al-Ikhlâs that stands majestically about 500 meters before the Bhur temple. This mosque is a pride of Muslims and Hindus in Tabuan hill Village because, in addition to being a symbol of unity, many worshipers also visit not only from remote areas of Bali and some regions in Indonesia, but from abroad, such as Malaysia, India, Pakistan, and Bangladesh.

3. Ngempon Jointly as a Role Sharing Strategy

Ngempon jointly can be accomplished with various actions. The most obvious form done by *ngaturang ayah* when there is *piodalan* in the temple. Considering that the *piodalan* temple falls every six months, the *pengempon* will be busy preparing it even for a month before, depending on the level of the ceremony. There is a *piodalan nadi* for it is carried out on a large scale, further a

piodalan alit, which is carried out simply. The size of the *piodalan* follows the level of ceremonies or means of offering, namely *nista* (small level), *madya* (medium level) and *utama* (major levels). *Piodalan* called *nadi* or *alit* is delimited by these three levels.

The three levels of the ceremony did not diminish the meaning of the ceremony and also did not conquer the social activities of the temple *pengempon*. Likewise, the *pengempon* of Hindus and Muslims in Bhur temple. Based on the results of interviews with informants, and strengthened by research data conducted by Seken (2017: 25), the temple *pengempon* is Hindu *krama* (Ind: Hindu residents) from Banjar Adat Peninggaran as many as 105 families and Islamic families as many as 90 families. However, if calculated the entire *pengempon* of Bhur Bwah Swah temple which covers 37 Indigenous Banjar in Seraya Village, it can reach 397 families or with a population of about 228.635 people.

Mr. Sahrudin's information was confirmed by Mr. Mangku Kembar, a stakeholder in the Bhur Bwah Swah temple. According to him, when *piodalan* came, Muslims have continuously been conducting huge efforts. They did not only distribute the product of the garden but also participated in the celebration, although they did not have to be inside *jeroan* of the temple (Ind: the inner sanctum). When analyzing harmony in Bali, the *ngempon* momentum in the view of Halimatusa'diah (2018) is also considered as a huge cultural capital. Some research on the relationship between Hindus and Muslims in Bali shows a similar pattern (Suwindia, et al., 2012; Muchtar, 2013; Pageh, et al., 2013; Subagia, 2014; Karim, 2016; Segara, 2018, 2018).

Based on research data on the entry and survival of Sasak Muslims in Bukit Tabuan as well as their ability to live together, carry out rituals both *odalan* and *saparan* and become *pengempon* together with Hindus in Pura Bhur, it looks clear that sharing roles in a pluralistic society can occur structurally and culturally. Structurally, in the Indonesian context, the function of both formal institutions such as the government (the Ministry of Religion) accommodates to support the survival of religious people who are full of tolerance. The Ministry of Religion even initiated the formation of the Center for Religious Harmony at the central level, while the Forum for Religious Harmony at the provincial and district/city levels (Chapter III Article 8-12 PBM Number 9/8 of 2006), in Hakim's research (in Hakim, 2013; Reslawati in Segara, 2017). Harmony between Hindus and Muslims at Bukit Tabuan is also established because of the cooperation of all parties, including religious institutions, such as the Parisada Hindu Dharma (PHDI) and the Indonesian Ulama Council (MUI), as well as the role of local governments from the village and

town levels, as well as the sub-districts and districts Karangasem. Culturally, there is a shared awareness to start from each individual. This condition can occur because Muslims as a minority, peculiarly those living in Muslim villages feel accepted and protected by the majority Hindus in Karangasem.

Thus, Muslims in Tabuan hill who although somewhat minority and seem to "unite" with other Hindus do not inevitably eliminate their identity as devout Muslims because, at the meantime, they have the capacity to do what Piliang said (in Suputra, 2006: 75) as transformative multiculturalism, namely open cultural exchange, crossing of norms and values, fusion of boundaries, and eclecticism in various forms of social, political, and cultural expression. Deeper, the seemingly sloping atmosphere of Hindu and Islamic relations on Tabuan hill can be interpreted as their ability to play cultural strategies by opening up spaces of expression and ensuring that everyone can contribute, notably in order to reduce the dividing barriers between them.

4. Ngempon Jointly: Adaptation, Habitus, and Collective Awareness

Based on historical awareness of the value of inter-group unity between Hindus and Muslims, they have been perpetually active, including being creative in carrying out common norms made in the past. Informant Mr. Sahrudin revealed that their existence of the past remained to be told to the younger generation. Oral history is a way for them to constantly see that their existence in the present cannot be sequestered from the past. *Piodalan* every six months and celebration of *saparan* every year in the Bhur temple is utilized as a tool to pump up historical awareness from the first generation to the present.

The way Hindus and Muslims in Tabuan hill interpret their history proves Bahktin's thesis (in Rudyansjah, 2009: 42) which asserts that the existence of life is as a process of dialogue between the perpetrator with himself and "the other" in a broad sense, which includes not only other people but also culture, history, and environment around him. Re-reading the cultural strategy carried out by Hindus and Muslims, there has been a continuing transformation thereby their presence can remain to be deciphered actively. The sense of harmony that they live cannot be perceived as static but also can continue to change according to the context of the situation. Consequently, they must therewith advance to care for them intensely through various motions. One that stands out is *ngempon* jointly and the hallmarks of this culture have become a shared moment that unites the differences between them.

What is interesting, as said by informants both Mangku Kembar from Hindus and Sahrudin

from Muslims is the adaptive ability and response of Muslims to continue to be able to live together for a very long period of time with the majority Hindus in Bukit Tabuan. The informant Mangku Kembar said when the *odalan* would arrive, they had already prepared themselves to take part in the *ngayah* activities and donate their agricultural products. This was also recognized by one of the figures from Puri Karangasem Kingdom who stated that since the beginning of the arrival of Muslims, the castle had always been involved in various activities. Even the *puri* placed them around Bukit Tabuan. Over time, they are now not required to go to *Puri* if there are activities but still establish good relations with *Puri* and Hindus in general. When referring to Bourdieu's practice theory, one of them through habitus, the high-grade relations that occur do not appear suddenly. There is a set of consecutive socialization carried out by these two religious people, although it must be admitted that Hindus are regarded as "taste of culture" to be shared together as a guideline. In his study, Bourdieu (1979) declares that tastes, nevertheless, he has revealed a unique representation system to certain social groups that define its position in society. However, this taste of culture, imitation, and self-stabilization as a response is a way for everyone to live together. Muslims in Tabuan hill who have realized their existence use self-stabilization to remain to be accepted by Hindus. For instance, in conducting *Ngempon* they use traditional Balinese clothes or speak Balinese fluently. A similar strategy is further carried out by Muslims in Bugis Village, Serangan, Denpasar (Segara, 2018) who use the Balinese language to communicate with Balinese, yet they use Bugis language when communicating with Muslims in their villages. The Sasak Muslims in Sindu village, Gianyar can only use the Balinese language as a daily social language and even more interestingly they join in the *banjar adat* membership (Segara, 2018). The various strategies implemented may be ethnically based, but entering religious relations sometimes must start with ethnicity, one of which is through language. The kinship and brotherhood between the Balinese are Hindus and the Sasaks are Muslims in Karangasem seem remarkably solid. They create past history to be an opportunity to survive and perform religious, customary, and cultural activities as a source of value to maintain common norms. *Ngempon* jointly has grown as a medium to reflect on themselves and find out their similarities with others. This state is somewhat comparable to the view of Durkheim (in Saifuddin, 2011: 74) which affirms that religion is the center of culture as it has the greatest power that controls all aspects of human life. Even more decisively, Geertz (in Saifuddin, 2011:

74) called religion not only part of the culture but also the core of culture. As a culture core, religion becomes a life guide, determining the direction and accuracy of life. Without realizing it, Hindus and Muslims through *ngempon* activities have not only made it a mean to run the religion but also showed their solidarity as a community. Regarding this fact, it can be linked to the view of Durkheim (in Saifuddin, 2011: 29) who stated that fundamental solidarity of a society is formed and maintained by the existence of a system of shared values that have historically been built through tradition. The value system can control the behavior of citizens in a certain direction and unite it in diversity. That unifying power is what Durkheim terms a collective representation. *Ngempon* jointly is a tradition that is particularly powerful to evolve and maintain harmony and tolerance between Hindus and Muslims in Tabuan hill.

D. CONCLUSION

N*gempon* is a social-religious activity carried out by Hindus at a temple they tempted. But it is different from *pengempon* in Bhur Bwah Swah temple who is carried out jointly by Hindus and Muslims. Both of these religious communities can share their roles very well. There are numerous principal reasons why this gathering can be taken mutually, even though they are separated by different beliefs, namely first, Muslims brought by Karangasem Kingdom are adherents of *Wetu Telu* but it has been remodeled into Islam in global as the formation of ulemas and the Ministry of Religion Office. Secondly, the *santren* or *langgar* which is settled inside the Bhur temple has converted a very solid binding between Hindus and Muslims, and that is manifested from Hindu ceremonies and *saparan*. Third, Hindus and Muslims for hundreds of years succeeded in making *ngempon* as a cultural strategy to share roles proportionally according to their capabilities. Fourth, a joint engagement between Hindus and Muslims can be deciphered as a way for Muslims to adapt and respond to their existence, both because of history and life in the present.

E. ACKNOWLEDGMENTS

The author would like to thank Mr. Ahmad Saleh as the faithful gatekeeper during the study, as well as Mr. Mangku Kembar and Mr. Sahrudin as the key informants.

REFERENCES

- Agung, A.A.G. Putra. (1979). "Sejarah Masuknya Islam di Karangasem Bali". *A Paper of National Seminar III*. Universitas Udayana. Page 1-18.
- Aziz, Ahmad Amir. "Islam Sasak: Pola Keberagaman Komunitas Islam Lokal di Lombok". *Millah Journal*. Vol VIII No. 2 February 2009. Page 241-253.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, New York.
- Bourdieu, Pierre. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1984). *Distinction*. Cambridge: Polity Press.
- Bortholomew, John Ryan. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Translated by Imron Rosyidi. (2001). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bruner, Edward. (1986). *Experience and Its Expressions* dalam Bruner (ed) *The Anthropology of Experience*. Chicago: University of Illinois.
- Blumer, Herbert. (1969). *Symbolic Interaction*. New York: Prentice Hall.
- Djuana, I Nyoman dan Ni Made Surawati. "Pura Mekah di Banjar Anyar Desa Poh Gading, Ubung Kaja, Kota Denpasar (Analisis Struktur, Historis dan Fungsi)". *Widya Wretta Journal*. Vol. 1 Nomor 1, April 2018. Page: 10-23.
- Fadillah, Moh Ali. (1986). *Makam-Makam Kuno di Pulau Serangan dan Beberapa Makam di Kabupaten Badung, Bali. Suatu Kajian Arkeologis*. Denpasar: Skripsi, Universitas Udayana.
- Fadillah, Moh Ali. (1999). *Wisan Budaya Bugis di Pesisir Selatan Denpasar. Nuansa Sejarah Islam di Bali*. Jakarta: The Ministry of Education and Culture, National Archaeological Research Center.
- Halimatusa'diah. "Peranan Modal Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama di Bali". *Harmoni Journal*. Vol. 17 No. 1 Januari-April 2018. Page 43-65.
- Hakim, Bashori A. "Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama" in Bashori A. Hakim (ed). (2013). *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama*. Jakarta: The Religious Life Research and Development Center, Development Research and Training Agency of the Ministry of Religion.
- Jahroni, Jajang dan Dadi Darmadi. "Agama/Kepercayaan Islam Wetu Telu di Bayan, Lombok Utara (NTB)" in Suhanah (ed). (2014). *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*. Jakarta: Center for Religious Life Research and Development, Research and Development Agency, Ministry of Religion.
- Jamaluddin. "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XVI-XIX)". *Indo-Islamika Journal*. Volume 1 No. 1, 2011/1432. Page 63-88.
- Karim, M. Abdul. "Toleransi Umat Beragama di desa Loloan, Jembrana, Bali (ditinjau dari Perspektif Sejarah)". *Analisis Journal*. Volume XVI, No. 1, June 2016. Page: 1-32.
- Kartini, Indriana. (2016). "Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Muslim Karangasem" in *Masyarakat Muslim Bali di Klungkung, Karangsem dan Bangli* (editor Hamdan M. Basyar). Yogyakarta: Calpulis.
- Laporan Napak Tilas Majalah Jelajah. "Segitiga Emas Dakwah Islam Pulau Dewata". *Jelajah Magazine*. Edition 08/Year. 1/March 2010.
- Laporan Napak Tilas. "Jejak Emas Islam Ujung Timur Bali. Benteng-Benteng 'Nyawa' Puri Karangasem". *Jelajah Magazine*. Edition 12/Year. 1/July 2010. Page 04-09.
- Laporan Napak Tilas. "Tak Ada Kudeta terhadap Kerajaan Bali". *Jelajah Magazine*. Edition 18/Year. 2/January 2011. Page 04-09.
- Mardotillah, Mila dan Dian Mochammad Zein. "Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, dan Pemeliharaan Kesehatan". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. December 2016 Vol. 18 (2): 121-133.
- Mashad, Dhurorudin. (2014). *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muchtar, Ibnu Hasan. "Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Angantiga, Petang, Badung, Bali)". *Harmoni Journal* Vol 12. No. 3 September-December 2013. Page 136-152.
- Munandar, Agus Aris. (2005). *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke 14-19 M*. Depok: Komunitas Bambu.
- Parimatha, I Gede, dkk. (2012). *Bulan Sabit di Pulau Dewata. Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*. Yogyakarta: CRCS.
- Pageh, I Made, Wayan Sugiarta, Ketut Sedana Artha. "Analisis Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam, Untuk Menyusun Buku Panduan Kerukunan Masyarakat di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 2, October 2013: 239-248.
- Rasmianto. "Interrelasi Kiai, Penghulu dan Pemangku Adat dalam Tradisi Islam Wetu Telu di Lombok". *el-Harakah Journal*. Vol. 11, No. 2, Year 2009. Page 138-154.

- Reslawati. "Hindu di Bali: Keseimbangan Hidup melalui Agama, Budaya dan Adat (Studi pada Klan Pura Keluarga di Pura Kawitan Dalem Pande Majapahit di Denpasar)" in I Nyoman Yoga Segara (ed). (2017). *Dimensi Tradisional dan Spritual Agama Hindu*. Jakarta: Research Center for Community Guidance on Religion and Religious Services, Research and Development Agency and Education and Training Ministry of Religion.
- Rudyansjah, Tony. (2009). *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan. Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sanjaya, Putu. (2008). *Acara Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2011). *Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Segara, I Nyoman Yoga. "Pura Langgar: Representation of Hindu and Islamic Relation in Bunutin, Bangli". *Proceedings of International Seminar Bali Hinduism, Tradition, and Interreligious Studies*. Universitas Hindu Indonesia, 2018. Page 185-191.
- Segara, I Nyoman Yoga. "The Cultural Treasures of Kampung Bugis in the Customary Village of Serangan, Denpasar". *Journal Heritage Nusantara*. Vol. 7 No 1, 2018. Page. 94-118.
- Segara, I Nyoman Yoga. "Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali". *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 16, No.2, 2018. Page 315-346.
- Seken, I Ketut. (2017). *Pura Bhur Bwah Swah dalam Dua Dimensi Keagamaan (Hindu-Islam) di Karangasem*. Research Report. STKIP Agama Hindu Amlapura.
- Siregar, Mangihut. "Teori "Gado-gado" Pierre-Felix Bourdieu". *Jurnal Studi Kultural*. (2016) Volume I No.2: 79-82.
- Stuart-Fox, David J. (2010). *Pura Besakih. Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*. Terjemahan Ida Bagus Putra Yadnya dari *Pura Besakih: Temple, religion and society in Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Subagia, I Nyoman. (2014). "Realisasi Toleransi Umat Hindu dan Islam dalam Aktivitas Keagamaan di Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar". *Research Report of IHDN Denpasar*.
- Subagiasta, I Ketut. (2008). *Pengantar Acara Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Suputra, Pande Made. "Identitas Etnis dan Otonomi Daerah dalam Membangun Multikulturalisme di Indonesia" in IBG Pujaastawa, ed. (2006). *Wacana Antropologi*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Suwindia, I Gede, Machasin, dan I Gede Parimartha. "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali". *Al-Ulum Journal* Volume. 12, No. 1, June 2012. Page 53-76.
- Tim Peneliti. (1997/1998). *Sejarah Masuknya Islam di Bali*. Denpasar: Project Guidance Section and Islamic Religion Da'wah of Bali Province.
- Wijaya, Nyoman. (1986). "Cahaya Kubah di Ujung Timur Kahyangan: Studi Perkembangan Islam di Kabupaten Karangasem 1950-1980". *Skripsi*. Yogyakarta: Faculty of Literature Universitas Gadjah Mada.
- Yusuf, Stephanie Arvina. (2014). "Konsep Bentuk Arsitektur Pura Langgar pada Komplek Pura Penataran Agung Dalem Jawa di Desa Bunutin, Bangli-Bali". *Skripsi*. Bandung: Bachelor Program in the Faculty of Engineering Architectural Study Program, Universitas Katolik Parahyangan.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagamaan Komunitas Islam Wetu Telu di Desa Bayan Lombok". *Jurnal Kontekstualitas. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 21 No. 2. Dec 2006. Page 71-94.



STRATEGI BERTAHAN HIDUP PERAJIN GERABAH TRADISIONAL

Joan Hesti Gita Purwasih^{1*}, Mahendra Wijaya², Drajat Tri Kartono³

¹ Faculty of Social Science, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia.

^{2,3} Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 02 May 2019
Review : 19 August 2019
Accepted : 01 December 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Gerabah tradisional; Strategi adaptasi; Ekologi budaya; Julian Steward

CORRESPONDENCE

*E-mail: joan.hesti.fis@um.ac.id

ABSTRACT

The decreased number of traditional earthenware craftsmen occurs due to three main factors: basic material, worker, and consumer. Some craftsmen instead prefer staying so that they should adapt to the existing condition. Nevertheless, in fact, some of them prefer stopping from being craftsmen now. Departing from this reality, the author tried to raise earthenware craftsmen's adapting strategy to survive until today. The author employed a qualitative method. The phenomenological research was chosen with interview and observation being the techniques of collecting data. The result of research generally showed a variety of products produced aiming to document cultural heritage threatened to be extinct. Meanwhile, as the analysis technique, the author borrowed Julian Steward's cultural-ecological perspective to explain the data found. Data analysis was conducted using an interactive technique of analysis. Considering the findings of the research, the craftsmen took a different surviving strategy today compared with that in the past. This change was effected by such constraints as basic material, consumer, and human resources. Julian Steward's cultural-ecological concept seemed to be insufficient. Therefore, natural resources as the main basic material of industrial society should be understood more complexly to a more macro level.

A. PENDAHULUAN

Gerabah tradisional merupakan warisan budaya yang patut dilestarikan. Meskipun demikian, perajin gerabah tradisional kini semakin menurun. Wilayah yang mengalami penurunan perajin tersebut dapat di temukan di beberapa perdesaan Indonesia, misalnya di Desa Tojan (Provinsi Bali), perajin yang tersisa tidak lebih dari lima orang (Mustofa, 2017). Kondisi tersebut juga dialami di Desa Paseban, Kabupaten Klaten. Berdasarkan data peneliti jumlah perajin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 perajin di desa ini ada 77 kepala keluarga, Pada tahun 2015 menurun menjadi 71, pada tahun 2016 sejumlah 63, dan terus menurun. Khusus di Dukuh Dolon di 2018 jumlah perajin kini tidak mencapai lebih dari 20 kepala keluarga (Purwasih & Hadi, 2017). Padahal, membuat gerabah merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Paseban (Ardika, 2014).

Sebenarnya tidak jauh dari Desa Paseban terdapat pula Desa Melikan yang juga menghasilkan gerabah. Berbeda dengan Desa Paseban (Dukuh Dolon), Desa Melikan mampu mengembangkan usaha dan produk gerabah yang lebih modern meskipun keduanya sama-sama pernah mengalami krisis akibat gempa di tahun 2006. Selain pengaruh bencana, secara umum keduanya mengalami kendala yang sama, yaitu sumber daya alam yang semakin terbatas (Hastuti, 2012). Akan tetapi, karena jenis produk yang dihasilkan berbeda, produk-produk Gerabah Desa Melikan masih banyak diminati oleh peziarah Makam Wali Sunan Tembayat (Ismail, 2016). Sementara itu, meskipun dekat dengan lokasi tersebut, gerabah Dukuh Dolon tetap sepi peminat.

Beberapa daerah lain juga sempat mengalami kondisi yang sama. Meskipun demikian, kondisi ini dapat disikapi dengan strategi lain yaitu pengembangan objek wisata seperti yang diterapkan pada Desa Gebangsari (Kabupaten Kebumen). Desa ini mengembangkan konsep eduwisata dan kini perajin yang kembali aktif

dalam pembuatan gerabah dapat meningkat (Syarif Hidayat, 2018). Selain itu, gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta mampu berkembang melalui penerapan *One Village One Product (OVOP)* (Triharini, Larasati, & Susanto, 2014).

Upaya membangkitkan kerajinan gerabah di beberapa daerah tersebut menunjukkan transformasi industri yang maju. Pada kasus tersebut pemberdayaan dapat memberikan dampak positif. Akan tetapi, kenyataannya pemberdayaan justru tidak berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat Dukuh Dolon. Pemberdayaan sudah banyak masuk, terutama pasca gempa 2006. Upaya pemberdayaan tersebut banyak dilakukan oleh LSM dan lembaga pendidikan tinggi. Akan tetapi, hingga kini pemberdayaan-pemberdayaan tersebut kandas di tengah jalan. Pemberdayaan tersebut banyak berupaya mengajarkan cara-cara baru dalam mengolah dan mengelola gerabah. Misalnya, dengan mengajarkan pembuatan gerabah hias. Akan tetapi, kenyataannya inovasi tersebut tidak berhasil. Perajin hingga kini tetap bertahan menghasilkan gerabah tradisional seperti *keren*, *wajan*, *kwali*, *blengker*, dan *kendil*. Sementara itu, konsumen jenis produk tersebut tidaklah banyak di era saat modern saat ini. Akibatnya, pemasukan yang diperoleh pun tidak memadai.

Perajin hingga kini terus bertahan meskipun penghasilan yang diperoleh tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Berdasarkan data lapangan, biaya produksi perajin nyatanya tidak sebanding dengan hasil penjualan. Adapun bahan baku yang sulit diperoleh di antaranya tanah liat dan bahan bakar. Tanah liat hitam dengan kualitas baik harus diperoleh dari sawah sewa yang lokasinya jauh dari desa. Sementara itu, setiap tahunnya harga sewa sawah terus meningkat di tengah menurunnya jumlah perajin yang ikut serta dalam sewa tanah. Bahan baku pembakaran seperti kayu bakar, jerami, dan daun kering juga semakin sulit diperoleh. Penyebab utamanya ialah menurunnya pemasok bahan baku tersebut. Selain itu, anggota keluarga perajin terutama laki-laki dalam tidak lagi bersedia mencari bahan baku tersebut di luar desa.

Perajin tidak dapat meningkatkan harga barang yang diproduksinya secara signifikan. Penyebab pertama dipengaruhi oleh semakin sedikitnya pengepul yang bersedia menadah hasil produksi perajin. Faktor kedua tentunya dipengaruhi oleh semakin sedikitnya peminat/konsumen gerabah. Gerabah tradisional untuk keperluan rumah tangga banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan, yaitu mereka yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Tentunya jumlah pengguna tersebut kini semakin terbatas. Penurunan ini sangat perajin rasakan sejak terjadi konversi bahan bakar dan pemerataan LPG 3 kg.

Berdasarkan paparan realitas sosial tersebut, peneliti mencoba menggali strategi bertahan hidup yang dilakukan perajin. Penelitian serupa mengenai strategi bertahan hidup perajin gerabah sebelumnya sudah pernah dilakukan di Desa Kademangan Jombang secara kuantitatif (Firdiyanti, 2016). Secara umum cara bertahan yang ditemukan penelitian tersebut hanya menggambarkan fenomena yang terjadi dalam satu waktu dan data kuantitatif. Akan tetapi, melalui penelitian ini penggambaran strategi bertahan hidup perajin pada masa lalu dan masa sekarang peneliti sajikan secara komprehensif. Selain itu, analisis ekologi budaya digunakan sebagai salah satu perspektif yang menunjukkan bahwa manusia dan alam tidak dapat dipisahkan.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Dolon, Desa Paseban, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dukuh Dolon merupakan bagian dari Desa Paseban. Dukuh Dolon terdiri atas RW 07 dan RW 08. Lokasi Dukuh Dolon relatif jauh yaitu sekitar 45–60 menit dari pusat Kota Klaten menggunakan kendaraan bermotor. Lokasi dapat ditempuh menggunakan kendaraan umum (bus) atau kendaraan bermotor melalui jalan Wedi-Cawas, yaitu arah melewati dua objek wisata religi Gowa Maria Marginingsih dan Makam Sunan Pandanaran.

Adapun jenis penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi cocok dipilih untuk mengungkapkan pengalaman individu ataupun kelompok (Creswell, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu tahun 2016 dan data diperbaharui pada tahun 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Adapun unit analisis dan narasumber penelitian ini ialah keluarga yang masih bertahan membuat gerabah hingga tahun 2018. Teknik validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, data, dan penyajian data yang disajikan secara runtut dan mengalir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Industri Kerajinan Gerabah Dukuh Dolon

Dukuh Dolon pernah menjadi pusat industri yang besar dan menjadi pemasok gerabah berbagai daerah di Jawa Tengah. Kondisi ini dirasakan sebelum hingga sekitar tahun 1950-an, saat hampir setiap kepala keluarga menjadi penghasil gerabah yang mandiri. Sisa-sisa masa keemasan ini masih dapat ditemukan pada kondisi lingkungan rumah

penduduk. Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, rumah penduduk Dukuh Dolon yang masih membuat gerabah pada umumnya memiliki ciri berikut:

- a. Sekitar rumah terdapat sisa-sisa pecahan gerabah.
- b. Memiliki tempat penyimpanan kayu bakar dan daun-dun kering.
- c. Memiliki halaman/sisa bangunan yang cukup luas untuk menjemur dan membakar gerabah

Kondisi tersebut kini hanya dapat ditemukan pada beberapa rumah. Sebagian besar rumah warga kini tidak lagi memiliki halaman luas, sisa-sisa pecahan gerabah, dan tempat penyimpanan kayu. Semuanya berubah seiring berjalannya waktu, adapun faktor utamanya ialah tidak ada lagi generasi penerus pembuat gerabah dalam masing-masing keluarga. Kondisi ini menjadi kasus yang unik dan berbeda dengan kasus industri gerabah lain yang berhasil mempertahankan budaya membuat gerabah dari satu generasi ke generasi, seperti di Jepara (Triyanto, 2015).

Generasi anak-anak perajin sebagian besar beralih pekerjaan ke sektor lain, sekolah ke jenjang lebih tinggi, dan bekerja di luar desa. Adapun sektor yang banyak dipilih yaitu sebagai kuli bangunan, pekerja pabrik, dan wirausaha. Peralihan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak perajin ini justru dirasa cukup positif dalam membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang dahulu membuat gerabah kini perlahan tidak lagi meneruskan usaha turun-temurun tersebut. Secara fisik perubahan tampak pada kondisi tempat tinggal, yaitu rumah tidak lagi memiliki halaman untuk membuat dan membakar gerabah. Halaman rumah tersebut berlahan menjadi hunian permanen yang digunakan oleh anak-anak perajin.

Peralihan pekerjaan yang dilakukan generasi anak dalam satu unit keluarga ini menyebabkan hambatan yang sangat berarti terhadap industri gerabah Dukuh Dolon. Tidak ada lagi anak laki-laki yang membantu orang tua mengumpulkan bahan baku, serta tidak ada lagi anak perempuan yang membantu membuat gerabah. Karakteristik industri yang bersifat otonom dalam unit keluarga inti tersebut menyebabkan kesulitan dalam melakukan produksi.

Sampai pada titik ini, sebagian besar perajin yang bertahan sudah lanjut usia. Selain itu, sebagian besar perajin mayoritas berstatus janda. Pembuatan gerabah di Dukuh Dolon sangat bergantung pada perempuan. Tidak ada laki-laki yang bisa membuat gerabah. Peran laki-laki dalam industri gerabah bukanlah membuat, melainkan membantu menggosok, menjemur, dan membakar. Oleh karena itu, kelangsungan industri gerabah keluarga sangat bertumpu pada keterampilan perempuan.

Perempuan pembuat gerabah di Duku Dolon terampil dalam membuat peralatan rumah tangga

yang tahan api. Teknik pembuatan gerabah yang digunakanpun sedikit berbeda. Alat putar dikombinasikan dengan teknik bentuk manual menggunakan tangan. Produk ini berbeda dengan gerabah desa lain. Ada banyak teknik dalam membuat gerabah misalnya di wilayah Melikan. Meskipun kedua lokasi berdekatan hanya berjarak sekitar satu kilo meter, penguasaan teknik putaran miring seperti yang ada di Melikan tidak ditemukan di Dukuh Dolon. Perajin gerabah Dukuh dolon juga tidak menerapkan teknik pembuatan gerabah yang dilakukan dengan cara *tinggang* perajin seperti di Lombok Timur. Pada teknik ini perajin yang melakukan putaran mengelilingi gerabah (Dewi, Suartini, & Rediasa, 2016).

Produk gerabah Dukuh Dolon tidak menggunakan tanah liat merah, tetapi tanah liat hitam yang dicampur dengan pasir kali. Tanah liat jenis ini cukup sulit dicari, karena tanah liat hitam berkualitas tidak lagi dengan mudah ditemukan di sekitar desa. Tanah liat hitam pun harus memiliki kualitas baik karena tidak boleh memiliki campuran kerikil. Tanah liat, diperoleh dengan cara sewa bersama dengan perajin Dukuh Kebondalem. Sementara itu, pasir yang diperoleh warga dari sekitar sungai akan cukup sulit ditemukan jika hujan deras memenuhi sungai.

Warna merah bata juga menjadi ciri khas produk gerabah Dukuh Dolon. Warna merah gerabah Dukuh Dolon diperoleh dari pelapisan tanah merah yang diambil di sekitar Makam Sunan Pandanaran dan dicampur dengan air. Pewarnaan alami ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang dipertahankan dari satu generasi ke generasi. Adapun proses pewarnaan ini dilakukan setelah proses pembakaran pertama dan proses pembakaran kedua. Tanah merah dari sekitaran Makam Sunan Pandanaran dipercaya memiliki kualitas baik dan dapat membawa keberkahan bagi perajin.

Gerabah dibuat dari pencampuran bahan baku tanah liat dan pasir, beberapa perajin menggabungkannya melalui proses tradisional, yaitu dengan cara diijak menggunakan kaki. Proses ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, melalui proses tersebutlah perajin dapat menentukan tingkat ketercukupan antarkomposisi bahan. Akan tetapi, ada juga sebagian kecil perajin yang menggunakan alat pencampur modern, yaitu *molen*. Akan tetapi, ini lebih banyak membutuhkan biaya karena harus mengeluarkan upah tenaga pencampur dan bahan bakar mesin. Setelah tercampur rata perajin akan menyimpan bahan baku pada bagian rumah yang dibentuk menyerupai kolam dan ditutupi dengan plastik untuk menjaga kelembaban.

Pada proses pembuatan alat-alat yang digunakan pun masih tradisional. Ada prebot, kerik, tatap dan watu, serta batu kali seperti pada gambar-gambar berikut.



Gambar 1. *Prebot*
Sumber: dokumentasi peneliti

Prebot merupakan alat yang digunakan perajin untuk membuat kerangka gerabah. Alat dahulu terbuat dari kayu dan porosnya ditanam di lantai rumah yang masih beralkasan tanah. Akan tetapi, pasca gempa 2006 alat-alat perajin banyak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, *prebot* dibuat menggunakan bahan lain seperti semen. Alat ini digunakan dengan cara diputar.



Gambar 2. *Watu*
Sumber: dokumentasi peneliti



Gambar 3. *Tatap*
Sumber: dokumentasi peneliti

Tatap dan *watu* digunakan bersamaan untuk membentuk dan meratakan permukaan gerabah. *Tatap* terbuat dari kayu, sementara *watu* terbuat dari tanah liat yang memiliki permukaan cembung. Kedua alat ini dipukul bersamaan dari

arah yang berbeda, yaitu bagian dalam dan luar.



Gambar 4. *Kerik*
Sumber: dokumentasi peneliti

Kerik merupakan lingkaran seperti gelang yang terbuat dari bambu untuk menipiskan gerabah. Perajin menggoreskan *kerik* pada permukaan gerabah agar terkikis dan terus menjadi tipis. Gerabah yang sudah dibentuk dijemur setengah kering dihaluskan menggunakan batu kali yang memiliki permukaan halus. Selanjutnya gerabah kembali dijemur untuk kemudian dibakar. Pada proses pembakaran gerabah disusun melingkar menyerupai tumpukan gunung berongga dengan kayu dan pecahan gerabah sebagai alas pondasi pembakaran. Celah pada rongga tumpukan menjadi saluran untuk memasukkan kayu secara perlahan. Selain kayu sela-sela dan permukaan gerabah diberi jerami untuk membantu proses pembakaran. Gerabah pun biasaya mulai dibakar pada subuh dini hari seperti gambar berikut.



Gambar 5. Poses menata pembakaran
Sumber: dokumentasi peneliti

Hasil pembakaran menghasilkan berbagai produk peralatan rumah tangga. Sayangnya produk tersebut kini semakin jarang digunakan. Bahkan warisan kerajinan tradisional tersebut kini semakin jarang dikenal masyarakat. Adapun produk-produk yang dihasilkan perajin sebagai berikut.



Gambar 5. *Kendil*
Sumber: dokumentasi peneliti

Kendil bisa dimanfaatkan untuk memasak jamu, sayur, bubur, dan memasak nasi sebelum dikukus.



Gambar 6. *Kwali*
Sumber: dokumentasi peneliti

Kwali banyak dimanfaatkan oleh penjual soto kwali khas Kabupaten Klaten. Selain itu, dahulu pada umumnya alat ini dimanfaatkan untuk mengukus nasi. Alat ini dikolaborasikan dengan anyaman bambu yang berbentuk kerucut dan berfungsi sebagai penyaring.



Gambar 7. *Wajan*

Wajan tanah liat ini digunakan untuk menumis dan mengoreng. Ada wajan yang berukuran kecil dan besar. Ada pula wajan yang dibentuk lebih cekung.



Gambar 8. *Keren*
Sumber: dokumentasi peneliti

Keren atau *tungku* ini masih banyak dimanfaatkan masyarakat, misalnya digunakan para pedagang sate, bakmi Jawa, dan soto yang ada di sekitar kabupaten Klaten. *Keren* ini ada yang didesain untuk pembakaran menggunakan arang dan kayu bakar.



Gambar 8. *Blengker*
Sumber: dokumentasi peneliti

Blengker berfungsi sebagai tatakan *wajan* atau *kwali*. *Blengker* kini sudah semakin jarang digunakan. Kondisi ini dapat diamati dari sedikitnya perajin yang memproduksi jenis barang ini. Produksi jenis produk ini pun semakin sedikit karena sulit laku di pasaran. Meskipun dijual dengan harga murah, sekitar lima ribu rupiah per biji nya, jenis produk ini kini jarang diminati masyarakat.

Berdasarkan pemaparan jenis produk yang dihasilkan Dukuh Dolon, semua peralatan rumah tangga ini merupakan warisan budaya leluhur yang kini semakin sedikit dan terancam punah. Peralatan rumah tangga ini menjadi saksi peradaban masyarakat tradisional yang kini mulai diabaikan.

2. Kendala Industri Gerabah Tradisional Masa Kini

Setiap jenis industri memiliki tantangan dan kendala tersendiri. Pada umumnya kendala tersebut selalu berkaitan dengan faktor-faktor produksi. Dalam temuan penelitian ini, klasifikasi kendala peneliti sajikan dalam tiga kategori yaitu konsumen, bahan baku, tenaga, dan distribusi.

Adapun pemaparan kendala yang dialami industri gerabah saat ini peneliti sajikan sebagai berikut.

a. Konsumen

Penurunan konsumen merupakan menjadi tantangan utama dalam setiap sektor industri termasuk gerabah tradisional. Gerabah tradisional tidak lagi ditemukan pada dapur-dapur rumah tangga masyarakat. Kondisi ini terjadi siring transformasi bahan bakar dan alat-alam memasak. Pada umumnya kayu bakar menjadi pasangan alat-alat masak gerabah ini. Akan tetapi, kini masyarakat sudah semakin jarang menggunakan kayu bakar/arang sebagai bahan bakar memasak.

Sebenarnya gerabah bisa digunakan sebagai peralatan memasak masa kini yang menggunakan bahan bakar gas. Panas yang diserap gerabah lebih tahan lama. Meskipun demikian, banyak konsumen beralih gerabah tidak lebih awet dan membutuhkan waktu panas yang lebih dibandingkan alat masak berbahan alumunium atau sejenisnya. Oleh karena itu, minat konsumen masa kini tidaklah luas.

b. Bahan baku

Pada pembahasa sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat gerabah. Adapun kendala utama bahan baku yang dialami perajin Dukuh Dolon yaitu pada tanah liat dan bahan pembakaran.

Tanah liat semakin jauh dari desa dan jumlah perajin yang ikut patungan dalam menyewa tanah semakin sedikit. Implikasi pertama, perajin harus menambah biaya untuk mengeluarkan jasa tenaga pengambil tanah. Kedua, perajin semakin mahal menanggung biaya sewa tanah bersama. Hal ini dilakukan seiring tidak memadainya tanah liat di wilayah desa sendiri. Industri masyarakat dalam membuat gerabah sudah berlangsung hampir satu abad, jauh sejak generasi sebelumnya. Oleh karena itu, tanah liat dengan kualitas memadai sudah semakin sulit. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pembangunan dan jumlah penduduk di desa. Lahan-lahan yang ada sudah banyak bergeser sebagai pemukiman penduduk.

c. Tenaga

Tenaga kerja awalnya dilakukan oleh keluarga inti. Akan tetapi, sebagian besar kini hanya dilakukan oleh generasi tua (ayah dan ibu), bahkan sebagian besar kini hanya dilakukan oleh ibu (lansia berstatus janda). Pada kondisi ini perempuan yang sudah lanjut lansia menunjukkan adanya kemampuan untuk bisa mandiri dan memenuhi ekonomi keluarganya. Kondisi ini pada umumnya ditemukan di wilayah perdesaan, yaitu perempuan menjadi ujung tombak ekonomi keluarga meskipun pada ranah domestik (Meliza, Iskandar, & Soemarwoto, 2019).

Akan tetapi, tidak semuanya bisa dilakukan perajin perempuan. Kenyataannya terdapat

bagian pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra sehingga membutuhkan biaya yang ekstra pula yaitu untuk tenaga mengambil bahan baku tanah, sebagian membutuhkan tenaga pencampur tanah, serta tenaga penggosok gerabah. Kondisi ini pada umumnya dilakukan oleh perajin yang sudah tidak memiliki anggota keluarga laki-laki. Kegiatan produksi bertumpu pada perempuan. Pembuatan gerabah hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Kondisi ini merupakan budaya yang banyak ditemukan pada sektor industri gerabah. Misalnya pada kerajinan gerabah di Desa Banyumulek, Lombok Barat. Perempuan menjadi tenaga kerja utama dalam pembuatan gerabah (Vibriyanti, 2015).

d. Distribusi

Kendala distribusi berkaitan dengan bagian pemasaran gerabah. Dahulu sebagian besar perajin menjual gerabah melalui peran ayah. Ayah dapat menjual gerabah berhari-hari ke luar Kabupaten Klaten dengan jumlah gerabah yang banyak. Akan tetapi, cara ini sudah tidak dilakukan sejak lama yaitu ketika tenaga ayah mulai senja dan konsumen pun menurun.

Sebagian besar perajin kemudian banyak beralih menggunakan jasa bakul dan pengepul. Bakul merupakan pembeli gerabah dalam jumlah besar yang berasal dari luar desa. Bakul kemudian akan menjual kembali gerabah ke luar desa. Sementara itu, pengepul merupakan warga desa setempat yang bersedia membeli gerabah perajin dalam jumlah besar. Pengepul kemudian menjual kembali gerabah kepada bakul luar desa ataupun menjual gerabah di rumah masing-masing.

Saat ini bakul gerabah tradisional semakin sedikit. Hanya bakul dengan permintaan produk tertentu yang masih membutuhkan gerabah. Misalnya, *kwali*, *keren*, dan *kendil*. Produk tersebut masih digunakan oleh penjual-penjual makanan tradisional. Begitu pula dengan pengepul yang ada di desa. Pengepul semakin enggan menghimpun produk perajin di rumah mereka dalam jumlah besar karena penjualan yang semakin macet.

Akibatnya, perajin semakin sulit menyalurkan barang dagangannya. Di tengah pembengkakan bahan baku, produk yang dihasilkan justru melemah. Pendapatan perajin semakin sedikit, sementara modal yang dibutuhkan semakin besar.

3. Alasan Tetap Bertahan

Masih ada perajin yang bertahan membuat gerabah meskipun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran modal produksi. Mereka sebagian besar ialah para perajin yang kini sudah memasuki usia lansia.

Sebagian perajin gerabah terus bertahan hanya untuk mengisi waktu luang. Anak-anak mereka sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja di sektor lain

yang lebih menghasilkan. Maka tidak heran jika faktor ekonomi tidak menjadi hambatan dalam membuat gerabah. Pada umumnya ikondisi ini dialami oleh keluarga yang mampu meyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Perajin dengan karakteristik keluarga seperti ini pada umumnya dahulu merupakan produsen gerabah kelas atas. Mereka memiliki modal besar dan memiliki jaringan pasar yang luas di luar desa.

Meskipun demikian, masih terdapat pula perajin yang bertahan karena tidak memiliki keterampilan lain untuk menyambung hidup keluarga. Perajin percaya meskipun hasil yang diperoleh tidak sebanding, gerabah akan selalu memberikan keberkahan. Sebagian tidak mau berpangku tangan mengandalkan bantuan dari anak-anak mereka. Pada umumnya pandangan tersebut dialami oleh perajin yang usianya sudah lansia sementara anak-anak mereka memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Hal ini pada umumnya ditemukan pada karakteristik industri keluarga menengah yang sejak dahulu memiliki modal kecil dan tidak memiliki jaringan pasar yang luas.

Kondisi karakteristik industri keluarga menengah ke bawah tersebut juga menimbulkan konsekuensi lain, yaitu dengan berhenti memproduksi gerabah. Ini dialami sebagian perajin yang belum terlalu tua. Gerabah ditinggalkan karena menyadari bahwa kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi jika terus bertahan. Golongan ini pada umumnya masih memiliki anak yang masih menjadi tanggungan di rumah.

Gerabah sebenarnya disadari perajin sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Akan tetapi, realitas kehidupan berkata lain. Gerabah kini tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berbuat banyak apabila generasi muda di desa tidak lagi berminat untuk meneruskan keterampilan tersebut. Orientasi perajin kini telah berubah, gerabah memang cukup berharga untuk mereka teruskan tetapi tidak untuk anak-anak mereka. Hal inilah yang menjadi ancaman terbesar hilangnya warisan keterampilan budaya membuat peralatan rumah tangga tradisional yang tahan api di Dukuh Dolon terus berlangsung.

4. Strategi Bertahan Hidup

a. Strategi Masa Lalu

Strategi bertahan hidup perajin berkaitan dengan sistem produksi gerabah. Dahulu perajin memiliki siklus pembuatan gerabah yang relatif stabil, yaitu dua minggu untuk proses pembuatan dan dua minggu kemudian untuk mengumpulkan bahan baku serta menjual gerabah. Pendapatan yang diperoleh dalam satu kali pembakaran digunakan untuk bertahan hidup satu siklus. Pada masa itu, penghasilan yang diperoleh dari membakar gerabah masih cukup memadai untuk

menyisihkan modal bahan baku terlebih dahulu barulah kebutuhan hidup. Pada umumnya siklus ini dilakukan oleh keluarga dengan tingkat produksi tinggi.

Pada sebagian perajin dengan tingkat produksi menengah ke bawah, pinjaman modal dari bakul/pegepul menjadi salah satu cara untuk menunjang kebutuhan modal dan kehidupan sehari-hari. Pinjaman diberikan dengan jaminan sejumlah gerabah yang nantinya akan diambil ketika masa pembakaran usai.

Pada situasi ini, masyarakat memiliki tatanan sistem kegiatan ekonomi yang mapan. Konsumsi, produksi dan distribusi dilakukan karena adanya keseimbangan. Kemapanan ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi pasar yang masih memadai. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya interaksi sosial yang mapan antara budaya, manusia, dan lingkungan dalam indikator ekologi lingkungan.

b. Strategi Masa Kini

Melihat berbagai tantangan gerabah tradisional masa kini, strategi bertahan hidup perajin pun mengalami perubahan. Kondisi itu dipengaruhi oleh siklus pembakaran yang semakin tidak menentu. Setiap unit industri pembuat gerabah kini membuat gerabah berdasarkan cepat lambatnya barang yang mampu dibeli pengepul/bakul. Kondisi ini terus berlanjut di tengah jumlah konsumen yang semakin memudar.

Kondisi ini semakin diperparah dengan jumlah pengepul/bakul yang semakin menurun. Bahkan sudah ada beberapa bakul yang tidak lagi aktif mengambil gerabah. Sementara pengepul di sekitar desa tidak berani lagi membeli gerabah perajin dengan jumlah banyak. Meskipun demikian, sebagian bakul tetap bersedia memberikan pinjaman tentunya dengan jaminan gerabah perajin. Rasa kekeluargaan dan ketetanggaan menjadi unsur yang masih diperhitungkan pada cara-cara ini.

Pada akhirnya, hutang menjadi jalan terakhir yang terus dipertahankan perajin. Hutang melalui jaminan gerabah diandalkan perajin kepada pengepul dan bakul. Ketika gerabah telah selesai dibakar dan disetorkan perajinpun sudah tidak menerima imbalannya karena harus membayar hutang. Perajin pun hidup dalam keadaan sangat sederhana, dalam kondisi miskin dan mengandalkan bantuan beras raskin dari pemerintah.

Tidak jarang sebagian perajin memilih beralih pekerjaan karena merasa gerabah sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya menjadi buruh/tenaga lepas di sektor industri lain yang mulai berkembang di desa yaitu industri pembuatan kerupuk rambak. Pada akhirnya beralih pekerjaan merupakan strategi akhir yang dipilih oleh perajin karena bertahan membuat gerabah sudah tidak lagi memungkinkan bagi mereka.

c. Strategi Bertahan Hidup Perajin Gerabah dari Perspektif Ekologi Budaya

Berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas dapat diketahui bahwa manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dan saling memengaruhi. Kondisi inilah yang digagas oleh Julian Steward melalui ekologi budaya. Budaya merupakan hasil dari adaptasi terhadap lingkungan. Artinya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu wujud budaya sehingga proses tersebut pula nantinya akan memengaruhi lingkungan. (Gunn, 1980).

Menurut Julian Steward cara terbaik untuk mempelajari antropologi pada penekanan ekologi budaya ialah dengan mengkaji teknologi yang digunakan (*technoenviromental relationship*), cara yang digunakan (*exploitation relationship*), dan efeknya terhadap lingkungan (*effects of technological – exploitation*) (Steward, 1955). Berangkat dari tiga komponen tersebut, peneliti menemukan bahwa strategi bertahan hidup perajin gerabah pada penelitian ini dipengaruhi oleh ketiga unsur tersebut.

Meninjau kondisi strategi bertahan masa lalu, industri gerabah dalam unit keluarga masih cukup memadai karena sumber daya yang ada, teknologi, dan cara yang digunakan masih memadai. Artinya, efek pengolahan terhadap lingkungan belum dirasakan. Misalnya, tidak terjadi kelangkaan bahan baku.

Sementara itu, pada masa-masa selanjutnya, sistem produksi perajin mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya sumber daya alam yang semakin tidak memadai. Industri tradisional pada umumnya hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Ketika sumber daya alam di lingkungan sekitarnya sudah tidak memadai maka sistem produksi dan budaya pun berubah (Steward, 1977). Cara-cara baru dengan memanfaatkan tenaga luar dimanfaatkan. Artinya, jika salah satu faktor produksi berupa bahan baku memudar maka industri tradisional tersebutpun akan terganggu. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa dikontrol sendiri oleh produsen.

D. KESIMPULAN

Pandangan Julian Steward mengenai ekologi budaya membantu kita memahami strategi manusia mempertahankan hidup-

nya. Akan tetapi, tawaran tiga komponen utama dalam memahami ekologi budaya Julian Steward ternyata tidaklah cukup. Manusia hidup dalam sistem yang kompleks dan berhubungan satu sama lain. Terutama jika analisis kondisi ekologi budaya diletakkan pada kehidupan masyarakat yang sudah mengarah pada kegiatan industri.

Komponen konsumen, sebagai pengguna hasil produksi gerabah menjadi salah satu pengaruh utama keberlangsungan pembuatan gerabah di Desa Paseban. Selain itu, sebagai industri, pembuatan gerabah membutuhkan tidak hanya satu bahan baku. Artinya, kelangkaan satu bahan baku di sekitar lingkungan masyarakat memengaruhi perubahan cara produksi masyarakat. Pada kondisi ini ekologi budaya harus dikembangkan dengan melihat ekosistem sumber daya alam yang lebih makro dan kompleks.

Saran yang direkomendasikan untuk menyikapi kondisi ini ialah dengan melakukan komodifikasi budaya. Budaya lama dihidupkan kembali dengan cara-cara baru dan bentuk produk yang baru (Irianto, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di dalamnya. Gerabah tahan api ini bisa dipromosikan sebagai peralatan dapur yang kekinian dan memiliki variasi fungsi. Misalnya, gerabah tahan api ini bisa digunakan untuk menyajikan makanan yang menggunakan unsur *hot plate* di beberapa restoran. Gerabah Desa Paseban ini mampu menyerap panas tahan lama sehingga cocok untuk digunakan. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk menyajikan makanan yang sidatnya dipanaskan terus menerus menggunakan api. Misalnya, untuk jenis bubur, sup panas, dan *suki*.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Malang atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menulis artikel jurnal ini dengan baik. Meskipun demikian, ide ini tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya perhatian dari pemerintah dan stakeholder yang peduli terhadap warisan budaya lokal. Oleh karena itu, kerja sama yang baik sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, F. (2014). *Relasi Antara Kearifan Lokal Masyarakat Desa Paseban dengan Interaksi Terhadap Sumber Daya Hutan*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70229

- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*. (S. Z. Qudsy, Ed.) (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. K., Suartini, L., & Rediasa, I. N. (2016). Kerajinan Gerabah Tinggang Di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*.
- Firdiyanti, B. (2016). Strategi Bertahan Hidup Pengrajin Gerabah Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi*.
- Gunn, M. C. (1980). *Cultural Ecology: A Brief Overview*.
- Hastuti, I. (2012). Perkembangan usaha industri kerajinan gerabah, faktor yang mempengaruhi, dan strategi pemberdayaanya pada masyarakat di desa melikan kecamatan wedi kabupaten klaten. *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Irianto, A. M. (2016). Komodifikasi Budaya Di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah. *Jurnal THEOLOGIA*. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.935>
- Ismail, A. (2016). Ziarah Ke Makam Wali: Fenomena Tradisional di Zaman Modern. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v19i2.156>
- Meliza, R., Iskandar, B. S., & Soemarwoto, R. S. (2019). Aspek Ekonomi Pada Kehidupan Perempuan Lanjut Usia: Studi Etnografi di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p11-21.2019>
- Mustofa, A. (2017, August). Tragis, Kurang Menarik, Jumlah Perajin Gerabah Kian Menurun. *Radarbali.Jawapost.Com*. Retrieved from <https://radarbali.jawapos.com/read/2017/08/21/8686/tragis-kurang-menarik-jumlah-perajin-gerabah-kian-menurun>
- Purwasih, J. H. G., & Hadi, N. (2017). The Failure of Regeneration Traditional Pottery Handicraft Process of Pottery Industry. In *2nd International Conference on Sociology Education* (Vol. 2, pp. 578–583). Scitepress. <https://doi.org/10.5220/0007113512181223>
- Steward, J. H. (1955). 2 The Concept and Method of Cultural Ecology. In *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution*.
- Steward, J. H. (1977). *The Concept and Method of Cultural Ecology. Evolution and Ecology: Essays on Social Transformation*. Urbana: University of Illinois Press.
- syarif hidayat. (2018, November). Tawarkan Konsep Eduwisata, Kampung Gerabah Gebangsari Kian Banyak Dikunjungi. *Sorot.Co*. Retrieved from <http://kebumen.sorot.co/berita-4748-tawarkan-konsep-eduwisata-kampung-gerabah-gebangsari-kian-banyak-dikunjungi.html>
- Triharini, M., Larasati, D., & Susanto, R. (2014). *Journal of visual art and design. Journal of Visual Art and Design*.
- Triyanto. (2015). Perkeramikan mayong lor jepara: hasil enkulturasi dalam keluarga komunitas perajin. *Imajinasi: Jurnal Seni*.
- Vibriyanti, D. (2015). Peran Kaum Perempuan Dalam Industri Kerajinan Gerabah Di Desa Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(2), 117–129. <https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n2.p117-129.2015>



PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL YANG DIPENGARUHI OLEH KOMPETENSI KOMUNIKASI GURU DI SEKOLAH DASAR INKLUSI TIRENGGO, YOGYAKARTA

Dwi Kartikawati^{1*}, Djudjur Luciana Rajagukguk², Yuyu Sriwartini³

^{1,2,3} Faculty of Social and Political Science, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 10 August 2019
Review : 19 August 2019
Accepted : 21 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Communication Competency; Multicultural Values; Inclusive School

CORRESPONDENCE

*E-mail: dookartika@yahoo.com

ABSTRACT

This research focused on the urgency of teachers' communication competence in inculcating multicultural values at elementary schools, in this case, the inclusive elementary school of Tlirenggo, Yogyakarta. Communication skills are an essential competency for teachers as stated in the Regulation of the Minister of Education No. 16 of 2007 dated May 4th, 2007. Teachers, as communicators, are the main factor in establishing effective communication in the learning process. In this case, a teacher with excellent communication skills would substantially determine a school's success in the implementation of multicultural values. In order to analyze the subject, this study used a qualitative method, and the data were collected from three respondents from the inclusive elementary school of Tlirenggo, Yogyakarta. The results indicated that teachers' communication competency which consisted of three aspects, i.e. motivation, knowledge, and skills, was urgently required in order to achieve teaching goals. A competent teacher would significantly be able to establish a positive atmosphere and influence among students, thus, enable them to effectively inculcate the designated values. At this school, the multicultural values were integrated into teaching subjects, students' assessment, specified learning methods, character development, and regular group activities.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik, 2017: 79). Guru memiliki peran sangat penting dan luas (Hamalik, 2017: 123). Guru harus memiliki penguasaan pengetahuan di samping ketrampilan-ketrampilan lainnya. Salahsatu peran penting guru dalam pendidikan adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sehingga proses tranfer ilmu dapat tersampaikan dengan baik. Peranan penting komunikasi ini juga terjadi pada lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar yang memerlukan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didiknya sehingga proses penyampaian informasi dapat berjalan sesuai tujuan dari pembelajaran itu.

Untuk itu guru perlu memiliki kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tindak komunikasi secara efektif dan berhasil (Purwasito, 2015: 284). Kompetensi komunikasi merujuk pada kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Hal ini selaras juga standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 yang menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan inti ke-7 yang harus dimiliki guru. Terdiri dari dua hal yaitu pertama: bahwa seorang guru harus memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain. Kedua, bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun dengan cara antara lain: (a) penyiapan kondisi psikologis

peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respon peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. Kompetensi komunikasi sangat penting dijadikan landasan pemikiran komunikasi, terutama dalam komunikasi multikultural yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan (*contexts*) dalam memengaruhi kandungan isi pesan (*contents*) dan bentuk (*pattern*) pesan komunikasi (Purwasito, 2015: 24-285).

Riset-riset mengenai kompetensi komunikasi ini dapat ditelusuri dari penelitian Alfikalia & Maharani yang berjudul "Faktor-faktor Pendukung Kompetensi Komunikasi Interpersonal: Studi Kasus pada Mahasiswa Tingkat Pertama di Universitas Paramadina" (Alfikalia & Maharani, 2009), yang menyimpulkan bahwa perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara mahasiswa di antara program studi-program studi yang menjadi obyek risetnya dilihat dari pengalaman organisasi serta frekwensi bicara di muka umum, serta konteks terjadinya komunikasinya. Sementara penelitian yang meneliti khusus pada kompetensi komunikasi guru dapat dilihat dari penelitian Wulaandari (2013), yang berjudul: "Kompetensi Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Student Center Learning di SMA N 9 Semarang." Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian murid terhadap kompetensi komunikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar berbasis *student center learning (SCL)* di SMA N 9 Semarang, tergolong dalam kategori kompeten (Wulandari, 2013). Dari rangkaian penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti terdahulu, riset penulis ini memiliki banyak perbedaan, khususnya penulis melihat pada aspek kompetensi komunikasi guru dalam upaya menanamkan nilai-nilai multikultural di sekolah inklusi. Kompetensi komunikasi dalam penelitian ini meliputi ketiga faktor yaitu motivasi, pengetahuan dan ketrampilan. Sekolah inklusi adalah sekolah khusus yang di dalamnya ada anak-anak reguler dan anak-anak dengan kebutuhan khusus belajar bersama dalam satu kelas. Ini yang menjadi kekuatan penelitian penulis, mengingat kompetensi komunikasi guru di sekolah semacam ini wajib dimiliki oleh para guru dan perlu di tingkatkan.

Kompetensi komunikasi merujuk pada dua konsep yaitu kompetensi dan komunikasi. Pengertian kompetensi adalah kemampuan seseorang yang meliputi motivasi, keterampilan, dan pengetahuan dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Sedangkan komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada manusia yang

tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Menurut Carl I Hovland, komunikasi adalah suatu proses di mana individu mengirimkan stimulus (biasanya simbol-simbol verbal) untuk memodifikasi perilaku individu lainnya (Iriantara & Syaripudin, 2018: 6). Komunikasi yang berkualitas adalah komunikasi yang efektif.

Komunikasi efektif merujuk pada bagaimana dalam sebuah proses interaksi komunikasi, pesan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik, dan memberi efek pada si penerima pesan (komunikator). Komponen kompetensi komunikasi motivasi (*motivation*), ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*Knowledge*) (Samovar & Porter, 2010). Kompetensi komunikasi antara lain motivasi untuk berkomunikasi, pengetahuan yang dimiliki dan kemampuan komunikasi yang sesuai, memiliki sensitivitas dan karakter. Faktor motivasi adalah menjadi daya dorong untuk melakukan komunikasi (Samovar & Porter, 2010). Sedangkan pengetahuan adalah kegiatan komunikator dalam mencari informasi mengenai lawan bicaranya sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ketrampilan adalah kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, proses penyampaian pesan atau informasi dapat secara mudah dipahami oleh orang lain yang dituju. Motivasi adalah proses di mana aktivitas yang terarah pada suatu tujuan tertentu didorong dan dipertahankan (Purwanto, 2014: 219). Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Pengetahuan komunikasi adalah kegiatan komunikator dalam mencari informasi lawan bicaranya supaya dapat mengurangi tingkat kecemasan dalam berkomunikasi. Seorang individu harus memahami serta menyadari norma, aturan, serta harapan dari individu lainnya yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Untuk menjadi kompeten, dibutuhkan dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan konten dan pengetahuan prosedural (Haryanti, 2013: 21). Dengan pengetahuan konten meliputi pengetahuan meliputi topik apa, kata-kata yang digunakan, pemahaman situasi dan seterusnya yang dibutuhkan dalam suatu situasi, diharapkan guru dapat belajar dan mengajar dengan sistem inkuiri. Pengetahuan prosedural merujuk pada pengetahuan bagaimana cara menyusun, merencanakan, dan mentransfer pengetahuan yang dimiliki dalam situasi tertentu. Ketrampilan komunikasi merupakan kemampuan yang dapat membimbing seseorang untuk menghadirkan sebuah perilaku tertentu yang cukup dan mampu mendukung proses komunikasi secara tepat dan efektif. Untuk mengurangi ketidakpastian, seorang komunikator sedapat mungkin harus memiliki tiga ketrampilan yaitu empati, berperilaku seluwes mungkin, dan kemampuan

mengurangi ketidakpastian. Kompetensi komunikasi dapat dilakukan dengan mengamati perilaku kita dengan mengidentifikasi diri dengan cara terbuka dalam komunikasi, memahami gaya komunikasi, dan memonitor diri sendiri, mendengarkan. *Communication knowledge The next major component of the competence model is knowledge...Questions were generated addressing the three major dimensions of competence pinpointed in this research: empathy, adaptability, and interaction management (A.Rahman, 2015: 262).* Keseluruhan kompetensi komunikasi itu sangat diperlukan untuk dimiliki para guru terutama dalam proses penanaman nilai-nilai multikultural. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran.

Dalam riset ini menekankan kompetensi komunikasi guru ini mempengaruhi dalam penanaman nilai-nilai multikultural di tingkat sekolah dasar inklusi. Guru harus memainkan peranan utama dalam proses tersebut. Guru dapat melakukan dengan cara menyadari budaya diri sendiri, mengamati perilaku pribadi diri, memahami gaya komunikasi diri, dan memonitor dirinya sendiri antara lain: (1) Pemahaman terhadap berbagai proses komunikasi dalam berbagai konteksnya. (2). Kemampuan perilaku komunikasi verbal dan non-verbal secara tepat. (3) Berorientasi pada sikap positif terhadap komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh guru. Jika keterampilan komunikasi dimiliki maka akan sangat besar membantu meminimalisir *miss* komunikasi sekaligus membuka peluang sukses bagi para siswa.

Dalam penanaman nilai-nilai multikultural tersebut melalui pendidikan multikultural guru tentunya berusaha mengomunikasikan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keberagaman yang ada dimasyarakat. Pendidikan multikultural adalah sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat (Al Hakim &Utari, 2018:2) Menurut Zulqarnain (2016: 198), pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan, yakni: (a) *Content Integration*: Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu; (b) *The Knowledge Construction Process*: Membaca siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin); (c) *An Pedagogy*: Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya maupun

sosial; (d) *Prejudice Reduction*: Mendefinisikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka; dan (e) Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Dalam pembelajaran pada umumnya, bentuk pembelajaran *cooperative learning* adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompoknya (Sembiring & Maputra, 2015:3).

Dengan demikian keterampilan komunikasi yang baik yang dimiliki guru akan memberikan iklim belajar yang positif dalam proses penanaman nilai-nilai multikultural yang berpengaruh pada perilaku dan kemampuan belajar siswa. Penelitian ini memfokuskan pada sekolah SD Trirenggo Yogyakarta yang merupakan sekolah inklusi. Sekolah Dasar Negeri 1 Trirenggo terletak di Klembon, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Sekolah ini adalah perpaduan antara SD Klembon dan SD Tanubayan tahun 2007 dan diberi nama SD Negeri 1 Trirenggo Yogyakarta. Sekolah inklusi dalam penyelenggaraan pendidikannya melaksanakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar (Wahyudi & Kristiawati, 2016: 6). Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah yang dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam menyatukan anak-anak memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan komprehensif dalam pendidikan secara menyeluruh (Smith, 2006: 46).

SD Trirenggo dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Istiani Nurhasanah, M.Pd. selain itu ada sekitar 17 tenaga guru yang terdiri dari 12 guru kelas, 1 guru Agama Islam, 2 guru olahraga, 1 guru karawitan, dan 1 guru batik. Negeri 1 Trirenggo ini merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. SD Negeri 1 Trirenggo juga merupakan sekolah model pendidikan berbasis budaya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1980 Tahun 2014. Selain itu, SD Negeri 1 Trirenggo juga masuk nominasi Sekolah Sehat tingkat provinsi dan dalam penilaian menuju sekolah Adiwiyata.

Dengan model sekolah inklusi ini memungkinkan anak-anak yang berkebutuhan khusus memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah umum sebagaimana sebagaimana yang diperoleh oleh anak-anak normal. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang-orang atau kelompok-orang yang berbeda. Hal itu dikarenakan keterampilan komunikasi tidak

hanya penting untuk proses komunikasi namun juga faktor yang dapat membantu keberhasilan siswa dalam mengelola emosi dan sosial mereka. Keterampilan komunikasi dan motivasi bekerja merupakan dua hal yang penting untuk dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran untuk proses *knowledge sharing* pada siswanya. Keterampilan Komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh guru/pendidik untuk dapat meningkatkan kinerja belajar para siswa. Dari uraian di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah penanaman nilai-nilai multikultural dipengaruhi oleh kompetensi komunikasi guru di Sekolah Dasar Trirenggo Yogyakarta?". Adapun tujuan penelitian antara lain: untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural ini dapat dipengaruhi oleh kompetensi komunikasi guru di SD Trirenggo Yogyakarta. Manfaat penelitian ini, selain memberikan manfaat akademik, juga memberikan manfaat praktis terutama bagi para guru untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi komunikasinya. Manfaat yang terakhir yang diharapkan adalah manfaat sosial, yang ditujukan pada masyarakat banyak untuk menyadari bahwa dengan kompetensi komunikasi yang baik dari guru sekolah inklusi maka akan sangat mendukung tujuan pendidikan terutama di sekolah inklusi semakin membaik ke depannya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Karakteristik Penelitian kualitatif antara lain (Cresswell, 2010:15): dilakukan pada kondisi yang alamiah, Peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*), Rancangan yang berkembang (*emergent design*); bagi para peneliti kualitatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis, Beragam sumber data (*multiple sources of data*); para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Analisis data induktif (*inductive data analysis*); para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas (induktif), dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Pada penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memahami masalah sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar alamiah (Gunawan, 2017: 81). Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada proses daripada produk

atau *outcome*, bersifat penafsiran (*interpretive*, pandangan menyeluruh (*holistic account*); para penelitian kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti. Sedangkan pendekatan studi kasus, melihat pada keutuhan dari objek perlu dipertahankan. Sumber data berupa data primer diperoleh langsung dari hasil pengamatan (observasi), wawancara langsung dengan informan baik secara individu maupun secara kelompok. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Zamzami, Lucky, & Hendrawati, 2014: 41). Pertimbangan tertentu ini, maksudnya adalah orang yang dianggap lebih mengetahui dan memiliki banyak informasi tentang objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 3 (tiga) informan yaitu informan 1 (Kepala Sekolah), informan 2 (Guru Mata Pelajaran PKN) dan informan 3 (Guru Mata Pelajaran IPS). *Data collections* (Pengumpulan Data), adalah fase pengumpulan data dengan teknik-teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi.

Dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh dapat dipandang telah jenuh. Analisis data dengan menggunakan model ini, terbagi menjadi empat element penting, yakni: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/drawing/verivication*. *Data Reduction* (Reduksi Data), ini merupakan proses reduksi data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian secara relatif cukup banyak oleh karena itu penulis perlu mereduksi data-data yang dipandang tidak relevan dengan penelitian. Mereduksi data dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk merangkum, memilih hal-hal yang benar-benar esensial dan terkait dengan penelitian. *Data Display* (Penyajian Data). Setelah data-data direduksi maka proses penyajian data dapat dilakukan. Umumnya, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi), setelah data direduksi dan disajikan maka kesimpulan awal mulai ditarik namun hanya bersifat sementara. Kesimpulan ini harus diverifikasi atau diuji keabsahannya agar dapat diketahui benar atau tidaknya data yang telah dikumpulkan. Pada uji keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan mencocokkan hasil observasi penulis dengan keterangan narasumber dan juga melakukan Triangulasi sumber

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Dalam melakukan kegiatan tersebut maka diperlukan kemampuan komunikasi yang baik dengan anak didiknya. Kemampuan komunikasi menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh guru. Keterampilan komunikasi pada guru sangat membantu dalam proses penanaman nilai-nilai multikultural di sekolah dasar inklusi karena terkait dengan kemampuannya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut. Dengan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, proses penyampaian pesan atau informasi dapat secara mudah dipahami oleh orang lain yang dituju. Kemampuan komunikasi yang baik pada guru diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu ataupun sekolah sehingga membantu proses penanaman nilai-nilai multikultural. Guru berupaya menjadi komunikator yang memiliki peran penting dalam menentukan keefektifan komunikasi yang dilakukan. Keberhasilan komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk mempengaruhi komunikasi sebagaimana arah perubahan yang diinginkan.

Lingkungan komunikasi yang positif dapat mendukung kesempatan bagi peneliti untuk belajar mengenai keterampilan dan bagaimana berkomunikasi lebih baik. Kemampuan komunikasi yang baik akan mempermudah proses *transfer knowledge*, karena akan mudah saling memahami informasi yang bertukar. Keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal yang perlu dikuasai oleh peneliti adalah komunikasi interpersonal yang mendukung dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, sehingga seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diampunya akan tetapi harus mampu menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif.

Kompetensi komunikasi yang pertama yang harus dimiliki guru adalah motivasi dalam komunikasi dengan anak-anak didik. Berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi dalam kegiatan komunikasi untuk mendukung belajar di sekolah, pihak SD Trirenggo menurut Informan 1 yang disetujui juga oleh informan 2 dan 3, bahwa sekolah ini memiliki beberapa langkah yang dilakukan guru, antara lain "memberikan pujian". Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian itu bisa dikatakan sebagai bentuk *reinforcement* yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri siswa. Dalam hal gaya komunikasi yang dilakukan dengan siswa baik siswa reguler dan juga siswa berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan

situasi yang ada. Menurut pengakuan kepala sekolah selaku informan 1:

"Peran dan fungsi kepala sekolah harus bisa menjadi contoh bagi seluruh warga sekolah dengan amanah yang telah diberikan. Harus bisa berfungsi sebagai *leader* atau pemimpin yang memiliki jiwa besar, sabar, percaya diri, tanggungjawab, mampu menjadi teladan yang juga paling penting adalah memiliki emosi yang stabil dan mampu menjalin komunikasi yang baik terutama dengan anak-anak"

Dalam hal *knowledge* atau pengetahuan, guru perlu memiliki pengetahuan dalam hal konten yaitu pengetahuan mengenai apa akan diinformasikan dan pengetahuan procedural adalah pengetahuan bagaimana cara menyampaikan pesan yang diciptakan. Dalam hal *skill* atau ketrampilan. Dalam pengertian ini guru menerapkan pola-pola komunikasi empati melalui ketrampilan berbahasa yang baik, verbal dan non verbal dan mau mendengarkan, dapat berperilaku seluas mungkin, dan memiliki kemampuan mengurangi ketidakpastian. Kompetensi komunikasi sebagaimana dinyatakan oleh Purwasito (2017: 284), bahwa ketrampilan komunikasi adalah kemampuan dalam bertindak komunikasi secara efektif dan berhasil. Kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan kegiatan dalam menanamkan nilai-nilai multikultural diimplementasikan melalui pembelajaran formal dan juga kegiatan non formal; yang menekankan menekankan pada aspek moral dan akhlak terpuji yang termuat dalam materi pelajaran sangat urgen membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik atau dengan kata lain memiliki kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi diperlukan dalam penanaman nilai-nilai multikultural yang meliputi lima kegiatan pendidikan multikultural yaitu:

- a. *Content Integration*: Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/ disiplin ilmu. Bentuk kongkrit yang dilakukan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran. *The Knowledge Construction Process*: Mengamati siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam pelajaran (melatih disiplin). Bentuk kongkrit yang dilakukan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah proses konstruksi pengetahuan dilakukan dengan memahami siswa yang berbeda dalam pemberian materi pembelajaran dan menerapkan kedisiplinan pembelajaran.
- b. *An Pedagogy*: Menyesuaikan metode

pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya maupun sosial. Bentuk kongkrit yang dilakukan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pembelajaran khusus-kurikulum adaptif. Hal tersebut selaras dengan informan 2 yaitu guru mata pelajaran PKN di SD Tlirenggo yang mengatakan: “ kita sebagai guru harus mampu melakukan persiapan RPP, mempersiapkan media yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Metode yang dilakukan harus kreatif. Kalau hanya ceramah aja maka jadi terbatas dan siswa mudah bosan. Maka bisa dengan memberi kertas tadi misalnya tentang toleransi, tentang hemat, dan lain-lain. Kalau anak inklusi cukup nulis. Udah nulis mau aja itu sudah prestasi. Anak inklusi ini memang butuh perhatian lebih maka harus di dampingi.” Di sekolah ini guru menerapkan kurikulum yang adaptif dan mampu melihat siswa secara beragam dengan keunikan masing-masing. Sebagai kepala sekolah wajib melakukan motivasi dorongan dengan melakukan komunikasi aktif dengan para guru dan anak didiknya. Salahsatunya seperti pernyataan informan 1 yang dikutip penulis sebagai berikut: “Saya jelaskan semua termasuk ke guru juga. Di jaga komunikasi ke anak anak ataupun orangtua. Karena ga gampang tho (tidak mudah) bu kalau memiliki anak inklusi seperti ini. Dan kita kan ga nyuwun (*Bahasa Jawa; tidak meminta*). Ada aja perilaku anak anak Anak berkebutuhan khusus yang memancing mancing negatif. Saya wis pesen ke guru guru ojo susah harus sabar.”

- c. *Prejudice Reduction*: Mendefenisikan karakteristik siswa dengan pembinaan karakter untuk mengurangi prasangka pada orang lain. Berbagai kegiatan untuk mendukung pembinaan karakter peserta didik dilakukan yaitu dengan pengembangan diri. Upaya untuk membentuk watak, karakter dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Sebelumnya sekolah Tlirenggo ini banyak yg menganggap sekolah yang isinya anak-anak bodoh karena di dalam pelayanan sekolah ini juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus, namun lama-lama pandangan tersebut luntur seiring dengan berbagai macam kegiatan positif yang dilakukan dan juga prestasi sekolahnya. Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan dilakukan kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya seperti karawitan, dan lain lain. Menurut informan 1 yaitu kepala sekolah SD Tlirenggo: “Kita dapat memanfaatkan yang

ada di sekitar sekolah kita ini, bisa memanfaatkan lapangan misalnya untuk olahraga dan juga mengembangkan diri melalui permainan anak anak, kemudian kantin untuk dimanfaatkan supaya anak anak bisa makan sayur yang ditanam di kebun kita sendiri.” Lebih lanjut informan 1 menyatakan: “Saya buat gebrakan 5 gerakan. Ada Program Gemais. Gerakan makan ikan dan sayur. Orang tua di sediakan ikan dan sayur untuk mencegah anemia. SD 1 dulu waktu belum gabung kan seger-seger nah di sini kok kuru-kuru (*Bahasa Jawa: kurus kurus*). Awalnya kantin 2 meja. Kantin kantin akhirnya jadi unggulan karena masak sayur dari kebon sendiri. Kantin di ambil dari kebon sekolah. Saya memanfaatkan lahan sempit. Ada terong, kangung, bayam dll. Akhirnya dari badan ketahanan pangan senang dan akhirnya di bantu juga. Anak anak juga kan jadi hemat dan sehat tho bu wong ambil dari kebon sendiri. Bekal dari rumah bisa nasi. Dan lain lain. Berusaha untuk mandiri yang kalau orang luar banyak menilai sekolah isinya bocah-bocah kemplo (*Anak-anak Bodoh*), lama-lama orang tidak menilai seperti itu lagi. Alhamdulillah”. Jadi sekolah Tlirenggo ini dulunya memiliki pandangan *stereotype* buruk sebagai sekolah yang isinya anak-anak yang tidak pintar. Tetapi seiring dengan waktu dan prestasi yang di raih maka sekolah ini justru berhasil menjadi sekolah Adiwiyata, dan juga banyak prestasi-prestasi yang diraihinya.

- d. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Menurut informan 3, dengan bergabungnya anak-anak dalam kelompok maka akan terlihat kerjasama dan saling tolong menolong, termasuk menolong anak anak yang berkebutuhan khusus dan anak anak ABK ini tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Dengan kerja kelompok, dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai pendapat orang lain, hal mana mereka telah saling membantu kelompok dalam usahanya mencapai tujuan bersama. Bisa juga untuk mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Siswa akan menjadi lebih aktif, berusaha mencari solusi atas masalah atau tugas yang dihadapinya dengan melakukan hal tersebut siswa akan menjadi pribadi yang pekerja keras, pantang menyerah dan kemampuan berpikir siswa dalam mencari jalan keluar atas masalahnya semakin meningkat. Siswa akan belajar bagaimana

- menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang dibebankan kepadanya selain itu pemberian tugas juga mendidik anak menjadi lebih inisiatif dalam menyelesaikan berbagai masalah.
- e. Secara keseluruhan dalam penanaman nilai-nilai multikultural dalam pendidikan akan memosisikan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek pendidikan, yang

sesuai dengan ciri peserta didik yaitu berdaya menggunakan kemampuannya dan kemauannya, memiliki keinginan untuk berkembang, memiliki latar belakang sosio-kultur yang berbeda, memiliki potensi secara individu. Sedangkan untuk melihat betapa pentingnya kompetensi komunikasi dalam penanaman nilai-nilai multikultural, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kompetensi komunikasi guru dalam penanaman nilai-nilai multikultural

Penanaman nilai-nilai multikultural	Kompetensi komunikasi Guru		
	Motivasi	Pengetahuan	Ketrampilan atau kemampuan
<i>Content Integration</i> Integrasi dalam mata pelajaran	Dalam pemberian motivasi komunikasi dilakukan melalui pemberian pujian dalam capaian mata pelajaran ketika siswa menunjukkan progres kemampuan sekecil apapun yang dicapai.	Memahami pengetahuan dalam hal konten isi materi pembelajaran yang dituangkan dari perencanaan pembelajaran hingga evaluasi dan prosedur pelaksanaannya	Dengan cara menerapkan komunikasi empati dan memiliki sensitivitas terhadap interaksi yg dilakukn dengan fleksibel, sabar, empati. Guru luwes dalam bergaul dengan peserta didik. Guru tidak merasa lebih berkuasa di kelas. Siswa dianggap sebagai sahabat oleh guru.
<i>The Knowledge Contruction Process</i> Proses konstruksi pengetahuan dilakukan dengan memahami siswa yang berbeda	Motivasi diri untuk berkomunikasi dengan melakukan penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam pembelajaran	Memiliki pengetahuan dasar dalam memahami latar belakang siswa dengan segala keunikan yang dimiliki	Memiliki ketrampilan pengelolaan emosi yang stabil dan terbuka pada perbedaan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik yang beragam
<i>An Pedagogy</i> Menggunakan metode pembelajaran khusus-kurikulum adaptif	Dorongan dengan melakukan komunikasi aktif dengan para guru dan anak didiknya dalam penerapan kurikulum yang fleksibel	Memiliki pengetahuan dalam berkomunikasi yang berkaitan dengan metode pembelajaran	Memiliki ketrampilan komunikasi dalam tranfer ilmu yang disesuaikan dengan siswa
<i>Prejudice Reduction</i> Pembinaan karakter untuk mengurangi prasangka	Dalam kompetensi komunikasi yang berkaitan dengan pemberian dorongan motivasi bahwa semua manusia adalah sama yang disampaikan secara verbal atau dengan media komunikasi lainnya	Memiliki pengetahuan dalam penyampaian materi- materi pembelajaran pendukung untuk menghilangkan perbedaan	Memiliki ketrampilan komunikasi empatik dalam pembinaan karakter
Melatih dalam kelompok	Selalu memberikan dorongan dengan apresiasi dan pujian terhadap apa yang di capai anak didik yang bergabung dalam dalam kelompok tugas tanpa membedakan baik anak reguler ataupun anak-anak ABK.	Memiliki pengetahuan pembelajaran dalam bentuk mengajarkan anak kegiatan ekstrakurikuler olahraga, karawitan dan seni membuat.	Dengan menerapkan komunikasi yang santun dan berlatih ketrampilan komunikasi yang positif dengan tim atau kelompok

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam hal gaya komunikasi yang dipilih para guru dari seluruh informan di SD Trirenggo, yaitu

Tabel 2. Gaya Komunikasi Guru

Sifat Gaya Komunikasi	Karakteristik Komunikasi	Alasan
Rileks Penuh perhatian	Tenang, nyaman Pendengar yang baik, memberikan semangat	Supaya anak-anak merasa nyaman Hal ini wajib diberikan karena anak-anak kondisinya beragam
Terbuka	Menyatakan emosi dan perasaan dengan apa adanya	Dengan terjalinnya keterbukaan, masing-masing pihak merasa bebas bertindak, saling menjaga kejujuran
Ramah	Menawarkan umpan balik dan dukungan yang positif	Dapat mengetahui kelebihan-kelebihan siswa dan bukan dilihat dari kelemahannya, guru juga menghindari kecenderungan untuk membandingkan siswa dengan siswa lain

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam pelaksanaannya banyak kelemahan dan kekurangan antara lain seperti yang dinyatakan kepala sekolah (informan 1) sebagai berikut:

“Wah lha kalau masalah hambatan meniko njih ada (Bahasa Jawa: hambatan ini juga ada). Karena pada dasarnya belum semuanya siap mengingat untuk mengelola sekolah seperti ini itu ya harus panggilan hati, apalagi mesti memahami perbedaan kemampuan meniko. Wong kalau ada pertemuan antar sekolah, sampai dibilang lha kae sekolah sing bocahe kemplo-kemplo (bodoh-bodoh). Yah begitulah bu, kita siap kok. Kita juga manfaatin yang ada di sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tanpa membedakan dengan baik. Dengan gaya komunikasi yang baik dan terbuka. Karena kalau dilihat dari sarana dan prasarana masih kurang tho bu. Kita buat warna yang menarik. Yang penting semua saling memahami, insyaallah bisa berjalan baik. Begitu bu.”

Sehingga dapat disimpulkan dari sisi kekurangan di sekolah ini adalah masih ada beberapa guru yang kurang kompeten dalam komunikasi pembelajaran serta kurangnya wawasan dalam proses pengajaran. Guru guru reguler yang sudah kewalahan dan belum siap terutama dalam hubungan penanganan komunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Hambatan lain adalah berasal dari orangtua yang rata-rata menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak terutama anak-anak inklusi, terkadang orangtua kurang memahami bahwa pelayanan di sekolah masih sangat terbatas. Bahkan untuk komunikasi dengan orangtua siswa ABK tertentu cukup menyulitkan karena kekurangpahaman mengenai pendidikan inklusi.

Hambatan lain yang ditemui adalah guru kurang kreatif dan inovatif maka anak didik cepat merasa bosan, jenuh, kurang merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung. Informan 2 dan 3 mengakui bahwa terkadang mereka merasa

harus berupaya keras untuk aktif dan kreatif dalam pemberian pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan. Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diampunya akan tetapi harus mampu menanamkan nilai-nilai ke-beragaman yang ada sebagai sekolah inklusi dengan menggunakan pola-pola komunikasi yang dapat diterima anak didik mereka. Dalam hal gaya komunikasi dipilih adalah gaya komunikasi yang penuh perhatian, terbuka dan ramah. Guru berupaya menjadi seorang komunikator yang kompeten, seseorang itu harus dapat mengenal keterampilan mana yang diperlukan di dalam situasi tertentu, dengan keterampilan yang dimiliki, termotivasi untuk menggunakan keterampilan dengan baik. Komunikasi terjadi secara transaksional. Setiap pengalaman komunikasi merupakan hasil akumulasi pengalaman yang sebelumnya. Pengalaman baru mempengaruhi pengalaman yang akan datang. Sehingga komunikasi yang terjalin dapat efektif dan berbagi pengertian dengan orang lain.

D. KESIMPULAN

Perlu nya kompetensi komunikasi guru ini tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 yang menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan inti ke-7 (tujuh). Kemampuan komunikasi yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dan dengan kemampuan komunikasi yang baik akan mempermudah *transfer of knowledge*. Disinilah diperlukan kompetensi komunikasi guru. Kompetensi komunikasi sangat *urgent* dibutuhkan karena berkaitan dengan tiga hal yaitu *Motivation* (motivasi), *knowledge* (pengetahuan), dan *skill* (ketrampilan). Guru yang memiliki kompetensi komunikasi akan mampu membangun komunikasi sekaligus menanamkan pengaruh positif pada siswanya dalam hal pemahaman nilai-nilai multikultural. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan ke dalam pelajaran integrasi

pelajaran, memahami siswa yang berbeda, penggunaan metode pembelajaran khusus, pembinaan karakter, dan melatih kerjasama dalam kelompok. Kemampuan komunikasi harus dimiliki seorang guru dalam ranah pembelajaran melalui penanaman nilai-nilai multikultural menjadi ketrampilan yang penting dimiliki oleh guru. Ketrampilan komunikasi pada guru sangat membantu dalam proses kegiatan pembelajaran, terkait dengan kemampuannya dalam mengkomunikasikan gagasan atau ide dalam pembelajaran multikultural dalam bentuk verbal atau non verbal. Guru seharusnya memiliki ketrampilan komunikasi yang baik dan mumpuni sehingga proses penyampaian pesan pembelajaran dapat dengan mudah dipahami para siswa. Guru memiliki gaya komunikasi antara lain penuh perhatian, terbuka dan ramah

yang pada akhirnya akan memperlancar proses pembelajaran yang ada. Untuk kajian mendatang perlu di kaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi guru atau juga dapat mengukur secara statistik kemampuan komunikasi tersebut.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt. selaku Ketua LPPM Universitas Nasional Jakarta yang selalu memberikan dorongan untuk aktif dalam penelitian dan Ibu Istiani Nurhasanah selaku Kepala Sekolah dan tim Guru SD Trirenggo Bantul Yogyakarta yang menerima dengan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikalia.; Anita Maharani. (2009). *Studi Kasus pada Mahasiswa Tingkat Pertama di Universitas Paramadina*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 6 No 1, hal: 25-44.
- Al Hakim, Suparlan; Sri Untari. (2018). *Pendidikan Multiultural: Strategi Inovatif Pembelajaran dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani Media.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pt Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamalik, Oemar. (2017). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdani. (2015). *Meningkatkan Pengetahuan Konseptual Dan Pengetahuan Prosedural Mahasiswa Melalui Pendekatan Diskursus Matematik*. Jurnal Pendidikan Matematika Dan IPA Vol. 6. No. 1, hal:13-25.
- Haryanti, Desi. (2013). *Memperbaiki Pengetahuan Dan Kemampuan Prosedural Siswa Melalui Metode Penugasan Berbasis Kesalahan*. Pontianak: Tanjungpura
- Iriantara, Yosali; Usep Syaripudin. (2018). *Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Purwasito, Andrik. (2015). *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2015). *Kompetensi Komunikasi Calon Sdm Public Relations*. Jurnal Visi Komunikasi. Vol 14, No 2, hal: 255-271.
- Sembiring, Lala Septiani; Yantri Maputra. (2015). *Mengembangkan Kerjasama (SoftSkill) Melalui Penerapan Metodacooperatif Learning Dan Experiential Learning Dalam Mata Kuliah Psikologi Kewirausahaan*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (Jantro). Vol 17, No 1, hal: 1-8.
- Samovar, Larry A.; Richard E Porter, (2010). *Komunikasi Lintas Budaya: Communication Between Cultures*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Smith, J David. (2018). *Sekolah Untuk Semua: Teori dan Implementasi Inklusi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Wahyudi ; Ratna Krisitiawati. (2018). *Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, (Tinjauan Sekolah Menengah Pertama) Kemendikbud Tahun 2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
- Wulandari, Novita. (2013). *Kompetensi Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Student Center Learning di SMA N 9 Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zulqarnain, (2016). *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren D DI-AD Mangkoso Barru Sulawesi Selatan*. Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 2, hal:193-205.
- Zamzami. Lucky, & Hendrawati. (2014). *Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Maritim Untuk Upaya Mitigasi Bencana Di Sumatera Barat*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (Jantro), Vol 16, No 1, hal: 37-48.



REGULASI KONFLIK PEMILU (Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung)

Sri Anggraini^{1*}, Afrizal², Indraddin³

¹ Graduate Program of Tata Kelola Pemilu, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

^{2,3} Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 17 October 2019
Review : 03 November 2019
Accepted : 24 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Election; Conflit; Resolution; Regulation

CORRESPONDENCE

*E-mail: ie.anggraini04@gmail.com

ABSTRACT

In the election, the conflict will always exist. Whether it is a conflict between the election participants, between the participants and the election organizers or among the election organizers itself. The purpose of this research is to analyze the contribution of the Election Conflict Regulation on handling the election conflict in Sijunjung Regency and to analyze the response of the conflicting parties to the usage of the Election Conflict Regulation in Sijunjung District. This research used a qualitative approach with a case study plan. To see this problem, the researcher used Ralf Dahrendorf's Conflict Theory of Regulation which explains that conflict regulation can affect the high and low escalation of conflicts that occurred. The results showed that in the resolution of conflicts that had occurred both in the 2015 Regional Heads Election conflict or the conflict during the preparation of the 2019 General Election, researcher found that the General Election Conflict Regulation played a role / contributed in resolving the conflicts, where the conflicts could be controlled and resolved properly without any increase in violence. This was proven by the conflicting parties that accepted the decision given by the authorities in its settlement plus there were no other conflicting actors involved in the conflict.

A. PENDAHULUAN

Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan suatu proses atau sarana demokratis yang dilaksanakan dalam menyalurkan aspirasi dan keinginan rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada yang mempengaruhi atau mengintervensi sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan pemilihan yang dilakukan secara nasional yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, sedangkan Pilkada merupakan pemilihan yang dilakukan dalam konteks lokal dalam memilih kepala daerah baik itu gubernur, bupati ataupun walikota.

Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen. Menurut Surbakti dan Nugroho (2015:20) independen berarti adanya kebeba-

san bagi penyelenggara Pemilu dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

Menurut UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, yang dimaksud penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) suatu lembaga yang tidak secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, karena DKPP merupakan lembaga yang menindak penyelenggara Pemilu apabila terjadi pelanggaran kode etik.

Dalam menyelenggarakan Pemilu ada regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang harus dipatuhi baik itu oleh penyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggara

Pemilu dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Selain itu dalam regulasi Pemilu juga terkandung regulasi konflik Pemilu yang menjadi pengendali apabila terjadi pertentangan baik itu antara sesama peserta Pemilu, antara sesama penyelenggara Pemilu ataupun antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Menurut Surbakti dan Fitrianto (2015:77) hubungan antara kelembagaan KPU dan Bawaslu tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang saling melengkapi. Titik temu antara KPU dan Bawaslu adalah pada kepentingan bersama untuk saling melakukan koordinasi. Sedangkan dalam UU Nomor 15 tahun 2011 dinyatakan bahwa keberadaan KPU dan Bawaslu secara ideal berada dalam satu nafas harmonis sebagai penyelenggara Pemilu, maksudnya keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan tapi juga oleh peran Bawaslu. Disini KPU sebagai pelaksana teknis setiap tahapan Pemilu dan Bawaslu pada fungsi pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dapat diartikan, bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan dasarnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

Walaupun sudah ada aturan yang jelas mengatur bagaimana hubungan antara sesama penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu atau hubungan Penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu (partai politik), namun fenomena yang ada sering terjadi pertikaian atau konflik dimana akhirnya berujung pada kekerasan dan tidak jarang menimbulkan korban.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam UNDP (2009) bahwasanya Pemilu memiliki peran ganda yaitu sebagai arena konflik dan sebagai instrumen resolusi konflik. Sebagai arena konflik adalah konsekuensi langsung dari ketegangan antar partai yang saling bertarung yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan fisik ataupun non fisik, sedangkan sebagai instrumen resolusi konflik Pemilu dijadikan sebagai proses untuk mengakhiri konflik dengan

menyerahkan keputusan ketangan rakyat. Senada dengan itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, pada dasarnya Pemilu atau Pilkada adalah konflik karena didalamnya merupakan pertarungan memperebutkan kekuasaan dan konflik tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada (Beritasatu.com).

Sebagaimana menurut Surbakti dalam Darmawan (2010:40) konflik merupakan "benturan" seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah. Senada dengan itu Pruit dan Rubin (2004:10) menyatakan kalau konflik merupakan perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Konflik yang terjadi didalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada sangat menarik perhatian, dikarenakan konflik dapat mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu dan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pilkada. Konflik biasanya tidak hanya terjadi ditingkat pusat namun sampai ke daerah seperti kabupaten/kota. Konflik dapat terjadi antara sesama penyelenggara Pemilu, antara penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu, antara sesama peserta Pemilu ataupun antara pendukung peserta Pemilu. Salah satu daerah yang didalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkadaanya terjadi konflik adalah Kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2015 Kabupaten Sijunjung melaksanakan Pilkada, dan dalam penyelenggaraan tersebut terjadi konflik yang berujung dengan dilaporkannya KPU Kabupaten Sijunjung oleh Panwaslu kepada DKPP dengan dugaan KPU melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kemudian pada awal persiapan Pemilu 2019, terjadi lagi konflik antara KPU Kabupaten Sijunjung dengan Partai Politik yaitu PDIP dan juga berujung dengan dilaporkannya KPU ke Panwaslu karena diduga melakukan pelanggaran administrasi.

Kejadian yang terjadi di Kabupaten Sijunjung hampir sama dengan yang terjadi di daerah Sidoarjo, Menurut Purnamasari, Kahfi dan Rachman (2015:1-116) terkait dengan sudah jelasnya peran, tugas dan wewenang dari penyelenggara Pemilu seperti yang tertera di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, akan tetapi masih saja sering terjadi konflik selama proses penyelenggaraan Pemilu.

Secara umum konflik yang terjadi dikarenakan tidak adanya desain dan implementasi penyelenggara Pemilu, ketidakjelasan regulasi, tumpang tindih peranan dan

interpretasi yang berbeda atas peraturan dan juga ketidakcakapan menangani perihal teknis Pemilu. Seharusnya dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada semua pihak yang terlibat harus memahami regulasi atau aturan yang ada sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dan juga tidak akan menimbulkan konflik dalam penyelenggaraannya. Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada ada beberapa sumber masalah yang menyebabkan terjadinya konflik menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri, diantaranya yaitu :

1. Independensi, netralitas dan Profesionalisme penyelenggara Pemilu. Hal ini berkaitan dengan kinerja DKPP, dimana DKPP telah memecat sebanyak 71 Anggota KPU dan Pengawas Pemilu dari berbagai daerah disebabkan karena tidak independen/netral. Indikasi ketidaknetralan KPU atau Pengawas Pemilu berkaitan dengan adanya relasi kepentingan partai politik, kekerabatan dan primordialisme.
2. Akurasi Data Pemilih Untuk Pemilu/Pemilukada. Pada tahun 2009, permasalahan DPT menjadi bahan acuan, agar tidak terjadi pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada berikutnya. Dimana pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 tersebut diduga banyak terjadi kecurangan diantaranya pengelembuan suara sampai surat suara telah dicontreng terlebih dahulu. Akibat ketidakakuratan data pemilih tersebut sangat rawan menimbulkan konflik.
3. Pelanggaran pada tahapan Pemilu/Pilkada yang berpotensi terjadinya konflik.
 - a. Pencalonan. Ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan dari calon atau pendukung calon ketika gugur dalam tahap pencalonan.
 - b. Pelanggaran Masa Kampanye. Pada masa kampanye beberapa pelanggaran yang berpotensi menyebabkan konflik adalah tindakan mencuri start, perilaku intimidatif dengan menunjukkan kelemahan dan keburukan lawan, ketidaknetralan PNS dan pemanfaatan sumber daya daerah oleh incumbent terkait penggunaan anggaran, aparaturnya PNS dan dukungan tokoh-tokoh lokal.
 - c. Pelanggaran Pada Rekapitulasi Hasil Suara. Untuk di TPS kecurangan jarang terjadi, hal disebabkan karena banyak pihak baik itu saksi atau warga yang mengikuti jalannya penghitungan suara. Namun ditingkat kecamatan, kecurangan lebih sering terjadi dengan memindahkan suara dari calon satu ke calon yg lainnya.
 - d. Penetapan Pemenang. Konflik dapat terjadi apabila tidak ditetapkannya pemenang secara sah dan resmi oleh

pihak yang berkompeten.

- e. Dinasti Politik dan Cacat Demokrasi. Di Indonesia sering terjadi politik dinasti, dimana adanya hubungan kekerabatan antara kepala daerah dengan pejabat pemerintah. Pola lainnya adalah dengan maju pada waktu Pilkada dengan posisi yang berbeda, hal ini bertujuan agar dinasti politiknya bisa terbangun lebih besar.
- f. Pengaruh primordialisme dan etnosentrisme. Biasanya yang sering terjadi apabila ada calon atau kandidat yang kalah, untuk membuat kekisruhan disebarluaskan isu SARA untuk menjatuhkan pihak lawan.

Banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa konflik dapat teratasi dengan sendirinya apabila dibiarkan merupakan anggapan yang salah, karena kenyataannya konflik akan terus berkembang dan akan semakin sulit dikelola apabila tidak cepat diselesaikan. Agar tidak terus berkembang maka diperlukanlah regulasi yang tepat dalam menangani konflik tersebut.. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori regulasi konflik menurut Dahrendorf. Menurut Dahrendorf konflik merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam sebuah masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik timbul berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dikarenakan adanya posisi-posisi para elit yang memiliki kekuasaan untuk memerintah terhadap posisi lain yang menjadi sasaran perintah. Selain itu untuk menyelesaikan dan mengendalikan suatu konflik menurut Dahrendorf (1986:280) ada istilah regulasi konflik, yaitu merupakan bentuk-bentuk pengendalian pertentangan yang lebih menunjukkan dirinya sendiri kepada perwujudan pertentangan daripada sebab-sebabnya. Dahrendorf juga menyatakan, untuk efektifnya suatu regulasi ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu *pertama* kedua kelompok yang bertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan, *kedua* bagaimana kondisi kelompok-kelompok yang bertentangan (harus bersatu) dan *ketiga* kelompok yang bertentangan harus menyetujui aturan permainan formal tertentu.

Adapun bentuk-bentuk regulasi konflik yang dinyatakan oleh Dahrendorf adalah konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Konsiliasi adalah pihak yang berkonflik berdiskusi secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memaksakan kehendak, disini ada pihak ketiga yang hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap baik. Mediasi yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berkonsultasi dengan pihak luar yang diminta untuk

memberikan nasehat, namun nasehat tersebut tidak mengikat. Arbitrasi yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal dan ada pihak ketiga sebagai arbitrator.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang regulasi konflik Pemilu ini. Disini peneliti berasumsi bahwa dengan adanya regulasi konflik Pemilu, konflik yang terjadi akan dapat diselesaikan dan konflik tidak akan mengarah ketingkat kekerasan. Permasalahan yang kemudian menarik untuk dibahas adalah apa kontribusi regulasi konflik Pemilu terhadap penanganan konflik Pemilu yang terjadi di Kabupaten Sijunjung. Disini konflik yang dimaksud adalah pertentangan yang terjadi antara KPU dan Panwaslu serta antara KPU dan PDIP. Dalam kaitan dengan rumusan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kontribusi regulasi konflik Pemilu terhadap penanganan konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung. Ini dilihat dari segi pengaturan normatif penyelesaian konfliknya dan cara konflik tersebut diselesaikan. (2) untuk menganalisis respon para pihak yang terlibat konflik terhadap penanganan regulasi konflik Pemilu di Kabupaten Sijunjung, ini dilihat dari segi hasil penyelesaian konflik dan respon atas hasil yang dikeluarkan dari penyelesaian konflik.

B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan rancangan studi kasus. Dimana Menurut Ulfatin (2015:25) studi kasus merupakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terinci dengan tujuan mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin menggambarkan dan memaparkan bagaimana proses terjadi konflik, penyelesaian konflik dan bagaimana regulasi konflik Pemilu berperan dalam penyelesaian konflik.

Agar tujuan dalam penelitian ini tercapai maka diperlukan data-data yang harus dikumpulkan berupa data primer dan data skunder. Data primer yaitu kata-kata dan tindakan yang diberikan oleh informan sedangkan data skunder berupa dokumen-dokumen seperti laporan-laporan yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan mencari informan-informan secara *purposive sampling* karena informan ini dianggap paham dan mengerti tentang isu dan permasalahan

yang terjadi. Informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisioner KPU Kabupaten Sijunjung, komisioner Panwaslu Kabupaten Sijunjung, Pengurus Partai Politik dan TPD (Tim Pemeriksa Daerah) perwakilan dari DKPP.

Untuk menganalisis data ada tiga Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *pertama*, reduksi data merupakan tahap menganalisis data dengan mengumpulkan data. *Kedua*, penyajian data yaitu menyajikan temuan penelitian dengan cara mengelompokkan data-data tersebut dan *ketiga*, menarik kesimpulan dari temuan yang dihasilkan tadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Pilkada 2015

Pada waktu pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan Pilkada. Dalam penyelenggara raannya ada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yaitu Drs. Muchlis Anwar. MSM - Maityetrinaldi. S.IP, Drs. H. Yuswir Arifin Dt. Indo Marajo - H. Arrival Boy dan Ashelfine. SH. MH - H.Alpian Kasir. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sijunjung tahun 2015 tersebut, terdapat laporan salah cetak terhadap C1 KWK Plano Hologram, yang menyebabkan KPU Kabupaten Sijunjung dilaporkan ke DKPP oleh Panwaslu Kabupaten Sijunjung karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, konflik sepertinya telah terjadi sebelum adanya kejadian salah cetak C1 KWK Plano Hologram tersebut. KPU Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwasanya laporan yang dibuat oleh Panwaslu ke DKPP terlalu mengada-ngada dan mendramatisir masalah. KPU menganggap jika Panwaslu mencari prestasi dari kasus yang terjadi, dimana Panwaslu bisa membuat masalah ini menjadi sesuatu yang besar karena disini tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kejadian salah cetak tersebut. Sedangkan Panwaslu Sijunjung berpendapat bahwasanya, laporan yang dibuat telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam hal salah cetak C1 KWK Plano Hologram, KPU Kabupaten Sijunjung melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Panwaslu dan Kesbang Pol Linmas. Koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah yang dituangkan

dalam Berita Acara untuk mengatasi supaya Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan telah disepakati atau disetujui oleh Panwaslu dan pihak terkait lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Sijunjung Juni Wandri dalam wawancara yang dilakukan :

“Untuk persoalan kasus itu tidak ada tekanan. Kalau secara kelembagaan demi menyelamatkan pemilihan hari itu, tentu kami harus sepakat untuk mencari solusi atas kesalahan pencetakan C1 KWK Plano Hologram. Karena itu merupakan prasyarat awal untuk melakukan telly atau penghitungan suara. Ketika kita di Panwaslu tidak sepakat, berarti kita akan menghambat proses pelaksanaan Pilkada makanya kita harus sepakat”.

Dengan adanya kejadian salah cetak tersebut KPU Kabupaten Sijunjung diduga oleh Panwaslu melakukan beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Dimana komisioner KPU diduga melanggar UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu dimana KPU dianggap tidak adil, tidak profesional dan tidak efektifitas dalam mengadakan formulir C1 KWK Plano Hologram.

KPU diduga melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012 dimana KPU diduga kurang memelihara dan menjaga kehormatan lembaga dengan adanya kesalahan cetak tersebut dan juga sikap KPU dianggap tidak mengetahui aturan pengawasan dengan mengabaikan undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh Panwaslu. KPU dianggap tidak ada memberikan perlakuan yang sama terhadap pasangan calon. Tidak menjelaskan kepada publik tentang kesalahan yang terjadi melalui pers.

Dari laporan yang diberikan oleh Panwaslu ke DKPP atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Dalam penyelesaiannya KPU dipanggil oleh DKPP untuk dimintai keterangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan dengan berpedoman kepada regulasi yang ada yaitu Peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu dimana apabila terjadi pelanggaran kode etik, DKPP lah yang berhak untuk menindak. DKPP menuangkan Hasil tersebut dalam putusan DKPP RI Nomor : 11/DKPP-PKE-V/2016, dimana dari keputusan tersebut DKPP memberikan sanksi kepada empat orang anggota KPU berupa peringatan keras yaitu Taifiqurrahman (Ketua), Atika Triana (Divisi Logistik), Didi Cahyadi

Ningrat (Divisi Hukum) dan Ade Yulanda (Divisi Teknis). Sedangkan Lindo Karsyah (Divisi Sosialisasi) dan Irzal Zamzami (Sekretaris) diberikan sanksi berupa peringatan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sri Zul Chairiyah K :

“Sanksi yang diberikan terhadap Lindo Karsyah (Divisi Sosialisasi) dan Irzal Zamzami (Sekretaris) hanya peringatan dikarenakan hasil dari rekomendasi TPD. Karena TPD sangat tahu bagaimana hasil kerja KPU. Kalau DKPP kan hanya tentang aturan-aturan. Hal itu dilihat dari ada orang yang *soft* dan keras terhadap aturan. Mungkin dilihat Lindo Karsyah (Divisi Sosialisasi) dan Irzal Zamzami (sekretaris) selama ini bekerjanya selalu benar”.

Atas keputusan tersebut KPU tidak bisa melakukan usaha banding untuk pembelaan diri, karena didalam aturan tidak ada yang mengatur tentang hal itu. Atas dasar itu juga KPU Kabupaten Sijunjung terpaksa menerima keputusan dari DKPP karena keputusan DKPP final dan mengikat, artinya keputusan DKPP tersebut merupakan keputusan akhir persidangan yang dilakukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Sijunjung melalui wawancara sebagai informan :

“Atas putusan DKPP itu, KPU tidak bisa melakukan apa-apa. Karena keputusan DKPP kan binding (final dan mengikat). Dalam celah hukumpun tidak ada lagi jalan, walaupun secara prosedur PTUN bisa memprosesnya. Namun bagaimana cara mengeksekusinya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut KPU mereka tidak bisa melakukan usaha apapun, karena dalam hal ini keputusan DKPP final dan mengikat. Walaupun bisa dilakukan secara prosedur ke PTUN, namun yang mengeksekusi tetap KPU Provinsi. Setelah dijatuhkan putusan oleh DKPP, KPU Provinsi harus langsung mengeksekusi keputusan tersebut.

2. Konflik Awal Persiapan Pemilu 2019

Pada awal persiapan Pemilu 2019 terjadi juga konflik yang melibatkan KPU Kabupaten Sijunjung dengan Partai Politik yaitu PDIP. Dalam hal ini KPU dinyatakan oleh PDIP melakukan pelanggaran administrasi. Atas dasar itulah, PDIP melaporkan KPU Kabupaten Sijunjung ke Panwaslu dengan dugaan pelanggaran administrasi. Permasalah-

han ini berawal pada waktu KPU Kabupaten Sijunjung melakukan verifikasi keanggotaan partai politik, dimana dalam pemenuhan persyaratan dukungan keanggotaan, PDIP menyerahkan hanya sesuai batas minimal dari persyaratan yang disyaratkan undang-undang yaitu sebanyak 233 Kartu Tanda Anggota). Hal ini bisa mengakibatkan PDIP tidak lolos sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Sijunjung, apabila ada salah satu dari anggotanya yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan ini diperkuat oleh pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Sijunjung.

Terbukti pada saat penelitian administrasi pertama ditemukan adanya dukungan keanggotaan PDIP yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Setelah dilakukan penyerahan perbaikan oleh PDIP, ternyata ada empat nama yang teridentifikasi keanggotaan ganda oleh SIPOL. Selain itu pada waktu penelitian administrasi juga ditemukan satu nama yang tidak lolos disebabkan karena nomor KTA tidak sesuai dengan yang diinput dalam SIPOL. Pada waktu dilakukan verifikasi faktual kegunaan dilapangan, dua orang diantaranya menyatakan mendukung PDIP sedangkan dua orang lagi menyatakan tidak mendukung partai manapun.

Dalam melakukan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Sijunjung menyatakan kalau pada waktu verifikasi faktual tersebut didampingi oleh staf Panwaslu. Namun dalam laporan yang diajukan oleh PDIP, menyatakan kalau dalam melakukan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Sijunjung telah melakukan intimidasi terhadap anggotanya sehingga menimbulkan ketakutan kepada mereka, yang menyebabkan mereka membuat keputusan tidak memihak partai manapun. Berdasarkan permasalahan itulah, akhirnya PDIP melaporkan KPU Kabupaten Sijunjung ke Panwaslu Kabupaten Sijunjung. Dari laporan itu PDIP menduga kalau KPU melakukan pelanggaran terhadap regulasi Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan hal itu PDIP melaporkan KPU ke Panwaslu dengan tuduhan pelanggaran administrasi. Sesuai dengan yang terkandung dalam regulasi konflik Pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2014, yang menyatakan bahwa Panwaslu adalah lembaga yang berhak menyelesaikan apabila terjadi pelanggaran administrasi.

Dari uraian yang disampaikan oleh PDIP dan keterangan dari saksi-saksi, Panwaslu memutuskan kalau KPU Kabupaten Sijunjung tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Panwaslu menyimpulkan berdasarkan jawaban yang sudah disampaikan baik oleh saksi dari PDIP ataupun dari KPU Kabupaten Sijunjung, menegaskan dan menyimpulkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sijunjung sudah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak terbukti secara materil substantif melakukan pelanggaran administratif seperti yang dituduhkan oleh pelapor. Disini Panwaslu bertindak sebagai arbitrator atas kasus yang terjadi antara KPU dan PDIP.

Atas keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslu, PDIP yang merasa sebagai pihak yang dirugikan berusaha melakukan usaha banding dengan mengirimkan laporan koreksi ke Bawaslu RI, namun hal itu tidak jadi terlaksana karena sesuai dengan aturan yang berlaku laporan yang dikirimkan tersebut sudah harus sampai tiga hari sesudah keputusan dikeluarkan. Atas dasar itu PDIP akhirnya menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari anggota Panwaslu Juni Wandri :

“Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari PDIP, berarti tidak ada masalah bagi PDIP. PDIP menganggap itu tidak jadi masalah disebabkan karena ada perubahan SE (Surat Edaran) untuk memverifikasi ulang semua partai termasuk partai lama. Sehingga hasil dari verifikasi tersebut di tingkat nasional PDIP lolos, makanya PDIP tidak mempermasalahkan ini lagi.”

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa, dari kedua konflik yang terjadi konflik dapat diselesaikan dengan baik dengan berpedoman kepada regulasi Pemilu dan regulasi konflik Pemilu yang ada. Dengan adanya regulasi konflik Pemilu, konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik sehingga konflik tidak berkembang kearah yang lebih tinggi. Selain itu dengan adanya regulasi konflik Pemilu, konflik yang terjadi tidak memunculkan aktor-aktor konflik yang baru yang nantinya dapat menyebabkan konflik menjadi berkembang kearah yang lebih tinggi atau kearah kekerasan.

Sesuai dengan teori Dahrendorf, konflik dapat diselesaikan dengan adanya regulasi konflik. Dalam penyelesaian konflik semua pihak yang terlibat dapat menerima hasil keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti DKPP dan Panwaslu.

Pada kedua kasus konflik yang terjadi, regulasi konflik Pemilu yang digunakan adalah berbentuk arbitrase, dimana penyelesaian dengan menggunakan bantuan lembaga peradilan yang nantinya menghasilkan keputusan secara legal dan wajib dipatuhi karena bersifat final dan mengikat. Menurut Dahrendorf dalam menggunakan regulasi baik itu regulasi Pemilu ataupun regulasi konflik Pemilu, regulasi ini bisa efektif apabila :

1. Kedua belah pihak mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi antara mereka. Baik konflik yang terjadi pada waktu Pilkada tahun 2015 antara KPU dan Panwaslu atau Persiapan Pemilu tahun 2019 antara KPU dengan PDIP, mereka sama-sama menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi diantara mereka dimana KPU menyatakan kalau Panwaslu terlalu mengada-ngada dan mendramatisir laporan yang diajukan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, sedangkan Panwaslu merasa kalau adanya temuan tentang salah cetak C1 KWK Plano Hologram tersebut menunjukkan kalau KPU tidak profesional, tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pekerjaan dalam pengadaan logistik Pemilu sehingga KPU harus dilaporkan ke DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik. Sedangkan untuk kasus antara KPU dan PDIP, KPU merasa tidak melakukan pelanggaran administrasi yang dituduhkan oleh PDIP karena KPU bertindak dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang verifikasi faktual kegunaan. Namun PDIP merasa kalau KPU telah melakukan intimidasi dan tekanan terhadap anggotanya yang mengakibatkan anggotanya menyatakan tidak memilih partai manapun dan hal ini menyebabkan PDIP tidak lolos untuk menjadi peserta Pemilu 2019 dan hal ini berujung dengan dilaporkannya KPU ke Panwaslu.
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan tidak terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Dalam memperjuangkan suatu masalah yang berujung pada konflik, kedua belah pihak yang berkonflik harus memahami bahwa dari konflik yang terjadi ada kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang sedang diperjuangkan.
3. Kedua belah pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Dalam hal ini Panwaslu dan PDIP sebagai pihak yang melaporkan KPU, secara jelas dan rinci menguraikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Aturan-aturan dan Pasal-Pasal mana yang dilanggar dengan

jelas diuraikan dalam laporannya. Kemana KPU dilaporkan, bagaimana penyelesaiannya dan apa sanksinya. Dari uraian tersebut dapat dilihat kalau dengan adanya regulasi konflik Pemilu dapat meredam konflik yang terjadi.

D. KESIMPULAN

Pemilu merupakan wujud demokrasi yang memberikan ruang untuk kompetisi damai yang mengandung gagasan-gagasan politik serta perdebatan politik dan sosial agar tetap berada dalam kawasan konflik yang membangun. Pemilu juga harus dipandang sebagai suatu ruang konflik yang memberikan perubahan kepada masyarakat dari sebelum Pemilu sampai sesudah Pemilu. Pada akhirnya semua konflik yang terjadi pada saat Pilkada atau Pemilu dapat diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Bahwa pada konflik yang terjadi saat Pilkada tahun 2015 dan Persiapan Pemilu tahun 2019, regulasi konflik Pemilu sangat memiliki peranan, dimana dengan adanya regulasi konflik Pemilu, konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik serta konflik tidak meningkat kearah yang lebih tinggi. Regulasi konflik Pemilu yang digunakan disini adalah dengan cara arbitrase, dimana kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dengan adanya regulasi konflik Pemilu, pihak-pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan atau sanksi yang diberikan tanpa adanya perlawanan. Karena disini atas keputusan DKPP dan keputusan Panwaslu adalah final dan mengikat, dengan arti kata bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan akhir yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun KPU dan Panwaslu merupakan satu kesatuan fungsi karena sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, namun konflik yang terjadi diantara keduanya tetap tidak terhindarkan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu FISIP Universitas Andalas, sebagai penerima beasiswa dari program kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Universitas Andalas. Peneliti mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardila, Mega. (2018). Budaya Merantau Masyarakat dan Permasalahan Pendaftaran Pemilih Pada Pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi; Isu-Isu Sosial Budaya*, Volume 20, No. 2, 157-163.
- Bawaslu. (2018). *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018*. Jakarta
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Penterjemah; Ali Mandan, Jakarta: Rajawali. Terjemahan dari *Class and Class Conflict in Industrial Society*.
- Dahrendorf, Ralf.. (2004). *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*. Jakarta : PrenadaMedia
- Darmawan, Ikhsan. (2010). Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada Kasus Pilkada Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. *Jurnal Politika*, Volume 1, No. 1, 38-48.
- Dunning, Thad. (2011). *Fighting and Voting: Violent Conflict and Electoral Politics*. *Jurnal of Conflict Resolution*, Volume 55, No. 3, 327-339.
- Gayatri. (2015). Konflik Kekuasaan Dalam Anggaran Pemilukada Provinsi Bali. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 12, No. 1, 111-142.
- Humaedi, S., Kudus, I., Pancasilawan, R., & Nulhaqim, S.A. (2018). Resolusi Konflik Pilkada di Kota Cimahi Jawa Barat. Volume 8, No. 1, 101-113.
- Indriyani, Atek Lis. (2017). Resolusi Konflik Internal Antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014. Universitas Lampung.
- Lestari, Era Yuni. (2018). Menghindari Tindak Pidana Pemilu: Belajar Dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, No. 2, 212-227.
- Liany, Lusi. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Volume 4, No. 1, 51-72.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Palupi, Nugrahaeni Kenyo. (2015). Hubungan Kerja Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008.
- Pito, Adrianus dan Toni. (2013). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Pruit, Dean. G dan Rubin, Jeffry Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Penterjemah : Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Penyunting : Mohammad Khatamie. Terjemahan dari *Social Conflict Escalation, Statemate and Settlement*.
- Purnamasari, Kahfi. Ashabul dan Rachman. Arief Fatchur (2015). Peran Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidarjo. *Jurnal JKMP*, Volume 3, No. 1, 1-116.
- Setiadi, Elly. M dan Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Siswanto, Edhi. (2017). Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015. *Jurnal Politico*, Volume 17, No. 2, 286-312.
- Sukri. (2016). Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 4, No. 2, 152-171.
- Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Surbakti, Ramlan dan Fitrianto, Hari. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kris. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Ubbe, Ahmad. (2011). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta.
- Usman. (2018). Pilkada dan Conflicy Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makasar). *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 7, No. 2, 325-346.
- UNDP. (2009). *Election An Conflict revention A Guide To Analysis, Planning And Programming*.
- Winardi (2010). Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, No. 2, 51-84.



STRATEGI VISUAL PUNDEN BERUNDAK SITUS GUNUNG PADANG DALAM GENRE FOTOGRAFI LANDSCAPE SEBAGAI PESAN BUDAYA

Winnie Gunarti Widya Wardani¹, Wulandar², Syahid³

^{1,2,3} Desain Komunikasi Visual, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 12 August 2019
Review : 19 August 2019
Accepted : 27 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Visual strategy; photography; landscape

CORRESPONDENCE

*E-mail: winnie.gunartiww@unindra.ac.id

ABSTRACT

Gunung Padang Site in Cianjur is a cone-shaped hill area filled with relics of the Megalithic era in the form of stone objects. Punden terraces – a place for the worship of ancestral spirits – has become a hallmark and an important cultural heritage as a part of the distinctive characteristics of the indigenous culture in Nusantara. This study aims to communicate the cultural message of the punden terraces through the visual strategy of photography with the landscape genre, the art of photography that explores the beauty of nature and sharpens the landscape. Quantitatively, this study conducted a survey to find out the attraction of the photo objects. The result showed that the majority of respondents considered the scenery on the Gunung Padang Site to be more interesting than the stone objects and the daily life of surrounding communities. Whereas qualitatively, this study discusses the elements of visual strategy using the theory of photography with visual communication semiotic approach, especially in terms of the shot sizes and the framing of visual space. Punden terraces' photographs in landscape photography are able to communicate cultural messages about human activity in the past. This, in turn, will contribute to enriching scientific references of visual communication design

A. PENDAHULUAN

Zaman Megalithikum adalah salah satu periode prasejarah yang ditandai dengan adanya peninggalan sisa bangunan dari batu-batu besar. Bukti otentik arkeologi dari Zaman Megalithikum di antaranya *menhir*, berupa tugu batu, dan *punden berundak*, bangunan berbentuk teras bertingkat yang berakhir di titik puncak. Kedua sarana dari batu besar ini digunakan oleh manusia pada masa itu untuk melakukan ritual pemujaan terhadap arwah leluhur.

Menurut Walsh, (Marsudi, 2015:79), masyarakat Jawa mempercayai gunung sebagai tempat suci karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang. Oleh karena itu, banyak tempat pemujaan dibangun di gunung-gunung, yang ditandai sebagai tradisi Megalithik, sebelum masuknya agama Hindu dan Budha.

Berdasarkan hasil penelitian tentang situs prasejarah yang ada di Indonesia, Situs Gunung Padang merupakan Situs Megalithikum terbesar di Asia Tenggara. Situs ini terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur,

Jawa Barat, yang dapat dicapai dengan jarak tempuh sekitar 30 km dari kota Cianjur, dan 90 km dari Jakarta (Sutarman, dkk, 2016:57).

Batu-batu Megalithikum ditemukan pertama kali pada tahun 1979 oleh tiga orang penduduk di wilayah perbukitan Gunung Padang. Temuan ini dilanjutkan oleh Prof. Dr. Raden Panji Soedjono di tahun berikutnya dalam sebuah proses ekskavasi dan restorasi. Namun, keberadaan Situs Gunung Padang mulai dikenal peneliti mancanegara setelah pemerintah membentuk Tim Katastropik Purba pada tahun 2011, dan disusul Tim Terpadu Riset Mandiri. Kedua tim ini terutama meneliti penyebab bencana alam besar yang pernah melanda wilayah tersebut. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa serakan batu-batu yang memenuhi bukit tersebut usianya diperkirakan sekitar 11.600 SM (Akbar, 2014)

Gunung Padang sebenarnya adalah sebuah bukit yang dikelilingi gunung-gunung. Padang dalam bahasa Sunda berarti bercahaya, sehingga ada yang menamakannya Bukit Cahaya. Bukit ini dikelilingi Gunung Batu yang terletak di sebelah utara, kemudian di sebelah barat terda-

pat Gunung Karuhun, di sebelah selatan terdapat Gunung Empet dan Gunung Melati, dan di sebelah timur terdapat Pasir Malang (Akbar, 2014).

Situs Gunung Padang dapat dibagi ke dalam lima wilayah jangkauan, yaitu gerbang masuknya yang terletak di Desa Karyamukti, kemudian jalur pendakian yang terdiri dari dua cabang, wilayah teras bebatuan berundak yang terdiri dari lima teras. Bagian terakhir adalah puncak Gunung Padang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yondri, 2012), konstruksi kelima teras dari punden berundak Situs Gunung Padang memiliki ukuran berbeda, yang semakin mengecil ke bagian atasnya. Teras pertama adalah teras terbawah berbentuk persegiempat yang memiliki 10 bangunan kecil dari berbagai bentuk susunan balok. Teras kedua memiliki permukaan yang tampak rata dan terdapat enam susunan bangunan besar dan kecil yang terbuat dari balok-balok batu andesit, dan batu-batu lebih besar yang tegak. Kemudian pada teras ketiga ada lima bangunan yang sebagian besar adalah kelompok batu tegak. Ada yang disusun dalam bentuk melingkar dan persegi empat, yang letaknya terpisah-pisah. Selanjutnya teras keempat memiliki tiga bangunan yang terletak pada bagian timur laut, sedangkan di bagian barat daya terlihat kosong. Terakhir, teras kelima yang terletak di bagian ujung sebelah tenggara, dan merupakan teras tertinggi, adalah teras yang dianggap paling suci tempat diadakannya ritual pemujaan, dan memiliki bangunan-bangunan kecil. Punden berundak tersebut terletak di puncak bukit yang memanjang dengan ketinggian 885 meter di atas permukaan laut.

Keberadaan dari kelima teras punden berundak ini menjadi peninggalan sejarah dan budaya yang memiliki daya tarik tersendiri, karena bentuk terasnya yang mengerucut membentuk susunan dari balok-balok batu vulkanik berbentuk persegi panjang, serta memiliki simbol-simbol khusus.

Penelitian tentang Situs Gunung Padang umumnya lebih mengangkat temuan-temuan yang bersifat arkeologis, namun terbatas pada kajian-kajian tentang perupa-an atau visualisasi objek melalui media audio visual sebagai tanda-tanda visual yang membawa pesan.

Beberapa kajian tentang perupa-an di antaranya adalah penelitian tentang visualisasi situs dalam bentuk gambar 3D yang pernah dilakukan oleh Tim Terpadu Riset Mandiri/RMOL untuk menggambarkan struktur teras punden berundak Situs Gunung Padang. Penelitian dari tim ini dirilis ulang sebagai gambar dari hasil pemindaian geolistrik yang menunjukkan bentuk dan ciri situs seperti keris kujang (Natawidjaya, 2012 dalam Sutarman et al., 2016:60–61).

Selain itu, ada pula kajian tentang perupa-an dari pola konstruksi situs yang menunjukkan adanya simbol-simbol kepercayaan Sunda

Wiwitan. Ramadina (2013:61–62), menemukan bahwa pembagian teras memiliki kesamaan dengan pembagian ruang pada rumah adat Sunda, yaitu terdapat simbol-simbol laki-laki dan perempuan pada elemen-elemen teras.

Dalam konteks desain komunikasi visual, Situs Gunung Padang juga pernah dihadirkan dalam film dokumenter, di antaranya film dokumenter berjudul "Situs Gunung Padang - Sejarah Kekayaan Terpendam" yang dipublikasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014) melalui situs youtube. Film dokumenter berdurasi 7 menit 37 detik ini telah ditonton 31.799 kali dengan *subscriber* sebanyak 56,6 ribu.

Penelitian tentang Situs Gunung Padang dalam bentuk karya fotografi belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, peneliti telah melakukan kajian pendahuluan tentang presentasi ruang arkeologi dalam bentuk visualisasi batu-batu Megalitik sebagai penanda dan petanda pesan, berupa karya foto dari Batu Kujang, Batu Telapak Kaki Manusia, Batu Tapak Harimau, Batu Gendong, Batu Gamelan, Batu Singgasana, dan Batu Gendong (Wardani, dkk., 2019:394).

Dari segi genre fotografi, Wardani, dkk. (2019:149) juga telah melakukan kajian karya fotografi bergenre *story* untuk memvisualisasikan interaksi manusia dengan Situs Gunung Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya pandangan kreator tentang daya tarik kehidupan manusia di lingkungan Situs Gunung Padang yang dapat dijadikan sebagai objek fotografi. Karya foto tidak saja dapat menjadi media promosi wisata, namun juga membangun persepsi visual tentang kehidupan masyarakat di masa prasejarah.

Studi ini pun berupaya untuk mengangkat kajian karya foto dengan genre fotografi yang berbeda sebagai strategi visual dalam mengomunikasi pesan budaya, sekaligus mengabadikan warisan budaya melalui bahasa visual.

Mengomunikasikan pesan di dalam karya fotografi berarti membaca dan mengolah elemen-elemen yang membentuk objek visual. (Hartel & Thomson, 2011) menuliskan kekuatan visual gambar dalam karya fotografi memiliki keunggulan yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kata-kata yang sulit terucap. Melalui gambar, orang juga dapat lebih memberi perhatian dengan cara baru, lebih mudah mengingat, mendorong keingintahuan, membangkitkan, meningkatkan pemahaman, empati, sekaligus mendorong pengetahuan.

Di dalam fotografi, juga ada banyak genre yang bisa digunakan. Namun penelitian ini memfokuskan pada genre fotografi *landscape*. Dasar pemilihan genre ini untuk lebih menonjolkan keindahan Situs Gunung Padang dan panorama dari punden berundak, sekaligus membahas daya tarik dari genre fotografi

landscape, melalui pembacaan elemen-elemen visualnya.

Objek visual punden berundak menjadi menarik dalam karya fotografi, sebagai upaya untuk membangun persepsi visual tentang kehidupan di masa lalu. Persepsi visual adalah kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat sebagai hasil penglihatan, yang diterjemahkan dengan melibatkan pikiran. Pembahasan objek foto dalam genre *landscape* ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian aset budaya. Karya fotografi punden berundak bergenre *landscape* diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk memahami bahasa visual pada gambar, serta penerapan visual tentang objek prasejarah bagi kalangan akademisi, khususnya ilmu Desain Komunikasi Visual, sebagai karya yang informatif sekaligus komunikatif.

Karya fotografi tak dapat dilepaskan dari tanda. Mengomunikasikan pesan di dalam karya fotografi berarti membaca elemen-elemen tanda yang membentuk objek visual, sehingga pendekatan semiotika komunikasi visual sering digunakan untuk menganalisis berbagai objek desain komunikasi visual, termasuk karya fotografi.

Di era digital saat ini, fotografi telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam gaya visualnya. Meskipun orang kini bisa mengolah visual foto sesuai kebutuhannya, namun tetap dibutuhkan teknologi kamera untuk menghasilkan karya-karya fotografi.

Ada banyak genre di dalam fotografi. Namun studi ini memfokuskan pada genre fotografi *landscape* untuk memberikan identitas. Dasar pemilihan genre ini dikarenakan banyak digunakan di dalam buku foto. Genre fotografi *landscape* adalah fotografi yang mengeksplorasi keindahan alam dan mempertajam panorama (Paulus, 2013:2). Perbedaan antara genre fotografi *landscape* dengan *nature*, adalah ada tidaknya buatan manusia. Pada genre *nature*, tidak terdapat unsur buatan manusia, sehingga *nature* menjadi bagian dari *landscape* (Alam, 2013:4).

Dalam hal ini, karya seni fotografi memiliki potensi untuk mengajak pembacanya berkomunikasi dengan apa yang dilihatnya melalui pikiran, yaitu membangun persepsi visual tentang "kisah" di balik keindahan alam objek foto tersebut. Penelitian dari Otto, dkk. (2018:307) tentang potensi fungsi kamera sebagai kritik budaya menyebutkan adanya dampak terhadap cara pandang manusia pada hasil visualisasi. Menurutnya, kamera dapat bertindak sebagai mediator dari cara pandang masing-masing orang yang berbeda. Penggunaan kamera dalam menyajikan penelitian antropologi juga dapat menjadi perangkat pemicu konteks bagaimana cara melihat dan memahami budaya secara mendalam, terutama di dalam praktik penelitian. Selain itu, penelitian Panke

(2016:4132) yang berjudul "Photography visual communication: Direct and indirect impact on human communities" juga menyoroti tentang bagaimana membuat masyarakat yang lebih baik melalui gambar visual. Kemampuan fotografi disimpulkannya dapat mengubah konsepsi visual, tentang cara orang memandang dunia.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa karya foto memiliki potensi visual yang dapat membangun cara pandang tentang objek visual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi tentang strategi visual dari objek foto tentang punden berundak sebagai peninggalan prasejarah ini adalah bentuk upaya untuk menghadirkan interpretasi tentang sejarah dan budaya melalui elemen visualnya.

Gunarti W.W., (2018:121) menjelaskan adanya prinsip tata bahasa visual yang dijadikan acuan dalam strategi visual karya fotografi, yaitu ukuran pengambilan gambar dan pembingkaiannya ruang visual. Pada ukuran pengambilan gambar, ada dua unsur utama, meliputi pemotretan lebar untuk menampilkan banyak elemen dan tata letak jarak jauh (*wide shot/WS*), dan penampilan latar belakang panorama dalam pemotretan berjarak menengah (*medium shot/MS*). Sedangkan untuk strategi pembingkaiannya ruang visual mengacu pada prinsip komposisi "the Rule of Thirds", yaitu membagi gambar menjadi grid imajiner pertiga, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Ardiansyah (Wulandari, 2015:171) komposisi *rule of thirds* membagi bidang gambar dalam tiga bagian sama besar dan proporsional, di mana akan membentuk empat titik perpotongan melalui pembuatan garis horizontal dan vertikal tersebut. Di titik-titik tersebutlah kemudian objek ditempatkan dan dijadikan sebagai pusat perhatian. Selain itu, dari pembagian garis horizontal dan vertikal yang ada, dapat ditarik garis-garis khayal yang menyertai fokus objek.

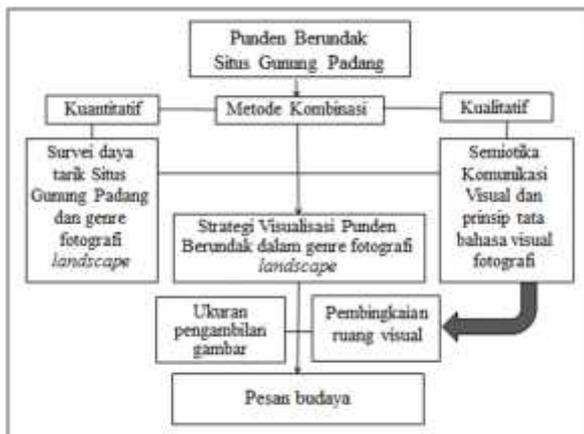
Pengaturan objek sebagai fokus dalam pembingkaiannya bisa ditempatkan pada pembingkaiannya ke kiri, ke kanan, ke tengah, dan penuh. Secara teknis dan nonteknis, pengambilan gambar dengan kamera tetap perlu mempertimbangkan fungsi lensa dan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, pemilihan warna, dan perspektif, yang juga memberi pengaruh pada visual foto.

B. METODE

Studi ini menggunakan metode kombinasi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan survei. Secara kuantitatif, studi ini melakukan survei terhadap 175 mahasiswa desain yang mengambil matakuliah fotografi di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, untuk mengetahui pandangan

mereka tentang objek visual yang memiliki daya tarik utama di Situs Gunung Padang, dan pandangan mereka tentang penggunaan genre fotografi *landscape* pada situs prasejarah. Hasil survei menjadi dasar analisis secara kualitatif tentang potensi objek visual yang dapat diterapkan sebagai karya fotografi bergenre *landscape*.

Pendekatan semiotika komunikasi visual digunakan untuk membahas hasil karya fotografi punden berundak bergenre *landscape* dengan mengacu pada teori fotografi. Studi ini mengacu pada dua prinsip dari tata bahasa visual fotografi, yaitu ukuran pengambilan gambar dan pembingkai-an ruang visual, sebagai sebuah strategi visual yang dapat membawa pesan budaya. Menurut Piliang (Walker, 2010:xxii), pesan budaya dapat dilihat sebagai bangunan yang terdiri dari kombinasi tanda-tanda, untuk menghasilkan makna. Di dalam fenomena kebudayaan, cakupan tanda sangat luas, namun selama ada unsur-unsur kebudayaan yang mengandung makna, maka ia dapat menjadi objek kajian semiotik. Dengan kata lain, tanda-tanda visual di dalam karya fotografi tentang punden berundak memuat unsur-unsur kebudayaan, karena merupakan objek visual prasejarah, sehingga dapat saja dibaca dan diolah sebagai sebuah kombinasi tanda-tanda yang bermakna. Secara garis besar, metode analisisnya dapat dilihat pada bagan berikut.



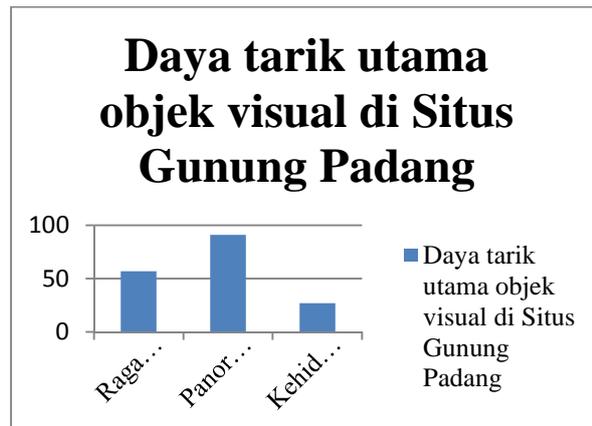
Gambar 1. Metode Analisis

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Objek Visual Pada Situs Gunung Padang

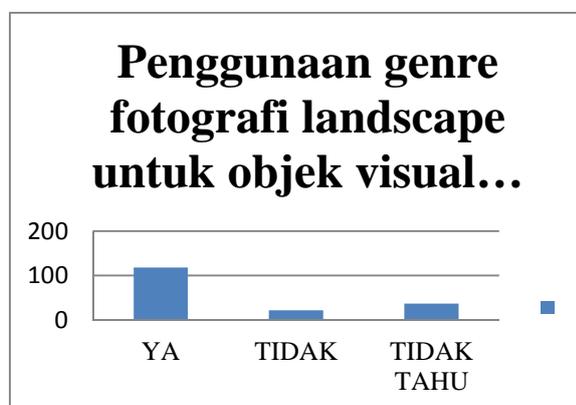
Berdasarkan hasil survei tentang pandangan mahasiswa desain, khususnya mahasiswa fotografi terhadap daya tarik utama objek visual di Situs Gunung Padang, diperoleh data sebagai berikut: Sebanyak 91 (52%) mahasiswa memilih panorama situs sebagai daya tarik utama, sedangkan sebanyak 57 (33%) mahasiswa memilih objek visual ragam batu, dan 21 (15%) mahasiswa memilih objek visual kehidupan masyarakat sekitar. Secara

garis besar, hasil data dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



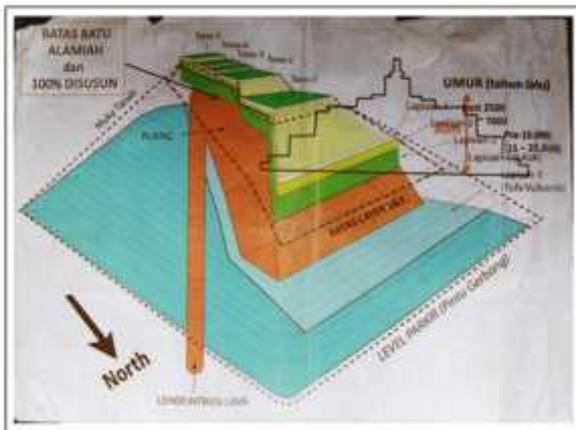
Gambar 2. Daya Tarik Utama Objek Visual di Situs Gunung Padang

Data tersebut menunjukkan bahwa keindahan alam dan panorama Situs Gunung Padang menjadi pilihan utama untuk menghasilkan sebuah karya foto yang menarik. Namun, bukan berarti objek visual yang lain tidak menarik. Hal ini didasarkan pula pada kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh sang fotografer. Selanjutnya, hasil data tentang pandangan terhadap penggunaan genre fotografi *landscape* pada situs prasejarah menunjukkan 118 (67%) mahasiswa memilih genre *landscape* untuk mengabadikan Situs Gunung Padang, kemudian 21 (12%) mahasiswa menganggap genre *landscape* tidak yang utama, sedangkan 36 (21%) mahasiswa menyatakan tidak tahu. Tingginya pilihan terhadap genre fotografi *landscape* menunjukkan ada kekuatan visual pada genre ini, terutama untuk menghadirkan wilayah Situs Gunung Padang dengan latar pemandangan alam, sehingga mempertajam sisa peninggalan bangunan punden berundak pada kelima teras di bukit tersebut.



Gambar 3. Penggunaan Genre Fotografi Landscape Untuk Objek Visual Situs Gunung Padang

Kedua hasil data kuantitatif di atas dapat dijadikan acuan untuk menganalisis elemen-elemen visual dari punden berundak yang dapat ditampilkan sebagai karya fotografi bergenre *landscape*. Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Katastropik Purba sejak tahun 2011, struktur bangunan punden berundak dapat digambarkan sebagai susunan kelima teras dengan batu-batu yang memiliki rentang usia berbeda. Dalam penelitian (Yondri, 2013) disebutkan bahwa konstruksi dan pola susunan balok-balok batu di punden berundak itu dipandang sebagai hasil proses dialektika antara masyarakat dengan lingkungannya. Sketsa dari pola susunan punden berundak digambarkan sebagaimana di bawah ini.



Gambar 4. Sketsa Punden Berundak Situs Gunung Padang (Sumber: Dokumen Pusat Informasi Situs Gunung Padang)

Sisa tumpukan atau susunan batu dari struktur bangunan punden berundak tersebut dapat divisualisasikan dengan strategi visual yang memfokuskan pada bahasa visual ukuran dan pembingkai. Tujuannya untuk membangun persepsi visual dan mengomunikasikan pesan tentang nilai-nilai budaya yang termuat dalam situs prasejarah tersebut. Terutama pesan tentang tradisi masyarakat di masa lalu yang masih memuja arwah nenek moyang.

2. Strategi Visual

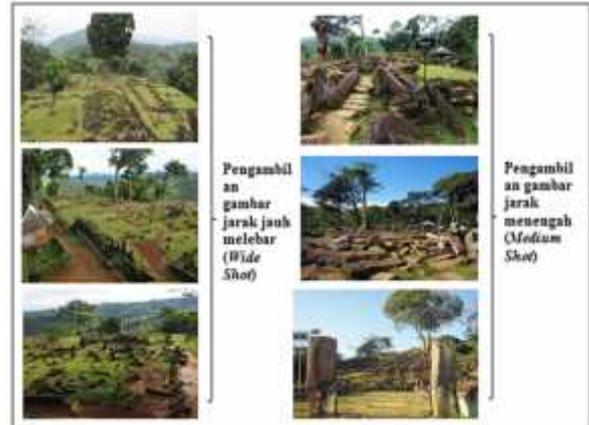
Pembahasan strategi visual berikut menampilkan ukuran pengambilan gambar yang menggunakan jarak jauh melebar (*wide shot*) dan jarak menengah (*medium shot*).

a. Jarak Jauh Melebar

Pengambilan gambar dengan strategi *wide shot* untuk menghasilkan visualisasi menyeluruh dari punden berundak, khususnya gambaran tentang teras. Kekuatan dalam strategi visual ini dapat memanfaatkan *angle* (sudut pengambilan gambar). Untuk kebutuhan akan latar keindahan alam dan panorama, dapat dipilih *high angle*, yaitu teknik pengambilan gambar dari atas.

b. Jarak Menengah

Pengambilan gambar dengan strategi *medium shot* untuk menghasilkan visualisasi yang lebih dekat dari sisa bangunan punden berundak. Pada strategi visual ini, dapat digunakan sudut pengambilan gambar dengan teknik *eye level*, yaitu pengambilan gambar yang sejajar dengan posisi objek.



Gambar 5. Ukuran Pengambilan Gambar Jarak Jauh Melebar (*Wide Shot*) dan Jarak Menengah (*Medium Shot*)

Teknik *high angle* dapat membantu penikmat foto untuk membangun imajinasi tentang luas area punden berundak yang menjadi lokasi prasejarah. Teknik *high angle* juga mampu memberi kesan "misteri" pada objek visual, sehingga menyentuh emosi penikmat foto untuk mencari tahu lebih lanjut tentang objek visual tersebut. Sedangkan pada teknik *eye level*, visualisasi menghadirkan posisi batu-batu besar yang sejajar dengan pandangan mata, sehingga seolah-olah penikmat foto sedang berhadapan dengan objek visual. Teknik ini membantu membangun rasa kedekatan dengan objek visual, dan secara tidak langsung menyampaikan makna tentang kisah yang ada di balik serakan batu-batu besar tersebut. Posisi kamera yang mengarah pada objek tertentu memberi pengaruh terhadap makna dan pesan yang akan disampaikan (Bonafix, 2011:851).

Namun, gambaran *landscape* dari situs Megalithik ini juga memberikan pemahaman yang lain, terutama dari keberadaan hutan yang ada di sekitarnya. Lingkungan di Situs Gunung Padang juga telah mengalami banyak perubahan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan, sejak situs itu dijadikan tujuan wisata. Manusia di masa lalu memang telah membangun sebuah bangunan tempat pemujaan dengan cara-cara yang alami dan mempertimbangkan adaptasinya dengan alam. Namun sisa keberadaannya kini memerlukan perhatian khusus.

Sebagaimana dituliskan dalam hasil penelitian (Hinijati Widjaja, 2016:477), adanya penebangan

pohon besar dan pengenalan jenis pohon baru telah mengubah tata ruang alam lereng bukit di Situs Gunung Padang. Lingkungan yang dulu hutan primer kini menjadi hutan sekunder. Lahan pertanian juga semakin sempit. Jenis dari vegetasi tersisa hutan primer di lereng sisi barat cukup curam, dengan sudut kemiringan mencapai 45 derajat atau lebih. Sejak ditetapkan sebagai situs, lereng Gunung Padang tidak lagi digunakan untuk pertanian. Hingga saat ini, proses penipisan hutan primer dan sekunder terus berlanjut di tanah milik masyarakat di sekitar Gunung Padang.

Selanjutnya, strategi visual dari segi pembingkaiannya ruang visual dapat ditampilkan melalui aturan grid imajiner pertiga, baik secara vertikal maupun horizontal. Pada studi ini, objek visual utama yang ditempatkan dalam pembingkaiannya diambil secara random.

Pembingkaiannya ruang visual terhadap sisa bentuk bangunan punden berundak di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembingkaiannya kiri

Pembingkaiannya kiri memfokuskan objek visual utama di bagian kiri grid imajiner untuk membangun persepsi visual melalui bentuk balok batu dengan tetap menyertakan pemandangan alam sebagai latar. Visualisasi balok batu persegi panjang dipilih sebagai elemen visual untuk menunjukkan adanya garis cekungan yang dalam. Cekungan ini dapat membangun imajinasi tentang kegunaannya, dan sebagai hasil buatan manusia, atau cekungan yang disebabkan faktor alam.

b. Pembingkaiannya kanan

Pembingkaiannya kanan memfokuskan objek visual utama di bagian kanan grid imajiner untuk membangun persepsi visual dari balok batu yang menancap ke tanah dan memiliki cekungan yang berbentuk oval. Visualisasi balok batu pada pembingkaiannya kanan adalah elemen visual yang membangkitkan imajinasi dan dapat menyampaikan pesan tentang jenis cekungan yang berbeda sebagai teknik perekatan antar batu dalam mendirikan bangunan.

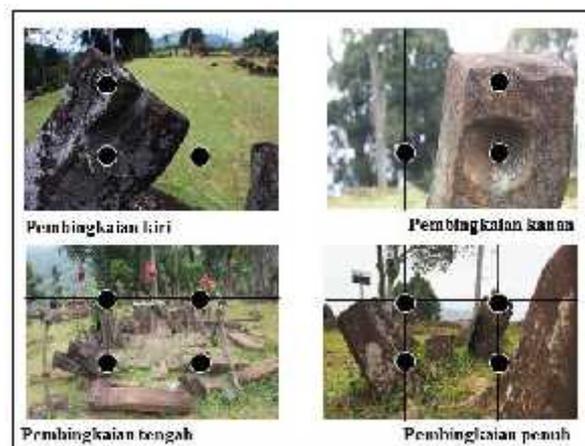
c. Pembingkaiannya tengah

Pembingkaiannya tengah memfokuskan objek visual utama di bagian tengah grid imajiner untuk membangun persepsi visual tentang batu pembentuk ruang. Visualisasi objek batu memperlihatkan balok-balok batu sebagai elemen visual yang ditancapkan ke tanah secara vertikal dan juga ada batu-batu yang direbahkan secara horizontal, sehingga keseluruhannya membentuk sebuah ruang tempat ritual. Pilihan objek foto terhadap sisa tempat ritual ini karena hingga saat ini ruang tersebut juga masih difungsikan oleh masyarakat setempat untuk tempat berdoa sebagai sebuah tradisi dan kepercayaan.

d. Pembingkaiannya penuh

Pembingkaiannya penuh dengan objek visual utama yang memenuhi bingkai, untuk membangun persepsi visual sebagai pintu masuk melalui batu-batu yang bersilangan. Visualisasi balok batu yang ditancapkan berdampingan dan berjarak adalah elemen visual yang menyampaikan pesan tentang jalan keluar masuk manusia di masa itu saat menjalankan berbagai aktivitasnya di punden berundak. Karya fotografi yang dihasilkan melalui strategi pembingkaiannya di atas, didasarkan pula pada hasil observasi peneliti di lapangan dan wawancara dengan Kang Nanang, selaku koordinator juru pelihara Situs Gunung Padang. Dikatakan Kang Nanang, bahwa hasil dari para peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa cekungan-cekungan ke dalam yang banyak ditemukan pada sebaran batu adalah teknologi untuk menyambungkan batu dengan batu, sehingga batu tidak mudah bergeser. Cekungan pada permukaan batu memiliki ukuran dan kedalaman yang berbeda. Hal ini diduga menyesuaikan besar kecilnya sisa bangunan yang ditemukan di setiap teras dengan ukuran yang berbeda pula.

Konstruksi bangunan punden berundak tampaknya dibangun dengan berbagai prasyarat yang disesuaikan dengan kebutuhan ketahanannya, mengingat wilayah Gunung Padang yang dipenuhi lereng terjal. Masyarakat di masa itu mengupayakan kemampuannya untuk mendirikan bangunan yang tahan lama, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menerapkan kearifan lokal. Bukti ketahanan bangunan tersebut hingga saat ini masih dapat diamati dan ditemukan (Yondri, 2013). Pengambilan gambar juga mempertimbangkan komposisi sebaran batu sebagai elemen visual di dalam kesatuan garis dan bentuk, serta pemanfaatan cahaya alami matahari di siang dan sore hari. Hal ini menjadi faktor nonteknis yang memengaruhi hasil foto.



Gambar 6. Pembingkaiannya Ruang Visual Sisa Batu Punden Berundak

Berdasarkan kedua strategi visual di atas, pesan budaya yang dapat dikomunikasikan melalui elemen-elemen visual pada karya fotografi punden berundak dengan genre *landscape* ini adalah:

a. Pesan budaya tentang ritual masyarakat melakukan pemujaan kepada arwah nenek moyang sebagai bentuk kearifan lokal

Masyarakat pendukung kebudayaan Megalithik terlatih untuk menghadapi bencana alam. Oleh karena itu, konstruksi punden berundak dibuat dengan susunan balok yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar yang rawan bencana. Cara mereka menghadapi tantangan alam yang besar tercermin dari pengetahuan mereka dalam membangun tempat ritual. Aktivitas mereka menjadi wujud kearifan lokal (Yondri, 2014:9).

Pemahaman tentang kearifan lokal ini menjadi penting karena keberadaannya menjadi nilai kebudayaan. Sebagaimana dituliskan oleh (Sulaeman, dkk., 2019:61), "Kearifan lokal diberlakukan masyarakat memiliki nilai-nilai moral dan sebagai pandangan hidup, menyatu dengan sistem kepercayaan dan norma diekspresikan di dalam adat".

Adat atau tradisi manusia prasejarah inilah yang tercermin melalui sisa peninggalan punden berundak. Ciri dari kebudayaan Megalithik adalah adanya penggunaan batu-batu besar untuk membangun sarana pemujaan, sebagai penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Masyarakat kebudayaan Megalithik meyakini adanya Roh Utama yang bersemayam di suatu tempat, sehingga mereka membangun tempat untuk persinggahan Roh Utama saat berada di dunia (Akbar, 2014). Adanya kegiatan ritual di masa lalu juga memberikan nilai kebudayaan. Nilai kebudayaan dianggap sebagai aspek evaluatif dari keberadaan sistem kepercayaan yang ada di masyarakat hingga saat ini. Makna budaya itu sendiri adalah sebagai sistem ide, nilai, kepercayaan, struktur dan praktik yang dikomunikasikan secara turun temurun (Hasan, Asmawi, & Rasul, 2019:180–181).

Adanya nilai-nilai kearifan lokal di Situs Gunung Padang juga dapat menjadi potensi pariwisata nasional yang berskala internasional. Dikatakan oleh (Rahmi, 2016:78) bahwa jenis pariwisata yang menggunakan sumber daya budaya dapat menjadi modal utama, di antaranya melalui pengenalan sejarah. Pariwisata budaya juga memungkinkan wisatawan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat setempat. Karya fotografi dengan genre *landscape* ini secara tidak langsung dapat menyampaikan pesan tentang potensi pariwisata yang berskala global karena mampu mengundang banyak wisatawan dari mancanegara, baik untuk melakukan penelitian, atau hanya ingin meninjau lokasi prasejarah dan keberadaan batu-batu Megalithik. Oleh karena itu, presentasi punden

berundak melalui karya fotografi bergenre *landscape* dapat dianggap sebagai strategi visual untuk mengenalkan kembali nilai kebudayaan yang pernah dianut di masa silam. Nilai-nilai kebudayaan ini lantas menjadi pengetahuan yang diadaptasi kembali sebagai penopang hidup dalam berperilaku dan bermasyarakat.

b. Pesan budaya tentang sebaran batu sebagai sisa bangunan yang dibangun dengan teknologi sederhana untuk sarana aktivitas masyarakat

Tingginya bencana di daerah Jawa Barat karena adanya dominasi perbukitan dengan lereng-lereng yang curam, dan adanya jalur patahan Cimandiri yang sering mengalami pergerakan. Di musim penghujan, kondisi ini menjadi rawan bencana. Punden berundak Gunung Padang dibangun dari batuan vulkanik berbentuk persegi panjang yang berasal dari batuan beku (*columnar joint*). Perkiraan jumlah balok batu yang membentuk bangunan punden tersebut tersusun dari ribuan balok batu (Yondri, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Sukendar dalam (Akbar, 2014) sisa balok batu yang membentuk sisa ruang itu berfungsi sebagai tempat berkumpul atau bermusyawarah dalam memutuskan persoalan, dan juga sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara khusus yang bersifat religius. Sisa balok batu, baik yang tertancap di tanah maupun yang berupa rebanan, juga menjadi penanda aktivitas manusia di masa lalu dalam upayanya bertahan hidup. Mereka melakukan interaksi sosial untuk menemukan solusi atas potensi bencana yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Dalam penelitian (Dalmeda & Elian, 2017:137) tentang interaksi simbolik, dikatakan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir yang dibentuk oleh interaksi sosial.

Berdasarkan kemampuan berpikir inilah manusia kemudian memaknai simbol-simbol, beradaptasi dengan lingkungan, bertindak dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya, yang kemudian dimaknai sebagai kearifan lokal. Hal ini dapat dibaca melalui elemen visual batu bertekstur dan batu yang membentuk pembatas ruang yang dipresentasikan sebagai karya fotografi bergenre *landscape* melalui pembingkai ruang visual. Meskipun tekstur batu ditangkap melalui pengambilan gambar jarak dekat, namun tetap menyertakan latar pemandangan di belakangnya. Karya fotografi seperti ini secara tidak langsung memberikan makna tentang peradaban manusia, khususnya teknologi yang digunakan pada masa itu.

Berdasarkan studi literatur dan hasil observasi di lapangan, punden berundak Situs Gunung Padang dibangun di atas bukit yang curam, sehingga batu-batu disusun sedemikian rupa agar mampu menahan kelongsoran. Manusia di

masa itu menancapkan balok-balok batu ke tanah sisi bukit untuk membuat tembok yang dapat meredam gempa bumi. Visualisasi dari sisa batu sebagai karya fotografi bergenre *landscape* dalam studi ini dapat membangun persepsi tentang sifat manusia yang pantang menyerah dan penuh kearifan, karena mereka dituntut untuk membangun dan beradaptasi dengan potensi bencana yang besar. Selain itu, teknik menancapkan balok batu ke tanah secara vertikal juga memberikan gambaran tentang upaya kerja keras manusia di masa itu demi menghadapi tantangan alam (Akbar, 2014). Umumnya kedalaman balok batu yang tertanam di tanah paling sedikit mencapai 45 cm dari permukaan tanah, dan rata-rata berat batu mencapai ratusan kilogram (Yondri, 2013).

Dampak lain yang dapat dipetik dari karya fotografi ini adalah kemampuannya menyampaikan pesan budaya melalui bahasa visual gambar. Karya fotografi dengan genre *landscape* tentang Situs Gunung Padang dengan visualisasi sebaran batu sisa punden berundak, lengkap dengan latar pemandangan alamnya yang indah, dapat digunakan sebagai media informasi wisata daerah. Upaya menginformasikan tentang daya tarik wisata yang berbasis nilai budaya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa daya tarik wisata dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata (Hermawan, 2017:563).

Atas dasar Undang-Undang ini, maka keunggulan nilai budaya dari Situs Gunung Padang menjadi aset bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hasil wawancara peneliti dengan Kang Nanang, koordinator juru pelihara di Situs Gunung Padang, setiap harinya situs ini dikunjungi sekitar seratus wisatawan, dan dapat mencapai lebih dari tiga ratus orang pada hari libur.

D. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan genre fotografi *landscape* di dalam karya fotografi berlatar prasejarah mampu membangun persepsi visual tentang kehidupan manusia di masa lalu. Penerapan

ukuran pengambilan gambar dan pembingkaiannya ruang visual terhadap karya fotografi punden berundak, dapat menjadi strategi visual yang komunikatif dan membawa pesan tentang tradisi manusia prasejarah yang sangat mengagungkan arwah para leluhur. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan batu-batu balok sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Penerapan genre fotografi *landscape* dapat mempertajam objek, sekaligus menghadirkan keindahan latar, sehingga menghasilkan karya foto yang menarik dalam membawa pesan tentang adanya aktivitas ritual manusia di masa lalu.

Visualisasi punden berundak dalam genre fotografi *landscape* juga dapat memberi kesan menyeluruh dan luas, sehingga para penikmat foto dapat ikut membangun imajinasi tentang bangunan punden perundak, sekaligus menginterpretasikan makna sebaran batu-batu besar sebagai sebuah hasil karya manusia dengan teknologi sederhana di masa lalu.

Sisa peninggalan punden berundak yang diabadikan melalui hasil fotografi juga dapat menjadi media informasi tentang daya tarik wisata. Kreativitas fotografi secara visual dapat menyampaikan pesan tentang nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai kebudayaan yang berpotensi dikembangkan menjadi modal utama dalam pariwisata nasional yang berskala global. Situs Gunung Padang hingga saat ini telah mampu menarik perhatian para peneliti maupun wisatawan dari manca-negara.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan yang telah membiayai kegiatan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun 2019. Terima kasih juga kepada LLDIKTI Wilayah III Jakarta dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indraprasta PGRI yang telah membantu kegiatan penelitian ini melalui Kontrak Penelitian: Nomor: 16/AKM/PNT/2019, Tanggal 27 Maret 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2014). *Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi*. Jakarta: Change Publication.
- Alam, P. C. (2013). *Kiat Praktis Memotret Landscape*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bonafix, D. N. (2011). Videografi: Kamera dan Teknik Pengambilan Gambar. *Humaniora*, 2(1), 845. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.4015>
- Dalmeda, M. ., & Elian, N. (2017). Makna Tradisi Tabuik Oleh Masyarakat Kota Pariaman (Studi Deskriptif Interaksionisme Simbolik). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2), 135. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i2.63>

- Gunarti W.W., W. (2018). Understanding Visual Grammar on the Stop Smoking Public Service Announcement: Analysis of Television Ad 'Vocal Cords Loss Due to Smoke.' *KnE Social Sciences*, 3(11), 117. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2755>
- Hartel, J., & Thomson, L. (2011). Visual Approaches and Photography for the Study of Immediate Information Space. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(11), 1–11. <https://doi.org/10.1002/asi.21618>
- Hasan, W., Asmawi, A., & Rasul, N. (2019). Komunikasi Budaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Memilih Di Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 179. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p179-189.2018>
- Hermawan, H. (2017). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Media Wisata*, 15(1), 562–577.
- Hinijati Widjaja. (2016). Megalithic Landscape in the Site of Gunung Padang, Analysis of Environmental Studies. *International Journal of Engineering Research And*, 5(11), 476–479. <https://doi.org/10.17577/ijertv5is110285>
- <https://www.youtube.com/watch?v=T8lhZnZLyY&t=220s>. (n.d.). Situs Gunung Padang - Kekayaan Sejarah Terpendam. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=T8lhZnZLyY&t=220s>
- Marsudi, M. (2015). Bangkitnya Tradisi Neo-Megalitik di Gunung Arjuna. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 79–87.
- Otto, T., Suhr, C., Crawford, P. I., Walto, K., Høgel, A. K., & Vium, C. (2018). Camera, Intervention and Cultural Critique: An Introduction. *Visual Anthropology*, 31(4–5), 307–317. <https://doi.org/10.1080/08949468.2018.1497328>
- Panke, T. (2016). Photography Visual Communication: Direct and Indirect Impact on Human Communities. *Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language*, 3(18), 4132–4137. Retrieved from www.srjjs.com
- Paulus, E. (2013). *Buku Saku Fotografi Landscape*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahmi, S. A. (2016). Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal. *REFORMASI*, 6(1), 76–84.
- Ramadina, S. P. (2013). Analisis Perupa-an Situs Megalitik Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. *Journal of Visual Art and Design*, 4(1), 51–66.
- Sulaeman, S., Malawat, M., & Darma, D. (2019). Konstruksi Makna Bakupukul Manyapu Bagi Masyarakat Mamala Maluku. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 61. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p61-72.2019>
- Sutarman, Hermawan, H. E., & Cecep Hilman. (2016). Gunung Padang Cianjur : Pelestarian Situs Megalitikum Terbesar Warisan Dunia (Gunung Padang Cianjur : Preservation Of The Largest Megalithic And World Heritage). *Jurnal Surya : Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 57–64.
- Walker, J. A. (2010). *Desain, Sejarah, dan Budaya, sebuah pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wardani, W. G. W., Wulandari, W., & Syahid, S. (2019). Presentasi Ruang Arkeologi Situs Gunung Padang Melalui Visualisasi Batu Penanda Untuk Buku Foto. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(3), 394–401. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.689>
- Widya Gunarti Wardani, Wulandari, Rezha Destiadi, S. (2019). Representasi Interaksi Manusia Dalam Genre Fotografi "story" Situs Megalitikum Gunung Padang. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 149–159. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3451>
- Wulandari, W. (2015). Seni Dalam Fotografi Disorientasi. *Jurnal Desain*, 2(No. 03), 169–182. Retrieved from http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Jurnal_Desain/article/view/582
- Yondri, L. (2012). *Punden berundak Gunung Padang maha karya nenek moyang dan kandungannya akan nilai-nilai kearifan lingkungan di masa Lalu di tatar Sunda*. Bandung.
- Yondri, L. (2013). Yondri-punden berundak 2013.pdf. *Purbawidya: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*. Retrieved from <https://purbawidya.kemdikbud.go.id/index.php/jurnal/article/view/P2%282%292013-4>
- Yondri, L. (2014). Punden Berundak Gunung Padang Refleksi Adaptasi Lingkungan dari Masyarakat Megalitik. *Jurnal Sositologi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2014.13.1.1>

**SOLUSI KONFLIK PERAN PEREMPUAN MINANGKABAU (Kasus Perawat Yang Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi)**Nola Mutiara Asril¹, Maihasn², Alfitri³^{1 2 3} Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia**ARTICLE INFORMATION**Submitted : 14 August 2019
Review : 03 November 2019
Accepted : 22 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Nurse; Nurse Advanced Education; Three Roles; Role Conflict

CORRESPONDENCE*E-mail: ollachan3@gmail.com**A B S T R A C T**

This article is about nurses who continue their education to universities it required by law no. 38 of 2014 of Nursing to continue to level SI (university graduate). According to by law declared a nursing graduate Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) who did not continue their study, will be a nursing assistant or administrative personnel. However, they do not get the task of study and only get the permission of studying and this keeps them working when they have to follow the SI education program. As a mother, worker, and student, nurses have three roles, the busy of these three roles need to be bridged to align themselves as a social being that connected to the community environment. The research question is what is the solution undertaken by students who work as nurses to save the role of the community? This article will show that Minang women who continue their education and work as nurses trying to save their role in their community at the time they are busy.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bagian yang penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Sejalan dengan itu, pendidikan seperti yang dikatakan oleh Schofield yaitu memposisikan diri sebagai tempat bagi mereka untuk mengembangkan diri berdasar keunikan potensi dan kepentingannya masing-masing (Maliki, 2010). Lebih lanjut, Grene menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya pada suatu kehidupan yang bermakna (Martono, 2012). Dengan demikian, pendidikan dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, mambantu,serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Menurut P.A. Sorokin bahwa prestasi integritas dan pangkat berdasarkan golongan, merupakan syarat paling penting untuk mencapai posisi tertentu melalui pendidikan (Idi, 2011). Hasil dari penelitian Supriyanti¹ menje-

laskan ada hubungan jabatan terhadap motivasi perawat melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. Pendidikan memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan harus bisa menjawab tuntutan masyarakat, terutama masyarakat modern. Lamanya mengenyam pendidikan dinilai memiliki banyak memberikan pengaruh terhadap pemben-tukan daya saing seseorang.

Maka inti pendidikan seiring dengan perkembangannya ialah usaha mendewasakan manusia seutuhnya lahir dan batin, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain dalam arti tuntutan supaya anak didik memiliki kemerdekaan berfikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari (Tatang, 2012).

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing mereka, dan semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin sulit menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang (Maliki, 2010). Hal ini berkaitan sebagaimana pendidikan selalu mengambil format tertentu, karena ketika sejarah berubah, pendidikan pun

¹ Supriyanti. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Perawat Melanjutkan Pendidikan Tinggi Keperawatan di Rumah Sakit Islam Surakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan*: 1-14. from: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/36077>. (diakses: 19 November 2019)

berubah. Sehubungan dengan itu, pendidikan keperawatan khususnya mengalami berbagai dinamika perkembangan pendidikan. Di Indonesia pendidikan keperawatan masih merupakan pendidikan yang bersifat vocational, yaitu pendidikan keterampilan, sedangkan idealnya pendidikan keperawatan itu harus bersifat profesionalisme. Maka, salah satu langkah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perawat melalui peningkatan pendidikan formal peraw.² Jika praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesional maka harus ada otoritas atau kewenangan.

Jenis perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah perawat vokasi dan perawat profesi. Dalam penelitian ini perawat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merujuk pada perawat yang belum memiliki pendidikan minimal diploma III, namun mempunyai kompetensi sebagai tenaga kesehatan yang diperoleh melalui pengalaman kerja di lapangan.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang tersebut lebih menjelaskan batasan kewenangan profesi perawat terkait pendidikan. Apabila dalam 6 tahun sejak diundangkan tenaga kesehatan tidak memiliki kualifikasi minimal Diploma III maka bagi tenaga kesehatan dapat menimbulkan beberapa dampak. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah menjadi asisten tenaga kesehatan, tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan, dan harus bekerja di bawah supervise tenaga kesehatan. Namun, dibalik pendidikan dan karir yang berhubungan erat, Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan menjadi sebuah tantangan bagi perawat. Pertama, perawat yang melanjutkan pendidikan SI telah berusia 40 tahun, dalam hal ini mereka membutuhkan konsentrasi dan memaksimalkan kemampuan untuk berfikir dan belajar. Kedua, mereka sudah menikah dan memiliki anak. Hal ini membuat konsentrasi menjalani pendidikan akan terbagi dengan berbagai urusan keluarga. Selain itu, mahasiswa yang sudah menikah dapat mengalami penurunan dalam hal keaktifan kuliah karena dampak dari pernikahan kuliah akan terbengkalai dan tanggungjawab akan bertambah (Aryati, Prastiwi, & Rosdiana, 2017). Ketiga, peran mereka sebagai pekerja dengan segala tugas-tugasnya sebagai perawat di rumah sakit. Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu konteks beban ganda. Peran-peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu tenaga, perhatian, sehingga kalau peran yang

satu dilakukan dengan baik, dan yang lain terabaikan maka akan menimbulkan konflik peran (Saputri, 2016). Dengan kata lain, konflik dapat terjadi apabila individu dituntut untuk memerankan berbagai peran, seperti pekerja, rekan kerja, pasangan hidup, peran sebagai orang tua dan peran sebagai anggota masyarakat.

Pendapat saya di sini adalah melanjutkan pendidikan izin belajar, melaksanakan peran sebagai ibu, dan sebagai pekerja harus bisa bijaksana membagi waktu, tanpa mengabaikan naluri untuk saling tolong menolong, setia kawan, toleransi serta simpati dan empati terhadap sesama. Adanya keinginan untuk dapat memenuhi tuntutan peran dalam kehidupan berkeluarga dan pekerjaan yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam hal membagi waktu dan komitmen untuk peran pekerjaan dan keluarga.³ Maka, pentingnya solusi peran agar membuat dirinya tetap terlibat dalam komunitas tanpa meninggalkan tugas dan tanggungjawab ke tiga peran yang lain.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang mereka lakukan untuk memainkan peranan itu secara baik. Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis (akademis) berkontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan budaya Minang. Serta secara praktis hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan sehingga dapat mempertimbangkan nilai-nilai, budaya serta kecenderungan yang ada di masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan yaitu dari Bulan November 2017 sampai Bulan Juli 2018. Lokasi Penelitian ini di Stikes Syedza Saintika Padang, dimana lokasi tersebut adalah tempat informan melaksanakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan pedoman wawancara kepada para informan dan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. Penelitian ini telah dipelajari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan model Miles dan Huberman untuk menjelaskan realitas dan interpretasi-interpretasi individu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teori peran Stryker yang menghu-

² Setyaningsih, A., Wuryanto, E., & Sayono. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Perawat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S1 Keperawatan di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang Tahun 2012. *FIKkes Jurnal Keperawatan*, Vol.6, No.2, pp.119-138. From: <<https://jurnal.unimus.ac.id>>. (diakses: 05 April 2018)

³ Susanti, S., & Ekayati, I. N. (2013). Peran Pekerjaan, Peran Keluarga, dan Konflik Pekerjaan Pada Perawat Wanita. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 2, No. 2, pp. 183-190. Doi: <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.118>

bungkan orientasinya dengan interaksionisme simbolik Meadian. Berdasarkan teori ini, meskipun berawal dari Mead namun bergerak melampaui Mead untuk memperkenalkan prinsip dan konsep teori peran serta menerangkan pengaruh timbal balik antara aktor dan struktur sosial. Menggunakan teori peran dari Stryker ini dapat mengeksplorasi kehidupan individu-individu sebagai makhluk sosial yang terlibat dalam ke tiga peran, karena menurut Stryker harus ada yang menjembatani struktur sosial dan individu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa untuk menyelaraskan manusia sebagai makhluk ekonomi dan sosial mereka melakukan refleksi, dan dalam melakukan persepsi yang kritis mereka menyadari keterbatasannya sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Menurut Freire, manusia dapat mengatasi dimensi tunggal, serta manusia mampu menjangkau hari kemarin, mengenal hari ini, dan menemukan hari esok. Maka para aktor sosial perlu memahami dirinya sebagai subjek dan juga sebagai objek supaya dapat mengatasi keterbatasan interaksi mereka dengan masyarakat akibat dari tiga peran yang dijalankan melalui solusi konflik peran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menitipkan Hadiah Untuk Acara Pernikahan

Menitipkan hadiah untuk acara pernikahan adalah cara yang dilakukan ketika mereka tidak bisa memenuhi undangan pernikahan dari teman atau kolega karena ada peran lain yang perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan. Diantara ke tiga peran yang dimiliki, yaitu sebagai mahasiswa, pekerja dan sebagai ibu, biasanya adalah peran sebagai mahasiswa yang menjadi hambatan untuk hadir dalam acara pernikahan di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dengan menitipkan hadiah diharapkan bisa mengganti kehadirannya untuk datang ke pesta pernikahan tersebut.

Uang atau hadiah yang diberikan pada prakteknya harus dikembalikan serupa atau sama ketika mereka juga mengadakan pesta pernikahan, ini menjadi transaksional karena ketika ada halangan yang membuat mereka untuk tidak hadir dalam acara pesta pernikahan tersebut, maka ada pelunas atau orang suruhan untuk menitipkan uang atau hadiah yang diberikan.⁴ Tindakan ini menjelaskan bahwa

peran mengandaikan seperangkat harapan. Jadi, uang dalam bentuk amplop atau kado menawarkan diri menjadi sarana untuk mengatasi jarak. Dengan demikian uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek, kemudian menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut.

Sehingga, amplop atau kado menjadi sarana dan simbol sebagai perwakilan dirinya agar orang tersebut terhitung hadir atau datang dalam acara pesta pernikahan itu. Tindakan atau perilaku yang dimunculkan ini sangat menentukan keramahan lingkungan terhadap kehidupannya sendiri. Mereka yang pada saat itu lebih memprioritaskan peran sebagai mahasiswa untuk dilaksanakan, lebih memilih mengganti kedatangannya melalui amplop atau kado. Ini adalah cara bagaimana mereka memelihara lingkungan dengan mensikapi kenyataan akan perannya.

Selain itu sifat dasar masyarakat Minang ada rasa setia kawan (solidaritas) yang tinggi dan rasa kebersamaan (Amir, 2011). Maka untuk menjaga hal itu, meskipun mereka tidak datang, hadiah atau amplop tetap jalan. Menurut Mauss sendiri, dalam hubungan atau bergaul dengan orang lain, menolak untuk memberi hadiah, ataupun lalai mengundang adalah sama dengan menolak untuk menerima, sama dengan suatu penolakan terhadap saling berhubungan dan persahabatan. Karena seseorang memberi sesuatu atau hadiah pada orang lain karena ia didorong untuk melakukan hal itu, penerima atau yang mengundang mempunyai semacam hak pemilikan atas segala sesuatu yang menjadi milik dari si pemberi. Hak ini dinyatakan dan dibayangkan sebagai semacam ikatan sosial. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat kesibukan adalah cara yang ia pikir telah melaksanakan harapan orang lain dan mengharapakan orang lain bertindak dengan cara-cara tertentu pula.

Jika merujuk dari penjelasan Simmel mengenai dasar kehidupan sosial, adalah individu atau kelompok individu yang sadar dan berinteraksi satu sama lain untuk beragam motif, tujuan, dan kepentingan. Ada kreativitas terhadap bentuk interaksi, kemampuan aktor untuk menciptakan struktur sosial. Dengan kata lain, aktor dapat mengambil dorongan eksternal, menjajaknya, mencoba hal atau tindakan yang berbeda, kemudian memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan.

Seperti yang disampaikan oleh Stryker dalam membangun orientasinya bahwa aktor tidak semata menerima peran, namun mereka berpikiran aktif dan kreatif terhadap peran mereka. Ada cara pandang kultural yang berusaha untuk memahami berbagai praktik sosial Minangkabau tersebut "dari dalam" kelompok sosialnya yang elemen-elemennya (manusia) diasumsikan memiliki kemampuan

⁴ Zainy, M. Q. (2008). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. From: <<https://docplayer.info/46808541-Pandangan-masyarakat-terhadap-tradisi-pesta-perkawinan-kasus-di-pesisir-desa-kilensari-kec-panarukan-kab-situbondo.html>>. (diakses 06 Desember 2018).

dan kebebasan bertindak aktif dan kreatif, kemudian cara pandang struktural yang menempatkan elemen-elemen struktur, yaitu manusia seolah tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada hukum keseluruhan.⁵ Apa yang dilakukan oleh individu-individu, tidak hanya begitu saja menerima peran. Ketika peran-peran itu datang secara bersamaan ia memikirkan apa yang harus dilakukan diantaranya, dan apa yang perlu mereka perbuat untuk menjembatani peran-peran tersebut, hal ini mengindikasikan mereka aktif dan kreatif. Teori peran Stryker mengkom-binasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep diri (dari teori interaksionisme simbolik).

Jadi, konsep peran dan konsep diri dalam menitipkan hadiah untuk acara pernikahan tidak dilakukan secara terpisah. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas diri, lalu mereka sebagai aktor memahami dirinya sebagai subyek dan sebagai obyek sehingga mereka memiliki kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubahnya untuk mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan peran. Hampir semua yang dilakukan adalah hasil dari memilih tindakan dengan suatu cara tertentu bukan cara yang lain. Keputusan untuk melakukan peran tertentu tersebut dapat mengatasi konflik peran sesuai dengan situasi dimana mereka menemukan diri mereka dan mewujudkan tindakan sesuai dengan situasi sosial dimana mereka tinggal.

2. Menyesuaikan Waktu Pergi Ta'ziah

Konflik peran timbul dari tugas-tugas yang bertentangan dalam satu peran tunggal atau dari tuntutan yang bertentangan terhadap berbagai peran yang berbeda. Sehingga menyesuaikan waktu merupakan cara yang dilakukan oleh individu-individu untuk melaksanakan peran yang lain ditengah kesibukan yang dijalani. Pergi ta'ziah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk datang ke rumah duka. Ini merupakan peran sebagai warga atau individu yang berada di lingkungan tempat tinggal yang sama atau jauh dari lingkungan tempat tinggal, dan merupakan sebagai wujud memiliki sikap dan perasaan mengenai perilaku peran ketika mendengar kabar duka, dan ini juga merupakan kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

Menyesuaikan waktu pergi ta'ziah disebut sebagai solusi yang mereka lakukan untuk memainkan peranan itu secara baik karena individu-individu mencari jalan keluar dari kesibukannya untuk tetap datang tanpa

melibatkan orang lain untuk mewakili dirinya di tengah lingkungan. Hal ini sebagaimana konflik peran dapat dikendalikan oleh rasionalisasi, pengkotakan, dan adjudikasi. Jadi, bagi mereka yang menyesuaikan waktu pergi ta'ziah tanpa digantikan oleh orang lain adalah kesadaran tentang status dan posisi dirinya sebagai makhluk sosial, yang merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu Minang.

Mereka yang pergi ta'ziah dilakukan sebelum atau sesudah menyelesaikan tugas atau peran lain dan ini merupakan penunjukan ke diri sendiri menjadi bagian dari harapan diri yang diinternalisasikan dengan perilaku mereka sendiri. Jika menyesuaikan waktu pergi ta'ziah dihubungkan dengan teori peran Stryker dalam menjelaskan solusi agar memainkan peranan secara baik, salah satu prinsip umum Stryker menjelaskan bahwa ketika berinteraksi, manusia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap diri mereka sendiri dan terhadap ciri-ciri khusus dari situasi. Penetapan situasi ini kemudian digunakan oleh aktor untuk mengorganisir perilaku mereka. Jadi, menyesuaikan waktu dengan jadwal tugas-tugas mereka untuk bisa datang ke rumah duka adalah mendudukkan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya serta membangun harapan-harapan sosial. Karena memperlihatkan emosi tidak hanya semata-mata hasil biologi, namun seperti halnya pikiran adalah hasil berpikir, tergantung sosialisasi (Henslin, 2006). Oleh karena itu, menyesuaikan waktu dengan kehadiran adalah hasil berpikir, ada perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapat tanggapan emosional dari orang lain pula. Jika seandainya mereka tidak hadir ada perasaan malu atau segan ketika bertemu dengan salah satu anggota keluarga yang mendapat musibah.

Ada ungkapan falsafah minang '*kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan*' - Jika merayakan suatu hal yang membahagiakan maka hendaklah mengundang tetangga dan handai tolan, tetapi apabila terjadi musibah atau kabar buruk pada anggota masyarakat, orang lain akan berdatangan secara spontan, tanpa dihibau penduduk segera berdatangan, dan tanpa diminta akan memberikan bantuan, dan ini masih di anut oleh mereka dalam menjalankan kehidupan sosial. Dengan demikian, pengaruh timbal balik antara aktor dan struktur sosial dijembatani atau masih difasilitasi oleh sistem tradisional, mereka tidak dipengaruhi oleh cara-cara modern, jadi menyesuaikan waktu adalah solusi dalam memainkan peranan yang timbul dari proses berpikir terhadap defenisi situasi yang dianut oleh masyarakat sekitar. Struktur sosial disini membantu membatasi hingga

⁵ Arifin, Zainal. (2009). Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Humaniora*, Volume 21, No.2, p.151. doi: <https://doi.org/10.22146/jh.963>.

ditingkat mana peran boleh 'diciptakan' ketimbang hanya 'diterima'.

3. Hadir Sebentar Membantu Memasak dalam Sebuah 'Alek'

Keputusan perempuan yang memilih untuk menjalani sebuah pekerjaan, terutama bagi perempuan yang telah menikah, disebut bahwa ia memiliki peran ganda. Peran ganda ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Meliza bahwa dalam keseharian, perempuan memiliki peranan penting. Perempuan sangat dibutuhkan hampir disetiap aspek kehidupan yaitu di dalam keluarga menjadi ibu dan istri sedangkan di luar lingkungan itu perempuan juga bekerja.⁶ Tugas perempuan pekerja menjadi lebih banyak, disamping tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, ia juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab di dalam pekerjaan.⁷ Namun, sebagai makhluk sosial, seseorang perlu untuk ikut menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di lingkungan, hubungan interaksi yang terus berjalan dan saling membantu dapat menumbuhkan ikatan yang baik dengan anggota masyarakat yang lain.

Oleh karena itu, pada sub bab ini merupakan gambaran mengenai solidaritas sosial yang merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk dari kepentingan bersama. Eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut solidaritas sosial yang dimantapkan oleh sosialisasi, dan melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar standar-standar atau aturan perilaku (Jones, 2009). Seperti tindakan yang ditunjukkan oleh mereka saat datang membantu memasak dalam sebuah *alek*. Ini adalah kegiatan yang masih dilakukan oleh ibu-ibu yang tinggal di lingkungan perumahan perkotaan, biasanya orang-orang yang ikut membantu adalah dari pihak keluarga dan para tetangga, tidak terkecuali bagi wanita yang bekerja.

Hal ini menunjukkan kerjasama perempuan Minang masih dijaga dengan baik. Karena seseorang dianggap ada, bila ia berhasil menjadi sosok yang diperlukan di kaumnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompoknya. Jadi, peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial yang datang dari lingkungan tetangga. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki pekerjaan sambil kuliah, tentunya kegiatan ini tidak bisa ia lakukan secara penuh, sehingga mereka yang bekerja dan kuliah hanya bisa hadir sebentar untuk membantu memasak dalam sebuah *alek* pada malam hari.

Singkatnya, ada nilai-nilai sosial yang diciptakan dari kebersamaan dalam kegiatan memasak itu. Selain membuat kondisi sosial menjadi akrab, menyempatkan hadir ditengah kesibukan dapat menciptakan tanggapan positif dari tetangga atau lingkungan. Meski masyarakat semakin modern dan spesialisasi setiap orang berbeda dalam setiap bidang pekerjaan dan peranan sosial. Namun tetap saja solidaritas sosial harus tetap terjaga untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari ketidakharmonisan dalam pergaulan.

Berdasarkan situasi tersebut, membantu memasak dalam sebuah *alek* merupakan suatu bentuk solidaritas atau bentuk kerjasama dan kepedulian ibu-ibu yang tinggal di lingkungan perumahan perkotaan. Bahkan jika di telusuri, hadir walaupun sebentar mencerminkan harapan akan dibalas dengan cara yang sama, jika sewaktu-waktu mereka juga mengadakan pesta pernikahan.

Seperti yang dijelaskan oleh Stryker dalam salah satu prinsip umum yang dibangunnya bahwa ketika berinteraksi, manusia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikan nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap diri mereka sendiri dan terhadap ciri-ciri khusus dari situasi. Maka, hadir sebentar membantu memasak dalam sebuah *alek* adalah bagian dari bagaimana para aktor mengorganisir perilaku mereka setelah melakukan penetapan situasi. Hal ini dikarenakan individu sebagai aktor memiliki konsep peran dan konsep diri yang tidak dapat dipisahkan. Jika ke dua hal ini digabungkan maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Mereka dapat memahami dirinya sebagai subyek dan juga sebagai obyek, maupun sebagai entitas individual, sehingga memberikan kesadaran tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan. Bersamaan dengan itu mereka mempunyai kesadaran bahwa jika tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, tingkat dimana mereka bisa memanfaatkan lingkungan saat berada pada situasi yang sama akan rendah. Jadi, mereka yang disibukkan oleh aktivitas pekerjaan dan pendidikan mengkondisikan peran-peran tersebut sehingga dapat hadir sebentar di malam hari. Dengan demikian, meskipun peran mereka sebagai mahasiswa, ibu, dan sekaligus pekerja dapat memberikan batasan-batasan, tetap saja manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan.

4. Melibatkan Tetangga Dalam Acara Syukuran

Gambaran mengenai peran perempuan Minang dijelaskan dalam sebuah literatur Zainal Arifin (2013) tentang Bundo kanduang yang "diminta" untuk mengurus urusan rumah tangga

⁶ Meliza, R., Iskandar, B. S., & Soemarwoto, R. S. (Juni 2019). Aspek Ekonomi Pada Kehidupan Perempuan Lanjut Usia: Studi Etnografi di desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya-vol.21.No.01* , 11-21. doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p11-21.2019>

⁷ Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama* , Vol. 2, No. 2, pp. 59-69. doi: <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>

saja, menangani persoalan rumah tangga, seperti perkawinan, masak memasak, atau perhiasan rumah, yang dari pemaparan tersebut merupakan dasar mengenai perempuan yang diasumsikan "pantas" hanya memiliki peran domestik, ini disadari atau tidak sudah melegitimasi dalam diri perempuan meski mereka telah bergabung dalam aktivitas pada sektor publik di berbagai bidang, sehingga dapat menghasilkan konflik peran.⁸ Dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Prakteknya, seperti melaksanakan acara syukuran yang biasa dilakukan di lingkungan tempat tinggal jika ada anggota dalam keluarga melaksanakan pernikahan, khitanan, aqiqah, kematian, pindah rumah, serta berangkat untuk perjalanan panjang seperti pergi umroh atau naik Haji, dimana acara dimulai dengan doa bersama yang kemudian diteruskan dengan makan-makan bersama dengan tujuan mendapat keselamatan dan perlindungan dari Allah S.W.T. Tentunya apa yang dikerjakan ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Bagi individu-individu yang terlibat kesibukan dalam pelaksanaan peran sebagai mahasiswa, pekerja dan sekaligus ibu akan merasa kesulitan jika mereka meng-cover seluruh aktivitas tersebut sendirian.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya, karena dalam pemenuhan kebutuhan baik hal tersebut berupa kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikis memerlukan bantuan orang lain, karena tidak mungkin bagi manusia untuk memenuhi atau melakukannya sendiri, dan jika individu mengalami tekanan yang dirasa cukup berat baginya dan merasa kurang mampu untuk memecahkan sendiri atau tidak sanggup meng-cover tugas-tugasnya, maka ia akan meminta bantuan pada orang lain yang ia percaya dapat memecahkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Jika tidak demikian tentu akan menimbulkan masalah, karena melibatkan orang-orang yang akan membantu adalah suatu bentuk kesadaran terhadap diri dan situasi apabila terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang dipandang dapat menimbulkan masalah.

Kehidupan sosial terkait dengan interaksi-interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan proses interaksi sosial juga dapat berupa bentuk kerjasama yang menghasilkan keserasian sosial, tercipta suasana hubungan yang dinamis, seimbang, dan serasi diantara pelbagai individu dan kelompok.⁹ Dengan kata

lain, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Maka, melibatkan tetangga dalam acara syukuran merupakan solusi peran yang dilakukan oleh para ibu yang bekerja dan sibuk kuliah, karena mereka berada pada situasi dimana mereka membutuhkan bantuan orang lain. Melibatkan tetangga dalam acara syukuran dan menerima bantuan juga manifestasi dari bagaimana mereka melibatkan diri dalam lingkungan. Intinya, acara melaksanakan syukuran terkait dengan posisi mereka dalam keluarga. Individu-individu yang melaksanakan tiga peranan akan merasakan kesulitan jika mereka yang meng-cover seluruh aktivitas itu sendirian. Menyadari hal itu seminggu sebelum acara mereka sudah memberitahu para tetangga bahwa mereka akan melaksanakan acara syukuran. Selain itu juga ada diantara individu-individu yang menjadi pihak melaksanakan syukuran mengikuti perubahan tren yang ada, misalnya memakai jasa *catering*. Namun ketika porsi makanan dari pihak *catering* mulai tidak mencukupi untuk tamu sedangkan acara masih belum selesai, para tetangga akan segera meng-covernya. Saling meng-cover ini tentu saja dapat meringankan kesibukan mereka yang terlibat dalam ketiga peran.

Kriteria ini juga dianggap ideal untuk menjadi sifat-sifat orang-orang Minang, solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa tolong menolong (Amir, 2011). Hal ini nampak jelas bahwa setiap manusia meskipun mempunyai kedudukan dan kekayaan, mereka selalu membutuhkan manusia lain, tidak pernah ada manusia yang mampu menjalani kehidupan tanpa bantuan orang lain.

Teori peran dari Stryker dapat menjelaskan bagaimana individu melibatkan tetangga dalam acara syukuran sebagai solusi untuk memainkan peranan dalam menjalankan kehidupan. Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep diri (dari teori interaksionisme simbolik). Bagi setiap peran orang lain, setiap individu mempunyai, ditampilkan dalam berinteraksi dengan defenisi tentang dirinya yang berbeda dari orang lain yang dinamakan identitas. Jadi, perilaku dalam suatu bentuk interaksi dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas diri.

Individu-individu yang terlibat dalam tiga peran, yaitu ibu, pekerja dan mahasiswa sadar bahwa ia tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi mereka mulai mempelajari bagaimana menggolongkan dan mengklasifikasikan maupun bagaimana mereka diharapkan bertindak terhadap permasalahan itu. Dari tahap ini individu harus mampu bergerak dari tingkat aktor ke tingkat struktur sosial, lalu kembali lagi ketingkat aktor, dimana mereka mampu menciptakan. Artinya, teori interaksionisme simbolik dan

⁸ Arifin, Zainal. (2013). Bundo Kandung: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). Jurnal Antropologi Indonesia, Vol.34 No.2, pp. 124-133. Doi:<https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3968>

⁹ Shonhaji. (2017). Keterlibatan Perempuan dalam Mewujudkan Keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung. Jurnal TAPIS, Vol. 14, No. 01, pp. 18-44. Doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v13i1.1397>

identitas mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya.

Tujuan mengintegrasikan interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Stryker bahwa harus ada sebuah kerangka konseptual yang memfasilitasi gerakan ini. Dari hasil penelitian, gerakan melintasi ini difasilitasi oleh sistem tradisional yang masih digunakan oleh individu sebagai aktor untuk menyelamatkan perannya.

5. Melibatkan Anak dalam Kegiatan Arisan

Konflik peran terjadi ketika individu-individu yang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus dapat membawanya pada pertentangan peran. Kasus perawat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ini melibatkan peran-peran yang dilakukan dalam aktifitas harian. Dengan kata lain, ketika individu menyetujui sebuah peran maka mereka sekaligus memikul beban. Hampir semua orang mengikuti panduan mengenai hal-hal yang 'pantas' bagi suatu peran. Sehingga orang biasanya ingin melakukan apa yang menurut peran itu pantas (Henslin, 2006). Maka, peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Apabila semua orang patuh terhadap persyaratan peran, dimana di dalamnya ada serangkaian hak, kewajiban, harapan, dan norma serta perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi, maka kehidupan sosialnya akan tetap harmonis. Namun, jika menyalahi persyaratan peran tentu akan menjadi konflik peran dan ini akan mempengaruhi serta mengganggu hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peran sangat efektif dalam mengerang orang. Oleh karena itu adakalanya seorang individu tidak mampu untuk menjalankan peran yang melekat terhadap dirinya dan ini dapat mengganggu kehidupan sosial individu.

Melibatkan anak dalam kegiatan arisan merupakan salah satu solusi bagi perempuan yang terlibat dalam aktivitas yang dilakukan untuk memainkan peranan secara baik. Individu memegang sejumlah peran yang berbeda dan dituntut untuk melakukan banyak hal tetapi tidak tersedia waktu untuk menyelesaikannya. Maka untuk mengatasi keterbatasan terhadap pelaksanaan peran lain akibat dari tiga peran yang dijalankannya. Anak dalam hal ini adalah sebagai penyelamat peran bagi mereka yang terkerangkeng oleh ke tiga peran yaitu sebagai mahasiswa, pekerja dan sebagai ibu.

Berdasarkan penjelasan di atas, melibatkan anak dalam kegiatan arisan adalah sebagai ganti ketidak ikutsertaan, dan ini dirasakan pantas oleh mereka menurut situasi dirinya dengan situasi dan kondisi di lingkungan. Oleh karena itu, solusi untuk memainkan peranan yang dilakukan ini adalah cara bagaimana peran mereka dengan

kelompok-kelompok tertentu di lingkungan dapat bergerak tanpa kehadiran dirinya.

Solusi ini menunjukkan sifat pribadi orang Minang, yaitu dengan berpikir jauh kedepan, maka akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi sehingga tetap selalu waspada (Amir, 2011). Melibatkan anak juga bisa untuk mengantisipasi keuntungan atau kerugian yang dicapai dari tujuan kegiatan arisan itu. Jadi, ketika dalam pengundian atau "kocok arisan" ada yang tidak hadir, dan nama yang tidak hadir itu keluar maka dinyatakan "hangus". Untuk itu dengan melibatkan anak, mereka mengantisipasi situasi demikian. Berdasarkan hal tersebut, mengganti ketidakikutsertaan dalam kegiatan arisan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dengan cara melibatkan anak merupakan sebuah solusi untuk menjalankan kehidupan sosialnya.

Jika solusi peran ini dikaitkan dengan teori peran stryker dengan melibatkan anak dalam kegiatan arisan maka ini sudah menjadi *role making* dimana individu sebagai aktor bisa menciptakan kreativitas dan membentuk interaksi. Dengan demikian, jalan mereka untuk tetap terlibat dengan masyarakat tetap menggunakan sistem tradisional yaitu dengan melibatkan anak mereka agar dirinya tetap terhitung dalam interaksi.

D. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian terhadap perawat yang terlibat konflik peran saat melanjutkan studi SI, dapatlah dipahami bahwa konflik peran ini adalah suatu keadaan dimana peran-peran menjadi dilematis, di satu sisi mereka sebagai bawahan harus patuh terhadap perintah pimpinan, di sisi lain mereka harus patuh terhadap perannya sebagai mahasiswa. Dalam konteks ini, memberikan penekanan bahwa struktur sosial dianggap 'kerangka', dimana struktur sosial memiliki wilayah kotak-kotak kehidupan, seperti keluarga, pekerjaan, pendidikan dan masing-masing kotak itu berisi stratifikasi sosial, kelas sosial, dan status sosial yang memberikan pengaruh lalu berkembang menjadi hambatan terhadap peran baru yang tengah mereka jalankan, yaitu peran sebagai mahasiswa. Dalam kehidupan, peran yang telah disusun oleh masyarakat mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulan. Jika ingin kehidupan sosial tetap harmonis, maka harus mematuhi persyaratan peran. Jadi, orang biasanya melakukan apa yang sesuai dengan peran mereka. Oleh karena itu, gambaran konflik peran tidak dapat dilihat hanya di satu sisi, tetapi ada pengaruh timbal balik antara aktor dan struktur sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik peran tersebut diperlukan solusi untuk memainkan peranan itu secara baik. Solusi ini dijumpai oleh bentuk interaksi sosial Minangkabau dengan mempraktekkan

kaba baik baimbauan, kaba buruak bahambauan. Cara kerja ini menciptakan *role making* di tengah-tengah kesibukan mereka, dengan melibatkan orang-orang terdekat untuk mewakili dan membantu peran yang tidak bisa mereka laksanakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat tanpa mengurangi nilai mereka dimata orang lain. Dengan demikian *role making* mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini, khususnya pimpinan dan para staf di Stikes Syedza Saintika Padang beserta seluruh informan yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bantuan dan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2011). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arifin, Zainal. (2013). Bundo Kandung: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). *Jurnal Antropologi Indonesia* , Vol.34 No.2, pp. 124-133. Doi:<https://doi.org/10.7454/ai.v34i2.3968>
- Arifin, Zainal. (2009). Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Humaniora* , Volume 21, No.2, p.151. doi: <https://doi.org/10.22146/jh.963>.
- Aryati, D., Prastiwi, S., & Rosdiana, Y. (2017). Motivasi Belajar Mahasiswa yang Sudah Berkeluarga dengan Indeks Prestasi (IP) di Fakultas Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang. *Nursing News* , Volume 2, Nomor 3, pp. 251-259.
- Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, Vol. 2, No. 2, pp. 59-69 doi: <http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v2i2.24>
- Henslin, J. M. (2006). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga.
- Idi, A. (2011). *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-teori Sosial* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Meliza, R., Iskandar, B. S., & Soemarwoto, R. S. (2019). Aspek Ekonomi Pada Kehidupan Perempuan Lanjut Usia: Studi Etnografi di desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya-vol.21.No.01* , 11-21. doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p11-21.2019>
- Saputri, E. Y. (2016). Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja. *eJournal Sosiatri-Sosiologi* , Volume 4, Nomor 2, pp. 212-226.
- Shonhaji. (2017). Keterlibatan Perempuan dalam Mewujudkan Keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung. *Jurnal TAPIS*, Vol. 14, No. 01,18-44. doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v13i1.1397>
- Susanti, S., & Ekayati, I. N. (2013). Peran Pekerjaan, Peran Keluarga, dan Konflik Pekerjaan Pada Perawat Wanita. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia* , Vol. 2, No. 2, pp. 183-190. Doi: <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.118>
- Tatang, S. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.



PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA AKIBAT MEDIA INSTAGRAM BAGI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA PADANG

Elva Ronaning Roem^{1*}, Sarmiati²

^{1,2} Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 23 August 2019
Review : 16 September 2019
Accepted : 27 October 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Communication culture; Technology Impact; Instagram; Student

CORRESPONDENCE

*E-mail: elvarona@soc.unand.ac.id

A B S T R A C T

Socio-cultural changes in the world of social media always occur because of the support of sophisticated technology that occurs to this day. One of them is the use of Instagram for millennials, including in Padang. This research is to find out how social change is and the impact that occurs on students in Padang in using Instagram. This research was conducted in Padang, using a case study approach by conducting in-depth interviews with 25 students who were active in using Instagram with a daily usage frequency of more than 12 to 24 hours. The results showed that the use of Instagram had an impact on the emergence of social and cultural changes for students in Padang. First, they do not hesitate to share excessively in self-disclosure in cyberspace. This culture certainly arises because of the presence of Instagram as one of the social media that can be accessed by anyone. Second, students are not able to provide boundaries between private space and public space, so Instagram currently also has an influence as a channel or medium in complementing relationships among themselves, and at the same time Instagram is part of the lifestyle chosen by students when communicating using sophisticated technology.

A. PENDAHULUAN

Instagram saat ini dikenal dengan kepopulerannya yang membawa masyarakat untuk bisa merasakan narsis setiap hari. Ini tentunya tidak lepas pula dari dukungan fitur-fitur dari fasilitas yang dimunculkan *smartphone* yang mampu membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Setiap orang dimanapun dan kapanpun dapat berfoto lalu mengabadikan pada akun Instagram mereka sebagai pilihan untuk ajang eksistensi diri.

Perkembangan Jejaring sosial Instagram saat ini seakan sudah menjadi bagian yang penting bagi pergaulan kekinian di kalangan mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri, mahasiswa masa kini identik dengan telepon genggam mereka yang penggunaannya bisa dilakukan hampir 24 jam dalam sehari. Penggunaan media sosialpun selalu beragam untuk diakses, artinya Tidak hanya Instagram yang mereka gunakan namun juga diikuti dengan perangkat komunikasi sosial lainnya yang paling sering digunakan seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *youtube*, *line*, dan *Whatsapp*.

Mark Poster dalam Holmes (2004) menyebutkan keberadaan media secara online telah menjadi tren di kalangan remaja. Hal ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern. Terbukti munculnya teknologi yang bersifat interaktif, seperti dunia maya, akan mengubah masyarakat di masa yang akan datang. Penguasaan teknologi juga dapat dilihat dari pola pemikiran masyarakat dewasa sekarang yang telah berubah dalam proses interaksi sosial mereka. Salah satu contoh adalah beragamnya aktivitas komunikasi dalam kehidupan sosial manusia yang perlahan berpindah dari komunikasi tatap muka mengutamakan aspek bertemunya fisik secara nyata menjadi komunikasi tanpa batas dan disebut dengan komunikasi virtual yang berlangsung di dunia maya.

Crish Garret (Aditya, 2015) juga menyebutkan bahwa berbagai jejaring sosial yang bersifat online yang hadir di dunia pada zaman sekarang ini merupakan suatu perangkat yang mudah dalam penggunaannya. Produk jejaring sosial bisa berbentuk jasa dan berbentuk komunikasi

yang mampu memfasilitasi setiap hubungan yang terjadi antara orang dengan satu sama lain. Setiap orang memiliki minat yang tinggi untuk menggunakannya tanpa terkecuali mulai dari orang dewasa, para remaja, bahkan usia dibawah umur. Banyak mereka yang sudah memiliki akun pribadi. Munculnya berbagai macam dunia online salah satunya Instagram ditengah kehidupan masyarakat memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif.

Mursalim (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan, Era teknologi canggih serta modern memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, bahkan kenyataan ini memaksa masyarakat untuk turut andil berfikir maju, kreatif, dan inovatif di segala bidang. Dari pendidikan, ekonomi, hukum, sosial budaya, sampai gaya hidup perlahan-perlahan mulai bertransformasi lebih dinamis dan praktis akibat fasilitas yang semakin canggih dan serba online. Salah satunya dalam memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media berkreasi dan menguatkan identitas diri. Sementara itu mahasiswi di Kota Padang, untuk dua Universitas yakni Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta, yang bagi para mahasiswi tersebut Instagram memiliki magnet bagi hidup mereka dan membuat mereka memiliki media dan dunia sendiri.

Sentrock (2011) menyatakan bahwa pergaulan setiap orang berbeda, dalam penggunaan media sosial, usia berpengaruh pada tingkat kematangan yang hampir sama. Observasi penulis dilapangan salah satu yang memberikan pengaruh buruk bagi mahasiswi di Kota Padang dalam penggunaan Instagram sebagai cara pergaulan di dunia maya bagi mereka adalah pengaruh teman sebaya. Mahasiswi berasumsi Instagram adalah kamus baru dalam mengenal dunia nyata mereka. Karena setiap saat bebas tanpa batasan untuk melakukan komunikasi pada siapapun.

Mereka juga tidak memiliki hambatan apapun dalam dunia tersebut karena setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya antara didunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. Penggunaan Instagram pada akhirnya membudaya pada diri mahasiswi bahwa teknologi adalah salah satu pendukung paling mendasar dan pendorong utama munculnya proses kebudayaan.

Sarkawi (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kebudayaan dalam penggunaan teknologi khususnya penggunaan jejaring sosial yang bersifat online ini adalah adalah proses yang bersifat seperti lambing (simbol), berlangsung terus menerus, berlaku pada setiap orang yang bersangkutan dan setiap orang akan merasakan perubahan secara bertahap. Sarkawi juga menyebut bahwa sifat kebudayaan yang berupa simbol ini juga memungkinkan, siapapun dapat dengan mudah

bisa melakukan komunikasi yang setiap saat dapat diteruskan dari seorang individu kepada individu lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain kebudayaan adalah fenomena yang mencakup kehidupan individu dan dapat menjelaskan seluruh perilakunya sebagai manusia.

Fahlepi, (2017) menyebutkan Media Sosial (*Social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang berfungsi untuk memperluas interaksi sosial manusia serta mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ("one to many") menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience ("many to many"). Sementara itu Instagram dirancang sebagai sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang dapat dilihat oleh Followers dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar antara sesamanya.

Menurut Jogiyanto (2007) Perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individual mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu tertentu. Minat perilaku akan menentukan perilakunya. Perilaku-perilaku yang di inginkan adalah perilaku-perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat oleh seseorang individual. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks penggunaan teknologi informasi, perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi.

Febriana (2017) melakukan penelitian dengan menscreenshot laman akun Instagram mahasiswi komunikasi di Universitas Sebelas Maret menyatakan bahwa mahasiswi memanfaatkan Instagram sebagai "Endorse", yakni ajang mempromosikan apapun tentang diri mereka untuk menunjukkan eksistensi diri mereka sebagai mahasiswi. Hasil penelitian juga menekankan bahwa makna "endorse" dapat mempengaruhi pola perilaku dari mahasiswi

Teori Ecnahme Cuture milik Hanners, dalam Martono (2014) menjelaskan setiap manusia berada dalam lingkungan yang berbentuk seperti interaksi, mereka juga akan menilai dan memberikan interpretasi terhadap apa yang mereka terima dan kemudian melakukan pertukaran budaya yang berlangsung secara terus menerus. Keadaan ini akan dimulai dari budaya lama atau yang disebut dengan budaya tradisional yang muncul pada kelompok-kelompok tersebut kemudian keadaan itu membuat mereka, berada pada ruang dan waktu tertentu yang pada akhirnya telah mereka ciptakan sendiri secara tak langsung di praktikkan dalam interaksi yang berlangsung secara tatap muka dalam komunikasi Interpersonal.

Selanjutnya budaya tradisionalpun beranjak

pada budaya yang bersifat modern yang dapat melintasi mulai dari jauh dekatnya ruang, dan waktu. Pada saat peralihan budaya dari tradisional ke budaya modern inilah aliran budaya dalam Ecumene justru tidak bersifat timbal balik melainkan hanya bersifat satu arah. Semuanya dikendalikan oleh teknologi. Secara tak langsung budayapun menjadi berubah akibat pengaruh teknologi tersebut. Dalam hal ini Hanners menggambarkan terjadinya empat kemungkinan sehubungan adanya penyatuan budaya dimasa mendatang. Pertama, munculnya manusia dengan produk global atau yang disebut dengan Homo genisasi global. Produk budaya global dibawa oleh budaya barat yang diprediksi akan mendominasi di seluruh dunia. Semua manusia diseluruh dunia akan berusaha melakukan perubahan mulai dari jiplakan gaya hidup, pola konsumsi, nilai dan norma serta gagasan dan keyakinan masyarakat barat.

Hanner berasumsi, pada kondisi ini, keunikan justru terjadi pada budaya lokal pribumi. Semuanya akan lenyap karena dominasi budaya barat tersebut, karena masyarakat secara massal melakukan perubahan besar dalam hidup mereka. Kedua, masyarakat pribumi akan merasa jenuh akibat munculnya proses pengaruh budaya global. Ini akan terlihat pada perubahan yang lebih ditekanankan pada dimensi waktu. Salah satu contoh yang akan terlihat adalah pengaruh dimensi waktu yang terjadi secara perlahan pada masyarakat pinggiran. Prediksi lain Hanner tersebut juga terlihat pada dimensi waktu jangka panjang, munculnya beberapa generasi, bentuk, makna, dan penghayatan budaya lokal akan membuat lenyapnya budaya tradisional di kalangan masyarakat pinggiran.

Ketiga, hal yang buruk akan terjadi akibat perubahan budaya global, yakni dimulai dengan rusaknya budaya lokal yang dimiliki oleh kelompok pribumi. Kerusakan ini akan terjadi melalui beberapa tahap mekanisme yang mau tak mau harus mereka terima akibat konsekuensi penerapan budaya global tersebut. Mekanisme pertama adalah budaya penerima akan mentahmentah menyaring produk budaya barat yang canggih walaupun pada dasarnya masyarakat pribumi hanya mampu menerima budaya yang bernilai murahan.

Mekanisme kedua adalah terjadinya penyalahgunaan nilai budaya yang awalnya diterima oleh masyarakat tradisional, namun kemudian disesuaikan dengan cara hidup lokal yang sudah ada. Ketiga, pola pikir masyarakat akan mengalami kedewasaan, yaitu menerima kedatangan budaya barat melalui dialog dan pertukaran sosial. Masyarakat berusaha memberikan penilaian mereka secara lokal terhadap budaya baru yang mereka adopsi. Akibatnya akan terjadi peleburan antara unsur budaya yang datang dan yang menerima.

Berkaitan dengan penggunaan Instagram dan budaya, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan

dalam fenomena kehidupan mahasiswa saat ini, kehadiran Instagram bagian dari produk sebuah budaya global dalam penggunaan teknologi canggih yakni internet membuat mahasiswa yang mulanya pendiam dan pemalu, tidak berani bicara menjadi tidak punya rasa malu lagi, bahkan berani memberi komentar karena bicara di internet bagi mereka bisa bersifat lebih bebas. Penggunaan internet yang lebih fleksibel tidak seperti media massa TV dan Radio. Hal ini membuat mahasiswa menjadi tidak ragu-ragu beropini secara online. Terlihat pula Pola komunikasi secara otomatis berubah menjadi pola komunikasi maya dan komunikasi virtual. Setiap interaksi yang dilakukan mahasiswa terjadi ketika menggunakan Instagram. Keberadaan Instagram yang muncul karena budaya global inilah yang membuat mahasiswa kini mampu mengubah diri mereka menjadi apa yang mereka inginkan.

Komunikasi yang di mediasi atau komunikasi melalui media baru, yang di manfaatkan mahasiswa saat ini telah memperluas kapasitas dasar komunikasi mereka sebagai manusia. Ini ditunjukkan setiap orang bisa berkomunikasi untuk melintasi waktu dan ruang dengan cara dan kecepatan yang tidak mungkin ditempuh tanpa media. Namun tak dapat dipungkiri komunikasi yang dimediasi memiliki keuntungan dan kerugian. Tujuan penulisan artikel tersebut adalah menganalisa perubahan sosial budaya yang terjadi terhadap mahasiswa di Kota Padang, sehingga akan merubah perilaku dan kebiasaan mereka tersebut.

B. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2014) mengatakan bahwa studi kasus dapat menjawab signifikansi/manfaat sosial penelitian yang ingin dicapai, yaitu memperkaya informasi mengenai Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Instagram yang terjadi pada mahasiswa di dua Universitas di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Selain itu studi kasus dapat membantu para pembaca (hasil penelitian) dalam mengkonstruksikan pengetahuan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan mahasiswa yang berjumlah 25 orang dan aktif menggunakan Instagram. Mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari dua perguruan tinggi di Kota Padang, yakni Universitas Andalas dan Universitas Bung Hatta. Proses mendapatkan informan peneliti lakukan dengan cara purposive sampling memakai kriteria. Salah satunya melihat informan terlibat dalam sehari menggunakan Instagram bisa mencapai 12 hingga 24 jam. Proses wawancara dilakukan secara mendalam dan pengamatan melalui laman akun Instagram mereka peneliti

lakukan dengan tujuan memahami perspektif informan mengenai makna media sosial khususnya Instagram bagi mahasiswi yang berasal dari dua Universitas yang berbeda tersebut. Sehingga dapat diketahui bagaimana mereka memanfaatkannya media tersebut dalam kehidupan mereka.

Untuk menganalisis data dilapangan, Model Miles dan Huberman menjadi pilihan bagi penulis, yang dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian reduksi data, hingga penyajian data dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data-data yang berasal dari wawancara dengan informan utama, rekam jejak publikasi dan interaksi informan utama di media sosial, serta data-data yang berasal dari wawancara dengan informan pendukung atau orang-orang yang ada di sekitar kehidupan informan utama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instagram Membudaya dengan Pemakaian Hingga 24 Jam.

Penelitian ini menyebutkan dari 25 Mahasiswi yang diwawancarai secara mendalam, 25 orang mengaku mereka

menghabiskan waktunya 24 jam sehari untuk berselancar pada dunia maya dan menggunakan Instagram dalam berkomunikasi. Terkadang mereka cenderung mengalami tekanan psikologis, akibat sering melihat teman atau orang yang selalu bepergian atau bersenang-senang. Sebagian mahasiswi mengaku hal tersebut membuat mereka merasa ketinggalan karena orang lain seperti sedang menikmati hidup.

Akibat terlalu sering memakai Instagram, terkadang membuat perasaan mereka selalu membandingkan diri mereka sendiri dan berusaha untuk bisa seperti dengan apa yang dilihatnya dalam media sosial tersebut. Instagram juga bisa memberi harapan yang tidak realistis dan menciptakan perasaan ketidakcukupan serta kepercayaan diri rendah. Hal itu tentunya dapat menjelaskan bahwa Instagram mendapat nilai terburuk dalam hal citra tubuh dan kecemasan. Salah satu Mahasiswi menyebutkan "Instagram dengan mudah membuat seseorang terutama perempuan merasa tubuh mereka kurang ideal sehingga banyak orang mengedit fotonya agar mereka tampak sempurna". Dapat dimaknai bahwa semakin sering mahasiswi membuka Instagram, maka makin besar pula mereka merasa depresi dan cemas akibat apa yang dilihatnya dalam dunia maya tersebut.

Tabel 1: Instagram Membudaya dengan Pemakaian Hingga 24 Jam

No	Informan	Durasi Menggunakan IG	Alasan Menggunakan IG
1	ST	20 jam	Untuk up date status
2	AS	24 jam	Kepo dengan teman
3	SM	19 jam	Memberikan perasaan menyenangkan
4	KR	20 jam	Untuk didengarkan
5	WT	20 jam	Untuk Dikenal
6	TT	16 jam	Mengekspresikan diri
7	AL	23 jam	Menjadi <i>trend</i>
8	MK	22 jam	Sebagai ajang pamer
9	AZ	22 jam	Menambah teman
10	RM	19 jam	Penasaran
11	DR	19 jam	Ingin untuk diperhatikan
12	JJ	20 jam	Ingin kehidupannya diketahui banyak orang
13	MA	24 jam	Ingin menambah teman pergaulan
14	BS	24 jam	Ingin bergaya hidup modern
15	TY	24 jam	Ingin bersaing dengan teman
16	JS	24 jam	Ingin menambah teman pergaulan
17	NA	20 jam	Ingin membahagiakan diri sendiri
18	LK	20 jam	Ingin disebut gaul
19	VV	20 jam	Sebagai tempat curhat
20	GR	22 jam	Untuk membuka diri
21	ER	21 jam	Untuk berani mengungkapkan
22	AB	24 jam	Ingin dikatakan manusia super <i>up-dates</i>
23	BT	19 Jam	Pelampiasan diri
24	YS	20 Jam	Ingin diperhatikan
25	DW	21 Jam	Ingin berani dalam mengungkapkan

Sumber: Data Primer, 2019

2. Instagram Memperluas Hubungan Komunikasi Dalam Dunia Maya Tanpa Batas.

Pada dasarnya, karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) di internet semata, tetapi juga harus

dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti tanda *love n like* di Instagram.

Beberapa mahasiswi menyebutkan bahwa setiap melakukan unggahan video yang ke Instastori Instagram, mereka mendapatkan ba-

nyak komentar. Hal ini tentu saja membuat mereka sebagai si pemilik akun merasa sangat bahagia dan bangga akan diri mereka. Hal ini dipertegasakan oleh DW, yang menyebut dirinya bisa dalam sehari melakukan *up date* status hingga 15 kali di instastori.

..."Saya biasanya *up date stories* di IG tidak terlalu panjang namun sering, misalnya menunggah foto-foto selfie saat berkumpul dikampus bersama teman, saat ngumpul makan bersama para sahabat. Pokoknya sebisa mungkin mengabadikan setiap peristiwa yang saya anggap penting".

Sementara itu AB hampir 24 Jam menggunakan Instagram hanya sekedar ingin dikatakan sebagai Manusia Super *Up-dates*. Dirinya berusaha melakukan cara agar semua *up date* status tersebut mendapat *like* dari semua orang yang mengikutinya di akun Instagram

..." Semakin sering kita *up-dates* status di IG maka akan semakin dikenal pula oleh banyak orang, meskipun mereka tinggal dibelahan bumi manapun. Yang jelas membangun jaringan itu penting dilakukan saat usia muda begini".

Penggunaan Instagram yang dilakukan oleh mahasiwa di dua Universitas yang berbeda ini adalah salah satu bentuk komunikasi akibat hasil kemajuan teknologi dan kreativitas yang saat ini dinikmati oleh semua mahasiswi dari berbagai kalangan. Instagram telah banyak membantu dalam mencari apapun yang mereka inginkan.

Mahasiswi bisa berkomunikasi dengan sesama mereka selama berjam-jam, bahkan hingga tertidur menutup mata, bahkan terkadang tak habis waktu bagi mereka untuk menunjukkan diri mereka melalui tulisan, suara bahkan video, tanpa rasa kuatir paket data yang dimiliki habis kuotanya. Dan seperti hal lainnya, di antara semua manfaat yang ada, tidak jarang ada saat-saat di mana beberapa orang lupa bahwa kemudahan dan kebebasan yang ada di dunia maya tidaklah bebas tanpa batas, tapi tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain untuk dihargai dan dihormati. Dengan semakin meluasnya jangkauan Instagram yang merupakan dan media sosial yang melibatkan semakin banyak orang di dalamnya, maka semakin banyak pula hal-hal kurang baik yang datang pada diri mahasiswi.

Mahasiswi berusaha memanfaatkan keadaan ini untuk mencari jati diri mereka pula bahwa dengan memanfaatkan Instagram bagi setiap orang tidak hanya saja untuk mendapatkan sebuah kesenangan, namun juga membuat diri mereka perlu mendapatkan dukungan bahwa setidaknya Instagram membuka cakrawala untuk melihat dunia yang luas dalam hidup mereka. Mulai dengan memperoleh teman yang banyak yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, serta ajang melupakan emosi dan pamer diri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki yang bisa di posting sesuka hati tanpa merasa bersalah pada diri sendiri.

Berikut makna Instagram bagi mahasiswi dalam memperluas hubungan komunikasi mereka dalam dunia maya tanpa batas:

Tabel 2: Instagram Memperluas Hubungan Komunikasi Dalam Dunia Maya Tanpa Batas.

No	Informan	Alasan
1	ST	Banyak Teman
2	AS	Memperluas jaringan
3	SM	Komunikasi bebas tanpa batas
4	KR	Bisa mendapat pacar
5	WT	Dapat berbagi dalam ruang waktu
6	TT	Menciptakan kebaikan bagi diri yang hampa
7	AL	Komunikasi tidak terbatas waktu
8	MK	Memunculkan keajaiban dalam dunia maya
9	AZ	Menambah <i>viewer</i>
10	RM	Menjalin silaturahmi
11	DR	Membina hubungan persahabatan pada orang yang tidak dikenal
12	JJ	Menambah relasi
13	MA	Memperluas cakrawala
14	BS	Mengenal banyak orang
15	TY	Mencari seseorang yang hilang dalam kehidupan
16	JS	Sebagai ajang eksis mencari pasangan
17	NA	Menjalin komunikasi dengan teman-teman di Luar Negeri
18	LK	Menjaring relasi seluas-luasnya
19	VV	Mengenal siapapun yang ingin dikenal
20	GR	Belajar mengetahui karakteristik orang lain
21	ER	Membangun komunikasi yang sukses
22	AB	Bisa berkomunikasi hingga 24 jam
23	BT	Komunikasi menjadi luas
24	YS	Komunikasi tidak ada jaraknya
25	DW	Belajar berani bicara

Sumber: *Data Primer, 2019*

3. Perubahan Sosial dan Budaya akibat Media Instagram.

Setiap manusia selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan-perubahan tersebut selalu berpengaruh setidaknya pada nilai sosial, pola-pola perilakunya dalam kehidupan. Teknologi dan media baru memberikan dampak buruk bagi Mahasiswi di Kota Padang. Beberapa informan seperti BT menyebutkan bahwa "Instagram telah mengepung mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, mulai dari bangun tidur hingga tertidur dan bangun kembali". Sementara itu VV menyebutkan "Kehadiran Instagram bagi mereka tidak hanya sekedar sebagai ajang gaya hidup saja namun Instagram dianggap pula sebagai saluran utama serta terpercaya dalam menyampaikan informasi.

AL dari Univeristas Bung Hatta menyebutkan pula "Dampak lain bagi mereka dalam menggunakan Instagram adalah munculnya budaya berbagi yang berlebihan dan pengungkapan diri (*self disclosure*) di dunia maya". Bagi AZ budaya ini muncul karena hadirnya instagram yang memungkinkan mereka dapat mengunggah apa saja. Dan keadaan ini bagi GR adalah sebuah budaya yang pada akhirnya memberikan setiap informan merasakan memiliki kesempatan dalam membuka jendela dunia maya mereka seluas-luasnya dan terkadang tidak mampu lagi membedakan mana ruang pribadi dan ruang publik.

Para informan lainnya seperti WL, TT, MK juga menegaskan bahwa Instagram bagi mereka membuat mereka tidak dapat menghindari setiap saat selalu terbiasa dengan membuat sebuah status, di dinding Instagram dengan mengunggah foto-foto yang bisa di edit sesuai dengan keinginan serta dapat bercerita tentang apapun yang dialami oleh si pemilik akun membuat hati mereka merasa bangga dan puas akan peristiwa yang mereka hadapi saat itu. RM, JJ, TY juga berpendapat Instagram tidak hanya sebagai hiburan iseng saja, namun bagi mereka Instagram juga membawa perubahan sosial pada hidup mereka mulai dari budaya, penggunaan bahasa, hingga perubahan pada aspek ekonomi salah satunya ketika menjual produk di Instagram.

Penggunaan media sosial membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, bahkan dikalangan mahasiswi sebagai bagian dari masyarakat modern yang dikatakan sebagai orang yang berpikiran maju saat ini dalam hal intelektualitas. Munculnya media sosial salah satunya Instagram menjadikan pola perilaku mahasiswi mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Tak dapat dipungkiri dari berbagai kalangan dan usia hampir semua mahasiswi saat ini memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik.

Roger Fidler dalam Nasrullah (2016) menjelaskan hadirnya jaringan sosial dalam media massa baru merupakan salah satu akibat pada munculnya pengaruh yang kuat dari perkembangan teknologi dan internet di tengah kehidupan manusia. Kehidupan manusia mengalami transformasi dari kehidupan dari nyata menjadi virtual. Jalinan hubungan yang dibangun antar manusia itu sendiri di setir oleh teknologi. Tidak hanya itu berbagai inovasi-inovasi juga cenderung bersifat sosiologis. Artinya teknologi yang ada memberikan ruang bagi masa depan manusia, dan teknologi tersebut sengaja dihadirkan di setiap sudut kegiatan manusia.

Instagram dalam keadaannya muncul dan memungkinkan setiap penggunanya berusaha merepresentasikan diri mereka dengan pola berinteraksi yang mereka ciptakan selalu tidak sama antara satu dan yang lain hingga, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Secara tak langsung prediksi Hanners dalam Teori Ecumene Culture mampu menjelaskan makna dari penelitian ini, bahwa dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam dunia jejaring sosial dapat membuat seseorang melakukan penilaian-penilaian tersendiri atas diri mereka, serta dapat melakukan pertukaran budaya yang berlangsung secara terus menerus dalam hidupnya. Bahkan setiap orang bebas memakai Instagram untuk memilih budaya modern bagi mereka dalam melintasi jarak, ruang, dan waktu dengan menggunakan teknologi komunikasi tanpa harus terikat dalam ruang dan waktu dalam pemakaiannya.

Perubahan sosial dalam penggunaan Instagram yang berdampak pada mahasiswi, menurut Verbena Ayuningsih Purbasari dan Suharno (2019) pada dasarnya yang dilakukan karena mahasiswi merupakan bagian dari masyarakat memiliki dua pengertian besar. Pertama, mahasiswi adalah bagian dari masyarakat sebagai sebuah realitas yang dapat muncul dengan sendirinya. Kedua, mahasiswi sebagai bagian dari masyarakat muncul karena sebuah realitas yang terbentuk terlebih dahulu karena adanya interaksi dan komunikasi antar individu dalam jaringan sosial tersebut.

Dalam penelitian ini, mahasiswi menggunakan Instagram rata-rata 19-24 jam setiap harinya, hal ini tentunya dimaknai bahwa Media sosial bagi mahasiswi merupakan media yang sengaja mereka ciptakan tidak hanya saja dalam berkomunikasi namun untuk membangun eksistensi mereka melalui kebiasaan yang membuat orang lain tertarik untuk melihat jaringan sosial mereka. Wahyudi dan Sukmasari (2018) menegaskan Media sosial ini merupakan suatu hal yang unik, karena media sosial memungkinkan pengguna untuk mengartikulasikan dan membuat orang lain melihat apa yang dimunculkan dalam jaringan sosial mereka.

Bagi mahasiswi Instagram saat telah menjadi sebuah media yang sangat populer. Apalagi produk budaya global tersebut mampu mengubah mahasiswi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang selalu harus cenderung “gaul” agar terlihat berbeda dari yang lain untuk mendapatkan pengikut yang banyak pada akun mereka. Tidak hanya itu saja, setiap unggahan yang dimunculkan harus dibuat sedemikian menariknya, mulai dari dimanapun dan kapanpun mereka berfoto kemudian menguploadnya di akun Instagram

Selama ini yang membuat setiap akun menarik dan menjadi sasaran bagi pengguna Instagram adalah mulai dari foto pribadi yang mereka abadikan, foto kuliner, serta tempat-tempat umum yang punya magnet dan daya tarik. Dalam penelitiannya tentang Instagram, Astuti (2018) menyebut bahwa Instagram memperlihatkan berbagai keunggulan yang membuat akun Instagram seseorang tersebut dapat melejit. Keadaan ini juga sesungguhnya didukung oleh keberadaan sistem sosial yang dibawa oleh Instagram pada penggunaannya. Salah satu contohnya adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki followers (pengikut) instagram, berdampak munculnya sistem sosial tadi, karena setiap orang akan otomatis saling berkomunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanggapan dan komentar berdasarkan apa yang dibuat dalam dinding Instagram mereka.

Nasrullah (2016) juga menyatakan ketika seseorang mulai merasakan bahwa media sosial adalah sesuatu yang berarti dalam hidup mereka, maka disanalah terjadinya realitas media, yang terjadi dimulai karena adanya hasil proses simulasi, direpresentasikan dan kemudian media menjadikannya sebagai realitas tersendiri yang terkadang apa yang di tunjukkan berbeda atau malah bertolak belakang. Dalam penelitian ini, proses terjadinya perubahan sosial mahasiswi dimulai dari perilaku yang mereka munculkan digambarkan melalui tahapan proses, awalnya mereka mengenal media sosial Instagram dari orang-orang di sekitar mereka yaitu keluarga dan teman sepermainan. Lingkungan teman sepermainan juga tak kalah penting dalam menyebarkan virus tren bermain Instagram sehingga para informan sebagai orang yang beranjak dewasa saling mempengaruhi sesamanya. Setelah mengenal dan terbiasa berselancar media sosial Instagram sendiri, maka para informan telah terbiasa mendapatkan segala informasi yang disajikan media sosial Instagram termasuk apapun yang mereka inginkan terkait dengan gaya hidup.

Dari pertemanan dalam jaringan sosial tersebut mereka mulai menemukan orang-orang atau akun Instagram yang mereka kagumi atau sukai. Biasanya karena ada faktor kecocokan antara akun yang mereka lihat dengan diri

mereka sendiri. Pada tahap selanjutnya, kebiasaan untuk tetap menggunakan Instagram tersebut membuat para informan masuk di tahap mengingat. Siapa saja orang-orang yang selalu akrab dengan mereka dan selalu melihat akun mereka, dan membuat mereka berusaha terus memperluas hubungan komunikasi dalam dunia daya tanpa batas tersebut sebagai dunia yang nyata dan terus membudaya bagi diri mereka.

Keberadaan Instagram yang bersifat kekinian pada akhirnya mampu merubah perilaku seseorang dalam hidupnya. Penelitian Mursalim dan Putri, Eka, Delia, (2016) tentang fenomena perilaku yang dimunculkan remaja di SMAN 1 Kota Makassar, tentang media sosial Instagram terkait dunia fashion kepada para remaja pengguna media sosial Instagram tersebut memunculkan sebuah perilaku yang disebut “Mimetik”. Yang artinya bahwa penggunaan Instagram tersebut dimulai dari perilaku dasar remaja yang mengalami perubahan setelah mengenal dunia fashion dari media sosial Instagram. Proses terjadinya perilaku mimetik pada remaja pengguna media sosial Instagram khususnya di SMA Negeri 1 Makassar sangat dipengaruhi lingkungan keluarga dan teman. Sebelum meniru dari media sosial, mereka akan lebih dulu memperhatikan kemudian terpengaruh dengan orang-orang disekeliling mereka yang lebih dulu menggunakan media sosial tersebut.

Kebiasaan yang memunculkan perubahan sosial tersebut pada akhirnya memunculkan pola komunikasi yang dibangun melalui pendekatan budaya. Hasan (2017) dalam hasil penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Jantro Pola Komunikasi dalam diri seseorang muncul karena kesadaran yang dimiliki seseorang yang dilakukannya dengan berbagai cara yang dimiliki oleh orang tersebut.

Soerjono dan Soekanto, 2009 meyakini perubahan sosial Masyarakat terjadi karena disebabkan oleh dalam masyarakat itu sendiri dan dipengaruhi oleh di luar masyarakat itu sendiri. Penggunaan media sosial dapat berdampak positif dan negatif. Jika berpengaruh pada dampaknegatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan.

Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Dapat dimaknai bahwa penggunaan media sosial Instagram bagi

mahasiswi dalam penelitian ini membawa perubahan sosial pada diri mereka.

Terlihat dari kebiasaan yang akhirnya membudaya dari ketidak bisa lepasan diri mereka dari gadget dan media sosial. Serangkaian aktivitas yang mereka lakukan dalam Instagram, biasanya terlihat saat mereka melakukan posting di akun Instagram mereka. Hal ini mereka lakukan sesungguhnya bukanlah hanya sekedar kesenangan belaka, melainkan suatu persaingan untuk menjadi yang terbaik. Para mahasiswi ini berlomba-lomba menjadi yang paling “mendapat ruang pamor” dari sekian banyak para pesaingnya atau temannya dengan cara menjadi agar bisa eksis di instagram. Apa yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut merupakan salah satu produk budaya global dalam rangka upaya untuk menjadi diri mereka lebih dikenal dalam dunia maya meskipun dalam dunia nyata sangat berbeda dengan apa yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Budaya berkomunikasi melalui Instagram membawa dampak lain bagi Mahasiswi di Kota Padang. Dampak yang sangat terlihat jelas adalah penggunaan Instagram yang dilakukan mahasiswi dari durasi 3 jam bahkan ada yang hingga 24 jam dalam sehari. Hal inilah secara tak langsung dapat mengubah pola interaksi sosial antara sesama mereka dalam berkomunikasi. Meskipun mahasiswi yang aktif di media sosial, belum tentu aktif di dunia nyata, namun mahasiswi masih mengandalkan Instagram sebagai media sosial, alat komunikasi yang ampuh untuk mendukung eksistensi dan

kepercayaan diri dalam diri mereka. Fenomena *chatting, videocall, comment, update status*, yang selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari bagi mahasiswi di Kota Padang seolah-olah adalah sesuatu yang sangat penting.

Tidak hanya itu saja, penggunaan media sosial cenderung menyebabkan isolasi bagi diri mereka, sehingga menghabiskan waktunya di dunia maya. Akibat penggunaan media Instagram yang berlebihan mengakibatkan seseorang akan terpapar media sosial, mereka akan memiliki kebulatan tekad dan hati untuk terus menggunakan Instagram, karena bagi mereka hadirnya media sosial Instagram memungkinkan siapa pun dapat mengunggah apa saja membuat hati mereka merasa senang. Dan pada akhirnya penggunaan Instagram di kalangan mahasiswi menjadi sebuah budaya yang pada akhirnya memberikan keleluasaan bagi mereka terhadap kebebasan tanpa batas-batas antara ruang pribadi dan ruang publik. Dalam hal ini konsekuensi adanya Instagram membuat penggunaan media sosial itu harus siap-siap untuk berubah antarlain mulai dari gaya hidup serta hubungan antara pengguna dan teknologinya.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini dapat terselesaikan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan masukan, motivasi, materi atau fasilitas pendukung lainnya. Ucapan terimakasih tak hingga juga kami sampaikan pada seluruh informan yang telah berkontribusi penuh dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2015). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Astuti, A. P., & Rps, A. N. 2018.. Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1): 18-29.
- Creswell John.W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Fahlepi, Doni, Roma. 2017. Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja ISSN: 2461-0690, *Indonesian Journal on Software Engineering*, 3, 15-23.
- Febriana, Merri. (2017). Hiperrealitas “Endorse” dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial di Kalangan Mahasiswi Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Oktober 2017, 6(2): 18-29.
- Holmes. (2004). *A Second Media Age?*. United Kingdom: SAGE Pub.
- Hasan, Widya, Asmawi, Najmuddin. 2018. Komunikasi Budaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. December 2018. ISSN 1410-8356. Vol. 20 (2)Hal: 179-189.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta.
- Mursalim & Putri, Eka, Delia. 2016. Analisis Perilaku Mimetik Di Kalangan Siswi SMA Negeri 1 Makassar Terhadap Tren Fashionista Instagram. *Jurnal Komunikasi Kareba* Vol. 5 No.2 Juli – Desember. Hal 349-367.
- Nasrullah, R.(2016). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media
- Nasrullah, R.. (2014). *Teori dan Riset Cybermedia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

- Sarkawi, Dewi. (2016). Perubahan Sosial dan Budaya Akibat Media Sosial. E-ISSN: 2527-9769, Jurnal Administrasi Kantor, 4, 307 – 338.
- Sentrock. John, W. (2011). Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga.
- Verbena Ayuningsih Purbasari & Suharno. (2018) Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. ISSN 1410-8356. Vol. 21 No. 01 June 2019: 1-9.
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1): 1-11.



BUDAYA RIMPU SEBAGAI EKSISTENSI PEREMPUAN ISLAM DI TANAH BIMA

Ayu Fitriana^{1*}, Suharno²

^{1,2}Department of Civic Education, Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 13 August 2019
Review : 14 August 2019
Accepted : 19 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Budaya; Bima; Rimpu, Eksistensi; Perempuan.

CORRESPONDENCE

*E-mail: ayu.fitriana57@yahoo.com

ABSTRACT

Bima people are known to be very religious, one of them being the Bima women who always cover their genitals. One of the well-known covers of genitalia in Bima is to use a Sarong, called the Rimpu. The purpose of this study wants to know the Rimpu culture as the existence of Islamic women in the land of Bima. This article compiled using the library research method. The results provided are Rimpu is genital cover clothes made of Sarong. The Rimpu has been in Bima since the first time Islam entered and applied to the sultanate in the land of Bima. The Rimpu divided into two types, namely regular Rimpu and Mpida Rimpu. The usual Rimpu split into two, namely Rimpu Colo and Rimpu Cili. The Rimpu Mpida divided into three kinds of Rimpu, namely, Rimpu Mpida, Rimpu Gala And Rimpu Cili. The Rimpu has multiple functions in addressing the times, as a religious identity, distinctive characteristics of Bima culture, and protector of women in interacting with the opposite sex. Nowadays, the government is trying to preserve it by holding a cultural parade every year.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, komunitas terbentuk atas kesamaan dalam suatu hal. Makna komunitas ialah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu, di mana biasanya mereka memiliki kepentingan yang sama, yang saling berhubungan sebab mempunyai kesamaan atas suatu hal (Riswari, 2019). Sama halnya dengan budaya, orang-orang yang memiliki kebiasaan dan keadaan yang sama akan mendiami daerah yang sama dan hidup secara bersama.

Budaya adalah sebuah sistem yang mencakup bahasa, benda, musik kepercayaan serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya (Yunus, 2014). Budaya selalu melekat dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat sehingga secara sengaja atau tidak akan selalu diterapkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat akan memiliki budayanya

masing-masing. Budaya ini akan terus diterapkan dan dipegang teguh oleh individu dari suatu kelompok masyarakat. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa yang memiliki latar belakang sosio-budaya yang beraneka ragam. Di Indonesia sendiri, tiap-tiap daerah memiliki budayanya sendiri dan setiap individu akan memiliki kepercayaan, norma, nilai dan kebiasaan yang berbeda sesuai dengan budaya yang diterapkan. Kemajemukan yang ada di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu diperlukan sikap yang mampu mengatasi ikatan-ikatan primordial, yaitu kesukuan dan kedaerahan (Anakotta Dkk, 2019).

Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup (Kemdikbud, 2016). Pada pandangan lain menurut Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan

tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Kearifan lokal adalah "asset spiritual" yang mengajarkan masyarakat bagaimana harus bersikap serta bertindak. Oleh karenanya meskipun kearifan lokal merupakan hasil produk budaya masa lalu namun patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup bangsa Indonesia.

Kearifan lokal bersifat lokal artinya kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda antar wilayah dan antar suku. Namun demikian ada kearifan lokal yang tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya tertentu namun dapat pula bersifat lintas budaya sehingga membentuk kearifan lokal yang bersifat nasional. Kearifan lokal merupakan hasil dari budaya masa lalu yang patut dijadikan sebagai pegangan hidup dan dilestarikan. Budaya atau kebudayaan memiliki arti yang sangat luas serta mengandung pemahaman yang sangat kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum seni, adat istiadat dan kebiasaan (Taylor, 1987).

Suatu daerah akan dikenal oleh daerah atau suku lain kaeran kearifan budayanya yang berbeda dengan daerah atau suku lain. Budaya yang membesarkannya dalam memaknai sebuah kehidupan, dari sekian budaya lokal yang ada di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatra, Bali dan daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Begitu pula budaya yang masih di lestarikan di tanah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu dari sekian budaya yang masih dilestarikan oleh rakyat Bima di tanah leluhur Bima adalah budaya Rimpu. Rimpu adalah memakai sarung dengan melingkarkannya pada kepala dimana yang terlihat hanya wajah pemakainya dengan menggunakan sarung. Sarung yang biasa digunakan adalah sarung nggolo atau yang biasa disebut *Tembe nggoli*.

Tembe Nggoli adalah kain tenun khas Bima dan Dompus, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kain yang terbuat dari benang kapas atau katun tersebut memiliki beragam warna yang cerah dan bermotif khas sarung tenun tangan. Bagi Masyarakat suku MBojo, tenun

Tembe Nggoli ini merupakan warisan budaya yang hingga kini terus dijaga. Bahkan sebagian besar warga perempuan suku mbojo masih menekuni tradisi menenun sarung Tembe Nggoli, yang diwarisi secara turun temurun. Teknik menenunnya juga cukup unik, yakni menggunakan alat tenun tradisional Gedogan yang penggunaannya dengan cara dipangku oleh si penenun dengan posisi duduk selanjor. Kebudayaan rimpu yang merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bima. Umumnya, kaum perempuan memakai rimpu untuk menutup auratnya sebagaimana ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap kaum perempuan yang sudah aqil balik harus menutup auratnya di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Dalam masyarakat Bima diwujudkan dengan memakai sarimpu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT.

Rimpu adalah suatu tradisi lokal masyarakat di Bima dalam menutupi auratnya dengan menggunakan *tembe* yang dalam bahasa Indonesia artinya sarung. Rimpu itu sendiri merupakan suatu budaya yang diwariskan secara turun temurun dikalangan masyarakat Bima. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, budaya ini mulai tak terlihat. Entah kenapa, mungkin karena generasi muda sudah tidak peduli akan hal-hal yang dianggap sudah ketinggalan zaman atau faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi saya sendiri khususnya dan semua masyarakat Bima, terutama generasi muda yang masih memiliki kepedulian terhadap rimpu itu sendiri pada umumnya.

Kenapa *Tembe nggoli* menjadi simbol dari *Rimpu*?, karena *Tembe nggoli* memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan sarung-sarung lainnya. Keistimewaannya *Tembe Nggoli* antara lain, hangat, halus dan lembut, tidak mudah kusut, dan warna kain tenunnya tahan (tidak mudah luntur). Saat ini, *Tembe Nggoli* sudah banyak diproduksi dalam berbagai corak dan motif. Ada yang biasa saja - untuk digunakan sehari-hari, dan ada pula yang istimewa, yaitu hanya digunakan pada acara-acara tertentu.

Budaya rimpu dikenal sejak Islam masuk di tanah Bima yang dibawa oleh para pemuka agama dari Makassar. Budaya rimpu merupakan hasil dari kebudayaan atau kebiasaan para perempuan bima, budaya rimpu ini telah ada sejak kesultanan

dan kerajaan islam berdiri di tanah Bima. Budaya rimpu sejalan dengan atmosfer dari kehidupan orang-orang bima yang ilhami dan taat akan peraturan islam.

Namun seiring perkembangan zaman dan globalisasi yang semakin menggerogoti kebudayaan asli Bima ini, maka budaya rimpu ini semakin luntur. Seperti halnya trend baru cara memakai kerudung dengan modern, sehingga melunturkan budaya *Rimpu* yang ada di tanah Bima itu sendiri. Dalam hingar bingar beragam model busana dan gaya berbusana, begitu pun busana muslim. Kondisi ini menimbulkan berbagai kekhawatiran dari sebagian orang yang menganggap pemakaian jilbab tersebut tidak sesuai syariat (hukum agama). Jilbab Funky tapi Syar'i dengan gaya berbahasa anak muda (Rahayu, 2016).

Dengan bermunculannya berbagai macam jenis hijab atau kerudung membuat budaya *Rimpu* menjadi begitu asing untuk pemuda-pemudi asli Bima. Hijab atau kerudung zaman sekarang juga memberi sekat antara warga, karena hijab atau kerudung memiliki level untuk warga kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah, sehingga membuat kelompok-kelompok baru sesuai kondisi ekonomi. Sedangkan dengan menggunakan *Rimpu* tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Pada dasarnya jilbab atau kerudung adalah kesederhanaan, kedekatan dengan pencipta dan pelindung diri sebagai perempuan muslim. Bagi sebagian yang lain hijab adalah gaya hidup, modernitas dan identitas diri dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat.

Globalisasi sangat sering dikaitkan dalam segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Proses globalisasi tidak terduga baru-baru ini, namun sudah lama terjadi sejak masa penjajahan, Perdagangan, peperangan dan migrasi, termasuk penggunaan kerudung di Bima ini sangat dipengaruhi oleh pendatang yang membawa dan menyiarkan agama islam di tanah Bima (Mohammed & Rostam, 2017). Semakin banyak gadis-gadis Bima yang sudah tidak mengenal adat istiadatnya. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena adat istiadat dan budaya merupakan ciri khas dari suatu suku, dan rimpu adalah budaya khas dari Mbojo (Bima) yang tak ternilai harganya (Tajib, 1995).

Pemerintah mulai mengadakan kembali budaya yang semakin dimakan oleh

perkembangan zaman ini. Salah satu cara pemerintah Bima adalah dengan mengadakan pawai budaya yang diadakan setiap peringatan hari jadi Bima. Baru-baru ini pada peringatan hari jadi Bima yang ke-379 tepatnya pada tanggal 5 juli 2019, pemerintah menggelar pawai budaya dengan melibatkan seluruh warga Bima untuk ikut serta memeriahkan hari jadi Bima. Dalam pawai budaya ini, gadis-gadis dan ibu-ibu di Bima memakai rimpu sebagai busana dalam kegiatan ini. Mereka mengkreasikan tembe nggoli (Sarung) sebagai penutup kepala pengganti kerudung (Suara Bima, 2019)

B. METODE

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode library research. Pengumpulan data penelitian dengan metode library research dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan untuk mendapatkan data mengenai Budaya *Rimpu* Sebagai Eksistensi Perempuan Islam Di Tanah Bima. Metode ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam masuk di tanah Bima

Tanah bima juga dikenal sebagai *dana Mbojo* yang berasal dari kata babuju yang memiliki arti tanah yang tinggi. Sedangkan nama Bima berasal dari nama leluhur raja-raja bima yang pertama. Bima merupakan kerajaan terpenting di pulau sumbawa pada masanya, karena pada abad 17-19, Bima merupakan jalur perdagangan antara malaka dan maluku. Kerajaan bima pada perkembangannya sangat banyak berhubungan dengan kota Makassar. Pada abad ke-16, Tome pires menggambarkan bima sebagai berikut: Bima di pimpin oleh raja yang kafir, memiliki banyak perahu serta banyak bahan makanan seperti daging, ikan, asam dan juga banyak bahan bakar kayu. Perdagangan di pulau Bima ramai. Orang-orangnya hitam dan berambut lurus. Pulau bima juga memiliki sedikit kekayaan emas (Maryam, 1999).

Sebelum masuknya islam, Bima menganut kepercayaan yang disebut dengan

“makakamba-makakimbi”. Orang-orang Bima percaya bahwa ada kekuatan pada pemimpin yang mereka angkat sendiri dan disebut sebagai “*nkuhi ro naka*”. Mereka percaya bahwa ada kekuatan yang mengatur segala kehidupan di alam lain yang mereka sebut sebagai “*parafu*”. Pada tahun 1609 M, agama Islam mulai masuk di Bima yang dibawa oleh para pedagang dari Jawa, Melayu bahkan dari Gujarat India melalui daerah pesisir pantai Sape, agama Islam mulai dianut oleh warga pesisir pantai (Aulia, 2013: 4). Lebih lanjut Aulia menjelaskan bahwa masa peralihan dari kerajaan Bima menjadi kesultanan Bima menjadi sangat mudah, karena keberadaan pelabuhan Sape yang menjadi jalur perdagangan internasional. Masa transisi kerajaan menjadi kesultanan terjadi pada 1620 M. Sebagai sultan pertama diangkatlah Sultan Abdul Kahir pada tanggal 5 Juli 1620 M.

Kehidupan Islam semakin meluas dengan ditandainya banyak mesjid yang dibangun, berkembangnya pusat-pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Bahkan sultan menentukan semboyan hidup orang Bima yaitu “*mori ro madena dou mbojo ede kai hukum Islam-ku*” yang memiliki arti bahwa hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam.

2. Awal mula budaya rimpu di tanah Bima

Sebelum masyarakat Bima menggunakan rimpu dalam menutup aurat atau sebelum Islam masuk di Bima, masyarakatnya sudah menganut beberapa Agama lokal (ada yang menyebutnya agama adat), yang oleh masyarakat Bima dikenal dengan istilah makamba (dinamisme). Makambe berarti percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kepercayaan lain yaitu makimbi (animisme), yang berarti masyarakat percaya kepada roh gaib. Selain kedua kepercayaan lokal itu, sebagian masyarakat Bima sudah menganut agama Hindu (politeisme) yaitu agama yang percaya kepada banyak dewa (Coretanzone, 2018).

Kata rimpu berasal dari bahasa Bima yang memiliki arti penutup kepala dengan sarung, sehingga rimpu memiliki arti sebagai busana muslimah perempuan Bima yang menutupi kepala dan seluruh tubuh dengan menggunakan sarung khas Bima. Penggunaan istilah penutup kepala

juga digunakan di beberapa bangsa yang memeluk agama Islam, diuraikan oleh Nasaruddin Umar seperti istilah *cadar* di Iran berasal dari bahasa Persi yaitu *Chador* berarti tenda. Dalam tradisi Iran *cadar* itu berarti sepotong pakaian serba membungkus yang menutupi seorang wanita dari kepala hingga ujung kaki (Milani, 1992). Sedangkan di India, Pakistan dan Bangladesh dikenal dengan istilah *Purdah* yang berasal dari bahasa Indo-Pakistan, *Pardeh*, yang berarti Gorden (*Curtain*). Istilah *Charshaf* lebih dikenal di Turki, dan *Milayat* di Libya, serta kudung atau kerudung untuk daerah Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia dan Brunei Darussalam (Milani, 1992).

Jazirah Arab sendiri yang merupakan tempat lahir dan awal berkembangnya agama Islam, mempunyai beberapa istilah yang berkaitan dengan pakaian sebagai penutup anggota tubuh. Nasaruddin Umar mengutip dari Abdul Halim Abu Syaqqah, bahwa jenis-jenis pakaian perempuan dalam *vocabulary* Arab pada masa Rasulullah dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *Khimar*, pakaian yang khusus menutupi bagian kepala, *dir*, pakaian yang khusus menutupi bagian badan, *niqab* dan *burq* pakaian yang khusus menutupi daerah muka kecuali bagian bola mata, *idzar*, yaitu pakaian berjahit yang menutupi anggota badan sampai ke bagian kaki, *rida*, pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di atas *idzar*, dan jilbab yaitu kerudung yang menutupi bagian luar kepala, termasuk menutupi *dir* dan *khimar* (Syaqqah dalam Umar, 1996).

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bima sudah mengenal pakaian sejak zaman pra aksara. Pada zaman itu, masyarakat membuat pakaian dengan segala macam jenis bahan dan alat seperti kulit binatang, kulit kayu dan lain sebagainya. Dengan seiring berkembangnya aman dan teknologi, masyarakat mulai bisa mengolah bahan pakaian dari kapas yang kemudian bisa menjadi benang dan diolah menjadi pakaian. Pakaian kebanyakan dibuat dengan cara menenun lalu diwariskan kepada keturunannya. Di tanah Bima yang paling khas adalah tenunan *tembe nggoli* atau sarung dengan banyak motif dan bentuk. Biasanya *tembe nggooli* dijadikan sebagai penutup aurat dari kepala hingga kaki dan populer dengan istilah *rimpu*.

Rimpu pertama kali dikenalkan sebagai pakaian perempuan muslimah di tanah Bima

yaitu sejak abad XVII setelah masuknya Islam yang ditandai dengan perubahan kerajaan menjadi kesultanan Islam (Rahman, 2009). Lebih lanjut Rahman mengatakan bahwa Ajaran Islam masuk di Bima pada 15 Rabiul awal 1050 H bertepatan dengan 5 Juli 1640 M. Pembawanya adalah dua ulama asal Sumatera (Dato ri Bandang dan Dato ri Tiro) yang diutus oleh pihak kesultanan Gowa untuk syiar Islam di daerah Bima (*Dou Mbojo*). Pada saat itu, hampir semua perempuan yang ada di wilayah Kesultanan Bima masih mengenakan pakaian warisan leluhurnya dengan kain penutup anggota tubuh seadanya, maka kedua ulama tersebut memperkenalkan kepada mereka cara berpakaian yang sesuai dengan tuntutan Islam. Sejak Islam diperkenalkan, sarung-sarung tradisional khas Bima mulai digunakan untuk menutup anggota tubuhnya dan dikenal dengan nama *rimpu*. Populernya budaya *Rimpu* di masa-masa awal karena pada saat itu masyarakat belum mengenal mesin jahit untuk menyambung kain yang akan di jadikan barang yang bermanfaat misalnya pakaian. Pada saat itu mereka hanya mengenal yang namanya tenunan sarung, bahan dasarnya adalah kapas yang diolah menjadi benang dan selanjutnya ditenun menjadi sarung.

Budaya *rimpu* semakin mengental sejak peralihan kerajaan Bima menjadi kesultanan Bima. Setelah menerima ajaran Islam, sultan mulai menginstruksikan perempuan Bima untuk menutup auratnya jika keluar rumah. Keberadaan Budaya *rimpu* menurut Ismail tidak lepas dari upaya pemerintah terutama terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuruddin, masyarakat Bima memperjualbelikan sarung tradisional khas Bima yang dikenal sebagai komoditi perdagangan yang laris di Nusantara sekitar abad XIII. *Dou Mbojo* memanfaatkan tanaman kapas yang melimpah untuk dijadikan kain tenun dan terjual laris hingga ke Negeri Cina. Sarung juga dipakai oleh wanita-wanita setempat (*rimpu*) baik ketika berada dalam rumah maupun saat bepergian diluar rumah. Budaya *rimpu* pada masa penjajahan Kolonial Belanda, sangat membantu para gadis untuk mempertahankan kehormatan dirinya. Dengan demikian, maka budaya *rimpu* sekarang bukan saja dikenal di daerah yang bermotokan *Maja Labo Dahu* tetapi mulai menjadi tradisi dan identitas wanita yang ada di daerah Bima dan Dompur

Tradisi *rimpu* telah menyebar dan membudaya pada lokus daerah Bima saja. Namun, tidak bisa dinafikan bahwa tradisi menutup aurat yang bentuk jilbab atau kerudung, dalam berbagai bentuk dan nama, sebenarnya telah memiliki sejarah yang lebih tua dari zaman Rasulullah SAW. Dalam Taurat, misalnya, dikenal pula istilah yang semakna dengan jilbab, yaitu *tiferet*, sedang dalam Injil terdapat istilah *redid*, *zammah*, *re"alah*, *zaif*, dan *mitpahat* (Umar, 1996).

3. Jenis-jenis *rimpu* di Bima

Rimpu memiliki dua jenis yaitu *rimpu* biasa dan *rimpu mpida*. *Rimpu* Biasa adalah menggunakan sarung untuk menutup kepala dan sebagian tubuh, serta yang kelihatan hanya muka saja. Sedangkan *rimpu mpida* adalah memakai sarung untuk menutup kepala dan muka sampai sebagian tubuh, serta yang kelihatan hanya mata dan hidung saja (Ambary, 1998). *Rimpu* terbagi dua jenis yaitu, *rimpu* biasa dan *rimpu mpida*. *Rimpu* biasa dibagi dua yaitu, *rimpu* colo dan *rimpu* cili. Sedangkan *rimpu mpida* dibagi 3 jenis yaitu, *rimpu mpida*, *rimpu* cili dan *rimpu* gala.

Rimpu biasa adalah *rimpu* yang hanya menutupi kepala beserta badan hingga tangan di masukan ke dalam sarung dan biasanya dipakai oleh ibu rumah tangga. *Rimpu* biasa dibagi menjadi dua jenis yaitu, *rimpu* cala adalah jenis *rimpu* yang biasa di pakai oleh perempuan yang sudah berumah tangga. Sedangkan *rimpu* colo adalah *rimpu* yang menggunakan sarung sebagai penutup kepala, namun ujung sarung bagian dahi sebelah kiri ditarik ke muka sehingga cahaya matahari tidak bisa mengenai wajah. Jenis ini biasa dipakai oleh kaum ibu ketika turun ke sawah maupun ke ladang (Aziz, 2002).

Lebih lanjut Aziz menjelaskan bahwa *rimpu mpida* di bagi menjadi tiga jenis yaitu, pertama, *rimpu* cili adalah jenis pakaian yang di pakai oleh gadis Bima yang sudah dilamar. Jenis *rimpu* ini adalah sarung yang menutupi kepala hingga kaki dan yang terlihat hanya mata saja. Kedua, *rimpu mpida* jenis *rimpu* ini hampir sama dengan *rimpu* cili, hanya saja pada *rimpu mpida* selain mata yang tampak, hidung juga akan nampak. *Rimpu* ini di pakai oleh gadi-gadi bima jika ingin keluar rumah. Ketiga, *rimpu* gala yaitu jenis *rimpu* yang dipakai oleh gadis-gadis bima pada acara tertentu saja. Seperti acara mengantar pengantin menuju

rumah mertua. Berikut contoh gambar dari rimpu biasa.



Gambar 1. (coretanzoneid, 2017).

Rimpu mpida dari segi fungsi dan pemakaiannya sedikit berbeda dengan *rimpu* biasa, *rimpu mpida* biasanya di pergunakan khusus para gadis yang sudah mengenal lawan jenis. Biasanya *rimpu* ini digunakan oleh seorang gadis setelah selesai dilamar, dan gadis (calon menantu) yang tinggal di rumah calon mertua (*Ngee Nuru*) selama dilamar hanya beberapa hari, gadis yang di lamar tidak diperkenankan calon laki-laki untuk menatap wajahnya, maka saat itulah calon mempelai wanita memakai *rimpu mpida*, juga pada hari-hari sebelumnya, hanya saja pada momen seperti itu cara berpakaian seorang gadis sedikit diperketat (Aziz, 2002). Berikut contoh gambar *rimpu mpida*.



Gambar 2. (Jokembe, 2018).

Rimpu memiliki multi fungsi dalam menyikapi zaman. Pertama, *rimpu* sebagai identitas keagamaan. Kedua, *rimpu* sebagai kombinasi budaya lokal dan ciri khas budaya Bima. Ketiga, sebagai pelindung kaum perempuan dalam berinteraksi dengan lawan jenis pada masa kolonial. Keempat,

sebagai pelindung terhadap lingkungan yang buruk (Aulia, 2013).

Cerminan budaya lokal masyarakat Bima yang dipegang dan diwariskan sekarang salah satunya, yaitu budaya *rimpu* sendiri. Budaya *rimpu* sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Kesamaan itu terdapat pada bagian-bagian aurat yang harus ditutupi oleh seorang wanita dengan pakaian yang menjulurkan ke tubuhnya, tanpa mempersoalkan jenis dan macam-macam pakaian yang harus ditutupi.

Zaman dulu wanita Bima dengan bangga memakai *rimpu* untuk menunjukkan ke khalayak bahwa mereka sudah bisa menenun dan kain yang mereka gunakan adalah hasil karya sendiri. Tersingkapnya aurat wanita di masa lalu dianggap sebagai aib. Siapapun lelaki baik sengaja atau tidak melihat aurat mereka, pria tersebut wajib menikahnya. Tersingkapnya betis saja wanita zaman dulu sudah merasa malu dan segera minta nikah mereka menganggap itu sebagai pelecehan (aib) terhadap wanita (Rahman, 2000:).

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan para penulis terkait *rimpu* sebagai pakaian muslim untuk perempuan Bima dalam menutup aurat. Pada saat Islam masuk ke tanah Bima, maka pada saat itu pula sulta pertama bima memulai peraturan untuk perempuan Bima agar menutup aurat. Menutup aurat dengan menggunakan sarung yang ditenun dengan sebutan *Rimpu*. *Rimpu* di bagi menjadi dua, yaitu *rimpu* biasa dan *rimpu mpida*. Dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi budaya dan adat istiadat khususnya di Bima, seperti munculnya trend-trend baru dalam berhijab yang memberi sekat antara masyarakat dengan membedakan mana yang miskin dan mana yang kaya, serta budaya luar yang menunjukkan cara berpakaian yang tidak menutup aurat sehingga budaya *rimpu* pun semakin luntur di kalangan perempuan-perempuan bima. Oleh karena itu pemerintah Bima melakukan berbagai cara untuk tetap melestarikan kebudayaan *rimpu* ini. Salah satunya dengan cara mengadakan pawai budaya yang mengikut sertakan seluruh warga Bima.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Suharno, M. Si atas masukan dan arahan yang telah diberikan. Selain itu juga kepada Program Pascasarjana

Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendukung artikel ini sepenuhnya dan pengalaman belajar yang menyenangkan dan penuh motivasi sehingga penulis terinspirasi untuk menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Rihlah Nur. (2013). *Rimpu: Budaya dalam Dimensi Busana Bercadar Perempuan Bima*. Dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berpikir Qur'ani*. 9 (2), 1-12.
- ajib, Abdullah. 1995. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT. Harapan Masa PGRI.
- Anakotta, Raisa, Alman, & solehun. (2019). Akulturasi masyarakat lokal dan pendatang di Papua barat. *Jurnal Antopologi: Isu-isu sosial budaya*. 21(01), 29-37.
- Coretanzone. (2017). Rimpu, pakaian tradisional muslimah di Bima Nusa Tenggara Barat. <https://www.coretanzone.id/2017/12/rimpu-pakaian-tradisional-muslimah-bima-ntb.html>. Di akses pada tanggal 18 november 2019.
- Jokembe. (2018). Rimpu, hijab khas suku mbojo bima dan dompu. <https://www.jokembe.com/budaya/baca/4/50/rimpu-hijab-khas-ala-suku-mbojo-bima-dan-dompu>. Di akses pada tanggal 18 november 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan. Diunduh pada 19 Juli 2019 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>
- Maryam, Siti. R, Salahudin. (1999). *BO Sangaji Catatan Kerajaan Bima*, Yayasan Obor. Jakarta.
- Milani, Farzaneh. (1992). *Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writer*. Syracuse University: New York.
- Mohammed, Esha. H, Rostam, katiman. (2017). Gloalisasi dan impak sosial budaya. *Jurnal Antopologi: Isu-isu sosial budaya*. 19(01), 33-45.
- Rahman, M. Fachrir. (2000). *Kebangkitan Islam di Dana Mbojo*. Mataram: Alam Tara Learning Institute.
- Rahayu, Lina Meilinawati. (2106). Jilbab: Budaya POP dan identitas muslim di Indonesia. *Ibda*. 14(01), 139-155.
- Riswari, Aninditya Ardhana. (2019). Komunitas surabaya wotagei: sebuah kajian budaya populer. *Jurnal Antopologi: Isu-isu sosial budaya*. 21(01), 121-131.
- Syaqqah, Abdul Halim Abu. (1996). *Tahrir al-Ma'rah fi „Ashr al-Risalah*, Juz IV, Darul Qalam lil-nasyr wal-Tauzi': Mesir.
- Suara bima (2019) semarak, pawai budaya hari jadi Bima ke-379 dipadati ribuan peserta. Diunduh di <http://www.suarabima.co.id/2019/07/semarak-pawai-budaya-hari-jadi-bima-ke.html>/tgl 19 juli 2019
- Umar, Nasaruddin. (1996). Antropologi Jilbab, dalam *Ulumul Qur'an, Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat Peranserta Masyarakat*. 5(6), 1-9
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



BUDAYA LITERASI MEDIA DIGITAL PADA IBU-IBU RUMAH TANGGA

Dewi Novianti^{1*}, Siti Fatonah²^{1,2} Faculty of Social and Political Science, UPN "Veteran" Yogyakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 18 August 2019
 Review : 19 August 2019
 Accepted : 29 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Digital media; Literacy; Media content; Media literacy culture

CORRESPONDENCE

*E-mail: dewinoviantiupn916@gmail.com

A B S T R A C T

Media literacy in the digital era has become important. Various layers of society need to understand the importance of digital media literacy. Research subjects were housewives in the Sleman area of Yogyakarta. Research subjects so far have not understood how to intelligently consume media. Media content worries that most of them are negative which can anesthetize the audience. The biggest content from media is entertainment. The media prioritizes entertainment programs that pay less attention to the ethics and norms of society. They don't care about the negative impact of the content displayed. Thus it is necessary to cultivate the media literacy movement for housewives. The method used is content analysis, literature study, in-depth interviews, observation, and FGD. The results of the study show that housewives after being given training, socialization, and FGD on digital media literacy became aware of the importance of digital media literacy. Then they continuously convey to the family and the environment where they are. On several occasions, PKK meetings, the Qur'an recitation group, socialized the importance of digital media literacy. Finally, this digital media literacy becomes a culture especially in Maguwoharjo Village, Sleman regency, Yogyakarta. This village is a pilot village of digital media literacy culture for the surrounding environment, especially the Sleman Regency Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini perkembangan teknologi semakin canggih, dimana media digital menawarkan berbagai macam informasi menarik yang membuat penggunaannya seperti dihipnotis. Media digital menjadi sebuah budaya baru. Segala usia dapat menikmati informasi dan hiburan media digital. Mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sampai berbagai hiburan. munculnya proses modernisasi telah banyak membawa perubahan dalam konteks hiburan (Riswari, 2019). Fungsi hiburan dalam media digital merupakan fungsi yang paling diminati daripada fungsi lainnya seperti informasi dan edukasi.

Kalau menilai awal kemunculan media sejatinya tujuannya adalah mulia, memberikan informasi, berita, dan pendidikan. Namun ketika konten-konten media itu semakin marak dan beragam, maka mulailah media ini menjadi boomerang bagi khalayaknya. Media sebagai sumber informasi bagi khalayak ternyata tidak lagi sepenuhnya dapat dijadikan sumber informasi yang akurat. Konten yang bersifat hiburan

paling mendominasi dari jenis-jenis konten media lainnya. Ada apa dengan konten hiburan ini? kalau dalam taraf normal dan wajar barangkali tidak menjadi masalah. Konten-konten hiburan sangat meresahkan karena tidak mendidik bahkan meracuni khalayaknya. Konten yang mengedepankan program-program hiburan yang kurang memerhatikan etika dan norma masyarakat. Mereka tidak peduli dampak negatif program siaran yang ditampilkan tersebut. Misalnya adalah eksploitasi terhadap perempuan, anak, kemiskinan, humor yang rendah, gaya hidup bebas, game online, judi bola online, dan sebagainya. Dibidang ekonomi wujud e-dagang dan e-keuangan di mana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung akan tetapi bertemu di alam maya. Bentuk perdagangan dan keuangan jenis ini juga bermasalahan seperti berlaku penipuan dan kecurangan karena manusia juga menjadi bertambah canggih. Golongan kapitalist mencari peluang perniagaan di mana saja di dunia ini dalam usaha mencari keuntungan untuk perniagaan mereka, melalui pemasaran, pembe-

lian bahan dan pengambilan pekerja (Mohamed, 2017)

Di samping hiburan, ekonomi, konten beritapun meresahkan karena banyak bermunculan berita-berita *hoax* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya. Dampak yang meresahkan dari konten media adalah terhadap anak-anak, karena dari segi usia masih muda dan dari segi emosional relatif belumlah stabil. Anak-anak cenderung belum bisa menyaring informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh kasus seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melakukan tindakan kriminal karena kecanduan *game online* (WartaBromo, 2018). Fenomena yang ironi kebiasaan buruk mengkonsumsi *game online* dimana membuat khalayaknya kecanduan seperti terhipnotis tidak bisa mengelak. Kebiasaan mengonsumsi game online menjadi sebuah budaya. Budaya buruk yang timbul akibat kebiasaan menonton game online melalui media digital.

Berangkat dari kekhawatiran terhadap dampak konten media ini, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian literasi media digital. Sasarannya adalah Ibu-Ibu Rumah tangga. Mengapa Ibu-Ibu Rumah tangga dijadikan subyek penelitian? Sebab Ibu-Ibu Rumah tangga merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan paling dominan dalam keluarga, terutama dalam mendidik putra putri bangsa. Ibu-ibu rumah tangga merupakan tonggak atau pilar keluarga, sehingga perlu memiliki pendidikan yang baik terutama dalam cerdas membaca media (menonton, mendengar, membaca, menelaah, menyaring media). Selektivitas ini tidak bisa muncul begitu saja tanpa adanya kesadaran yang tinggi dan kepedulian dari kalangan yang telah melek media untuk dapat menyosialisasikan, menyadarkan, dan sampai pada mencerdaskan ibu-ibu rumah tangga. Literasi media bisa menjadi sebuah budaya di lingkup masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menonton acara televisi dan bermedia sosial. Tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga yang berada di daerah Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, khususnya kecamatan Depok Desa Maguwaharjo. Ibu-ibu di desa ini masih ada yang tidak bisa menggunakan gadget sama sekali. Bahkan ada yang tidak memiliki smartphone, namun ironinya anak-anak mereka sudah bisa menggunakan smartphone dengan lancar. Ada pula yang putranya masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sudah memiliki smartphones secara pribadi sementara ibunya tidak bisa menggunakan smartphone. Ibu-ibu tidak bisa memantau informasi apa saja yang sudah dikonsumsi oleh putra-putri mereka. ("Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » Penduduk," 2018).

Informasi menjadi sesuatu yang berharga di era digital saat ini. Adanya Informasi yang

disampaikan oleh media membuat orang-orang saling berkomunikasi fokus pada informasi itu. Dalam jangka panjang, komunikasi tentang objek yang sama antara orang-orang akan membangun komunitas tertentu yang dicirikan oleh ideologi media. Dalam pengertian ini, media komunikasi memainkan perannya membangun sebuah komunitas. Selain itu, media komunikasi juga bisa menghadirkan realitas sosial saja. Itu tidak membangun komunitas, tetapi hanya memotretnya (Tridiatno & Tridiatno, 2013).

Pemahaman *media literacy* atau melek media secara sederhana adalah bagaimana khalayak mampu memilih atau menyaring isi pesan yang disampaikan oleh media. Khalayak mampu membedakan mana yang dianggap penting atau baik dan mana yang dianggap buruk. Pada dataran ini khalayak sudah semakin cerdas, aktif dan kritis. Bahkan khalayak tidak begitu saja mempercayai pesan yang disampaikan oleh media. Untuk itulah dibutuhkan adanya media edukasi dalam konteks *media literacy*. Wirodono dalam Rejeki (2010) mengemukakan tiga kategori khalayak yang rentan terhadap pengaruh buruk media, yakni anak-anak, remaja, dan kaum ibu. Pertama, pada anak-anak, pengaruh itu terutama terletak pada perkembangan otak, emosi, sosial, dan kemampuan kognitif. Intensitas akan memengaruhi pada persepsi dengan apa yang mereka tonton. Kekhawatiran tersebut misalnya pengaruh tayangan kekerasan pada anak-anak yang sering meniru bentuk tontonan. Selain itu tayangan berbau seks dan mistis menjadi kekhawatiran para ibu-ibu. Kedua, pada remaja, tayangan sinetron dengan tema remaja cenderung mengeksploitasi kehidupan remaja dari satu sisi. Keadaan ini menyebabkan remaja tidak bisa mempelajari realitas yang sesungguhnya. Ketiga, bagi ibu-ibu pengaruh buruk televisi lebih pada membangun perilaku konsumtif. Mereka merupakan sasaran potensial iklan. Komoditas ini dikemas dalam bentuk tayangan sinetron, infotainment, tayangan kuliner dan sebagainya (Wirodono, 2010).

Hasil penelitian Balya, Pratiwi, dan Prabudi yang berjudul Literasi Media Digital pada Pengguna Gadget memperlihatkan kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dengan adanya gadget. Salah satu dampak dari penggunaan gadget terlihat pada pergeseran nilai kearifan lokal. Terdapat beberapa bukti terjadinya pergeseran budaya yang dialami oleh masyarakat, diantaranya yakni; pertama, permainan tradisional yang dulunya dimainkan oleh anak-anak sekarang telah tergantikan dengan permainan game online yang dianggap sebagai permainan yang lebih menarik dan menyenangkan, hal ini bisa berakibat dimasa yang akan datang permainan game online akan menggeser posisi permainan tradisional, sedangkan permainan tradisional merupakan salah satu warisan dari nenek moyang dan ciri khas dari karakter

masyarakat Indonesia (Balya, Pratiwi, & Prabudi, 2018).

Salah teori yang berkaitan dengan literasi media digital adalah Teori Ekologi Media merupakan salah satu teori dalam studi ilmu komunikasi yang membicarakan tentang perkembangan teknologi media yang memberikan pengaruh pada kehidupan manusia. Teori yang digagas oleh Marshall McLuhan ini menjelaskan bahwa media secara umum dapat membentuk dan mengorganisir kebudayaan manusia (West & Turner, 2007). Hubungan manusia dan media dalam teori ini bersifat simbiosis— manusia menciptakan teknologi, teknologi menciptakan kembali manusia. Salah satu bahasan dalam Teori Ekologi Media ini adalah pembagian kebudayaan masyarakat menurut perkembangan media. McLuhan, dalam West dan Turner (2007) membagi masyarakat ke dalam empat era, yakni tribal, melek huruf, cetak, dan elektronik. Era tribal adalah keadaan akustik. Pada zaman itu, telinga sebagai indra pendengaran menjadi indra dominan manusia. Era ini identik dengan masyarakat komunal yang saling berinteraksi melalui berkomunikasi tatap muka karena saat itu belum ditemukan huruf dan media massa. Era melek huruf berlangsung ketika masyarakat mengenal huruf dan mulai memahami lingkungan di sekitarnya secara visual dan spasial karena indra penglihatan merupakan hal yang menonjol di era ini. Era ini identik dengan komunikasi tertulis dan bersifat individualistik karena pada era ini manusia dapat menjalin komunikasi (Ashari & Ashari, 2018). McLuhan berpendapat bahwa media telah ikut mempengaruhi perubahan bentuk masyarakat. Media tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia akan informasi atau hiburan tapi juga ilusi dan fantasi yang mungkin belum pernah terpenuhi lewat saluran-saluran komunikasi tradisional (Sihabudin, 2013). Kebutuhan akan media menjadi sebuah kebiasaan yang lama kelamaan menjadi sebuah budaya media.

Berbicara masalah budaya, menurut Ibrahim dan Akhmad, saat ini kita sedang kehilangan sentuhan budaya-budaya lokal dan sedang bergerak ke dalam lingkungan budaya global yang sepenuhnya berbasis media (Ibrahim dan Akhmad, 2014). Bukan kejadian yang kebetulan bahwa rasa hormat budaya kita kepada yang lebih tua dan kebijaksanaan yang mereka pegang telah merosot di era media (Baran & Davis, 2010). Media sebagai industri budaya dipandang sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi bentuk-bentuk simbolik yang kian memerlukan mobilisasi sumber daya sosial yang langka baik material maupun kultural (Ibrahim & Akhmad, 2014). Iklan-iklan yang banyak mengeksploitasi tubuh perempuan, sinetron-sinetron menjual mimpi, game online yang membius, konten-konten media sosial seperti face book, youtube, instagram, tweeter, whatshap, line dan sebagainya yang sangat memikat sehingga

dapat menghipnotis khalayaknya. Mereka menciptakan budaya ketergantungan bagi khalayaknya. Dengan demikian budaya buruk ini harus diantisipasi dengan budaya literasi media. Literasi media perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat sampai mereka betul-betul menyadari bagaimana cara mengonsumsi media dengan benar.

Berangkat dari permasalahan itulah peneliti melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya pada tahun 2016 dan tahun 2017, dimana penelitian menemukan sebuah model literasi media bagi ibu-ibu rumah tangga di Desa Banguntapan Kabupaten Bantul. Model ini diimplementasikan di Desa Banguntapan Bantul dan berhasil menjadi *pilot project* desa melek media (Novianti & Fatonah, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi kemampuan literasi media digital, dan kedua, mengimplementasikan model Literasi Media Digital kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk menciptakan agen-agen serta kader-kader literasi media digital yang pada akhirnya akan mewujudkan “Desa Literasi Media Digital” sebagai *pilot project* di Kabupaten Sleman.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Neuman (2000) menyebutkan adanya tiga perspektif dalam Ilmu Sosial yang akan membedakan dalam teknik penelitian, yaitu : *Positivist*, *interpretive* dan *critical*. Pendekatan kuantitatif berada di bawah perspektif *positivist*, sedangkan pendekatan kualitatif berada di bawah perspektif *interpretive/constructivis* dan *critical* (Neuman, 2000). Creswell (2014:24) juga memberikan kriteria penelitian kualitatif seperti berkembang dinamis, pertanyaan terbuka, data wawancara, data dokumentasi, data audio (Weriza, Asrinaldi, & Arief, 2019). Penelitian ini masuk dalam kategori *constructivis sosial research*.

Obyek dalam penelitian ini adalah pertama memetakan kemampuan literasi media dari Ibu-Ibu di lingkungan Desa Maguwoharjo Kec. Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Tahap kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi media digital. Tahap ketiga implementasi model literasi media mencerdaskan Ibu-Ibu di lingkungan Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Sleman, DI Yogyakarta dalam berinteraksi dengan media.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mendalam dengan instrumen Interview guide, observasi, dan FGD. Sedangkan data sekunder berupa analisis isi dan studi pustaka. Analisa isi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa jenis dan isi

media/dokumen yang relevan, seperti konten media digital: *Whatsap, face book, line, Instagram, dan Youtube*. Telusur pustaka juga dilakukan guna melengkapai data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis antar kasus (*cross-site analysis*). Pada tiap kasusnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atas verifikasi-nya, dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus (Sutopo, 2002). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Ibu-Ibu Rumah Tangga Desa Maguwoharjo

Ibu-ibu rumah tangga merupakan pilar keluarga. Pilar-pilar rumah tangga ini haruslah kokoh. Dengan demikian rumah tangga akan menjadi stabil dan mampu melahirkan generasi yang tangguh dan sukses. Tantangan generasi milenial saat ini adalah kuatnya pengaruh media digital yang menawarkan berbagai informasi. Dampak negatifnya adalah khalayak menjadi kecanduan dan dihipnotis olehnya. Oleh sebab itu, budaya literasi media digital menjadi sangat urgen terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anaknya.

Nara sumber penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil riset menampilkan bahwa masih banyak ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo yang belum mengerti arti penting literasi media digital. Peneliti mewawancarai sebanyak 20 (dua puluh) ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo. Hasil wawancara semua dari nara sumber tersebut belum mengetahui apa itu literasi media. Semua subyek penelitian adalah ibu-ibu rumah tangga dari kalangan menengah ke bawah. Rata-rata dari keluarga kurang mampu sehingga berko-relasi dengan kecerdasan dalam membaca media. ini memang menjadi permasalahan pemerintah, dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketidak-mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang mengakibatkan semakin meningkatnya permasalahan sosial, karena kemiskinan yang bersumber dari ketidak-berdayaan secara ekonomi akibat krisis, masih merupakan penyebab utama munculnya permasalahan sosial lainnya (Basri & Yoserizal, 2019) seperti rendahnya kemampuan literasi media digital.

Ibu-Ibu Rumah tangga Desa Maguwoharjo merupakan pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), pengurus dan anggota Dasa Wisma Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Program-program KWT diantaranya adalah TOGA singkatan dari tanaman obat keluarga yang ditanam di pekarangan rumah warga. Program pengembangbiakan tanaman Lidah Buaya dan Singkong yang kemudian di olah menjadi panganan seperti manisan Lidah Buaya dan kripik Singkong. Program Dasa Wisma sudah berjalan seperti Kampung Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan berbagai pelatihan. Mereka juga aktif sebagai pengurus dan sebagai anggota majelis ta'lim atau pengajian di kampung mereka. Kita perlu menilik lebih luas lagi mengenai Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kabupaten Sleman berada di wilayah dataran tinggi dengan tanah yang subur, sehingga memungkinkan penduduknya untuk bertani ("Pemerintah Kabupaten Sleman," 2018). Ibu-ibu rumah tangga tersebut dari segi pendidikan ada yang Sekolah Dasar (SD), ada yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), beberapa ibu ada yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sarjana. Berikut tabel pendidikan formal para nara sumber:

Tabel 1. Pendidikan Formal Nara Sumber

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2-S3
Jumlah	2	8	8	0	2	0

Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman membaca informasi media. Tabel 1 di atas ibu-ibu yang hanya berpendidikan SD sebanyak 2 orang. Ibu-Ibu berpendidikan SMP sebanyak delapan orang, berpendidikan SMA sebanyak delapan orang dan yang berpendidikan Strata 1 sebanyak 2 orang. Pendidikan SD dan SMP di era sekarang tentu sangat rendah. Ibu-ibu yang hanya tamat SD dan SMP sulit mengerti konten-konten media terutama informasi-informasi atau berita-berita melalui media digital. Bahkan ibu-ibu tersebut tidak memiliki media sosial, sehingga tidak update berita, tidak mengetahui perkembangan terkini, dan gagap teknologi. Ibu-ibu yang telah memiliki HP atau smartphone belum bisa melacak historis konten apa saja yang telah dilihat oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka lebih mampu menggunakan smartphone dibanding ibu-ibu tersebut. Tidak semua ibu-ibu tersebut memiliki smartphone, sehingga mereka memperoleh informasi dari anak-anak mereka, atau dari anggota keluarga yang lain. Ibu-ibu yang memiliki smartphone atau handphone ada yang sudah selama lima tahun, ada yang tiga sampai empat tahun, ada yang satu sampai dua tahun, ada yang tidak sama sekali.

2. Identifikasi penggunaan Smartphone

Ketika peneliti menanyakan berapa lama rata-rata ibu menggunakan Smartphone setiap harinya? Berikut tabel jawaban nara sumber:

Tabel 2. Durasi menggunakan handphone dalam sehari

Durasi	0 – 1 jam	1 – 2 jam	2 – 3 jam	3 – 4 jam	5 jam	Total
Jumlah	6 orang	8 orang	1 orang	3 orang	2 orang	20

Ibu-ibu ini menggunakan HP rentang durasi 1 sampai 2 jam dalam sehari paling banyak. Table tersebut menunjukkan sebagian besar ibu-ibu masih masuk kategori normal dalam menggunakan HP, walaupun masih ada yang menggunakan sampai 5 jam dalam sehari. Selanjutnya Peneliti menanyakan tujuan ibu-ibu menggunakan HP atau Smartphone. Ada yang menjawab untuk berkomunikasi, untuk mencari informasi, untuk hiburan, dan untuk mencari pengetahuan. Media sosial yang paling sering digunakan adalah *whatsap* (WA), sedikit ibu-ibu tersebut menggunakan *face book* dan *youtube*. Namun sayangnya dalam keluarga tidak ada aturan yang jelas menggunakan HP. Peneliti memetakan lebih jauh mengenai penggunaan aplikasi yang ada di internet yakni *instant massaging*.

Tabel 3. Penggunaan instant massaging dalam 3 bulan terakhir

Jawaban	ya	Tidak (selesai)	Tidak menjawab	Total
Jumlah	7	6	7	20

Ada tujuh ibu-ibu yang menjawab menggunakan *instant massaging* secara aktif. Enam ibu-ibu menjawab menggunakan tetapi tidak aktif. Sementara yang tidak menjawab ada tujuh ibu-ibu rumah tangga. Total narasumber ada dua puluh orang. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan *instant massaging* masih rendah, dari 20 narasumber, hanya tujuh orang yang menggunakan secara aktif. Bahkan ada yang tidak menjawab ini artinya tidak menggunakan sama sekali. Tujuh orang ibu-ibu rumah tangga tidak tahu aplikasi *instant massaging*. Peneliti mengidentifikasi mengenai manfaat apa yang diperoleh ibu-ibu rumah tangga dengan bergabung dalam group/ komunitas virtual.

Tabel 4. Manfaat grup atau komunitas virtual

No.	KETERANGAN	JUMLAH
a	Menjalin komunikasi dengan banyak orang/pihak	1
b	Mengetahui berbagai informasi	3
c	Ajang silaturahmi	3
d	Sebagai hiburan	
f	Yang tidak menjawab	6
f	Yang jawab b,c	1
g	Yang jawab a,b,c	2
h	Yang menjawab semua	1

Peserta yang menjawab manfaat grup atau komunitas virtual untuk menjalin komunikasi dengan banyak orang atau banyak pihak hanya satu orang. Pada kenyataannya semua dari ibu-ibu yang menggunakan grup media sosial adalah untuk menjalin komunikasi dengan banyak orang atau orang lain. Yang menjawab manfaat grup untuk mengetahui berbagai informasi ada tiga orang. Grup digunakan untuk ajang silaturahmi sebanyak 3 orang. Yang menjawab grup sebagai hiburan tidak menjawab ini disebabkan khawatir apabila menjawab hiburan akan dilecehkan oleh yang lain, namun pada sejatinya semua dari ibu-ibu rumah tangga ini menggunakan grup sebagai hiburan. Yang tidak menjawab cukup banyak enam orang. Tidak menjawab disebabkan tidak memiliki grup dan bahkan tidak memiliki HP secara pribadi. HP menjadi milik bersama dalam keluarga, dimana ibu sangat jarang menggunakan HP. Tak jarang jika ibu ingin berkomunikasi dengan orang lain meminta bantuan anaknya untuk mengirimkan pesan. Yang menjawab secara kombinasi ada tiga orang saja. Sementara yang menjawab menggunakan grup untuk semua tujuan yang dipaparkan. Dari data tersebut, ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo masih banyak yang belum bergabung dalam grup atau komunitas virtual media sosial. penyebabnya beragam, ada yang memang tidak memiliki smartphone secara pribadi. Ada yang sudah memiliki tetapi belum bergabung dengan grup. Ada yang sudah memiliki tetapi terkendala finansial untuk membeli pulsa. Di era tanpa batas saat ini masih ada sekelompok orang yang masih buta media digital. Kalangan akademisi sangat dibutuhkan perannya dalam menggalakkan gerakan literasi media digital.

Minimnya pengetahuan tentang literasi media digital menyebabkan ibu-ibu tersebut tidak tahu dampak negative dari informasi yang dishare melalui *whatsap*, *face book*, atau media sosial lainnya. Seperti dalam Salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi itu bersifat Irreversible. Artinya, dalam komunikasi sekali kita mengirimkan pesan, kita tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali (Litariani, 2010). Informasi yang telah dibagikan bisa memviral, tidak jelas lagi siapa saja yang sudah membaca dan membagikan informasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa ibu-ibu yang mendapatkan berita hoax, kemudian mereka membagikan informasi itu ke beberapa grup *whatsap* (WA), karena mereka tidak mengetahui berita tersebut ternyata *hoax*.

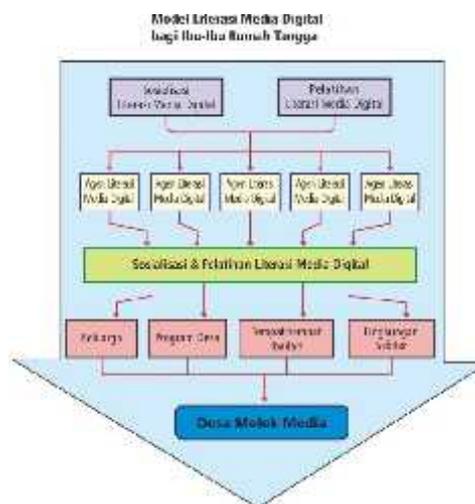
Juliswara menyatakan masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial (Juliswara, 2017). Demikian pula halnya dengan Ibu-ibu rumah tangga ternyata banyak mendapatkan Informasi *hoax*, seperti berita-berita, iklan – iklan, hadiah-hadiah, dan penipuan. Peneliti melakukan diskusi (*Focus Group discussion*).

3. Implementasi Model Literasi Media Digital

Setelah peneliti memetakan kemampuan literasi media digital ibu-ibu rumah tangga tersebut, langkah selanjutnya peneliti memberikan sosialisasi dan pelatihan literasi media digital. Lembaga Swadaya Masyarakat atau *non government organization* yang berkonsentrasi pada literasi media membantu peneliti dalam menyosialisasikan dan memberikan pelatihan literasi media digital kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwogarjo.

Model Literasi Media Digital yang digunakan dengan alur sebagai berikut; model literasi media digital diawali dari kegiatan gerakan literasi media yang dimotori oleh kalangan akademisi, para peneliti literasi media digital, pemerintah (Kominfo atau Dispora), *Non Government Organization* (NGO), pemerhati masalah literasi media digital. Elemen-elemen tersebut bisa secara bersama-sama atau secara mandiri melakukan sosialisasi dan pelatihan atau pendidikan literasi media digital. Sosialisasi dan pelatihan ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga yang telah dipilih memiliki *smartphone*/HP, mampu mengoperasionalkannya secara sederhana, aktif di lingkungan sekitar seperti pengurus Dasa Wisma, PKK, Pengajian, bahkan ibu-ibu pekerja. Ibu-ibu ini diarahkan untuk menjadi agen-agen sosialisasi media dilingkungan mereka berada. Ibu-ibu rumah tangga tersebut dalam penggunaan media digital tidak hanya sampai pada level menggunakan (*usage*), tetapi juga sampai pada level memahami (*understansing*) dan level memproduksi (*creat*). Selanjutnya ibu-ibu ini menyosialisasikan literasi media digital di lingkungan mereka berada. Utamanya sosialisasi ditujukan kepada keluarga mereka masing-masing, kemudian pada setiap kesempatan

pertemuan aktivitas atau program desa (pertemuan dasa wisama, pokja, PKK), di tempat-tempat ibadah (Masjid melalui pengajian), dan di lingkungan di mana ibu-ibu ini berada. Agen-agen yang bergerak ini tidak berhenti sampai disitu, secara berkesinambungan akan melahirkan agen-agen baru yang secara kontinyu menyosialisasikan literasi media digital. Kedepannya desa dimana literasi media ini digalakkan akan menjadi percontohan desa melek media. Desa-desa lain bisa mengikuti untuk melakukan gerakan literasi media dengan mengundang agen-agen dari desa percontohan tersebut. Begitu seterusnya secara berantai yang pada akhirnya menciptakan masyarakat Indonesia melek akan media digital (Novianti & Fatonah, 2018).



Gambar 1. Model Literasi Media Digital bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga
Sumber : (Novianti & Fatonah, 2018)

Peneliti melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga. Mereka diberikan pemahaman mengenai arti penting literasi media digital. Pengertian literasi pada dasarnya yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis. Sederhana yaitu kemampuan dan pengetahuan tentang sesuatu. Literasi tidak hanya untuk menulis dan membaca, pada perkembangannya muncul literasi politik, kesehatan, kuliner, perbankan, media, otomotif, dan sebagainya. Dengan demikian tidak hanya sebatas tahu tetapi sampai kemampuan tentang sesuatu. Literasi sama artinya dengan mampu melihat. Jika kita memejamkan mata terhadap sesuatu, sama halnya dengan media, kita mampu melihat sebatas yang kita mampu melihat sesuatu. Demikian pula halnya dengan digital, jika kita memejamkan mata, maka kita tidak dapat menggunakannya dengan tepat. Jika kita hanya menganggap media digital itu biasa saja, maka itu berarti belum mengalami literasi media. Literasi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak selektif dalam menggunakan teknologi informasi atau digital, mampu bersikap kritis, dapat

mengevaluasi dan mampu merespon, dan mampu menciptakan media alternatif untuk mengurangi ketergantungan. Bertindak selektif yaitu mampu menimbang informasi yang diperoleh melalui media, jadi dibaca terlebih dahulu dengan seksama tidak langsung menyebarluaskan. Khalayak mampu bersifat kritis yaitu mempertanyakan akan informasi yang telah diperoleh. Kita dapat mengevaluasi informasi yang diperoleh. Kita perlu literasi media agar tidak terperosok. Literasi sebagai pertahanan kultural, sehingga jika literasi kita tinggi, ketika kita memperoleh informasi dapat mengendalikan. Literasi proses yang terus menerus tanpa batas.

Literasi media tidak hanya kampanye untuk melihat sisi negatif media digital. Bukan sikap yang menafikkan atau menolak, dan bukan bertujuan untuk menolak media digital. Kita lebih selektif terhadap media digital dan informasi yang ada. Generasi imigran adalah generasi hingga kelahiran tahun 1990. Generasi digital yaitu generasi milenial atau Y. Generasi imigran media baru dianggap sebagai kesulitan, sebagai milik kelompok elit, media hanya dipahami sebagai alat, sebagian besar gagap terhadap teknologi, media baru dianggap menjadi ancaman. Kalau generasi milenial sebagai kemudahan, media baru milik semua orang, media tidak hanya sebagai alat tetapi sebagai bentuk ekspresi untuk eksistensi dirinya, mampu mengoperasikan media secara otodidak dan insting, media dapat menunjukkan eksistensi diri. Cara belajar anak-anak sekarang dengan cara menyenangkan seperti melalui game, sumber bacaan tidak hanya terbatas pada buku, dalam waktu yang bersamaan dalam menghadapi berbagai masalah karena sudah terlatih, cara berfikir lateral tidak lurus saja, belajar sambil menghibur diri, menitik beratkan pengetahuan luas, sangat membuka diri terhadap pandangan dan pendapat, senang berbagi pengetahuan dengan pihak lain, proses pembelajaran dengan cara berbagi.

Waktu efektif menggunakan media sosial ibu-ibu rumah tangga adalah di malam hari ketika anak-anak belajar atau pada saat jam belajar anak-anak. Malam hari adalah waktu santai di mana ibu-ibu sudah selesai melaksanakan tugas rutinnnya baik sebagai ibu rumah tangga, maupun sebagai pekerja. Ibu-ibu ini nyaris tidak pernah atau sangat jarang mengecek informasi atau aplikasi apa saja yg sudah dikonsumsi oleh putra-putri mereka. Di samping tidak menganggap penting, mereka juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi yang ada di smartphone termasuk media sosial.

Durasi anak-anak bermain smartphone kurang menjadi perhatian ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo. Ibu Parsini (Ibu Rumah Tangga 37 tahun), mengatakan bahwa ia tidak pernah memantau berapa jam dalam sehari anaknya bermain hp atau konten media apa saja yang sudah dikonsumsi anaknya,

Pesan yang perlu disampaikan kepada anak-anak ketika menghadapi media baru jangan mengunggah informasi pribadi, jangan secara akurat dan lengkap karena akan menjadi jejak digital, jangan mudah tergiur oleh pancingan seperti diminta mengirim foto dengan imbalan pulsa.

Pertanyaan ibu Maemunah, "bagaimana jika pengetahuan kita kurang bijak dan terlanjur sudah mengunggah suatu informasi? bagaimana cara mencabutnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan?"

Pertama harus kita menghapus dari akun milik kita sendiri. Tetapi hal tersebut tidak otomatis menghilangkan dari track record servernya. Selanjutnya jika ada yang sudah menyimpan informasi tersebut dan menanyakan ke kita, maka kita beri pengertian dan meluruskannya.

Listya salah seorang team NGO mengatakan "Saya jarang buka youtube dan instagram karena boros, kalau penting saya simpan kemudian menontonnya kalau sudah terdownload. Dampak negative media, ada anak yang tidak berhenti bermain HP sampai baterenya habis. Dan sampai sekarang matanya merah-merah dan berair."

Pada saat diskusi mengenai dampak media, salah seorang peserta, Ibu Dwi menyampaikan "dampak media mengganggu kesehatan, bisa membuat kepala pusing dan mengganggu kesehatan mata. Media bisa membuat mata merah, mata minus karena menatap layar HP yang banyak radiasi".

Ibu Nur (peserta sosialisasi dan pelatihan) melanjutkan dampak media "Boros pulsa dan anak menjadi malas. Anak masih kecil 3,5 tahun suka bermain game akibatnya boros pulsa dan malas. Orangtua membatasi anak memegang HP, membatasi waktu bermain HP".

Pandangan tentang media tidak hanya dari segi dampak negatifnya saja, tetapi juga dampak positifnya. Media memberikan banyak informasi tinggal khalayaknya yang memilih dan menyaring mana yang bermanfaat mana yang tidak. Ibu-ibu tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi bisa memproduksi pesan.

Setelah menjalankan sosialisasi dan pelatihan, hasilnya ibu-ibu tersebut menjadi mengerti dan menyadari bahwa harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Mereka harus melakukan cross check terlebih dahulu sebelum menyebarkan sebuah informasi. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari informasi yang mereka sebarkan melalui media sosial. Ibu-ibu ini mampu

melacak historis media sosial yang telah dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Ibu-ibu rumah tangga tersebut membudayakan rajin membaca buku-buku yang bermanfaat bagi keluarga mereka.

Tahap selanjutnya peneliti bersama team memantau perkembangan literasi media ibu-ibu rumah tangga tersebut. Hasilnya mereka menjadi paham arti penting literasi media digital dan mengimplementasikannya. Mereka secara sadar menyampaikan pentingnya literasi media digital kepada keluarga mereka, kelompok Dasa Wisma, Kelompok Tani Wanita, majelis ta'lim, dan lingkungan sekitar mereka. Ibu-ibu rumah tangga tersebut menjadi agen-agen gerakan literasi media digital di lingkungan mereka. Aktivitas ini terus dilakukan sehingga menjadi sebuah budaya literasi media digital di lingkungan Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada akhirnya Desa Maguwoharjo menjadi desa percontohan di kabupaten Sleman sebagai Desa Literasi Media Digital.



Gambar 2. FGD, Sosialisasi, dan Pelatihan Literasi Media Digital
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

D. KESIMPULAN

Ibu-ibu Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebelum diberikan pencerahan literasi media digital, masih berada pada suasana boleh dikata buta media digital. Kalaupun ada yang menggunakan *smartphone* hanya sebatas menggunakan tanpa tahu dampak yang ditimbulkan, belum bisa memilah dan memilih informasi yang berkualitas berdampak positif bagi keluarga. Ibu-ibu di lingkungan ini diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas yang mereka ikuti seperti KWT dan Dasa Wisma serta pengajian. Dengan demikian sudah ada aktivitas positif bagi ibu-ibu tersebut. Namun sayangnya kontrol penggunaan media bagi keluarga masih sangat minim, sehingga anak bebas berselancar di dunia maya tanpa pengawasan berarti dari ibu. Barulah setelah peneliti dan tim memberikan sosialisasi serta pelatihan literasi media digital, Ibu-ibu rumah tangga tersebut menjadi paham arti penting literasi media digital khususnya bagi keluarga mereka. Selanjutnya ibu-ibu tersebut dilatih menjadi agen-agen pembaharuan literasi media digital di lingkungan mereka. Sampai pada akhirnya Desa Maguwoharjo menjadi desa melek media digital. Program ini diharapkan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi keluarga

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kemenristekdikti yang telah mendanai penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti tujuan pula untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini, serta ibu-ibu rumah tangga di Desa Maguwoharjo, Kec, Depok, Sleman, Yogyakarta yang telah bersedia menjadi subyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, R. G., & Ashari, R. G. (2018). Memahami Hambatan dan Cara Lansia Mempelajari Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15, 155–170.
- Balya, T., Pratiwi, S., & Prabudi, R. (2018). Literasi Media Digital Pada Penggunaan Gadget (Studi Deskriptif Penggunaan Gadget Pada Siswa SMK Broadcasting Bina Creative Medan Yang Berdampak Pada Pergeseran Nilai Kearifan Lokal). *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 4(2), 173–187. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1898>
- Basri, B., & Yoserizal, Y. (2019). Identifikasi Faktor Pendorong Anak Perempuan Beraktivitas Di Jalanan (Suatu Studi Terhadap Anak Jalanan Perempuan di Kota Pekanbaru). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 81–91.
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Litariani, R. (2010). Komunikasi Bersifat Irreversibel | Roselitariani's Blog. Retrieved June 14, 2019, from <https://roselitariani.wordpress.com/2010/03/06/komunikasi-bersifat-irreversibel/>
- Mohamed, A. H. (2017). Globalisasi Dan Impak Sosiobudaya. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(1), 33–45.
- Novianti, D., & Fatonah, S. (2018). Literasi Media Digital di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1). Retrieved from <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2678>
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2018). Retrieved June 15, 2019, from <http://www.slemankab.go.id/>
- Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » Penduduk. (2018). Retrieved June 15, 2019, from <http://www.slemankab.go.id/3274/kependudukan-demografi.slm>
- Riswari, A. A. (2019). Komunitas Surabaya Wotagei: Sebuah Kajian Budaya Populer. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 121–131.
- Sihabudin, A. (2013). Literasi Media Dengan Memberdayakan Kearifan Lokal. *Communication*, 4(2). <https://doi.org/10.36080/comm.v4i2.55>
- Tridiatno, Y. A., & Tridiatno, Y. A. (2013). Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus terhadap Halaman "Kasus" di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 3. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.237>
- WartaBromo. (2018). Kecanduan Game Online, Pelajar MTs Mencuri di Rumah Anggota TNI. Retrieved June 14, 2019, from Kumparan website: <https://kumparan.com/wartabromo/kecanduan-game-online-pelajar-mts-mencuri-di-rumah-anggota-tni>
- Weriza, W., Asrinaldi, A., & Arief, E. (2019). Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 213–222.
- Wiratmojo, 2010, *Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca televisi*. Tifa :Yogyakarta



WELFARE STATE POLICY MODEL AS A POVERTY REDUCTION STRATEGY IN THE WEST SUMATRA DISTRICTS AND CITIES

Azwar^{1*}, Emeraldy Chatra², Zuldnesni³

^{1,3} Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

² Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 19 August 2019
Review : 21 September 2019
Accepted : 18 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Welfare state; Social Policy Model; Poverty; Reduction; Strategy.

CORRESPONDENCE

*E-mail: azwar.fisip@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is one of the social problems that the government can never completely solve. As a result, other, more significant social issues arise and cause social vulnerability, such as conflict and crime. As a province that is experiencing rapid growth in the last ten years, the West Sumatra find difficulty to overcome the number of poor people in several districts and cities. The research outcomes are the models and forms of social policy made by West Sumatra regencies and cities governments in improving the welfare of poor communities. It is also covering the constraints or obstacles to the implementation of social policy and the selection of welfare state models for the poor in some districts and municipalities of West Sumatra. This research is conducted qualitatively with a sociological approach that uses social perspective on searching and explaining social facts that happened to needy groups. Based on research conducted that the social policy model adopted by the government in responding to social problems in the districts and cities of West Sumatra reflects the welfare state model given to the poor. There is a strong relationship between the welfare state model and the form of social policy made by the government.

A. INTRODUCTION

The head of the Central Statistics Agency (CSA) of the Republic of Indonesia released that in March 2018, the poverty rate in Indonesia had touched the one-digit figure of 9.82% or 25.95 million people. The highest number is still found in Java as many as 13.94 million and in Sumatra occupies the second largest number of 5.98 million, while the lowest number is in Kalimantan of 980 thousand. In the same month in 2018, the Head of CSA West Sumatra also said that for the number of poor people in the province amounted to 6.65% or 357,130 thousand people and nationally at rank 9 of 34 regions or below the order of North Maluku Province of 6, 64%. West Sumatra has three regencies with the highest number of poor people in the Mentawai Islands District at 14.67%, West Pasaman District at 7.26%, and South Solok District at 7.21%. The lowest number of poor people is in Sawah Lunto City, which is 2.01%, followed by Padang City at 4.74%.

Although nationally, the poverty rate has decreased from double digits in 2017 (10.92%) to 1 number in 2018 (9.82%) the average district and city in West Sumatra reduce the poverty rate by 0.28%. As in West Pasaman District, which is the largest and best palm oil plantation area, the results in Indonesia only experienced a decline in the number of poor people by 0.14%. It is difficult to understand that the City of Padang as the Capital City of West Sumatra Province with LGR in 2016 reached 19.6% of the proportion of the APBD, the poor experienced an increase of 0.06%, which at 2017 was 4.68% and in 2018 it became 4.74%.

Poverty connotes unhealthy living conditions, according to McGillivray (2007), which is characterized by an inability to meet life's needs. When people were mentalization with a rope of poverty, power is needed both inside and outside. "Inner strength" manifests the ability of the poor to get out of the poverty loop. It is different from "external power," an intervention and facilitation carried out by other parties both individually and institutionally to open the poverty

loop. Although poverty can have objective and subjective meanings and interpretations, the estuary of each purpose is how the quality of life can be a realization in the form of fulfilling life's needs. The government of one state institution has an essential role in providing strength to achieve a good quality of life or welfare. But the convergence between internal power and external power has a significant role so that people can get out of poverty or become well-being. For Harkness (2007), the welfare of the poor needs to be an expression in the form of happiness and maximum satisfaction.

However, according to Maolani (2019), the discrepancy between social policy and economic policy in solving poverty problems has a different strategy. The political system and social structure of a country as a dimension that influences the economic policy model a prosperous society. Meanwhile, Nurwanda (2019) sees that social policies in poverty programs are actively effecting the bureaucratic structure in a country. They saw from the case of the Raskin rice program in Cibanten Village, Cijulang District, Kabupaten Pangandaran. The program's policy implementation is not efficient because there are bureaucratic obstacles that are less than optimal. This situation is inseparable from the policy model adopted by the state in realizing a prosperous nation. The principle of "Good Governance," according to Ramdhani (2017), has not been carried out consistently but is still limited to discourse or narrative to the public. These principles include consistency, transparency, accountability, fairness, effectiveness, and efficiency. It means that the problem of poverty in the context of social policy using as a resource for a project for institutions and not to solve the problems of the poor themselves.

Other thoughts, the process of decommodification and decapitalization of the poor according to Gough in Kennett (2004), is the use of self-potential to be used as an asset in increasing income to live prosperously by formal and non-formal institutions. Improving the welfare of the poor requires this process through policy interventions made by the state in the form of social guarantees and social protection (Spicker in Sutomo, 2011). This pattern has been carried out consistently by modern countries with the perfect welfare of the population before the country becomes a prosperous country (Spiro, 1983). According to King in Spiro (1983), resolving welfare issues must be integrated and simultaneous, cannot be part and segmented among institutions in implementing social policies in a state government. Wilensky also reinforced the same thought in Spiro (1983) and Flora in

Andre (2001), where the principle of applying "welfare" is that the government protects minimum standards in income, nutrition, housing, and guarantees of education to citizens as political rights and not as gifts or alms. It can do by providing a basic income guarantee, providing employment for everyone, supporting children from low-income families to go to college, reducing income differences.

The use of local institutions to boost the realization of a welfare state is one of the models developed in Indonesia. Local institutions designed in the form of the formation of Village Community Enterprises (VCE) in every village in Indonesia with economic activities. As research by Caya et al. (2019) in Belitung Regency concluded that the government program in promoting community welfare in villages through the VCE program has not been able to improve the social and economic community. This institution is only limited to making programs in the provision of education and public health infrastructure. Effectiveness and optimization of village institutions have not been able to realize the welfare of citizens, especially for the poor. As a result, the migration process took place to find a better place to live in the city. One of the jobs that many poor villagers enter when they reach the city is as a street beggar. Although various policies issued to prohibit becoming a beggar, but it can not inhibit. The principal reason, according to Basri and Yoserizal (2019), to survive as street beggars, is a factor in the economic needs of the family. The poor who move to the city uses all family members as a source of income by doing beggar work.

The poverty problem of determination from the level of community welfare, reduction, and increase in the number of poor people illustrates social policies implementation of the government. Lee Rainwater and Martin Rein in Spiro (1983) see poverty because of redistribution of income that does not work and includes the social services for the poor. Thus, the low and increasing decline in the number of poor people in West Pasaman District and the City of Padang between 2017-2018 is a shape of the social policy built by the government in realizing a prosperous state. If the government follows a pattern and model that is an inherent part of reducing the number of poor people, then the poverty rate quickly decreases. There will be no increase in the name of poor people, as experienced by Padang City if consistency and commitment in the use of public tax funds for social welfare programs.

Other cases were addressing the problem of poverty, such as those found by Wulandari and

Rosfiantika (2018), which still leaves many improvements in policy. For example, in Bondowoso District, out of 12 districts running poverty programs, all of them have welfare problems. These problems include homeownership status, welfare levels, dropping out of school, access to electricity, quality of water sources, subsidized LPG access, sanitation facilities, working family members, and access to health services. The cause, according to Hurairah in Wulandari and Rosfiantika (2018), is 1). The program still orientation towards the economic aspect rather than a multidimensional aspect; 2). More compassion oriented than productivity; 3). Positioning the poor only as objects not as subjects in development, and 4). The government acts as the ruler rather than the facilitator. Not much different from the poverty program that applied to communities whose villages are affected by the construction of reservoirs in Koto Panjang, West Sumatra. That the welfare of the displaced households was better than in the old rural and that at the beginning of the displacement. It has been able to adjust themselves so that they can get out of the conditions of impoverishment that occurred during the initial transfer period. The average household income is above the Provincial Minimum Wage, and this condition does not show a good spread because only five villages from 12 research villages have an average salary above the PMW. There is no stable relationship (strong correlation) between income inequality and welfare because the correlation value obtained in this study is so low that it is not enough to prove the relationship between inequality and well-being for the case of Involuntary Resettlement Koto Panjang. (Adrianus et al., 2019)

The form of the model in question includes the model in implementation consisting of imperative models and indicative models. Then there are two models in the scope of the program, namely the selectivity model and the universal model. The sustainability of the implementation of the social policy has two models, namely the residual model and institutional model. Finally, the social policy model based on the problem and its objectives, which include categorical and comprehensive models (Suharto, 2005: 71-77). Through this paper which is the result of research trying to analyze the problem by finding forms of social policy made by the government of Padang City and West Pasaman District in improving the welfare of disadvantaged groups. Then it became very relevant in the analysis by finding the "welfare" policy model used by the two governments, including the obstacles faced in

implementing social policies to accelerate the reduction of the number of poor people.

B. METHOD

The method used in this study is a qualitative type of explanation by combining action research methods or participatory approaches in a wholeness construction to achieve the research objectives. Through this method has resulted in the identification of policies and includes a comprehensive model of the Welfare-state relating to the program to reduce the number of low-income families.

The stages of the research were initiated by identifying and analyzing various social policies originating from the center. Those created the regions themselves, including private and NGO programs aimed at low-income families in Pasaman Barat and Padang. Furthermore, classifying policies that are oriented to reduce the number of low-income families — documenting studies in various agencies that are relevant to the program to reduce the amount of low-income families, including conducting literature studies, direct observation, in-depth individual interviews. Through this method, information obtained on the obstacles that occur in implementing policies by stakeholders such as the Local Device Organization (LDO) that are responsible for needy families. Then the last one comprehensively conducts theoretical discussions to find the model of social policies implemented by district and city governments in low-income families.

This research carried out ethical and emotional analysis techniques, where, through this technique, the researcher immediately became the instrument of study, meaning that the researcher quickly collected data using interviews and observation methods. Analysis has begun since the data collection process in the field or from the interview and observation process. Therefore, in this study, data analysis was carried out by describing the information provided by the informant. Then the researcher interpreted the information provided.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Local Government Social Policy in Poverty Programs

In the years of 2018, that cannot avoid at this time are that the population classified as weak still reaches 7.26% in West Pasaman District while in Padang City is 4.74%. Compared to the previous year, the poverty rate for West

Pasaman Regency decreased by 0.14%, but what was unusual for the City of Padang was an increase in the number of poor people by 0.06%. This issue arises undoubtedly cannot separate from the policies carried out by the two governments through social programs oriented towards the welfare of the poor. The government action is proper in the context of implementing standard procedures, according to Gough in Kennett (2004: 240-241). The West Pasaman District Government and Padang City have taken action in the sense of meeting the needs of the poor, encouraging their potential, including supporting the active involvement of the community in realizing that prosperity. Like running a Healthy Indonesia Card program (HIC) and a Smart Indonesia Card (SIC) for treatment and educational help for the poor.

The program owned by the Regency and City Governments is a form of replication of the poverty reduction program created by the central government. Local governments only follow programs designed nationally in resolving national issues, namely reducing the number of poor people. Program funding comes from the central and regional governments in the form of budget priorities to make the federal program a success. In the context of poverty alleviation, the six programs mentioned above can grouping into three clusters, namely Cluster I is a Poverty Reduction Program for Family-Based Integrated Social Assistance, Cluster II is a Poverty Reduction Program Based on Community

Empowerment, and Cluster III is a Poverty Reduction Program Based on Increasing Economic Capacity & Revenue.

The social policies carried out were not limited to the two programs alone, the poor also received income guarantees (through the FHP), housing (UHP), assistance in need for rice (the Rastra program). All forms of social policy are manifestations of the government's obligation to actualize the rights of the poor to obtain social protection into a prosperous life (Spicker (2000: 151-154). It does at the individual level (providing cash assistance and scholarships including medical expenses), and group level (forming a joint business group-JBG) In the context of the scope of the policy carried out by the two governments, it has been included in social policy issues as mentioned by Lerner et al. (2006) which emphasizes on the poor, housing, health and opportunities in education, employment and non-discrimination, it means that the governments of West Pasaman Regency and Padang City as heterogeneous societies do not distinguish between ethnicity and religion in implementing social programs, Clasen stated the same thing in Kennett (2004: 93-95) that program implementation social is an expression of the government in regulating significant plans for the public such as income security, housing, health, and social services. This policy aims at guaranteeing or increasing welfare in the opportunity of human life.

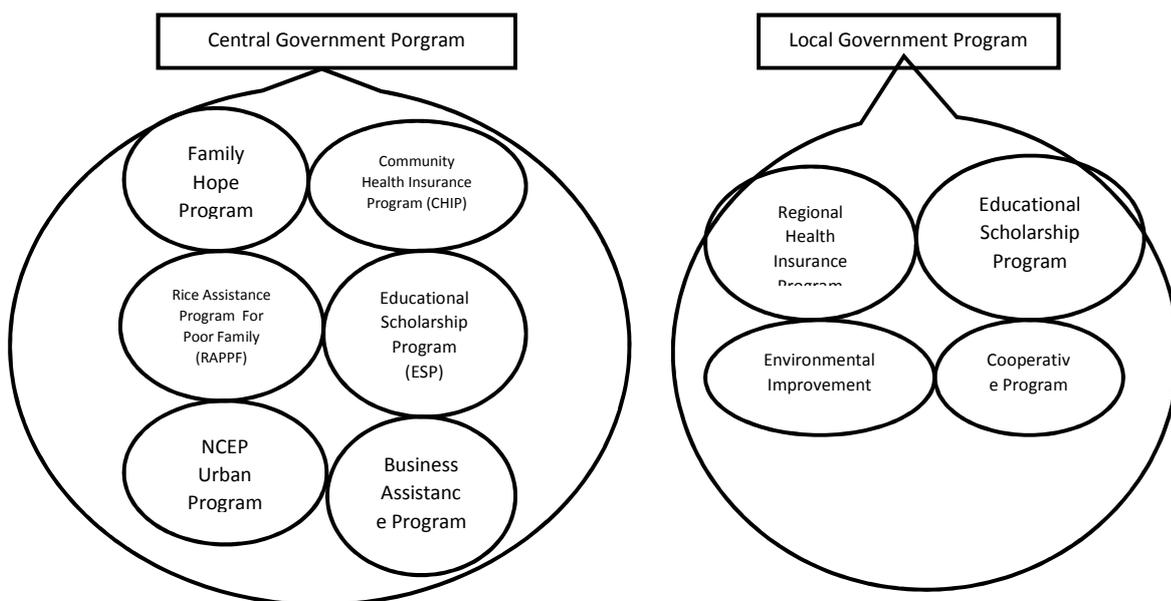


Fig. 1 Comparison Of The Central Government Poverty Program With Local Government

Based on figure 1, the various types of National Community Empowerment Programs

(NCEP) programs that are passed down by the central government to Regencies and Cities in

West Sumatra, where the form of the application has determined only the implementation or type of activities based on the capacity and environmental conditions of the community. Therefore, the NCEP included in cluster II categorized as an imperative social policy. Then it is indicative because the targets or targets of the schedule determined by the central government and implemented through assistance from non-governmental organizations. It means that the government has outlined policy objectives, while the implementation is carried out entirely by the community (NGOs or social organizations), and this model often referred to as participatory policy. The Islamic Financial Services Cooperative (IFSC)-Baitul Mal Wattamwil (BMT) program is included in group III, namely providing stimulant funds developed in the form of joint ventures or the kind of savings and loans.

Interestingly this program's target group is the poor or residents who have small or micro-businesses— this program categorized in Padang City Government policy as a form of indicative and selectivity systems. As a symbolic policy, this program determined by the government, and then the poor or micro or small entrepreneurs given access to borrow funds that are sharia cooperatives.

The still high number of poor people in Pasaman Barat Regency and Padang City is a determination of failure in the implementation of social policies. Although the government already has clear targets and targets of the plan, it has not implemented an integrated social system. According to Edwar III in Widodo (2006: 96-110), four factors are integrated and interrelated in the successful implementation of social networks, namely (1) communication, (2) resources, (3) disposition, (4) bureaucratic structure. These four factors do not run simultaneously and tend to be partial in implementing social policies. Poor people get information through information dissemination conducted by officers in an unclear manner about the program they will receive. So that health and education assistance programs in the form of HIC and SIC are considered by the poor to be valid for life. Including direct cash assistance through the FHP program is understood as the same as a form of almsgiving. As a result, the poor did not make the assistance as a stimulant in stepping up to change lives to become more prosperous. But it leads to reckless living behavior by utilizing support for secondary needs. This situation arises not apart from the resources in running the program which is not competent. That is, placing people who do not have the ability in the program, such as putting healthcare workers in the social field.

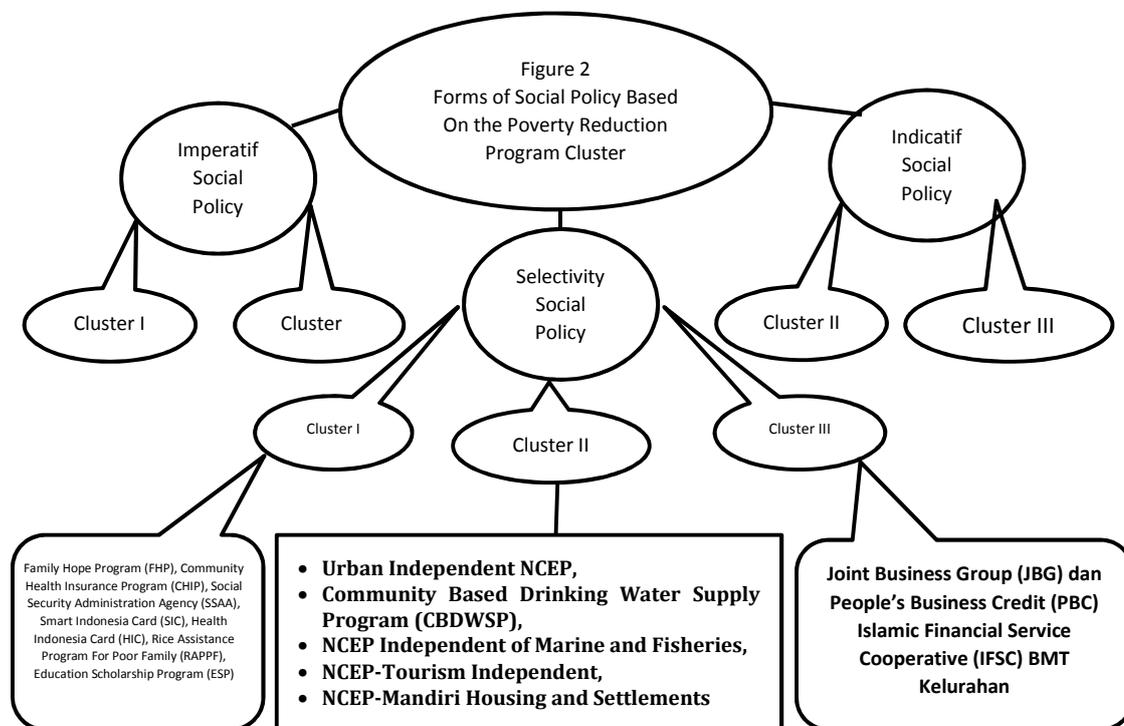


Fig. 2 Forms of Social Policy Based On the Poverty Reduction Program Cluster

Edwar III further explained that the mistake in placing resources due to improper disposition factors. Many program implementers are not severe and severe because they are concerned that the person will not be in that position for a long time, including the also has no competence. Like knowledge, understanding, and objective or neutral and the form of intensity in carrying out policies is an essential part of placing people in a position (Mater and Horn in Widodo, 2005: 105). Local device organizations (LDO) which not synergized are also the cause of failure in reducing poverty. Including LDO, who have the main task of not being given high authority in making the program, but on the contrary, the LDO that is not directly related has a program that is a little touch in reducing the population. Such as the Office of Social Affairs and the Health Service have a small budget for poverty alleviation programs while the Department of Public Works has a huge budget. Only 1% of the Locally-Generated Revenue (LGR) for the budget given to the two agencies in carrying out its function as the "leading sector" of poverty alleviation programs.

2. Model of Implementation of Social Policy in Poverty Programs

The poverty program implemented by the governments of West Pasaman Regency and Padang City includes programs from regional centers and programs. The central government program consists of the Family Hope Program (FHP), Jamkesmas in the form of the Healthy Indonesia Card (HIC) program, the Smart Indonesia Card (SIC), the Unqualified Home Program (UHP), and the Prosperous Rice (Rastra). Then the regional government lowers programs such as Regional Health Insurance (RHI), UHP, Sanitation, Electricity. The plan from the central government has become "given" to the local government because the objectives, types, sources, and forms of services determined while the local government only implements them. Similarly, the regional program is complementary to the limitations of the mayor plan to reach targets from those who receive plans from the central government. Like the UHP and RHI programs made by the local government because the number of program recipients limited from the central government, the regional government makes the same follow-up program for the regions.

Poor people who receive poverty programs have done with a pattern of selectivity where social services provided to low-income citizens, parents who do not have permanent jobs, including access to education. The program is

determined using poverty testing instruments and needs tests. This model, according to Suharto (2005: 71-77), is called the social policy model of selectivity. Using the model described by Suharto, poverty programs implemented by the governments of West Pasaman District and Padang City are a combination of several models. First, using a model of social imperative and indicative policy, this is indicated by the government determining the form of programs that will be received by the poor. Then the suggestive model, where the central and regional governments outline the poverty program, the implementation is carried out entirely by the community or non-governmental institutions. As with the NCEP, it is a program from the central government, but it implemented by self-help groups formed by themselves.

The other model applied is a definite and comprehensive social policy model in the absolute model of the government of West Pasaman Regency and Padang City, focusing on the main problems that cause poverty, such as the economy, education, and health. It also includes implementing a comprehensive social policy model that is making social policies that pay attention to the interrelationship between the factors that influence it. There is a program cycle for the poor. The implementation of the FHP program through the provision of cash is directed to finance maternal health during pregnancy, meeting basic needs. If a sick person gives birth to a healthy baby will get a smart generation, FHP assistance used for educational purposes.

Policies made by the District and City governments in West Sumatra in poverty alleviation programs have guided the application of the welfare state model in providing services to the community. All existing and ongoing programs reflect imperative social policies, indicative social policies, and selective social policies. The three forms of social policy balanced in carrying out clusters of poverty reduction programs. Such as in group I, which focuses on conditional cash transfer and unconditional cash transfer programs. The targets and targets of this program are through the provision of conditional and unconditional cash transfers to poor communities. This program not be developed for non-poor community groups. Then the application has been determined, and the poor only take "granted for granted" what has been determined by the government. Impoverished households that receive the FHP program are required to utilize cash assistance in the health and education sectors. Low-income families must not use capital for business or buy work equipment.

The above policy, if understood in the perspective model of a welfare state, is included in the residual model and the minimal model. In the better welfare state model is universal in the sense that the country has a responsibility for the welfare of its citizens both from the rich and the poor— forms of protection provided by the country ranging from clothing, shelter, food, health, and education. The state guarantees the health and education of its citizens, including proper housing, there are no citizens who are malnourished or not eating, or there are no citizens who do not get adequate training. All are under the responsibility of the state. It is a welfare state model that is ideal for applying to a country. Currently, the only one that can affect that model in Switzerland. Of course, the application of this model supported by the country's ability to provide the budget to help the policy. The city of Padang, as part of the Indonesian government system, shows more capacity to carry out the minimum and residual welfare state model. It could also be in the form of a welfare state corporation model or based on the scheme where the community members work. If a citizen works in a private company, then the one who guarantees his welfare is a private company; if he works in the government, then social security is obtained from the government. The fact is that not all corporate institutions provide social security for their workers, especially corporate organizations that are still small scale.

3. Constraints to Implementing Social Policy in Poverty Programs

Comprehensive and integrative forms of policy can reduce poverty rates quickly, including commitment and consistency in implementing the policy model. The increasing and number of poor people in Pasaman Barat Regency and Padang City due to several factors. These factors are relevant to what was stated by Edwar III in Widodo (2005) there are four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Understanding of programs provided by the government to the poor is not able to change the behavior of life for the better. It is due to the communication that built-in introducing the program by the government to the recipients to highlight the formality and quantity and ignore the quality of communication. The socialization meeting measured its activities from the time of the meeting, evidenced by the attendance list by the poor, but ignored the understanding of the program for the poor. Besides, the resource factor is also the main trigger for the increasing number of poor people. Capital resources are the principal reason given, where local governments

do not have sufficient budget to reduce the number of poor people. So that dependence on poverty programs from the central government is very high, and few programs raised from local governments. As a result, regions have a strategy to be able to obtain central funds by maintaining the amount of poverty so that they always included in the recipients of poverty programs from the center.

Another obstacle in implementing social policy models is the disposition factor, meaning that institutions or LDO that are relevant to poverty programs not occupied by people who have competence and commitment. So that LDO leaders often work not seriously because of career uncertainty in holding positions in LDO. The difficulty of keeping from running the social policy model is because the bureaucratic structure or inter-LDO relations are not synergistic, and what happens is the ego of each LDO in making work programs. It can see from the presence of several LDOs in coordination meetings not attended by the head of the LDO but only by staff.

D. CONCLUSION

The local government has made social policies to reduce the number of poor people. But the number of poverty figures is still high and tends to increase compared to the previous year. It is influenced by the social policy model that used not going well in the sense that it did not carry out consistently. The government has made social policies in an imperative and indicative model, including residual and institutional. But this model is not implemented systematically and organized in a synergistic and coordinative frame. It is due to several constraints, namely socialization of programs that not carried out comprehensively, the budget allocated for poverty programs is still very dependent on assistance from the center, placing people in program institutions often not according to competence, joining between LDOs is not going well. This condition must be changed to a superior program of the local government so that the composition of the budget directly touching the poverty program is no longer using indirect program terminology with poverty programs.

E. ACKNOWLEDGMENT

Thank you to LPPM UNAND for facilitating research through Kemenristekdikti's research grant funds years 2018. Likewise, undergraduate students, Rina and Linda, have helped to conduct interviews to make reports until the publication of this paper.

REFERENCES

- Andre , Hans-Jurgen, and Thorsten Heien. 2001. Four World of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway, and The United States. *Jurnal European Sociological Review*, Vol. 17 No. 4, 337-356.
- Andrianus Fery, Syafruddin Karimi dan Werry Darta Taifur. 2019. Inequality And Welfare Of The Displaced Households Due To The Construction Of Koto Panjang Dam. *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 21 No. 01, Juni, 93-102.
- Basri dan Yoserizal. 2019. Identifikasi Faktor Pendorong Anak Perempuan Beraktivitas Di Jalanan (Suatu Studi Terhadap Anak Jalanan Perempuan di Kota Pekanbaru). *JURNAL ANTROPOLOGI: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 21 No. 01, Juni, 81-91.
- Blau, Joel. 2003. *The Dynamic of Social Welfare Policy*. New York: Oxford University Press.
- Caya, MUHPammad Fajar Nandra dan Ety Rahayu. 2019. Dampak BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20 Nomor 1, April, 1-12.
- Gasper, Des. 2007. *Human Well-being: Concepts and Conceptualizations*. New York: Published PALGRAVE MACMILLAN.
- Harkness, Susan. 2007. *Social and Political Indicators of Human Well-being*. New York: Published PALGRAVE MACMILLAN.
- Kennett, Patricia. 2004. *A Handbook of Comparative Social Policy*. Northampton Massachusetts USA: Published Edwar Elgar
- Lerner, K. Lee (ed). 2006. *Social Policy; Social Issues Primary Sources Collection*. USA: Thomson Gale
- Lerner, K. Lee, Brenda Wilmoth Lerner, and Adrienne Wilmoth Lerner, Editors. 2006. *Social Issues Primary Sources Collection Social Policy Essential Primary Sources*. New York: Published Thomson Gale.
- Lewis, Gail and Sharon Gewirtz and Jhon Clarke (ed). 2000. *Rethinking Social Policy*. London: SAGE Publication.
- Lewis, Jane and Rebecca Surrender. 2004. *Welfare State Change: Toward Third Way ?*. New York: Oxford University Press
- Maolani, Dedeng Yusuf. 2019. Arah Kebijakan Sosial Perkotaan dan Pengurangan Kemiskinan di Perkotaan. *Jurnal Kelola* Vol. 2 No. 1, 104-120
- McGillivray, Mark (ed). 2007. *Human Well-Being: Concept and Measurement*. New York: Published PALGRAVE MACMILLAN.
- Nalle, Frederic W dan Emilia K. Kiha. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang MempengarUHPi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 3, 35-45.
- Nurwanda, Asep. 2019. Analisis Kebijakan Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa LGRa Program Beras Sejahtera. *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 1, Februari, 107-120.
- Page, Robert M. 2007. *Introduction Social Policy: Revisiting The Welfare State*. New York: McGraw Hill.
- Ramdhani, Abdullah dan MUHPammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01, 1-12.
- Rizal, MUHPammad Fikru dan Eddy Van Doorslaer. 2019. Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia SSM - *Population Health*, 9, 1-10
- Seeleib, Martin-Kaiser (ed). 2008. *Welfare State Transformations: Comparative Perspectives*. New York: Published Palgrave Macmillan.
- Spicker, Paul, and Sonia Alvarez Leguizamon and David Gordon. (2007). *Poverty An International Glossary Second Edition*. New York: Published Zed Books.
- Spicker, Paul. 2000. *Welfare State A General Theory*. New York: SAGE Publication.
- Spiro, Shimon E and Ephraim Yuchtman-Yaar (ed). 1983. *Evaluating the Welfare State Social and Political Perspectives*. New York: ACADEMIC PRESS.
- SUHParto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Penerbit Alfabeta

- Sutomo. 2011. Efektifitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 15, Nomor 1, Juli, 15-28.
- Widodo, Joko. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis*. Malang : Bayu Media Publishing
- Wulandari, Kusuma dan Evi Rosfiantika. 2018. POVERTY ALLEVIATION AND COMMUNITY WELFARE: A CASE STUDY IN BONDOWOSO REGENCY, EAST JAVA, INDONESIA. *Asian Journal For Poverty Studies* 4 (1), 1-6.



RELEVANSI POLITIK IDENTITAS PEMILIH MUSLIM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATRA UTARA TAHUN 2018

Dharma Kelana Putra^{1*}

¹ Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 19 August 2019
Review : 04 September 2019
Accepted : 27 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Politics of Identity; Religion; Muslim Voters; Election of Governor; North Sumatra

CORRESPONDENCE

*E-mail: dharma.kelana@kemdikbud.go.id

ABSTRACT

The similarity of identity such as religion and ethnicity as a primordial aspect becomes a preference in choosing a leader not based on their capability. In the election of the Governor of North Sumatra in 2018, identity politics tended to strengthen in Muslim voters, especially in terms of religion, indigenous issues and natives. This practice of identity politics resulted in a victory for the couple Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Islam-Islam). The main question in this study is why identity politics is still relevant to be used by Muslim voters in the Election of Governor of North Sumatra in 2018. The study was conducted with a qualitative descriptive method, in which all data were collected through library studies and internet searching. This study concludes that Muslim voters see identity politics still relevant to use in choosing leaders because they consider Muslims have to be led by leaders who care about Islam. This understanding emerged from previous experiences in DKI Jakarta, namely the Al Maidah 51 incident by Ahok and discriminatory practices against Muslims when led by the non-Muslims and the Muslims who did not care about Islam in various regions in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melalui serangkaian sejarah panjang penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer, sampai kepada demokrasi pancasila dalam bentuknya yang sekarang (Purnaweni, 2004: 181). Demokrasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya. Demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang artinya kekuasaan, yang kemudian menjadi *demokratia* atau kekuasaan rakyat.

Dalam demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Purnaweni, 2004; Ma'arif, 2012; Fikri dan Oktario, 2018). Proses ini merupakan akhir dari sesuatu yang lama sekaligus menjadi awal dari sesuatu yang baru bagi rakyat, sehingga tak jarang proses pergantian kepemimpinan ini dianggap sebagai pesta demokrasi oleh berbagai kalangan. Kemenangan seorang pemimpin seogyanya merupakan kemenangan bagi rak-

atnya, sebab pemimpin terpilih merupakan hasil akumulasi dari suara terbanyak atau pilihan mayoritas.

Penerapan pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi di berbagai belahan dunia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Di negara-negara yang homogen misalnya, preferensi dalam memilih pemimpin lebih dititik beratkan pada isu apa yang ia bawa, untuk kepentingan siapa dan bagaimana ia akan menjalankan roda kepemimpinannya setelah ia terpilih. Sementara, di negara-negara yang penduduknya heterogen, faktor identitas seperti etnis, agama, ras, warna kulit, usia, penampilan, budaya, dan bahasa menjadi aspek primordial yang sangat menentukan keberpihakan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan ia pilih (Maarif, 2012; Xiaomei, 2014). Pelibatan aspek primordial dalam demokrasi untuk mengarahkan keberpihakan berdasarkan identitas tertentu disebut dengan politik identitas.

Polemik yang kemudian muncul adalah apakah praktik politik identitas baik atau buruk jika dalam demokrasi di Indonesia? Terkait dengan hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi, dimana sebagian mengata-

kan bahwa politik identitas merupakan indikator primordialitas karena memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas melainkan atas dasar identitas, sementara sebagian lainnya mengatakan baik karena pemimpin yang terpilih akan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai kelompok mayoritas (Caplan, 2008; Haboddin, 2012; Ma'arif, 2012; Burhan dan Sani, 2013; Faraidiany, 2016; Fikri dan Octario, 2018).

Di Indonesia khususnya di Sumatra Utara, politik identitas masih menjadi praktik politik yang populer di kalangan elit, dan dukungan dari kelompok mayoritas itu sendiri masih menjadi dambaan para politisi untuk memenangi suatu kontestasi. Dalam kasus pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018 lalu misalnya, dukungan kelompok yang diperebutkan berasal dari etnis Jawa dan umat Islam sebagai mayoritas. Sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Penduduk Sumatra Utara Berdasarkan Etnis Tahun 2018

Etnis	Populasi	%
Jawa	4.749.295	33,3
Batak Toba	2.738.332	19,2
Tionghoa	1.511.788	10,6
Mandailing	1.340.642	9,4
Minangkabau	1.183.758	8,3
Melayu	898.515	6,3
Karo	599.010	4,2
Aceh	399.340	2,8
Simalungun	85.573	0,6
Nias	98.409	0,7
Pak-Pak	98.409	0,7
Lain-lain	559.076	3,9
Jumlah	14.262.147	100,0

Sumber: *Data Primer*

Sementara jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Penduduk Sumatra Utara Berdasarkan Agama Tahun 2018

Agama	Populasi	%
Islam	9.425.734	66,1
Protestan	3.855.729	27,0
Katolik	566.914	4,0
Hindu	16.088	0,1
Budha	333.475	2,3
Lainnya	64.207	0,5
Jumlah	14.262.147	100,0

Sumber: *Data Primer*

Dari dua tabel di atas, diketahui bahwa kelompok etnis Jawa memiliki proporsi 33,3% dari seluruh populasi (4.749.295 jiwa) sementara pemeluk agama Islam tercatat dengan proporsi sebesar 66,1% dari seluruh populasi (9.425.734 jiwa). Secara kuantitatif, ini menjadikan dua kelompok identitas ini sebagai basis dukungan yang potensial untuk mendukung suara. Satu hal yang menarik adalah, kedua calon Gubernur yakni Edy Rahmayadi dan Djarot Syaiful Hidayat bukan kelahiran Sumatra Utara, tetapi mereka sama-sama beragama Islam, dan sama-sama berdarah Jawa. Sementara wakilnya sama-sama berasal dari Sumatra Utara, hanya saja yang satu beragama Islam (Musa Rajeckshah) dan satu lagi beragama Kristen (Sihar Sitorus).

Pengamatan awal yang dilakukan terhadap beberapa media daring memperlihatkan bahwa politik identitas mewarnai persaingan yang terjadi di antara keduanya. Pendukung Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah misalnya, mereka cenderung menyampaikan agar umat Islam memilih pemimpin muslim yang mau memperjuangkan agama Islam. Sementara, pendukung Djarot dan Sihar Sitorus menyampaikan pesan agar para pemilih tidak menjadikan persamaan identitas etnis maupun agama sebagai preferensi dalam memilih pemimpin. Namun di sisi lain, para pendukung Djarot dan Sihar juga memanfaatkan latar belakang keduanya untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih beretnis Jawa dan Batak¹, yang juga sebagian besar adalah non muslim². Reproduksi politik identitas yang ada di ruang publik seolah menciptakan konstruksi bahwa pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018 adalah pertarungan antara kelompok Islam dan Non Muslim.

Dari konstruksi ini, jika diasumsikan seluruh pemilih non Muslim mendukung pasangan Djarot dan Sihar Sitorus sebanyak 33,9%, maka mereka membutuhkan strategi kampanye untuk memperoleh suara pemilih muslim sebanyak 20% agar menang dalam pemilihan. Di sisi lain, pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah membutuhkan strategi agar suara pemilih Muslim tidak beralih ke lawan politik mereka.

Hasil akhir yang diperoleh kemudian adalah kemenangan bagi pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, dengan perolehan suara 3.291.137 (57,58%). Strategi yang digunakan oleh pendukung Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah berhasil mempertahankan dukungan suara pemilih muslim, dengan menyisakan

¹ Rujuk pada tautan berikut: <https://medan.tribunnews.com/2018/05/23/persaudaraan-jawa-batak-tegaskan-menangkan-djarot-sihar>

² Rujuk pada tautan berikut: <https://news.solopos.com/read/20180628/496/924891/faktor-kekalahan-djarot-sihar-mirip-ahok-djarot-di-pilkada-jakarta>

perolehan suara Djarot dan Sihar sebesar 2.424.960 (42,42%)³.

Ketatnya dinamika persaingan antara kedua pasang calon dalam memperebutkan suara pemilih muslim dan nuansa politik identitas yang mewarnainya menjadi alasan mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan tentang mengapa politik identitas masih relevan digunakan oleh pemilih muslim dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018, kemudian bagaimana sebenarnya bentuk Politik Identitas yang digunakan oleh pemilih Muslim dalam pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif tipe deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu di dalam masyarakat (Suparlan, 1994). Metode ini digunakan karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian, yang hanya terbatas pada upaya untuk mendeskripsikan mengapa politik identitas masih relevan digunakan dan bagaimana sebenarnya bentuk politik identitas yang digunakan oleh pemilih muslim dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018.

Seluruh data diperoleh dari hasil penelusuran internet (*internet searching*) dan studi kepustakaan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel yang ingin diteliti baik berupa buku, laman berita, dan artikel jurnal maupun *web site*. Media daring menjadi sumber data utama karena lebih mudah diakses, konten yang singkat dan mudah dipahami, serta lebih interaktif karena disertai kolom komentar dari para pembacanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Politik dan Politik Identitas

Konsep politik identitas pada dasarnya berbeda dengan konsep identitas politik, tetapi keduanya mengakar pada konsep yang sama yakni identitas. Secara harfiah, identitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin "*idem*", yang artinya "sama", sedangkan secara konseptual, identitas merujuk pada identitas bersama, termasuk di dalamnya pengakuan atas keberadaan, penerimaan, dan afiliasi terhadap sebuah subjek (Xiaomei, 2014). Baik identitas politik maupun politik identitas sama-sama menempatkan seseorang pada sikap politik tertentu dan keberpihakannya berdasarkan kon-

struksi identitas yang ia miliki, baik secara sosial maupun kultural (Setyaningrum, 2005: 19). Dari dua pandangan ini, dapat ditarik suatu definisi bahwa politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada pemanfaatan kesadaran akan kesamaan identitas tertentu, seperti; warna kulit, jenis kelamin, agama, budaya, pekerjaan, etnis, ras, dan usia.

Politik identitas pada dasarnya memiliki perbedaan dengan politik aliran yang kembali populer di era pasca reformasi. Politik aliran merujuk pada kelompok-kelompok sosio-budaya yang berkembang dari pembelahan kultural masyarakat Jawa ala Geertz (santri, priyayi, dan abangan) dan kemudian menjelma sebagai organisasi politik dengan menganut arah serta posisi ideologis yang sama (Alatas, 2010: 39). Sementara politik identitas cenderung mengedepankan kesamaan identitas terlepas dari adanya implikasi bahwa kesamaan identitas memiliki kesamaan arah dan posisi ideologis. Praktik politik aliran pada Pemilu 2009 menyebabkan kontestasi yang tajam antara partai-partai nasionalis dengan partai Islam.

Politik identitas seyogyanya merupakan strategi dalam politik, yang apabila dipraktikkan dapat berarti baik atau buruk, tergantung siapa, bagaimana, dan untuk tujuan apa politik ini dimanfaatkan (Setyaningrum, 2005; Appiah, 2006; Ma'arif, 2012; Xiaomei, 2014). Penggunaan politik identitas sebagai strategi pada dasarnya memiliki tujuan yang fundamental, seperti membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya (Appiah, 2006: 15). Akan tetapi persoalan yang terjadi di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia (dalam Ma'arif, 2012: 45) ini dilakukan oleh kelompok *mainstream*, yaitu kelompok mayoritas, dengan niat "menyingkirkan" kaum minoritas yang dianggapnya "menyimpang" atau "menyeleweng". Terlebih karena proses desentralisasi dan otonomi daerah mendorong penguatan identitas kultural dan sentimen kedaerahan, yang apabila tidak diantisipasi bukan hanya akan menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethnonationalism*, tetapi juga menghilangkan posisi sentral Pancasila sebagai identitas nasional baik langsung maupun tidak langsung (Azyumardi Azra dalam Fikri dan Octario, 2018: 183).

Pada proses pergantian kepemimpinan, politik identitas cenderung dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan kepada calon pemimpin yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik identitas agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, budaya, pekerjaan, ras, dan usia. Dalam praktiknya, politik identitas dihembuskan oleh seorang elit terhadap kelompok mayoritas untuk memperoleh legitimasi dalam setiap tindakan politiknya, sementara di sisi lain digunakan oleh kelompok tersebut untuk menentukan pilihan berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas ter-

³ Rujuk pada tautan berikut: <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/16345571/infografik-peta-kemenangan-pilkada-Sumatra-utara-2018>

tentu (Maarif, 2012; Xiaomei, 2014; Fikri dan Octario, 2018).

Praktik ini menimbulkan reaksi negatif dan penolakan dari kelompok minoritas, terutama dalam proses pergantian kekuasaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara moral praktik politik identitas dalam pergantian kepemimpinan dinilai buruk, karena pemimpin yang terpilih karena praktik politik identitas dianggap seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak berimbang, berat sebelah, memihak pada satu sisi dan memarjinalkan sisi lainnya sehingga berpotensi memunculkan konflik horizontal pada tataran tertentu (Ma'arif, 2012). Terlebih lagi, pemimpin terpilih dikhawatirkan hanyalah sebatas simbol keislaman dan tidak memiliki keunggulan dalam kapasitasnya. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, praktik politik identitas dinilai relevan dan fungsional sehingga hampir setiap orang kini melakukannya. Ini senada dengan pendapat Chandrakirana dalam Haboddin (2012) yang mengatakan bahwa Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi -alat untuk menggalang politik-guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.

Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Fikri dan Octario (2018: 177) bahwa praktik ini menjadi mungkin karena identitas masih dapat digunakan sebagai acuan dan konsolidator demokrasi, itu sebabnya para elit saat ini cenderung membawa isu-isu yang berkaitan dengan identitas dalam politik praktis yang dijalankannya dalam rangka untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Terlebih lagi, politik identitas biasanya tidak lepas dari kampanye negatif dan kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak citra diri lawan politik dan mengalihkan perhatian para pemilih (Ahmad, 2008; Sopian, 2011).

2. Reproduksi Politik Identitas di Media Daring

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa media daring nasional, ditemukan bahwa reproduksi politik identitas yang mempengaruhi kecenderungan afiliasi suara pemilih Muslim dalam pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018 terbagi atas tiga tipologi, diantaranya: 1) pembenturan antara Islam dengan "kafir" (penganut agama lain), 2) membangkitkan kembali sentimen pribumi dan non pribumi, serta 3) reproduksi politik identitas melalui kampanye negatif dan kampanye hitam. Tiga tipologi ini diperoleh dari hasil penelusuran internet (internet searching) terhadap 38 laman berita yang menampilkan informasi terkait Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018. Berikut ini merupakan penjabarannya.

Tabel 3. Reproduksi Politik Identitas dalam Media Daring dengan kata kunci "Politik Identitas Pilgub Sumatera Utara Tahun 2018"

No	Tipologi	f	%
1	Pembenturan Identitas antara Islam dengan Penganut agama lain	15	39,5
2	Membangkitkan sentimen Pribumi dengan Non pribumi	12	31,6
3	Reproduksi politik identitas melalui kampanye negatif dan kampanye hitam	7	18,4
4	Lain-lain	4	10,5
Jumlah		38	100

Sumber: *Data primer*

Data di atas menunjukkan bahwa reproduksi politik identitas dalam kampanye politik lebih sering muncul dalam bentuk pembenturan kelompok identitas antara Islam dengan penganut agama lain, serta dengan membangkitkan sentimen pribumi dengan non pribumi. Kedua tipologi ini memperlihatkan adanya suatu pola pendulangan suara yang memanfaatkan kontestasi antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas, baik antara umat Islam (66,1%) dengan non muslim (33, 9%) maupun antara kelompok pribumi (89,4%) dengan non pribumi (10,6%). Oleh karenanya, identitas etnis dan agama kedua pasang calon seolah lebih diutamakan dibanding kapasitas, kapabilitas, prestasi, dan rekam jejak mereka.

3. Identitas Agama: Islam dengan "Kafir"

Isu agama merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara. Sejak awal diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah, isu ini selalu muncul ke permukaan dan direproduksi dalam beragam bentuk dan rupa.

Pada pemilihan kepala daerah beberapa periode sebelumnya, isu agama sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh para pendukung masing-masing kandidat, hanya saja intensitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada pemilihan sebelumnya setiap pasangan calon pemimpin terdiri atas komposisi Muslim dan Non Muslim. Selama model "pelangi" ini diterapkan, tensi politik memang memanas tetapi tidak sampai mengganggu kerukunan dalam relasi antarumat beragama di Sumatra Utara. Akan tetapi pada pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018, isu identitas agama kembali direproduksi sebagai bagian dari strategi politik. Isu ini bahkan dianggap sebagai perluasan dari gerakan 411 dan 212 pasca insiden Al-Maidah 51 oleh Ahok, yang juga dikaitkan dengan euforia kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 sebagai isu sentral⁴.

Insiden Al-Maidah 51 dan gejolak sosial yang mewarnainya merubah banyak hal di Sumatra

⁴ Rujuk pada tauran berikut:

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789>

Utara, dimana kelompok etnis yang dahulunya satu oleh sistem kekerabatan mulai terpecah-pecah karena isu agama. Kondisi ini mengakibatkan kerenggangan ikatan antara Siregar Islam dengan Siregar Kristen, Saragih Islam dengan Saragih Kristen, Tarigan Islam dengan Tarigan Kristen dan sebagainya. Padahal, di masa lalu masyarakat yang terikat dengan sistem kekerabatan cenderung tidak mempersoalkan perbedaan agama yang dianut. Mereka menjaga kerukunan dalam ikatan kekerabatan (*dalihan na tolu*) bahkan sampai mereka mati, bahkan dalam beberapa situasi mereka lebih marah jika dikatakan “tidak beradat” daripada “tidak beragama” (Angga, 2017: 193).

Kenyataan yang terjadi saat ini justru sangat berbeda dibanding dulu. Kampanye memang tidak lagi dilakukan di tempat ibadah melainkan di ruang publik seperti lapangan dan media sosial (*youtube*, *facebook*, dan sebagainya), tetapi hal itu merubah sesuatu yang sifatnya eksklusif menjadi inklusif dan mempertajam perbedaan pilihan yang dianut masyarakat. Penggunaan isu kafir sebagai bentuk reproduksi politik identitas memisahkan ikatan kekerabatan yang sudah terjalin sejak lama, doktrin-doktrin agama di kedua sisi seolah memaksa orang memilih antara surga dan neraka. Proses pemilihan kepala daerah dianggap sebagai perang simbolis antara kebajikan dan keburukan, sehingga muncul terminologi “*Partai Allah vs Partai Setan*” yang dilontarkan oleh salah satu tokoh nasional Indonesia⁵.

Keterlibatan tokoh agama seperti *ustadz* dan ulama sebagai patron untuk meraih suara dinilai sangat berpengaruh, sebab keberadaan patron menjadi referensi spiritual bagi pemilih Muslim dalam menetapkan pilihannya berdasarkan kesamaan identitas agama. Dalam kasus pemilihan gubernur Sumatra Utara tahun 2018, para ulama merasionalisasikan pemimpin muslim yang peduli pada Islam sebagai figur ideal yang harus dipilih oleh umat Islam. Pendapat ini juga dikuatkan oleh penelitian Marzuki (2019), bahwa *ustadz* dan ulama memiliki kontribusi yang cukup besar dalam kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Para ulama menilai bahwa penistaan yang selama ini terjadi dikarenakan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang tidak peduli pada Islam. Oleh karenanya, para ulama menekankan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin yang peduli dengan Islam^{6,7}. Meski tidak secara spesifik mengarahkan, tetapi pemilih muslim dapat menafsirkan bahwa orang-orang yang dikatakan peduli dengan Islam adalah pasangan Edy

Rahmayadi dan Musa Rajekshah, yang berlatar belakang Islam-Islam, berasal dari partai yang didukung oleh para ulama, dan bersedia menandatangani pakta integritas dengan para ulama⁸.

Sebutlah *Ustadz Abdul Somad*, yang meski tidak menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon secara spesifik, dalam potongan video ceramahnya menganjurkan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin Muslim sebagai aturan yang bersumber dari Al Qur'an. Ia menganalogikan pasangan Calon Gubernur dan Gubernur sebagai gulai⁹, dimana gulai yang boleh dimakan adalah gulai “kentang dengan daging yang halal” sementara gulai yang tidak boleh dimakan adalah “kentang dengan daging yang tidak halal”¹⁰.

Ceramah ini oleh sebagian besar umat Islam ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa pemimpin ideal adalah pemimpin yang beragama Islam, baik kepala daerah maupun wakilnya. Kemudian, beredar juga pesan *Ustadz Adi Hidayat*, yang menyampaikan bahwa pemilih Muslim boleh saja sepakat tidak memilih, sebab itu merupakan hak azasi seseorang dalam demokrasi. Tetapi persoalannya ketika orang Muslim tidak memilih, orang liberal memilih, orang sekuler memilih, lesbi ikut memilih, homoseksual memilih. Ketika suara mereka banyak, mereka yang memegang kekuasaan”¹¹.

4. Identitas Pribumi vs Non Pribumi

Di Sumatra Utara, proses pemilihan Kepala Daerah tidak dapat sepenuhnya lepas dari isu kedaerahan, khususnya dalam terminologi identitas pribumi dan non pribumi (Burhan dan Sany, 2013; Faraidiany, 2016). Setiap kali pemilihan diadakan, wacana pribumi dan non pribumi selalu menjadi ukuran layak atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin di Sumatra Utara, bahwa konsep pemimpin ideal direproduksi sebagai sosok keturunan pribumi yang menunjukkan keberpihakannya pada kaum pribumi melalui sikap politiknya (Muda, 2013; 142). Kecenderungan ini yang akhirnya membuat Sofyan Tan, seorang tokoh masyarakat Tionghoa, mengurungkan niatnya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara tahun 2018¹².

Lebih lanjut, Edy Rahmayadi adalah figur seorang keturunan Melayu dan Jawa kelahiran Aceh, selain itu ia pernah menduduki posisi strategis di Sumatra Utara selama karir mili-

⁵ Rujuk pada tautan berikut: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>

⁶ Lihat videonya pada tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=OQSPdAFhbUE>

⁷ Lihat videonya pada tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=C9GsxITd0ZE>

⁸ Rujuk beritanya pada tautan berikut: https://kumparan.com/gun_gun-gunadi/gnpf-ulama-sumut-komitmen-dukung-eramas-1522137746209

⁹ Jenis makanan khas Melayu dengan kuah santan berwarna kuning

¹⁰ Lihat videonya pada tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=2BI0TF24hq0>

¹¹ Lihat videonya pada tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=X47clB9AKKw>

¹² Rujuk pada tautan: <https://www.rmol.co/read/2016/04/03/241823/Maju-Di-Pilkada-Sumut,-Sofyan-Tan-Pasti-Punya-Hitung-hitungan->

ternyata. Latar belakang sebagai prajurit militer menghadirkan citra bahwa ia memiliki rasa nasionalisme yang tidak dapat diragukan. Sebenarnya jika dilihat dari tempat kelahiran, ia adalah seorang “pendatang”. Tetapi karena ia keturunan Melayu, nasionalis, dan juga menunjukkan sikap keberpihakan politik pada pribumi, ia pun dianggap oleh pemilih Muslim sebagai pribumi dan putra daerah¹³.

Sementara itu, Djarot adalah keturunan Jawa asli, seorang politisi yang dianggap memiliki cukup pengalaman untuk menjalankan pemerintahan di tingkat provinsi. Kolaborasinya dengan Ahok selama memerintah DKI Jakarta dianggap berhasil oleh sebagian kalangan, akan tetapi ia bukan orang asli Sumatra Utara dan kerap dilabeli sebagai “pendatang” sehingga menyulitkan langkahnya untuk meraih suara di beberapa kabupaten kota¹⁴. Terlebih lagi, polemik Reklamasi Teluk Jakarta membuat ia dikaitkan oleh sebagian pemilih Muslim sebagai bagian dari kelompok 3A, yakni Asing, Aseng, dan Antek¹⁵.

Sejak dahulu, terminologi pribumi dan non pribumi memang masih menjadi isu yang sensitif di Sumatra Utara, apalagi jika isu tersebut kerap dikaitkan dengan eksistensi warga keturunan Tionghoa¹⁶. Warga keturunan Tionghoa di Sumatra Utara dinilai sebagai komunitas yang eksklusif, segregatif, tidak loyal terhadap NKRI, jaringan sosial yang sangat tertutup, dan selalu memandang rendah kaum pribumi khususnya umat Islam bahkan hingga kini (Faraidiany, 2015; Harahap dan Abdurrahman, 2014). Beberapa kali muncul gejolak dalam relasi mereka baik dalam skala kecil (konflik dalam kehidupan sehari-hari) maupun yang berskala besar seperti di tahun 1965 dan 1998. Kasus terakhir adalah miskomunikasi terkait protes *adzan* yang berujung pada insiden pembakaran vihara karena meledaknya amarah warga di Tanjungbalai (Susanto, 2018).

Para pemilih Muslim di Sumatra Utara memahami bahwa etnis Tionghoa menguasai sektor perekonomian di berbagai bidang, sektor yang cukup vital dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari sini. Di satu sisi keunggulan ini menciptakan *privilege* tersendiri yang menguntungkan bagi etnis Tionghoa, namun di sisi lain ini juga menciptakan kecemburuan sosial dan prasangka bagi kelompok etnis lain (Putra, 2010).

Pendapat ini dibuktikan dengan hasil penelitian Burhan (2013: 30), yang menunjukkan

bahwa keberadaan etnis Tionghoa kerap dianggap sebagai ancaman bagi etnis pribumi, baik itu ancaman yang bersifat simbolik (ancaman terhadap nilai-nilai, moral, budaya) maupun yang bersifat realistik (ancaman terhadap kesejahteraan hidup, seperti; kekuatan politik, ekonomi, dan sumber daya). Padahal di daerah lain seperti di Solo, relasi antara etnis Tionghoa dengan etnis lain berjalan lebih mulus dan integrasi sosial terwujud dalam berbagai aspek (Purbasari dan Suharno, 2019).

Insiden “Al Maidah 51” oleh mantan Gubernur Ahok beberapa tahun silam menjadi pintu masuk pemanfaatan sentimen pribumi versus non pribumi dalam pemilihan Gubernur serentak tahun 2018 (Sutisna dan Akbar, 2018). Pernyataan tersebut dilihat sebagai pernyataan simbolik oleh Ahok yang beretnis Tionghoa dan dianggap sebagai bentuk dominasi minoritas non pribumi terhadap kelompok pribumi yang mayoritas beragama Islam. Serangkaian isu ini menjadi medium yang tepat untuk mematahkan strategi politik Djarot-Sihar dalam meraih suara pemilih Muslim di Sumatra Utara. Sebab selain karena Djarot adalah mantan rekan kerja Ahok, ia juga diusung oleh partai yang dianggap tidak pernah memihak umat Islam. Sementara di sisi lain, wakilnya pun bukan berasal dari kalangan umat Islam.

Beberapa hal yang sudah disebutkan di atas menjadi referensi yang kuat bagi elit untuk membangun rasionalitas agar umat Islam tidak memilih pemimpin yang bukan Islam serta pemimpin yang tidak berpihak pada pribumi. Sebab ketika pemimpin seperti itu terpilih, kebijakan yang akan diambil dikhawatirkan tidak akan pernah berpihak kepada umat Islam seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Manado, serta daerah-daerah lain yang muncul di berbagai media karena mendiskreditkan agama Islam dan umat muslim.

Pengalaman yang terjadi di daerah lain menciptakan rasa tidak percaya pemilih Muslim di Sumatra Utara terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak *fair*. Selain itu, perasaan tersebut juga muncul terhadap kepemimpinan yang dianggap mengancam nilai-nilai keislaman karena pengaruh dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, seperti; pembatasan *adzan*, dukungan terhadap LGBT, dukungan terhadap ideologi komunis, pembiaran atas kasus penistaan agama, identifikasi Islam sebagai ideologi radikal, dan sebagainya.

5. Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif

Pemilihan Calon Gubernur di Sumatra Utara tahun 2018 silam juga diwarnai dengan serangkaian kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif ini oleh Ahmad (2008: 2) dimaknai sebagai informasi yang benar tetapi sifatnya negatif terkait dengan identitas kandidat (bisa dugaan korupsi, karakter, sejarah masa lalu, keluarga dsb) yang didasarkan pada fakta,

¹³ Rujuk pada tautan berikut: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789>

¹⁴ Rujuk pada tautan berikut: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493569>

¹⁵ Asing merujuk pada negara lain, Aseng merujuk pada WNI keturunan Cina, dan Antek Merujuk pada orang-orang “pribumi” yang bekerja atau dimanfaatkan oleh Asing dan Aseng untuk kepentingan tertentu.

¹⁶ Rujuk pada tautan berikut: <https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp>

sementara kampanye hitam tidak didasarkan atas data dan fakta (*hoax*). Kedua jenis kampanye ini biasanya dilakukan oleh elit tertentu untuk mengesankan citra diri yang baik dengan cara menciptakan citra buruk kepada lawannya. Pada praktik ini, peran media menjadi sangat penting khususnya dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada para konstituen atau pemilih.

Kedua kandidat mengakui bahwa mereka menjadi korban kampanye hitam dan kampanye negatif pada Pilkada Sumatra Utara tahun 2018. Edy Rahmayadi misalnya, ia diisukan terkena serangan stroke sehingga tidak mampu melanjutkan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatra Utara, padahal kenyataannya ia sedang melaksanakan Umroh¹⁷. Dari beberapa media yang ditelusuri tidak diketahui pasti siapa yang pertama kali menyebarkan, tetapi isu ini bertujuan untuk mengarahkan para pemilih untuk tidak memilih pemimpin yang sakit. Isu lain yang berkembang adalah pembaptisan Edy Rahmayadi oleh pendeta Kristen¹⁸ dan isu tentang dugaan kedekatannya dengan Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria¹⁹.

Di lain pihak, Djarot juga mengaku mengalami hal yang sama. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa ada tuduhan pemilihan Gubernur hanya batu loncatan untuk menduduki posisi Menteri di pemerintahan yang sekarang²⁰. Secara otomatis, ini akan menghantarkan Sihar Sitorus menjadi Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Djarot nantinya²¹. Berdasarkan pengalaman polemik yang muncul akibat kepemimpinan Ahok di Jakarta, para pemilih muslim di Sumatra Utara cenderung bersikap tegas dan tidak menginginkan polemik yang sama kembali terulang.

Meski sejak awal program-program yang diutarakan oleh Djarot-Sihar dinilai cukup populis dan memiliki nilai jual tinggi untuk mendongkrak elektabilitas, pengalaman terdahulu membuat pemilih Muslim seolah tidak lagi melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting. Lebih jauh, Djarot juga sempat ditimpa isu miring tentang praktik politik uang yang ia lakukan di sela agenda kampanye²². Selain itu, isu politik uang juga kian

menguat dengan digagalkannya dugaan serangan fajar melalui pembagian sembako oleh mantan Gubernur Syamsul Arifin di Kota Medan²³.

Tidak hanya calon Gubernur, isu miring juga menimpa kedua calon Wakil Gubernur. Untuk Ijeck misalnya, ia diisukan tersangkut dugaan kasus alih lahan yang dilakukan oleh perusahaan keluarga (PT. ALAM) di masa lalu²⁴. Sementara untuk Sihar sendiri, kasus alih fungsi lahan Register 40 dari hutan lindung menjadi lahan perkebunan menjadi batu sandungan yang sangat menyulitkan baginya²⁵.

Lebih lanjut, informasi dalam kampanye hitam maupun kampanye negatif pada dasarnya sangat mempengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih kandidat mana yang mereka percayai sebagai pemimpin (Ahmad, 2008: 3). Akan tetapi, baik kampanye hitam maupun kampanye negatif hanya berhasil pada tokoh yang tidak dikenal baik oleh masyarakatnya. Selain itu, bentuk kampanye ini juga hanya berpengaruh pada *swing voter*. Jika masyarakat mengenal baik sosok dari tokoh tersebut, kampanye hitam dan kampanye negatif justru hanya akan menimbulkan rasa simpati dan semakin menguatkan karakter tokoh tersebut di mata pemilihnya (Sopian, 2011: 93).

D. KESIMPULAN

Dilihat sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu, politik identitas masih relevan diterapkan di Indonesia. Mengingat dalam demokrasi nasib suatu bangsa ditentukan oleh suara terbanyak, maka sudah sewajarnya kepentingan orang banyak harus lebih diutamakan untuk membangun bangsa dengan latar budaya yang lebih kuat. Tetapi jika dilihat dari perspektif berbeda, praktik politik identitas sebaiknya dihindari karena dianggap dapat mengancam pluralisme dan demokrasi yang multikultur di Indonesia.

Bagi pemilih Muslim, politik identitas masih relevan digunakan dalam Pemilihan Umum, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pilihan yang dianggap rasional adalah memilih orang yang sama latar belakang identitasnya, yakni putra daerah dan beragama Islam. Mereka melihat bahwa beberapa tahun terakhir kepemimpinan yang sedang berjalan tidak memihak pada umat Islam sebagai kelompok mayoritas sehingga memilih pemimpin yang seagama

¹⁷ Rujuk pada tautan berikut: <https://www.antaranews.com/berita/716597/edy-rahmayadi-mengaku-sering-mendapat-fitnah>

¹⁸ Rujuk pada tautan berikut: <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/05/2018/pendeta-bantah-baptis-edy-rahmayadi/>

¹⁹ Rujuk pada tautan berikut: <http://jateng.tribunnews.com/2018/12/06/edy-rahmayadi-bantah-punya-hubungan-dekat-dengan-ratu-tisha-kasihannya-dia-dia-yang-rugi?page=3>

²⁰ Rujuk pada tautan berikut: <https://regional.kompas.com/read/2018/04/12/08084891/djarot-kepada-yang-memfitnah-saya-berdoa-ampuni-mereka-tuhan>

²¹ Rujuk pada tautan berikut: <https://pilkada.tempo.co/read/1083350/djarot-saiful-hidayat-minta-dai-beri-pendidikan-politik-ke-umat/full&view=ok>

²² Rujuk pada tautan berikut: <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3502727/kuasa-hukum-djarot-saiful-hidayat-tuduhan-politik-uang-fitnah>

²³ Rujuk pada tautan berikut: <http://medan.tribunnews.com/2018/06/26/ini-klarifikasi-syamsul-arifin-soal-rencana-bagi-bagi-sembako-di-jalan-puri?page=2>

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207204711-12-367345/kasus-lahan-wagub-ijeck-klaim-sudah-lama-tinggalkan-pt-alam>

²⁵ Rujuk pada tautan berikut: <http://waspadamedan.com/index.php/2018/05/10/keluarga-dl-sitorus-harus-segera-serahkan-lahan-register-40-ke-pemerintah/>

menjadi sangat penting. Tentunya apa yang dikemukakan oleh Caplan (2008) bahwa pemilihan umum yang ditentukan oleh pemilih atas dasar rasionalitas adalah sebuah mitos sedikit terbantahkan oleh kasus yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018, dimana politik identitas justru direproduksi berdasarkan rasionalitas yang dibangun untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Sementara itu, bentuk politik identitas dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dilakukan dengan cara membenturkan antara umat Islam dengan penganut agama lain, membangkitkan kembali sentimen pribumi dan non pribumi, penyebaran kampanye negatif dan kampanye hitam, serta pemanfaatan patronisme dalam agama Islam.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan atas kesempatan yang telah diberikan, baik dalam bentuk pemberian Tugas Belajar maupun pembiayaan selama masa studi melalui jalur beasiswa Kerjasama Dirjen Kebudayaan dengan FIB UGM, sehingga penulis dapat menimba ilmu di kampus yang diimpikan sejak dulu. Tak lupa penulis sampaikan pula kepada pimpinan, Ibu Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP atas segala dukungan dan rekomendasi yang telah diberikan. Terkhusus kepada Prof. Dr. Irwan Abdullah, terimakasih atas motivasi, inspirasi, bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan. Kiranya tulisan ini merupakan yang pertama dan menjadi titik tolak bagi penulis untuk memulai tulisan-tulisan lain yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Semoga ilmu yang diajarkan dapat menjadi amal jariyah bagi beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nyarwi. (2008). *Kampanye Negatif dalam Pilkada: Kajian Bulanan No.11 Maret 2008*. Jakarta: PT. Lingkaran Survey Indonesia.
- Alatas, Salim. (2010). *Politik Aliran dalam Pemilu 2009 (Studi atas Political Marketing Partai Keadilan Sejahtera)*. Jurnal Kom dan Realitas Sosial. 1 (1): 37-48.
- Angga. (2017). *Rukun Sampai Mati: Dalihan na Tolu sebagai Wadah Relasi Antar Umat Beragama yang Toleran*. Prosiding Seminar Nasional, 17-20 Juli 2019 dengan tema "Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia: Perspektif Sejarah dan Budaya". Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY.
- Appiah, Kwame Anthony (2006), *The Politics of Identity, Daedalus*, 135 (4): 15-22.
- Burhan, O. K., & Sani, J. (2013). *Prasangka Terhadap Etnis Tionghoa di Kota Medan: Peran Identitas Nasional dan Persepsi Ancaman*. Jurnal Psikologia. 8 (1): 25-33.
- Caplan, Bryan. (2008). *The Myth of the Rational Voter Why Democracies Choose Bad Policies - New Edition*. New Jersey: Princeton University Press.
- Faraidiany, Maghfira. (2016). *Politik Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jurnal Politeia. 8 (2): 74-82.
- Fikri, M. Sirajudin & Oktario, Nico A. (2018). *Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal)*. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. 18 (2): 172-185.
- Haboddin, Muhtar. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan. 3 (1): 116-134.
- Harahap, Abdi Syahrial dan Abdurrahman, Syed. (2014). *Etnik Tionghoa di Bandaraya Medan: Kajian Tentang Pandangan Mereka Terhadap Agama Islam*. Jurnal Analytica Islamica. 3 (1): 134-151.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi*. Jakarta.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Marzuki. 2019. *Kontribusi Ulama dalam Pemenangan Pasangan Edy Rahmayadi–Musa Rajekshah Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan*. Tesis (Tidak Diterbitkan). Medan: UIN Sumatera Utara.
- Muda, Indra. 2013. *Potensi Konflik Horizontal di Kota Medan*. Jurnal Perspektif. 6 (2): 138-144.
- Purbasari, Verbena Ayuningsih dan Suharno. (2019). *Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. 21 (1): 1-9.
- Purnaweni, Hartuti. 2004. *Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa*. Jurnal Administrasi Publik. 3, (2): 118-131.

- Putra, Dharma Kelana. (2010). *Potensi Konflik Komunitas Jawa Muslim Terhadap Etnis Berbeda dan Penganut Agama Lain di Kota Medan Tahun 2010*. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sopian. (2011). *Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suparlan, Parsudi. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Susanto, Agus. (2018). *Pola Komunikasi Masyarakat Muslim Melayu dan Tionghoa (Studi Terhadap Penyelesaian Konflik di Kota Tanjungbalai)*. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman. 6 (1): 2-27.
- Sutisna, Agus & Akbar, Idil. (2018). *Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2018*. Politik. 15 (2): 161-178.
- Xiaomei, Zhan. (2014). *Political Identity: A Perspective from Cultural Identity*. Journal Social Sciences in China. 35 (2): 155-173.



SOCIAL NETWORK ANALYSIS IN THE COASTAL AREA IMPROVEMENT INITIATION PROGRAM

Ayu Novelisa^{1*}

¹ Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Science, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 23 August 2019
Review : 29 August 2019
Accepted : 26 November 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Coastal; Social Relation; Actor; Program Response

CORRESPONDENCE

*E-mail: novelisa.ayu@gmail.com

A B S T R A C T

The research location is in Bungin Village, Pantai Bakti Village, where the issue is related to the conditions of coastal areas and brings up the program initiation. The research method was carried out with qualitative methods through in-depth interviews and participant observant. This thesis shows that in responding to the initiating improvements program in coastal areas, coastal communities are often faced with the social dynamics of the community itself. The response gap of the actors is influenced by social relations namely, 1) relations based on patron-client, 2) relations based on blood relations, and 3) relations based on emotional relationships, and two economic motives, namely 1) economic motives based on personal gain, and 2) economic motives which are based on basic needs. This thesis also enriches the study of the response of the fishing community through the approach of actor and network analysis. This approach is more relevant in looking at the response to the initiation of improving coastal areas through forms of actions, relationships, roles and motives of actors who are part of coastal communities.

A. INTRODUCTION

The characteristics of coastal communities, especially artisanal fishermen, are quite vulnerable to various policies imposed by the government. The issue that is currently being discussed is related to the conditions and problems subject to ecology of coastal areas, where the coastal communities depend their lives on. At the local level, an environmental conservation movement emerges involving various parties to help change. However, the readiness of coastal communities in accepting changes and various interests related to the conservation movement will have an impact on the dynamic response and management of coastal areas.

At the community level, the implementation of a program relates to what Rogers (1983) introduced as the diffusion of innovation, the process through which an innovation is communicated to members of the social system through certain channels in a certain period. This theory has been widely used by academics and practitioners in looking at models of most behaviors and trends. Empirically this theory can show that there is a cultural consensus that plays

an important role in the process of diffusion of an innovation (Jagadish & Dwivedi, 2018).

Warren (2016) studied the resource management through the perspective of social capital where leadership roles and public participation are seen in the context of indigenous peoples. Furthermore, this study looked at issues related to the destruction of resources in Bali. Social capital often moves the community to carry out collective action on resource management. Warren also mentioned that several studies related to social capital forget the internal structure of the complexities of a community, and also do not see the interests of actors to benefit from access to these resources. Warren stated that discussions about the leadership and issues of communities that depend on coastal resources often have difficulties in mobilizing and building sustainable management regimes.

Warren and Visser (2016) also conducted a study of the role of local leaders and elites in resource management in Indonesia and their implications in debates on leadership, elite capture and good governance. Their case studies showed an analysis of the roles and positions of local leaders in overcoming critical issues of local resource management. Warren and Visser stated

that the same actors can show different types of agencies in various times and contexts. Collective identity and personal agency can also be a force of proof in the drama of community-based resource management.

Both studies show that the role and social relations of the actors in the research location affect the response to a coastal area improvement initiation program. On the other hand, the role of actors is also influenced by the complexity of livelihood patterns and trust in the actors that play a role. Matera's study (2016) showed that artisanal fishermen diversified their livelihood patterns and had distrust of local government in response to resource management programs in Providencia and Santa Catalina, Colombia. In this study, it was stated that understanding the complexity of social systems can help design good management strategies, including in building trust in local government in the program management. The thing that needs to be seen as well, according to Matera (2016) the possibility of distrust of the local government that is more than just a connection with fishing activities.

This study tries to provide an understanding of the condition of coastal communities in responding to the initiation program for the improvement of coastal areas with an actor approach. Daouda & Bryant (2016) shows that the relationship between actors at the local level becomes the basis in seeing the importance or not the importance of an innovation and whether or not the relationship has an effect on an innovation. To that end, an anthropological approach by looking at changes from the actor's perspective or in this theory focusing on early adopters can show the causes of the implementation gap of innovation. The actors' approach explains the forms of change from the actual conditions in coastal areas. Starting from a coastal area improvement program in Pantai Bakti Village, in Kampung Bungin to be exact, this study describe the actual conditions regarding the response to regional improvement programs through the actor approach.

B. METHOD

This study was a qualitative study using ethnographic methods through "participant observant", which is to understand the community through "immerse", by approaching themselves to their culture and following the process individually and psychologically (Wax & Wax, 1980). Data collected and analyzed were data related to the response of coastal communities to programs to improve coastal areas.

Analysis of the data obtained in the field also used social network analysis methods. Social network maps can bring out and identify individuals who are considered the most important in

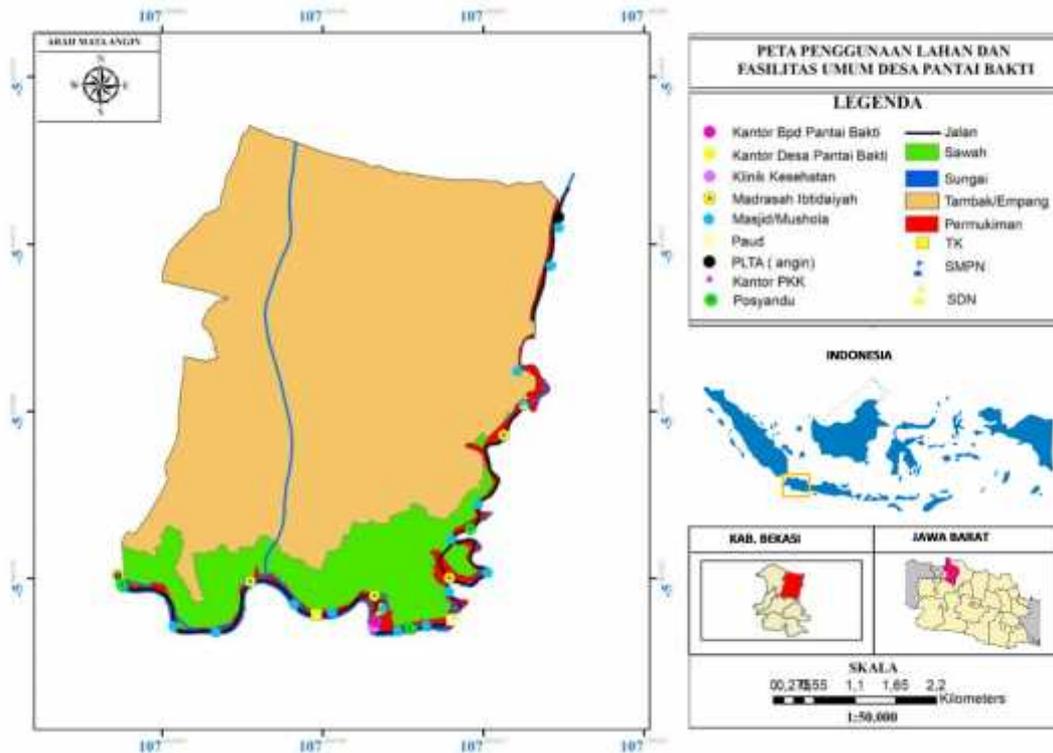
the social network through an understanding of the role of individuals in the social network (Prell, 2012). Analysis of social networks in this study referred to the degree of centrality as stated by Scott (2011) that is related to the concept of sociometry to identify individuals who act as "star" occupying a central position in social networks. I conducted an assessment of the degree of centrality category in this study based on observations and findings of field data. In this case, the assessment was based on the interpretation of the researcher in looking at the roles and relations of the actors related to the response to program initiation.

I did the fieldwork process for the initial or preliminary data collection in October 2016. I started this process by staying with the community from October to December 2016. During 2017 and 2018, I focused on this research and began to find actors who played a role in life in Pantai Bakti Village. I visited Kampung Bungin for 2-3 days every month to keep up-to-date information and maintain good relations with the actors. I obtained data about the process of implementing coastal area improvement programs every time I visited or communicated via tele-phone. In 2019, I began to stay again for 1 month in Kampung Bungin to enrich and reinforce the data previously obtained.

The data in this study were collected and the categorization of the results of the field notes obtained was carried out. Sources from the literature and related documents also collected to get an overview between the relations of local problems and the conditions of coastal communities. The entire data were analyzed by referring to the conceptual framework that had been written before to direct the focus of the research.

C. RESULT AND DISCUSSION

Kampung Bungin is within the administrative area of Pantai Bakti Village, located in the northernmost region of Bekasi Regency, West Java Province. The area of Pantai Bakti Village is 3,442 Ha, divided into 3 sub-villages with 6 Hamlets (RW) and 19 Neighborhoods (RT). Sub-Village 1 includes the area called Kampung Kedung Bokor, Kedung Cinde, and Jogol. Sub-Village 2 starts from Kampung Bendungan and Kampung Biyombong. Sub-Village 3 is Jogol, Selokan Mati, and Kampung Bungin. According to the community, there is no clear boundary regarding the division of territory based on these local terms. For example for Kampung Bungin and Jogol, at least RT 01 area to part of RT 03 is Kampung Bungin, while most of the RT 03 area is mostly known as Jogol region.



Source : Village Government Documentation and Processed by Author
 Fig. 1. Map of Location of Pantai Bakti Village

1. Abrasion and Change of Population Settlement

Pantai Bakti village has a coastal area located in Kampung Bungin. The atmosphere in Kampung Bungin until around the early 1990s was a crowded area. Lots of lodgings, people who trade, fish auctions, and other fishermen stop at the estuary which now have undergone abrasion. The crowded location at the estuary was also followed by “dombret”, a nightly entertainment featuring dangdut music and female singers. The existence of dombret was troubling the wives in Kampung Bungin. The jealousy made wives march and drove away the existence of dombret in the estuary in 1998. Since dombret no longer exists, crowds have diminished in the estuary, because entertainment for the fishermen who return or stop after fishing has disappeared.

Abrasion causes a real physical change for the people of Kampung Bungin. As far as 2 km from the highest limit of sea water, currently the land area has been lost due to abrasion. This condition leads to disappearance of houses and ponds by the sea. According to Mak Tin and Kori, one of the married couples who live in muara, every year when the east wind, about 25-30 meters of land from the highest tide of sea water is lost.

After 2010, many changes took place in Muara Bungin. During this period, there were no more auction activities in Muara Bungin. Fish auctions was closed, dombret was stopped, and the surrounding stalls also closed. This condition is exacerbated by abrasion which continues to expand from year to year. Some residents’ buildings have been victims of abrasion. Some of them began to move from the end of the estuary, towards the land. The displacement causes the settlement in Kampung Bungin to look denser at present time than before.

2. Coastal Area Improvement Programs

Abrasion occurred in Kampung Bungin led to the emergence of several good programs initiated by outside parties and from the community itself. At least, the programs in Kampung Bungin can be categorized into three major groups. These three programs mostly involve the same actors but with different degrees of centrality. In addition, the three categories of programs are not a stand-alone program, but consist of several activities in it which are eventual or only done once. The three programs are the Bungin Ecotourism program, the mangrove planting social activities, and the construction of abrasion prevention infrastructure.

The Bungin Ecotourism Program began with the Bungin Techno Village activity which was a program of the Community Service Team from the Faculty of Engineering, University of

Indonesia (FTUI). The initiation of this activity is as community empowerment in the development of renewable energy which is transforming wind energy into electricity by making windmills. The activity of developing renewable energy was accompanied by a team of students from FTUI and guided by a lecturer from FTUI. Starting from the development activities, the mangrove planting program emerged as an effort to prevent the abrasion from getting worse. The program then formed a non-formal social environment team consisting of Bahar, Bedu, Rahmat, Kori, and Beni.

The mangrove planting program is a continuation of the spirit of improving the estuary from the community. This mangrove planting program was driven by Bahar, who had been trusted as the neighborhood head, so that he was formally able to invite his people to take part. This mangrove planting program began after the completion of the construction of the windmill from the Bungin Techno Village activity. Bahar and environmental social groups began to try making mangrove nurseries which could later be synergized with the planned mangrove planting activities coming from outside parties.

Some corporate social responsibility (CSR)¹ activities have also been in Kampung Bungin since 2017 - 2018, such as CSR activities from a joint industry in Jababeka and a mangrove planting program from Pertamina. In addition, there are also several groups of students who participate in activities to plant mangroves in the estuary of Kampung Bungin. Kampung Bungin begins to carry out infrastructure development especially in terms of constructing village roads and sub-village roads with one of the actors who played a significant role was Salam. This construction is done in reference to the Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (The Village Medium Term Development Plan/ RPJMDes)² which has also allocated village funds to improve infrastructure in the village. In addition to road repairs, one of the things included in the allocation of village funds in the RPJMDes is improvement in the estuary area. The RPJMDes states that there are plans for the construction of sheet piles as far as 2 Km in Muara Bungin. The construction of the sheet was started in January 2019 as far as 100 meters by utilizing the remaining village funds in 2018. The development of the village is also felt by the

people of Kampung Bungin as a continuation of their efforts to build breakwater independently at the end of 2016.

3. Analysis of Actor Networks in Pantai Bakti Village

Improvement of the coastal area of Pantai Bakti Village in practice focused on the people of Kampung Bungin and was affected by the relations of the actors who pay attention to the conditions of the estuary. The actors involved included Bahar, Bedu, Beni, Rahmat, and Kori. In addition, the social movement to overcome abrasion was also influenced by Mr. Hamid, whose characters to initiate a movement based on coastal areas was more independent and did not depend on the government or special assistance. The actors also related to actors categorized as FTUI Team. Actors from the FTUI Team cannot be personally identified because members in the team often experience changes, so that the relations and roles of actors in this presentation are within the scope of actors under the identity of FTUI Team. And finally, other actors who play roles are actors from government groups, such as Suwarta, Salam, and Jiman.

The four network models in Figure 2 illustrate the relationship between actors in terms of sentiments or related emotions, interests, formal influences, and informal influences. Each actor in each type of network has an interest or relation that is different from other actors. Some actors have high levels of sentiment, formal and informal influences, and interests. This is especially evident in Bahar as an actor who got arrows on every type of network. Table 1 shows a detailed summary of the assessment of the social network of actors based on the number of arrows that point to the actor from the network in Figure 2.

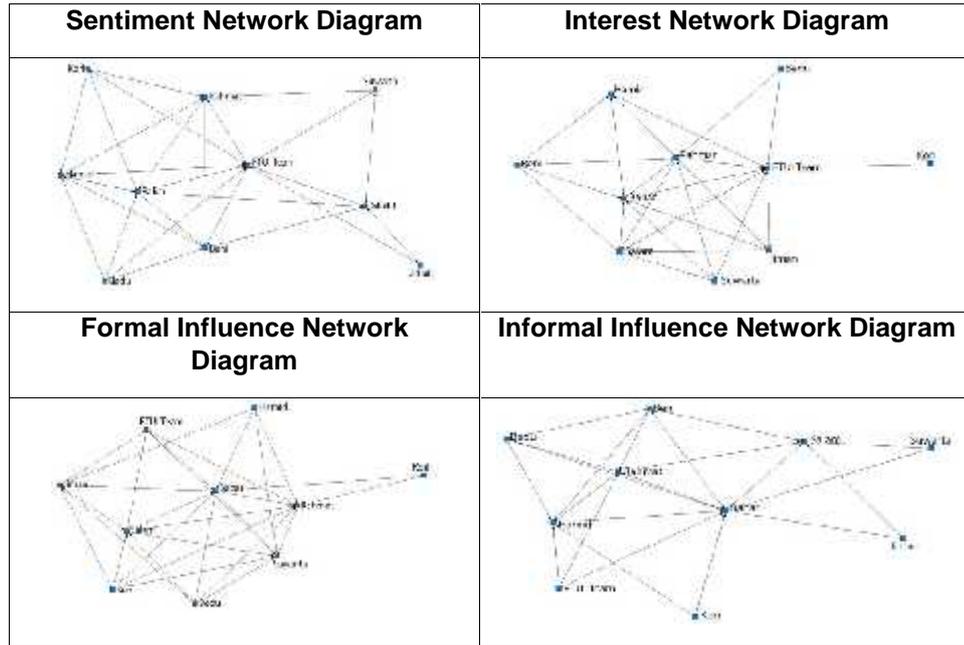
Figure 2 and Table 1 show that each actor had different strengths in each network. Hamid, for example, was quite high in informal influences, but did not appear to be a formal influence where Hamid was indeed not involved in village governance. In addition, the FTUI Team had a greater role in terms of sentiment in the community and the interest towards the implementation of Bungin Techno Village program. Based on the assessment of social networks in the table, it can be seen that the actor who had a considerable role in the coastal area improvement program was Bahar.

The relationships between the actors shown in life in Kampung Bungin also showed a positive relationship. However, the negative relationship actually arose from the actors who are from social environmental groups, such as Bahar, Rahmat, and Suwarta as the headman who served in 2012 to 2017. In addition, a negative relationship was also seen between the FTUI Team and Suwarta because the communication and coordination carried out often did not work

¹ Social responsibility to the surrounding environment carried out by a company in the form of various activities, for example related to environmental improvement, building public facilities, improving the welfare of the community, as well as providing financial assistance for the welfare of the surrounding community.

² RPJMDes is a 6-year development plan, according to the range of powers of a village head for a period of power that contains the vision and mission of the village head and what he/she will do while leading his/her village. Fulfillment of the preparation of RPJMDes in accordance with government regulation in Article 79 of Law No. 6 about Villages in 2014

well with the activities carried out by the FTUI Team.



Source: Collected and analyzed by author
 Fig. 2. Social Network Diagram of Actors in Responding to Coastal Area Improvement Programs in Kampung Bungin

Table 1. Assessment of Social Networks of Actors in Responding to Coastal Area Improvement Programs in Kampung Bungin

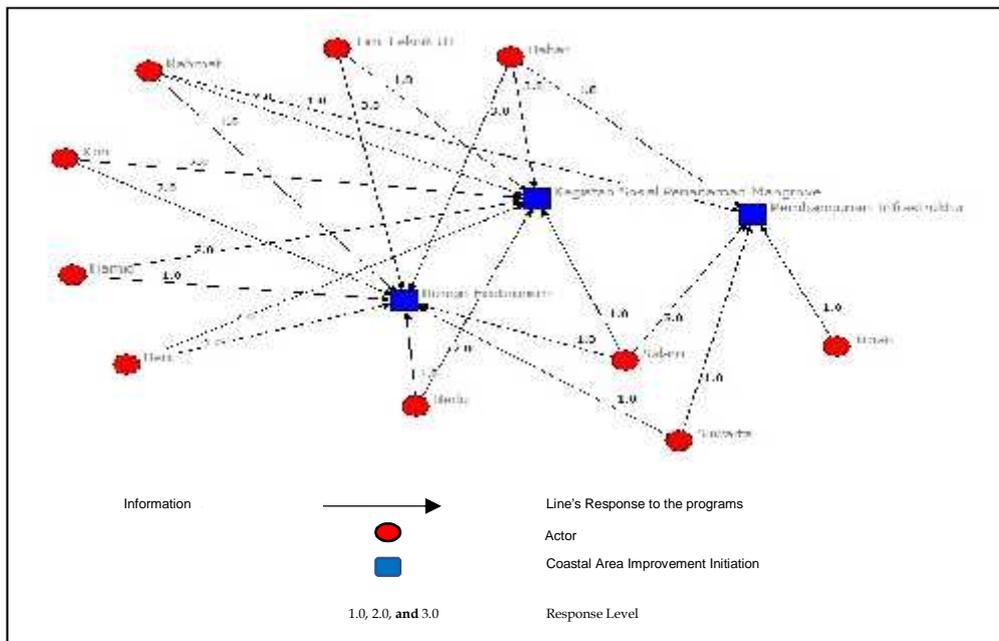
Actors	Sentiment	Formal Influence	Informal Influence	Interests
Bahar	7	7	9	6
Bedu	2	0	0	0
Beni	5	0	3	0
Rahmat	4	7	4	4
Kori	1	0	0	0
Suwarta	3	7	0	3
Jiman	2	6	0	3
Salam	5	6	5	6
Hamid	6	0	6	4
FTUI Team	9	0	0	8

Source: Collected and analyzed by author

4. Response of Actors to the Program

The response to each program is also shown differently by the actors who play a role. The diagram in Figure 3 illustrates the response of actors to the program. The arrow lines in Figure 3 show the direction of the actor's response to the type of program followed by the level of response from the actors. Based on studies conducted in Kampung Bungin, responses from the actors are categorized into three levels, namely levels 1, 2, and 3. The three levels of response are seen based on the involvement and influence of the

actors on the program. Level 1 is a response in the form of giving attention and interest to initiation. Level 2 is a response that shows that involvement is active enough to carry out initiation. Level 3 shows that the response is not only interested and involved, but also influences others about the program being carried out. The number of arrows that lead to program initiation shows the increasing number of actors in Kampung Bungin who have a response to existing programs.



Source: Collected and analyzed by author
 Fig. 3. Response Diagram of Actors to Coastal Area Improvement Initiation Program

Based on these diagrams in Figure 3, activities that many actors respond to are activities in the Bungin Ecotourism program and Mangrove Planting Social Activities. Both programs received many responses because the implementation process involved the community more. Both of these initiatives are different from the initiation of the construction of estuary repair infrastructure which focuses more on the role of government and government policies in carrying out its programs. The person who is most considered to have the idea of always being involved in the program is Bahar.

Ermayanti, et al (2016) in their study stated that the inhibiting factors of community participation in a program can be influenced by limited funds, the level of community awareness, poor understanding of the community, and busyness of the community. Zamzami (2017) also reinforced the need for an understanding of a program to strengthen groups so as not to profit only. Based on this literature, I found that for Kampung Bungin fishermen in general, the attention to improving estuary is not a matter of too much concern. Fishermen often respond with complaints but not followed by awareness to participate in the initiation of improvements to the coastal area. Fishermen are more passive in these social activities, even though they experience difficulties when they go home to sea when the estuary is aground and it could make them have to spend the night on the boat.

The response gap of the actors is also influenced by the relations and motives of each actor. The social relations which mainly affect the actors with livelihoods as fishermen are patron-client relationships that appear in the relationship between *pelele* and fishermen. Several studies of patron-clients in coastal

communities have been carried out and show that bond debt with patrons is something that cannot be separated from the lives of fishermen. Atmadjaja (2017) mentioned that there are three patterns of relationships found from the results of the study, namely: 1) very close and profitable relations, 2) relationships that are not only in the form of money, but are like brothers or family, and 3) relations can be broken and moved to another patron if the loan the initial patron was paid off. This patron-client relationship is also the reason for being able to carry out social strategies by owing to patrons (Widodo, 2009) when experiencing economic problems, so the debt becomes a bond between them (Muhartono & Nurlaili, 2018).

Bahar as an actor who played a lot of roles in the three programs in Kampung Bungin, showed that his social relations with *pelele* were important because it was related to the sustainability of his fishing activities. Likewise with fishermen in general, they can actually be more indifferent to respond to programs to initiate improvements in coastal areas. Fishermen in Kampung Bungin maintain a good relationship with patrons/*pelele*. Broken working relations will affect the social life of the community.

Analysis of the program response to initiation of estuary improvement in Kampung Bungin also shows the influence of emotional interactions between actors (Bericat, 2016) in their social life. Assistance made and actions to improve estuary refer to respectful relationships and feelings of wanting to help influential actors. One of them is the reluctance that arises towards Bahar that is stronger than the feelings of other actors to want to be involved spontaneously in the estuary improvement activities.

The gap in response to the initiation program for improving coastal areas in Kampung Bungin was also influenced by two kinds of economic motives from the Kampung Bungin community. First was economic motives based on the need for personal gain and another motive was economic motives which are based on basic needs. Both of these motives certainly influenced the way the actors responded to the program's initiation and sustainability.

Matera (2016) mentions that programs introduced by the government are often unsuccessful due to the lack of local trust in the running of the program. In his study the reasons for this distrust have not yet been explained. However, reading the conditions in Kampung Bungin community illustrates that distrust of the local government can be caused by concerns related to honesty in finance. In addition, distrust arises due to negative stereotypes about leaders who seem to only be concerned with personal gain.

Other economic motives that also affect the actors are economic motives that are based on basic needs. For actors who depend their lives from fishing, such as Bahar and Rahmat, the interest in finding fish sometimes has to shift their activities related to improving the estuary. The estuary improvement activities require considerable time and attention. However, the daily needs of households may not be covered from the estuary improvement activities. Sometimes, these activities will incur their own costs for just being suave. By the pressures of economic needs, the actors become more realistic about the results in the form of money. The economic conditions of each of these actors play the role of shifting their ecological awareness.

5. Theoretical Implications of the Study Results

Kee (2017) states that the previous innovation diffusion study approach is mostly done with a survey methodology approach where the data is only obtained from the adopters and focus on one innovation in a span of time, then the traditional innovation diffusion study method needs to be improved. One approach that can be developed is to conduct a study of diffusion through a qualitative approach so that it can provide an explanation based on empirical studies that occur and can open new research directions in diffusion studies in the 21st century (Kee, 2017).

In addition, this theory was also developed to see the diffusion of innovation towards the development of scientific communication networks (Zhang & Vorobeychik, 2019). Some other studies also show that the process of social learning can influence the diffusion of information and increase the ability of adopters or actors. However, the communication approach needs to look more at a qualitative perspective with actors

and social networks as an analysis of the changes that occur.

Through this study, the actor approach and social network analysis indicate that there are dynamic social conditions that occur that affect the response to the program. Analysis of social networks shows that there are actors who have roles outside, rather than their functions in the structure of society. For example, Bahar as adopter became an actor in Kampung Bungin who was able to formally and informally influence the community. Through Bahar's perspective as an actor, there are other perspectives that need to be considered when looking at changes in a society. Based on the analysis of social networks, the romanticism of the condition of the community that emerges with a structure-function approach becomes invisible. The dynamics and roles of actors in the context of complex coastal communities look even stronger. The Kampung Bungin with a variety of regional improvement initiatives shows the actual conditions through the actor's approach and the analysis of social networks formed between these actors. The response to a program and analysis of the forms of actions, relations, roles and motives of actors can explain the dynamics of the conditions in Kampung Bungin.

This also implies that change is a necessity and has no limitations, especially in heterogeneous communities. When looking through the eyes of romanticism, the actor's role cannot be specifically seen when the program is running. For this reason, the actor's approach helps to see deeper changes by making an interpretive approach to the role and involvement of actors in the community, so that the changes that occur can be explained more concretely. In addition, the initiation of improving coastal areas also shows the form of interaction between actors in each problem that exists not at the level of the social layer that is artisanal, official, and strict; so that the analysis of responses to initiation is more appropriate when taking an approach to actors and analyzing social networks that occur between actors and actors, then between actors and programs. This approach then provides an understanding of how the process of diffusion of innovation occurs in a community based on empirical conditions.

D. CONCLUSION

Differences in responses that arise from social relations and economic motives basically need to look at the capacity and capability of each actor involved. The actions of the actors will depend on the social context occurred. Kampung Bungin has a complex community structure when looking at the social relations that the actors have. This has led to an ecological awareness dilemma, where actors have not fully been able to carry out an

understanding of the importance of improving coastal conditions due to other factors that make the ecological awareness of each actor invincible.

Kampung Bungin, with various initiatives to improve the area, is an actual condition, and the analysis of responses to coastal area improvement initiatives becomes stronger when done through an actor approach. The actor's response can also be seen as the result of an explanation of the human, object, and concept that is formed, and can explain the dynamics of the response through analysis of the forms of action, relations, roles and motives of the actor.

The actor's approach in looking at the empirical conditions of the Pantai Bakti community in responding to the initiation of improvement made becomes important, when looking at the complexity of coastal communities. The role of

the actor in this study completes a more dynamic analysis of how the diffusion of innovation occurs in a community. Through the analysis of actors and social networks, it can be analyzed the causes of gaps in response to innovation or program.

E. ACKNOWLEDGMENT

I am grateful to the lecturers in the Department of the Anthropology, University of Indonesia, especially Semiarto Aji Purwanto and Prihan doko Sanjtmiko, in developing my understanding. I am also thankful to the people in Kampung Bungin and FTUI Team in the Community Service program at Bungin Village, who helped make this research possible.

REFERENCES

- Atmadjaja, Y. I. (2017). Identifikasi Keberadaan Pengamba' dan Pola Relasi dengan Masyarakat Nelayan Pesisir Timur Banyuwangi. *Ekspektra: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 31-45. doi:<https://dx.doi.org/10.25139/ekt.v1i1.86>
- Bericat, E. (2016). The Sociology of Emotions: Four decades of progress. *Current Sociology*, 64(3), 491-513. doi:<https://doi.org/10.1177/0011392115588355>
- Daouda, O., & Bryant, C. R. (2016). Analysis of power relations among actors and institutions in the process of agricultural adaptation to climate change and variability from the diffusion of innovations perspective. In *Agricultural Adaptation to Climate Change* (pp. 27-51). Springer, Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-31392-4_3
- Ermayanti, Hendrawati, & Zamzami, L. (2018). Studi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program PNPM Mandiri di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu Isu Sosial Budaya*, 20(1), 33-34. doi:10.25077/jantro.v20.n1.p33-43.2018
- Jagadish, A., & Dwivedi, P. (2018). In the hearth, on the mind: Cultural consensus on fuelwood and cookstoves in the middle Himalayas of India. *Energy Research & Social Science*, 37, 44-51. doi:<https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.017>
- Kee, K. F. (2017). Adoption and diffusion. *The international encyclopedia of organizational communication*, 1-14. doi:<https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc058>
- Matera, J. (2016). Livelihood Diversification and Institutional (dis-)trust: Artisanal fishing communities under resource management programs in Providencia and Santa Catalina, Colombia. *Marine Policy*, 67, 22-29. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.021>
- Muhartono, R., & Nurlaili. (2019). Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan 'Pengambe' di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 13(2), 239-248. doi:<http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869>
- Prell, C. (2012). *Social network analysis: History, theory, and methodology*. London: Sage.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations Third Edition*. New York: The Free Press.
- Scott, J. (2011). Social network analysis: developments, advances, and prospects. *Social network analysis and mining*, 1(1), 21-26. doi:<https://doi.org/10.1007/s13278-010-0012-6>
- Shaijumon, C. S. (2018). Social learning in information diffusion and capability of farmers. *International Journal of Social Economics*, 45(4), 602-613. doi:<https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2017-0027>
- Warren, C. (2016). Leadership, Social Capital and Coastal Community Resource Governance: the Case of the Destructive Seaweed Harvest Governance. *Human Ecology* 44, 329-339. doi:<https://doi.org/10.1007/s10745-016-9832-y>
- Warren, C., & Visser, L. (2016). The Local Turn: an introductory essay revisiting leadership, elite capture and good governance in Indonesian conservation and development programs. *Human Ecology*, 44(3), 277-286. doi:<https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>
- Wax, M. L., & Wax, R. H. (1980). Fieldwork and the Research Process. *Anthropology and Education Quarterly*, 29-37.

- Widodo, S. (2009). Strategi nafkah rumah tangga nelayan dalam menghadapi kemiskinan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 2(2), 150-157. doi:<https://doi.org/10.21107/jk.v2i2.856>
- Zamzami, L. (2016). Partisipasi masyarakat nelayan dalam pengembangan budaya wisata bahari di Kabupaten Agam. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 17(2), 131-144. doi:<https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n2.p131-144.2015>
- Zhang, H., & Vorobeychik, Y. (2019). Empirically grounded agent-based models of innovation diffusion: a critical review. *Artificial Intelligence Review*, 1-35. doi:<https://doi.org/10.1007/s10462-017-9577-z>



FENOMENA GEGAR BUDAYA PADA WARGA NEGARA PERANCIS YANG BEKERJA DI JAKARTA

Yusnia Khoirunnisa¹, Nathalia Perdhani Soemantri^{2*}

^{1,2} Faculty of Communication Studies, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 09 September 2019

Review : 03 November 2019

Accepted : 03 December 2019

Available online: December 2019

KEYWORDS

Cultural communication, Cultural shock, French citizens

CORRESPONDENCE

*E-mail: nathaliaperdhani@univpancasila.ac.id

A B S T R A C T

The cultural shock will be increasingly visible if the newcomer has a cultural origin that is far different from the new culture he is attending. This study aims to see how the phenomenon of culture shock that occurs in French citizens who work in Jakarta. The concept used as a knife of analysis in this study is the concept of Cultural Communication and Cultural Concentration, which includes stages, phases, and forms of Cultural Concussion. The method of this research is using descriptive qualitative with the main data collection obtained from the results of interviews with three French citizens who work in Jakarta. The results showed that the three French citizens experienced a cultural shock in the form of language, food, weather, attitude, order. The cultural shock reactions experienced by them are feeling confused, stressed, homesick, physically ill, and always compare everything with their home country. The stages of cultural shock experienced by French citizens, namely the phase of excitement, the phase of disappointment, the initial phase of resolution and the phase function effectively.

A. PENDAHULUAN

Setiap hari dimanapun kita berada tidak bisa terlepas dari komunikasi. Bisa dikatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang terpenting atau vital bagi manusia tanpa komunikasi maka manusia dikatakan “tersesat” dalam belantara kehidupan ini. “Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan ‘tersesat’, karna ia tidak bisa menaruh dirinya dalam lingkungan sosial” (Mulyana, 2008:5). Komunikasi manusia tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, komunikasi terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks. Lingkungan sosial ini merefleksikan bagaimana orang hidup, bagaimana iya berinteraksi dengan orang lain. lingkungan sosial adalah budaya, dan untuk benar-benar memahami komunikasi maka harus memahami budaya (Sihabudin, 2017:18).

Manusia berpikir dan bertindak sesuai dengan pola budaya yang telah melekat pada dirinya. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Ketika individu masuk dalam lingkungan budaya baru akan mengalami kesulitan bahkan tekanan mental karena telah

terbiasa dengan hal-hal yang ada disekelilingnya. Salah satu kecemasan yang terbesar adalah mengenai bagaimana harus berkomunikasi. Ketika individu masuk dan mengalami kontak budaya lain serta merasakan ketidaknyamanan psikis dan fisik karena kontak tersebut, maka keadaan ini disebut sebagai gegar budaya atau *culture shock*. *Culture shock* didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk itu meliputi seribu satu cara yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi sehari-hari (Mulyana dan Rahmat, 2006:174).

Sangat wajar apabila seseorang yang masuk dalam lingkungan budaya baru mengalami kesulitan bahkan tekanan mental karena telah terbiasa dengan hal-hal yang ada. Pada kenyataannya seringkali kita tidak bisa menerima atau merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat interaksi tersebut, kebiasaan yang berbeda dari seorang teman yang berbeda asal daerah atau cara-cara yang menjadi kebiasaan (bahasa, tradisi atau norma) dari suatu daerah sementara

kita berasal dari daerah lain (Sekeon, 2011:3). Penelitian Ajeng (2016) mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Korea menjelaskan bahwa TKI mengalami *culture shock* yang berbeda-beda pada dirinya ketika pertama kali datang ke Korea Selatan. Culture shock yang dialami adalah penyesuaian terhadap perbedaan iklim musim dingin, kelemahan tubuh dan penyesuaian terhadap makanan.

Seseorang menjadi wajar mengalami *culture shock* sebagai akibat perpindahannya dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Gegar budaya yang dialami selain dengan bahasa yaitu terikat masalah perbedaan musim atau cuaca dan makanan. Faktor geografis atau perbedaan letak wilayah menjadi penyebab terjadinya perbedaan cuaca atau musim (Ridwan, 2016:210). Selain itu faktor makanan juga menjadi penyebab terjadinya *culture shock* karena disetiap wilayah atau Negara memiliki makanan khasnya tersendiri. Ridwan (2016:12) juga memberi pengertian bahwa budaya atau kebudayaan diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan sebagai sesuatu turun temurun dari satu generasi ke generasi lain.

Kebiasaan makan, bahasa, persahabatan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan teknologi semua itu berdasarkan pola-pola budaya. Apa yang dilakukan bagaimana mereka bertidak, merupakan *respons* terhadap fungsi-fungsi budayanya (Sihabudin, 2017:19). Individu yang memasuki alam kebudayaan baru yang berbeda dari tempat asalnya akan merasakan kegelisahan dalam dirinya, hal tersebut terjadi akibat dari perbedaan budaya (Ridwan 2016:200). Hal itu terjadi secara alamiah dan terkadang berubah menjadi rasa takut, frustrasi dan tidak percaya diri pada orang yang mengalaminya. Penelitian Marnelly (2017) mengungkapkan bahwa perubahan terjadi karena adanya kontak dengan budaya baru dan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi masa depan dan nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Gegar budaya akan semakin terasa jika jarak perbedaan budaya semakin jauh. Negara Perancis adalah salah satu Negara yang berada di Benua Eropa. Banyak pekerja asal Negara Perancis yang kemudian datang dan bekerja di Indonesia dan mengalami gegar budaya karena jauhnya perbedaan budaya antara kedua Negara tersebut. Ridwan (2016:215) menyebutkan ada 6 jenis gegar budaya yang biasa dirasakan akibat perbedaan budaya yaitu kategori bahasa, makanan, musim/cuaca, sikap/perilaku, ekonomi, dan ketertiban. Sedangkan Samovar et.al, (2017:277) menyebutkan bahwa fase gegar budaya biasa digambarkan dengan kurva U yaitu berupa fase kegembiraan, fase kekecewaan, fase awal resolusi, dan fase berfungsi secara efektif.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah maka penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana bentuk dan tahapan gegar budaya yang dialami warga negara Perancis saat bekerja di Jakarta.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Menurut Craswell (2015:11) paradigma Interpretatif meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia dimana mereka hidup dan bekerja. Paradigma interpretatif digunakan pada penelitian ini dengan upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia. Paradigma ini bersifat subjektif. Meninjau masalah dari penelitian. Paradigma ini membantu dalam memahami, memaknai dan menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam fenomena gegar budaya pada pekerja asing Negara Perancis yang bekerja di Jakarta.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut (Pujilek sono, 2015:35) penelitian kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Neuman (2015:53) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata dan angka serta untuk menyajikan profil, klarifikasi jenis atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti kapan, dimana dan bagaimana. Tidak hanya itu jenis penelitian deskriptif ini lebih berfokus juga kepada pertanyaan "siapa" dan "bagaimana" dalam menyajikan gambarnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Informan kunci dipilih berdasarkan fenomena yang diteliti yaitu mengenai fenomena gegar budaya pekerja asing asal Negara Perancis, oleh karena itu agar data objektif dapat diperoleh, maka peneliti menetapkan bahwa informan utama dalam penelitian yaitu pekerja asing Negara Perancis. Adapun pekerja tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pekerja asing berwarga Negara Perancis yang lahir dan besar di Negara Perancis
- b. Pekerja asing warga Negara Perancis yang bekerja lebih dari 6 bulan di Jakarta. Dengan asumsi bahwa seluruh tahapan Gegar Budaya telah dilewati dalam jangka waktu tersebut.

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau tidak ikut serta dalam kegiatan yang

diamatinya. Menurut Creswell (2015:17) Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti, pengamatan tersebut juga disebut peneliti lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data informan

a. Gerald Bernardin

Gerald Benardin adalah salah seorang manager Vinci *Contruccion* pada bagian Logistic & plant, Superintendent. Gerald lahir di Aix en Provence (Perancis bagian selatan) pada tanggal 12 Juli 1990. Agama yang dianut yaitu Islam. Pendidikan yang pernah dijalani yaitu Management Communication Marketing, Skill Structur *Contruccion*. Gerald berkarir menjadi metalic structur hingga umur 23 tahun. Dirinya memulai bekerja dengan Perusahaan Vinci pada tahun 2013 hingga sekarang. Awal tahun 2017 Gerald menetap di Jakarta untuk mengerjakan proyek yang berjalan 8 bulan.

b. El Mehdi El Alami

El Mehdi El Alami bekerja pada bagian MEP Manajer. Beragama islam, belum menikah. Lahir di Negara Perancis di Paris pada tanggal 16 Agustus 1986. Pendidikan yang dijalannya yaitu

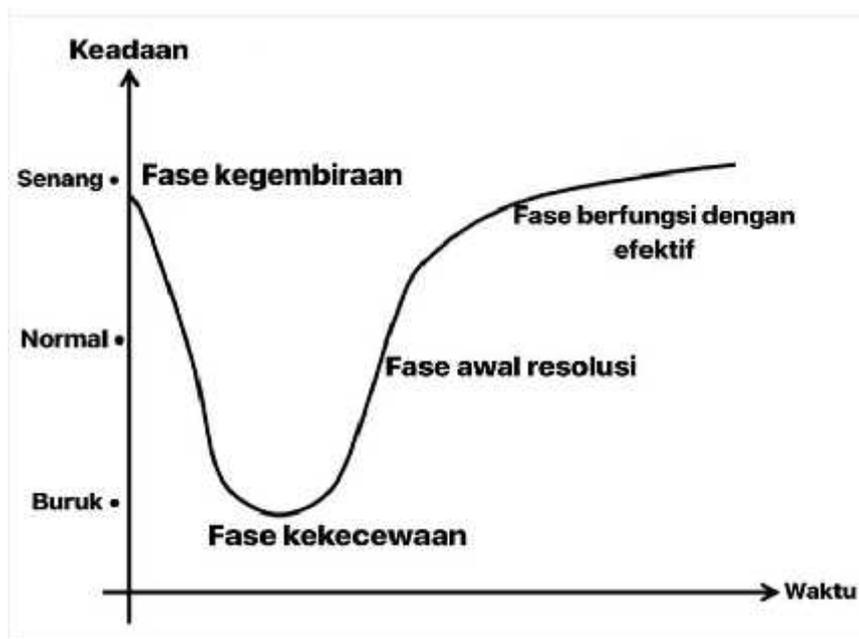
bersekolah di bidang listrik, yang kedua menempuh pendidikan di bidang tehnik, selanjutnya menjalani pendidikan di spesifik untuk kontraktor. Sejak sekolah di bagian tehnik dirinya juga menjalani pekerjaan di perusahaan Vinci hingga sekarang.

c. Louis Franchois

Louis Franchois yang lahir pada tanggal 27 Januari 1989 di kota Lil bagian utara Negara Perancis. Louis beragama kristen. Bekerja di bagian Trades Manager. Pada proyek pekerjaannya di Jakarta Louis menetap selama 8 bulan. Louis menjalani pendidikannya jurusan tehnik management.

2. Fase Gegar Budaya yang dialami warga Negara Perancis di Indonesia

Meskipun ada banyak variasi dari bagaimana orang memberikan tanggapan terhadap gegar budaya dan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam menyesuaikan diri. Seseorang biasanya melewati empat tahapan gegar budaya. Keempat tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai kurva berbentuk "U". Sehingga disebut u-curve. Kurva-U menggambarkan keoptimisan dan kebahagiaan terhadap budaya tuan rumah, level adaptasi, dan berikutnya masa penyembuhan (Samovar et al, 2017:477).



Kurva "U" pada Fase Gegar Budaya (Samovar et.al, 2017)

Berikut adalah penjelasan mengenai fase-fase gegar budaya yang dialami oleh pekerja asing asal negara Perancis di Indonesia:

A. Fase Kegembiraan

Tahapan atau fase tersebut diawali dengan fase kegembiraan atau tahap *Honeymoon*. Fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan

euforia sebagai antisipasi individu ketika berhadapan dengan budaya yang baru. Dibuktikan dari ketiga informan asal Negara Perancis yang datang ke Negara Indonesia untuk bekerja di Jakarta. Mereka merasakan harapan akan lingkungan barunya ketika pertama kali datang, seperti mengatakan bahwa Negara Indonesia yang banyak budaya, di kota Jakarta yang

menjadi ibu kota Indonesia yang besar dan banyak masyarakat yang menetap untuk bekerja dari kebudayaan berbeda, kota yang sibuk dengan kantor-kantor yang banyak di Jakarta, kota yang bersih. Dari observasi yang peneliti lakukan terlihat perasaan senang ketika menjelaskan pertama kali datang ke lingkungan barunya.

B. Fase Kekecewaan

Tahap kedua adalah Fase Kekecewaan. Dirasakan ketika menyadari kenyataan bahwa berada di lingkungan yang berbeda. Serta masalah awal mulai berkembang. Misalnya kesulitan adaptasi dan komunikasi, kesulitan bahasa, tempat tinggal yang kualitasnya buruk, transportasi yang sesak, pusat perbelanjaan yang berbeda, dan sebagainya. Hal ini dirasakan oleh pekerja asal Perancis yang bekerja di Jakarta ketika sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa. Karena ketiga informan pekerjaannya di bidang kontraktor, yaitu pembangunan mereka bekerja dengan berhadapan langsung pada pekerja pribumi. Dari ketiga informan yang paling merasakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan para buruh bangunan adalah informan Gerald yang berprofesi sebagai manajer bagian lapangan, sehingga dirinya harus harus memantau setiap hari pekerjaan yang dilakukan oleh buruh bangunan dan membuatnya merasa lelah ketika komunikasi tidak berjalan lancar. Disampaikan olehnya bahwa mereka menjawab mengerti tetapi kenyataannya tidak mengerti. Serupa dengan pendapat informan Mehdi mengenai kesulitannya dalam komunikasi bahasa.

Fase ini kadang ditandai oleh rasa kaget, kecewa, bingung dan ketidakpuasan. Hal ini adalah periode krisis dalam gegar budaya. Orang-orang menjadi bingung dan tercengang dengan sekitarnya, dan rasa frustrasi membuat mudah tersinggung, memiliki sifat bermusuhan, mudah marah, tidak sabar, dan bahkan tidak mampu. Dalam kasus ekstrem, perasaan tidak nyaman tersebut akan menjadi perasaan benci terhadap segala sesuatu yang asing. Bagi pekerja asal Perancis banyak hal yang berbeda dari kebudayaannya, hal tersebut yang membuat mereka merasa bingung. Seperti dengan keadaan lalu lintas di Jakarta, kondisi cuaca atau musim yang berbeda, dapat diketahui bahwa musim di Negara Perancis terdapat empat musim sehingga cuaca yang di Jakarta tepatnya ketika hujan yang dikatakan aneh karena setelah panas hujan lebat. Adapun sikap bekerja buruh bangunan yang kurang tepat waktu, pakaian bekerja. Selanjutnya mengenai makanan serta peraturan pada pedagang makanan yang berada di pinggir jalan trotoar.

C. Fase Awal Resolusi

Fase ketiga dimana seseorang mulai memahami mengenai budaya barunya. Pada

tahap ini, seseorang secara bertahap akan membuat penyesuaian dan perubahan dalam caranya menagani budaya baru. Menurut para pekerja asing asal Perancis, pada fase ini mereka menemukan cara dan solusi atas masalah-masalah yang ada mengenai perbedaan budaya. Ditandai mempelajari bahasa sehari-hari yang mudah digunakan dan dimengerti. Para pekerja lebih berani menjelaskan dengan bahasa mereka. Para pekerja bangunan mengerti dan mulai tepat waktu sehingga kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi bisa diatasi. Peristiwa dan Orang-orang dalam lingkungan baru mulai dapat terprediksi dan tingkat stres tidak banyak. Karena sikap saling menghargai dari perbedaan budaya yang membuat para pekerja asal Negara perancis mulai di tahap memahami lingkungan sekitar, ingin mengetahui mengenai budaya yang ada, mencoba makanan khas dari Indonesia, belajar menggunakan bahasa Indonesia.

D. Fase Berfungsi dengan Efektif

Fase terakhir ini berada pada puncak kanan dari kurva-U. seseorang telah mengerti elemen kunci dari budaya barunya seperti nilai-nilai, adab khusus, pola komunikasi, keyakinan, dan lain-lain. Pada tahap ini para pekerja asal Perancis muncul sikap santai dan lebih mampu untuk memahami orang lain dan menerima keadaan budaya sekitar. Kemudian mulai merasakan kenyamanan dengan orang-orang sekitar lingkungannya dalam budaya yang berbeda.

Pada tahap ini orang merasa nyaman dalam budaya baru dan mampu bekerja dengan baik. tidak hanya merasakan kenyamanan terhadap lingkungan melainkan kenyamanan di tempat tinggalnya, kenyamanan dengan makanan dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh ketiga informan asal Perancis bahwa di Jakarta sangat mudah dalam mencari makanan dari Negara asalnya, banyak restoran yang menyediakan makanan Perancis serta toko roti Perancis. Tidak hanya bahagia dengan makanan asal negaranya, mereka juga banyak menyukai makanan khas Indonesia yang ada di Jakarta, seperti nasi goreng, sop, sate, rendang, iga sop. Kesukaannya terhadap makanan Indonesia menandakan juga bahwa mereka sudah sangat nyaman dengan lingkungan barunya.

3. Jenis Gegar Budaya yang di alami pada warga Negara Perancis

a) Kategori Bahasa

Bahasa merupakan alat utama yang digunakan budaya untuk menyalurkan kepercayaan, nilai dan moral. Bahasa berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk berkomunikasi dan pedoman untuk melihat realitas sosial. Ridwan (2016:119) menyatakan bahwa bahasa adalah 'verbal'. Bahasa merupakan cerminan dari budaya, yakni isi budaya dan natur budaya.

Dalam banyak tindakan komunikasi, bahasa nonverbal menjadi komplemen atau pelengkap bahasa verbal. Lambang-lambang nonverbal juga dapat berfungsi kontradiktif, pengulangan, bahkan pengganti ungkapan verbal. Dalam hal ini pekerja asal Negara Perancis merasakan permasalahan yang ada yaitu pada bahasa. Pekerja asing ini tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia dan pekerja buruh bangunan tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Sehingga keinginan dari pekerja Perancis yaitu kepala yang bertanggung jawab membawa pekerja bangunan dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Inggris, namun kenyataannya tidak sesuai dan mengakibatkan banyak kesalahpahaman.

Kesalahpahaman karena bahasa yang tidak dimengerti mengakibatkan pekerjaan yang lambat, sehingga para pekerja asal Negara Perancis mencari solusi yaitu mencampur bahasa Indonesia yang umum dengan bahasa Inggris sebaliknya pada para pekerja buruh bangunan juga menggunakan bahasa nonverbal dalam berkomunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ridwan (2016:156) bahwa Bahasa verbal ataupun nonverbal merupakan bentuk pesan yang digunakan oleh manusia untuk mengadakan kontak dengan realitas lingkungannya.

Kemampuan manusia untuk menggunakan simbol menjadikannya sebagai makhluk yang unik, yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Bagi para pekerja asal Perancis sudah mengetahui apabila para pekerja buruh bangunan yang tidak mengerti maksud mereka, solusi yang dilakukan yaitu dengan bahasa tubuh, menunjuk, menjelaskan dengan gambar dan turun langsung menjelaskan lebih maksimal untuk benar-benar dimengerti. Dan menghasikan kepuasan pada pekerja asal Perancis.

b) Kategori Makanan

Faktor makanan juga menjadi penyebab terjadinya gegar budaya karena di setiap Negara memiliki ciri khas mengenai makanan, seperti contohnya Negara Perancis yang terkenal dengan makanan keju, roti, pasta. Sedangkan Negara Indonesia memiliki banyak makanan dengan berbagai macam rasa. Salah satunya makanan Indonesia terkenal dengan makanan pedas. Permasalahan dengan makanan pada warga Negara Perancis adalah mereka tidak bisa memakan pedas, ungkapan tersebut dikatakan oleh informan Louis, dan informan Gerald menyatakan bahwa dirinya sempat sakit akibat makanan yang pedas. Serta Gerald mengatakan bahwa perbedaan dari makanan utama di Indonesia dan Perancis adalah nasi dan makanan dari Perancis yaitu kentang atau pasta.

Ketiga informan berpendapat menyukai makanan Indonesia, seperti Nasi goreng, sate, sop, rendang, sop iga. Dari ketiga informan tersebut satu diantaranya yaitu Meidi menyukai pedas tetapi tidak dengan memakan sambal.

Karena di Negara Perancis rasa pedas yang ada berasal dari krim atau bubuk paprika dan minyak yang dicampur dengan cabai yang tidak sepedas di Indonesia. Adapun hal yang membuat pekerja asal Perancis terkejut dengan banyaknya makanan yang dijual di perbatasan jalan, di negaranya hal tersebut tidak akan ada karena untuk membuat usaha perlu izin dari gubernur.

c) Kategori Cuaca/Musim

Gegar budaya yang dialami selain dengan bahasa, makanan yaitu terikat masalah perbedaan musim atau cuaca. Faktor geografis atau perbedaan letak wilayah menjadi penyebab terjadinya perbedaan cuaca atau musim (Ridwan, 2016:210). Para pekerja asal Negara Perancis ketika pertama kali mejekjakan kakinya di ibu kota Jakarta merasakan perbedaan dari udara yang terlalu banyak polusi. Cuaca yang tidak menentu, seperti hujan yang turun sangatlah besar, hal tersebut sangatlah berbeda dengan Negara asalnya Perancis yang memiliki 4 musim.

Meidi mengatakan bahwa cuaca yang buruk dan ketika hujan turun mengakibatkan banjir. Dirinya kaget dengan keadaan tersebut. Gerald juga mengatakan bahwa cuaca yang aneh karena ketika siang hari sangatlah panas terik dan sore hari turun hujan.

d) Kategori Peraturan Lalu Lintas/ ketertiban

Jakarta merupakan ibu kota Negara Indonesia, Sehingga banyaknya penduduk dan aktivitas di Jakarta menyebabkan banyaknya kendaraan motor dan mobil. Gerald mengatakan bahwa tekejut dengan cara mengemudi kendaraan motor dan mobil, juga dengan banyaknya kendaraan yang ada di Jakarta. Para pekerja Perancis melihat langsung keadaan lalu lintas yang macet dan membuat mereka merasa kaget dengan kondisi pada lalu lintas. Keanehan yang dirasakan dengan lalu lintas di Jakarta yang mengakibatkan para pekerja asal Perancis membandingkan dengan negaranya.

4. Reaksi Gegar Budaya yang dialami oleh para pekerja warga Negara Perancis

Samovar et al (2017:476) menyampaikan bahwa Reaksi Gegar Budaya yang dirasakan setiap individu bervariasi dan dapat muncul dalam waktu yang berbeda. Menurut gegar budaya dapat menghasilkan sejumlah reaksi yang berpotensi mengakibatkan masalah. Paling tidak, gegar budaya dapat menyebabkan anda merasa putus asa, lelah dan tidak nyaman. Bagi para pekerja asal Perancis mereka mengalami reaksi gegar budaya. Reaksi tersebut dialami dengan waktu yang berbeda dan gejala yang berbeda. seperti mengalami rasa lelah, ketidaknyamanan akibat dari perbedaan budaya dan berada dilingkungan yang sangat berbeda dari Negara asalnya dirasakan oleh pekerja asal Negara Perancis.

Samovar et al (2017:476-477) juga menjelaskan bahwa reaksi yang mungkin dialami ketika menyesuaikan diri pada budaya yang baru yaitu perasaan disorientasi, permusuhan terhadap lingkungan baru, perasaan tertolak, sakit perut dan kepala, rindu kampung halaman, rindu teman dan keluarga, perasaan kehilangan status dan pengaruh, keinginan untuk menyendiri, dan menganggap anggota budaya yang lain tidak sensitif. Adapun reaksi gegar budaya yang dirasakan oleh pekerja asal Perancis saat tinggal di Indonesia adalah timbulnya rasa rindu akan kampung halaman, merindukan keluarga dan teman-teman. Kerinduan ini kemudian berdampak pula pada kesehatan mereka dan menjadikan mereka merasakan sakit kepala. Selain itu timbul perasaan tidak cocok dengan lingkungan baru. Bagi Para pekerja asal Negara Perancis, Reaksi yang dialaminya mulai dari masalah yang dirasakan saat bekerja dengan pekerja lokal Indonesia membuat pekerja asing Negara Perancis membandingkan negaranya dengan lingkungan baru di Jakarta Indonesia. Hal ini bisa dikatakan bahwa mereka mengalami reaksi permusuhan terhadap lingkungan baru dengan membandingkan Negara asalnya Perancis dengan Negara Indonesia.

Perasaan disorientasi juga dirasakan oleh para pekerja asal Negara Perancis. Karena mereka dikirim dari perusahaannya untuk menyelesaikan proyek yang sedang berjalan di Indonesia. Dalam reaksi gegar budaya dengan mengalami perasaan tertolak yaitu merasa tidak dihargai dan dicampakan oleh pekerja pribumi, tidak dialami oleh warga Negara Perancis. Karena dalam hal ini para pekerja asal Perancis yang datang ke Jakarta adalah orang-orang yang dipercayai perusahaan dengan jabatan sebagai manajer, sehingga tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan tinggi. Serta para pekerja yang dibawahnya akan selalu mendengarkan perintah yang diberinya.

Kekhawatiran terhadap makanan yang ada dilingkungan barunya karena pernah mengalami sakit akibat makanan adalah reaksi yang diungkapkan oleh informan pekerja asal Negara Perancis. Reaksi ini termaksud kedalam reaksi sakit. Karena para pekerja asal Perancis mengalami sakit perut akibat dari makanan dan sakit flu akibat dari keadaan cuaca. Kemudian reaksi rindu dengan kampung halaman atau *homesick*, kerinduan terhadap keluarga serta teman-teman yang ada dilingkungan asal negaranya diakibatkan dari kebingungan terhadap lingkungan barunya. Adapun khawatir terhadap cuaca yang dirasakan oleh para pekerja asal Perancis berbeda dan aneh karena hujan dan panas serta ketika hujan air yang turun sangat banyak. Dalam hal ini, cuaca yang buruk yang membuat rindu dengan keadaan cuaca lingkungan di Negara asalnya Perancis. Kemudian jarak yang jauh dan tidak dapat bertatap muka

secara langsung mengakibatkan kerinduan akan keluarga dan teman-teman.

Perasaan kehilangan status dan pengaruh tidak dialami oleh warga Negara perancis karena mereka memiliki pengalaman bekerja di Negara Negara lainnya sehingga dalam hal tersebut tidak dijadikan masalah oleh pekerja asal Perancis. Tujuan mereka datang hanya untuk bekerja. Selanjutnya reaksi yang dialami dengan menyendiri, hal ini sangat tidak dirasakan oleh para pekerja asal Perancis. Mereka bekerja sehingga dalam hal usia dan kematangan berfikir sudah stabil. Dengan bertemu banyak orang dengan kebudayaan yang berbeda membuat para pekerja asal perancis tidak merasakan kesepian. Serta para pekerja asal Perancis ini sudah memiliki pasangan, sehingga tidak mungkin untuk menyendiri karena lingkungan yang berbeda.

Pada reaksi yang terakhir yaitu Menganggap anggota budaya yang lain tidak sensitif, ini bisa dikatakan bahwa perasaan sensitif dengan hal memiliki perasaan yang besar dengan kepedulian. Para pekerja asal perancis mengatakan bahwa terkadang adanya kesalahan komunikasi karena bahasa yang tidak dimengerti. Serta rasa yang kurang berani bertanya untuk pekerjaan yang di perintahkan. Ketika seseorang mengalami gegar budaya, hal ini dapat menjadi suatu hal baik ataupun buruk tergantung individu memperlakukannya, karena reaksi terhadap gegar budaya pada masing-masing individu berbeda. Hal baik akan terjadi jika pekerja asal Perancis bisa dengan cepat menyesuaikan diri di lingkungan baru dan berbaur namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka gegar budaya bisa mempengaruhi keadaan fisik maupun psikis. Pada ketiga informan penelitian ini, mereka memiliki perbedaan waktu dalam menyesuaikan diri tetapi tidak lebih dari 3 bulan, hal tersebut beralasan karena mereka sudah diruang lingkup bekerja dan memiliki pengalaman sebelumnya.

Informan pertama Gerald merasakan 3 bulan untuk menyesuaikan diri, lebih lama satu bulan dari informan Louis dan Mehdi yang hanya 2 bulan sudah bisa menerima kebudayaan baru dan merasa nyaman. Hal tersebut karena Gerald lebih banyak berkomunikasi langsung dengan pekerja bangunan yang kurang mengerti bahasa Inggris dan dirinya tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Serta dirinya harus berada dan mengontrol pekerjaan di lapangan atau proyek untuk mengecek keadaan di proyek. Louis merasakan 2 bulan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru karena dirinya sudah bekerja di Malaysia sejak tahun 2011 dan Louis menikah dengan wanita Asia yang berasal dari Philipina, hal tersebut juga memudahkannya dalam beradaptasi pada lingkungan Jakarta yang memiliki kemiripan penduduknya dengan Negara Malaysia dan Philipina. Pada informan Meidi yang merasakan 2 bulan adaptasi dirinya memiliki pengalaman

yang banyak dengan bekerja sebelumnya di Negara Kamboja. Sehingga membuatnya cepat beradaptasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasannya mengenai bentuk- bentuk gegar budaya yang dialami pekerja asal Negara Perancis di kota Jakarta dan Tahapan gegar budaya yang mereka alami, maka diperoleh kesimpulan bahwa pekerja asal Negara Perancis mengalami empat tahap gegar budaya yaitu Fase *honeymoon*, Fase kekecewaan, Fase awal resolusi dan Fase berfungsi dengan efektif. Dengan memiliki pengalaman yang berbeda-beda pada setiap informan, dari kedatangannya ke lingkungan baru dengan rasa senang, bangga dan dirasakan di minggu awal-awal. Selanjutnya mulai merasakan banyak kesulitan beradaptasi dari bahasa, cuaca, kebudayaan, sikap dan sebagainya. Kemudian setelah merasakan beberapa masalah yang mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima lingkungan barunya, tahap ketiga yang dirasakan yaitu menemukan solusi dari masalah yang terjadi dengan menyesuaikan diri, mengenal budaya Indonesia, adanya sikap keterbukaan dan keinginan bersosialisasi. Tahap terakhir yaitu ditandai dengan adanya kenyamanan dengan perbedaan yang ada di lingkungan baru, senang dan para pekerja asing Negara Perancis belajar sedikit menggunakan bahasa Indonesia seperti percakapan sehari-hari.

Pekerja asing asal Negara Perancis juga mengalami reaksi fenomena gegar budaya yaitu seperti lelah, sakit, khawatir, bingung, kecewa, rindu keluarga dan teman dikampung halamannya. Kejadian gegar budaya yang dialami para pekerja asal Negara Perancis yaitu beberapa jenis gegar budaya berdasarkan kategori yaitu bahasa, cuaca, sikap, dan ketertiban. Pada kategori bahasa para pekerja asal Negara perancis mengalami hambatan dalam memahami bahasa Indonesia dan pekerja Indonesia kesulitan memahami bahasa Inggris yang digunakan oleh pekerja asal Perancis sehingga kerap timbul kesalahpahaman dalam

pekerjaan. Kemudian pada kategori cuaca dimana Negara Indonesia dan Negara Perancis memiliki perbedaan musim, di ketahui bahwa Negara Perancis memiliki 4 musim. Karena hal ini para pekerja asal Perancis yang bekerja di Jakarta merasakan keanehan pada cuaca. Seperti turun hujan yang mengakibatkan banjir dan cuaca yang panas terik disiang hari namun berakhir hujan lebat. Selanjutnya pada kategori sikap, para pekerja asal Negara Perancis merasakan adanya kekecewaan dengan cara kerja yang dilakukan oleh pekerja bangunan dalam hal kedisiplinan waktu. Terakhir, pada kategori ketertiban dimana terdapat perbedaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah di setiap Negara ataupun daerah harus dilaksanakan oleh para penduduknya. Dalam hal ini pekerja asal Negara Perancis merasakan keanehan dengan ketertiban lalu lintas, seperti saat keadaan lalu lintas yang macet, cara pengemudi yang mengendarai kendaraan seandainya, dan banyaknya pedagang ilegal di pinggir jalan perbatasan lalu lintas memunculkan banyak keheranan bagi mereka.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tentu saja tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak-pihak yang telah dengan penuh keikhlasan membantu dari awal penelitian ini dirancang hingga proses penulisan, pencarian data-data, pengolahan, hingga selesai menjadi sebuah tulisan penelitian. Untuk itu ucapan terima kasih yang pertama disampaikan kepada jajaran pimpinan, dosen, dan staf di fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila atas dukungan yang diberikan pada penelitian ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ketiga informan yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukan mereka sebagai pegawai di PT VINCI untuk diwawancarai. Terakhir, penelitian ini tentu saja tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan yang penuh dari keluarga tercinta. Semoga penelitian ini membawa manfaat baik secara akademis dan praktis bagi penulis dan pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, R. (2016). Komunikasi Antar Budaya Pada Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kualitatif Peranan Bahasa Dalam Mengatasi Culture Shock Pada Tenaga Kerja Indonesia Di Korea Selatan Melalui Lembaga Pelatihan Kerja Di Kabupaten Karanganyar). Universitas Sebelas Maret
- Basrowi, S. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Effendy, O. U. (2007). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Cetakan Kesembilanbelas . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J.W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Henny, Z. R. I. (2011). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Korea Selatan di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.9 No.1.
- Itdc.co.id. (2017). ITDC tandatangani MoU dengan Vinci Construction untuk bangun Kompleks Sirkuit Jalan Raya Mandalika. Retrieved Juni 1, 2018, from 2017: <https://www.itdc.co.id/corporate/news/itdc-tandatangani-mou-dengan-vinci-construction-untuk-bangun-kompleks-sirkuit-jalan-raya-mandalika/>
- Juariyah. (2012). Miskomunikasi Antarbudaya Mahasiswa Pendatang di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.10 No.3.
- Kemlu.go.id. (2017). Hubungan bilateral Perancis – Indonesia. Retrieved Mei 17, 2018, from 2017: <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/RI-France.aspx>
- Kholil, S. M. S. (2017). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Malaysia Dan Indonesia Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.2.
- Liliweri, A. (2002). Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: LKIS.
- Marnelly, T.Romi. (2017). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Melayu Pesisir (Studi Pengelolaan Madu Sialang di Desa Rawa Mekar Jaya). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol.19 No.2
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2014). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Cetakan Ke 18). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D et al. (2017). Membongkar Budaya Komunikasi (Cetakan Pertama). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, R. &. (2006). Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, R. &. (2014). Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya (Cetakan keempatbelas). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Nationalgeographic.co.id. (2016). Kemesraan Indonesia dan Perancis. Retrieved Maret 14, 2018, from 2016: <http://nationalgeographic.co.id/opini/2016/03/kemesraan-indonesia-dan-prancis>
- Newman, W. L. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Pikiran-rakyat.com. (2017) Datang ke Indonesia, Prancis Investasi 26 Miliar Dolar AS. Retrieved Mei 20, 2018, from 2017: <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/29/datang-ke-indonesia-prancis-investasi-26-miliar-dolar-397451>
- Pujileksono, S. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Qureta.com. (2017). Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Perancis . Retrieved Mei 25, 2018, from 2017: <https://www.quireta.com/post/kerjasama-bilateral-antara-indonesia-dengan-prancis>
- Rahmadhani, F. (2015). Adaptation Of Foreign Teacher In The Process Of Learning In Darma Yudha Highschool Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2 No.2.
- Ridwan, A. (2016). Komunikasi Antar Budaya Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Ruslan, R. (2016). Manajemen Public Relations & Media komunikasi: Konsepsi Aplikasi Edisi Revisi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samovar, L.A et al. (2017). Komunikasi Lintas Budaya (Edisi 7). Jakarta: Salemba Humanika.
- Sihabudin, A. (2017). Komunikasi Antarbudaya Satu Perspektif Multidimensi (Cetakan ke 45). Jakarta: Bumi Aksara.
- Simatupang, O. L. W (2015). Gaya Berkomunikasi Dan Adaptasi Budaya Mahasiswa Batak Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2 No.5.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (Cetakan ke 45). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tirto.id . (2017). Perancis dan Indonesia dalam Lintas Sejarah . Toyota.co.id. (2017). Special Service Campaign . Retrieved Maret 12, 2018, from 2017: <https://tirto.id/perancis-dan-indonesia-dalam-lintasan-sejarah-cj8Z>
- Tribunnews.com. (2017). Data Imigrasi: Sepanjang 2017. Retrieved Maret 23, 2018, from 2017: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/05/data-imigrasi-sepanjang-2017-warga-china-paling-banyak-masuk-ke-indonesia>.
- Vinci.com.(2018) business line vinci construction. Retrieved Juni 2, 2018, from 2018: <https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/item/business-line-vinci-construction.htm>

PETUNJUK PENULISAN YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PENULIS JURNAL ANTROPOLOGI: ISU-ISU SOSIAL BUDAYA

JENIS NASKAH SEBAGAI BERIKUT:

Naskah yang diterima adalah artikel yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya (original). Naskah dapat berupa jurnal laporan hasil penelitian atau artikel review. Naskah ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

SISTEMATIKA NASKAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Judul artikel
2. Nama lengkap penulis (tidak disingkat, tanpa gelar)
3. Afiliasi penulis (instansi tempat penulis bekerja dan alamat korespondensi)
4. Abstrak dan Kata kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
5. Pendahuluan
6. Metode Penelitian
7. Hasil dan Pembahasan
8. Kesimpulan & Saran
9. Ucapan terimakasih
10. Daftar Pustaka (**Sistem APA**)

PETUNJUK PENULISAN

1. Artikel ditulis sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Artikel diketik dengan satu spasi pada kertas A 4 dengan menggunakan program pengolah kata MS-Word for Windows, menggunakan huruf "Arial" 10 font, rata kiri, tanpa pemenggalan kata (*hard-hyphenation*), dan panjang tulisan 5.000-5.500 kata.
2. Judul artikel ditulis secara spesifik dan efektif, tidak lebih dari 11 kata.
3. Artikel dilengkapi dengan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (dua bahasa), masing-masing berisi 100 s.d 150 kata, disertai 3 s.d 5 kata kunci
4. Artikel ditulis dalam bentuk essay, sehingga tidak ada format numeric (atau abjad) yang memisahkan antarbab/bagian, ataupun untuk menandai bab/bagian baru; Kesimpulan tidak dirinci dalam poin-poin, tetapi berupa paragraph. Setiap kutipan harus menyebutkan sumber pustaka yang termutakhir secara lengkap dan ditulis dengan sistem running note, misalnya:

Jurnal:

Zamzami, Lucky. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Jurnal MIMBAR: Sosial dan Pembangunan. Vol. 8, No.3, pp. 209–223.

Buku:

Effendi, Nursyirwan, (eds) (2007). 'Pembangunan Sosial dan Pembangunan', Edisi 1, Laboratorium Antropologi

Bagian dari buku:

Manan, B. (2010). Managing Innovation in the Information Age, in: Soelaiman, T.M. (Ed.) Seeing Differently: Insight on Innovation, Harvard Business Review Book, pp.193-202.

Conference paper (proceedings):

Dahlan, M.D. dan Tirtosudiro, A. (2010). Quality System Based on ISO 9000 Combined with QFD Proceedings: World Innovation & Strategy Conference 1998 incorporating 4th International Symposium on Quality Function Deployment, 2-5 August, Sydney Australia, pp.1-8.

Internet (bila ada) disusun dengan menyebutkan nama, judul artikel dan alamat situs web dalam kurung siku serta waktu mengakses. Contoh: R. Ceha (2010). Fenomena Anak Jalanan. (<http://www.mailarchive.com/kimia.ui.html+anak+jalanan&hl>) diunduh pada 1 Januari 2014.

Penulis yang ingin memasukkan naskah harus memperhatikan poin-poin di bawah ini. Jika naskah tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan, ada kemungkinan naskah tersebut akan dikembalikan.

1. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini adalah hasil karya penulis sendiri.
2. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini belum pernah diterbitkan atau dalam proses penerbitan pada media apapun.
3. Dengan ini penulis menyatakan, bahwa naskah ini dibuat tanpa ada unsur plagiasi sedikitpun.
4. Dengan ini penulis menyatakan, panjang naskah yang diberikan adalah antara 10 sampai 15 halaman A4 (210 x 297 mm) termasuk di dalamnya gambar dan tabel.
5. Dengan ini penulis menyatakan, format dan aturan penulisan dalam naskah ini telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan telah menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (*EYD*)
6. Penulis menyatakan, bersedia bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah yang telah di submit maupun yang diterbitkan jika dikemudian hari ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya.
7. Dengan ini penulis menyatakan, referensi yang digunakan minimum 10 sumber referensi, dengan > 70% adalah berasal dari 10 tahun terakhir.

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya telah mendapatkan akreditasi nasional peringkat 2 Ristek Dikti, dengan nomor SK: 34/E/KPT/2018 Tanggal 10 Desember 2018



0 772393 506312



1 410 0350